



REVIU APIP

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2026

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SALATIGA



RANCANGAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
RKPD TAHUN 2026



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.1.1. Proses Penyusunan.....	I-1
1.1.2. Prinsip dan Pendekatan Penyusunan	I-3
1.2. Dasar Hukum	I-5
1.3. Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-7
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-9
1.5. Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2026.....	I-9
BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2026	II-1
2.1. Realisasi Kinerja	II-1
2.2.1. Realisasi Kinerja Utama	II-1
2.2.2. Realisasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II-2
2.2.3. Realisasi Kinerja Program Perangkat Daerah	II-15
2.2. Kendala dan Permasalahan	II-90
2.2.1. Kondisi Internal	II-90
2.2.2. Kondisi Eksternal	II-93
2.3. Isu Strategis Pembangunan pada Perubahan Tahun 2026.....	II-97
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1. Kerangka Ekonomi Nasional Tahun 2026	III-1
3.2. Kerangka Ekonomi Jawa Tengah dan Kota Salatiga Tahun 2026.....	III-3
3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-4
3.3.1. Permasalahan dan Tantangan Ekonomi Tahun 2026.....	III-5
3.3.2. Strategi.....	III-5
3.3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-6
3.4. Pertimbangan dalam Melakukan Perubahan	III-7
3.5. Kerangka Pendanaan Keuangan.....	III-8
3.5.1. Kerangka Pendapatan Daerah	III-9
3.5.2. Kerangka Belanja Daerah	III-11
3.5.3. Kerangka Pembiayaan Daerah	III-16
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	IV-1
4.1.1. Visi Pembangunan Daerah	IV-1
4.1.2. Misi Pembangun Daerah	IV-2
4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-4
4.2. Prioritas Pembangunan	IV-29
4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional tahun 2026	IV-29
4.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Jawa tengah tahun 2026	IV-55
4.2.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2026.....	IV-55
4.2.4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD	IV-165
4.2.5. Inovasi Daerah	IV-166

	4.2.6. Pemanfaatan Kelitbangan dalam Pencapaian Prirotitas Pembangunan dukungan Program Unggulan Wali Kota.....	IV-168
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
	5.1. Rencana Kerja	V-2
	5.1.1. Rencana Kerja Prioritas Pertama	V-19
	5.1.2. Rencana Kerja Prioritas Kedua	V-130
	5.2. Pendanaan Daerah	V-222
	LAMPIRAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026	V-224
BAB VI	PENUTUP	VI-1
	6.1. Kaidah Pelaksanaan.....	VI-1
	6.2. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi.....	VI-2

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Prinsip dan Indikator Penyusunan Rencana Pembangunan	I-3
Tabel 1. 2	Pendekatan Penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 yang Berorientasi pada Proses.....	I-4
Tabel 1. 3	Pendekatan Substansi RKPD Kota Salatiga Tahun 2026.....	I-4
Tabel 2. 1.	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2026	II-1
Tabel 2. 2.	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Triwulan I Tahun 2026	II-2
Tabel 2. 3.	Evaluasi Capaian Kinerja Program per Urusan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 Kota Salatiga	II-16
Tabel 2. 4.	Evaluasi Rata – Rata Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 Kota Salatiga	II-70
Tabel 2. 5.	Rekap Realisasi Pelaksanaan Kegiatan s.d. Bulan Maret 2026	II-88
Tabel 2. 6.	Sinkronisasi Permasalahan dan Isu Strategis.....	II-97
Tabel 3. 1.	Kerangka Pendanaan Keuangan pada Perubahan RKPD 2026	III-8
Tabel 3. 2.	Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2026.....	III-10
Tabel 3. 3.	Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2026.....	III-15
Tabel 3. 4.	Proyeksi Belanja Mandatory, Pegawai dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2026	III-16
Tabel 3. 5.	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2026.....	III-19
Tabel 4. 1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Salatiga beserta target pada Perubahan RKPD Tahun 2026.....	IV-5
Tabel 4. 2.	Target Indikator Kinerja Utama Kota Salatiga Tahun 2026	IV-7
Tabel 4. 3.	Target Indikator Kinerja Daerah Kota Salatiga Tahun 2026.....	IV-8
Tabel 4. 4.	Target Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026.....	IV-30
Tabel 4. 5.	Sinkronisasi Target Indikator Makro Tahun 2026	IV-56
Tabel 4. 6.	Penyandingan Prioritas Pembangunan Nasional (Asta Cita), Provinsi Jawa Tengah, dan Kota Salatiga Tahun 2026.....	IV-58
Tabel 4. 7.	Penyandingan Prioritas Nasional, Tema Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Kota Salatiga Tahun 2026.....	IV-81
Tabel 4. 8.	Penyandingan Program Pusat, Jawa Tengah dan Program Kota Salatiga Tahun 2026	IV-94
Tabel 4. 9.	Dukungan Program Pembangunan Daerah Kota Salatiga terhadap Prioritas Nasional (Asta Cita) Tahun 2026	IV-99
Tabel 4. 10.	Dukungan Pemerintah Kota Salatiga terhadap Program Strategis Nasional (ProSN) Tahun 2026.....	IV-102
Tabel 4. 11.	Dukungan Kegiatan Kota Salatiga terhadap Program Prioritas Delegasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026	IV-110
Tabel 4. 12.	Dukungan Kegiatan Kota Salatiga terhadap Program Prioritas Pendukung Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026	IV-124
Tabel 4. 13.	Konsistensi Permasalahan, Isu Strategis dengan Program Prioritas Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2026.....	IV-126
Tabel 4. 14.	Sinkronisasi Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan serta Program pada Perubahan RKPD 2026.....	IV-128

Tabel 4. 15.	Pemetaan Kegiatan Implementasi Penelitian dan Pengembangan Daerah IV-138
Tabel 4. 16.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Penurunan Stunting di Kota Salatiga Tahun 2026 IV-141
Tabel 4. 17.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pemenuhan SPM di Kota Salatiga Tahun 2026 IV-145
Tabel 4. 18.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kota Salatiga Tahun 2026 IV-150
Tabel 4. 19.	Sasaran, Prioritas dan Program yang Mendukung Terwujudnya SDGs di Kota Salatiga Tahun 2026 IV-160
Tabel 4. 19.	Usulan Pokok-pokok Pikiran berdasarkan Kamus Usulan dan Permasalahan untuk RKPD Tahun 2026 IV-165
Tabel 4. 20.	Hasil Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Kota Salatiga Tahun 2021-2025 IV-166
Tabel 4. 21.	Rekomendasi Perencanaan dalam Pencapaian Program Unggulan Wali Kota IV-168
Tabel 5. 1	Penjabaran Isu Strategis, Prioritas Pembangunan dan Rencana Kerja Tahun 2026 V-3
Tabel 5. 2	Dukungan Pendanaan Program Pembangunan Daerah Kota Salatiga terhadap Prioritas Nasional (Asta Cita) Tahun 2026 V-19
Tabel 5. 3	Dukungan Pendanaan Pemerintah Kota Salatiga terhadap Program Strategis Nasional (ProSN) Tahun 2026 V-24
Tabel 5. 4	Dukungan Rencana Kerja Kegiatan Kota Salatiga terhadap Program Prioritas Delegasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 V-40
Tabel 5. 5	Dukungan Rencana Kerja Kegiatan Kota Salatiga terhadap Program Prioritas Pendukung Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 V-43
Tabel 5. 6	Penjabaran Pendanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2026 V-46
Tabel 5. 7	Rencana Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pemenuhan SPM di Kota Salatiga Tahun 2026 V-54
Tabel 5. 8	Rencana Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Penurunan Stunting di Kota Salatiga Tahun 2026 V-76
Tabel 5. 9	Rencana Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kota Salatiga Tahun 2026 V-82
Tabel 5. 10	Rencana Pendanaan untuk Sasaran, Prioritas dan Program yang Mendukung Terwujudnya SDGs di Kota Salatiga Tahun 2026 V-106
Tabel 5. 11	Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2026 yang menerapkan Konsesp Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) V-116
Tabel 5. 12	Penetapan Indikator Program berdasarkan urusan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2026 V-155

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Antara Pusat, Provinsi dan Kota Salatiga.....	I-8
Gambar 2. 1.	Diagram Perbandingan Jumlah Program dalam RKPD Tahun 2026 dengan Jumlah Program dalam APBD Tahun 2026.....	II-95
Gambar 2. 2.	Diagram Perbandingan Jumlah Kegiatan dalam RKPD Tahun 2026 dengan Jumlah Kegiatan dalam APBD Tahun 2026	II-95
Gambar 2. 3.	Diagram Perbandingan Jumlah Subkegiatan dalam RKPD Tahun 2026 dengan Jumlah Subkegiatan dalam APBD Tahun 2026	II-96
Gambar 2. 4.	Diagram Perbandingan Jumlah Anggaran dalam RKPD Tahun 2026 dengan Jumlah Anggaran dalam APBD Tahun 2026	II-96

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan merupakan proses dinamis yang disesuaikan dengan perkembangan permasalahan dan isu strategis terkini. Perkembangan dan dinamika kondisi perekonomian maupun adanya kebijakan nasional yang membutuhkan penyesuaian, menyebabkan perencanaan pembangunan perlu dilakukan penyesuaian. Pemerintah Kota Salatiga telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga pada tahun 2026. Namun karena munculnya beberapa permasalahan serta perkembangan dan dinamika dalam skala nasional maupun regional yang memerlukan penyesuaian, maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Berdasarkan pasal 13 ayat (1) Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, perubahan RKPD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan;

Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun berpedoman pada RPJMD dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bertujuan untuk mengukur sejauh mana target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan untuk mengidentifikasi kendala serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program.

Pada Perubahan RKPD tahun 2026 memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029 yang ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2025. Dokumen Perubahan RKPD selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), serta menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2026 yang akan akan disepakati bersama antara Wali Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lebih lanjut dokumen KUPA-PPASP Tahun 2026 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.

1.1.1. Proses Penyusunan

Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 diawali dengan persiapan penyusunan yang meliputi pembentukan Tim Penyusun Perubahan RKPD, orientasi mengenai Perubahan RKPD, penyusunan agenda kerja serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan

daerah. Tim penyusun Perubahan RKPD terdiri dari personil lintas perangkat daerah yang dipandang mampu untuk memberikan kontribusi dalam perencanaan pembangunan daerah. Adapun tahapan proses penyusunan dokumen dilaksanakan melalui tahapan sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 tahun 2017, yaitu :

1. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD tahun 2026 dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga tahun 2025-2029 serta hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2026 sampai dengan Triwulan I. Penyusunannya diawali dengan perumusan rancangan Perubahan RKPD tahun 2026 untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun rancangan Perubahan Rencana Kerja dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah tahun berjalan. Perumusan Rancangan Perubahan RKPD 2026 mencakup analisis ekonomi dan keuangan daerah, evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I tahun 2026, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah, perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, dan perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif. Rancangan Perubahan RKPD 2026 disampaikan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan, dan saran masukan, yang selanjutnya Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang pedoman penyusunan perubahan rencana kerja perangkat daerah. Surat Edaran tersebut disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah sebagai lampiran rancangan Perubahan RKPD untuk menyempurnakan rancangan perubahan rencana kerja perangkat daerah. Untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan rencana kerja perangkat daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD, maka dilakukan verifikasi rancangan perubahan rencana kerja perangkat daerah. Saran dan rekomendasi pada saat verifikasi menjadi bahan penyempurnaan perubahan Rencana Perangkat Daerah.
2. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD yang merupakan penyempurnaan Rancangan Perubahan RKPD berdasarkan rancangan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi Berdasarkan hasil verifikasi perubahan rencana kerja perangkat daerah, rancangan perubahan RKPD disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Perubahan RKPD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD tahun 2026. Selanjutnya, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda untuk difasilitasi dengan hasil yang akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2026.
3. Penetapan RKPD menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD
Rancangan peraturan kepala daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Walikota Salatiga tentang Perubahan RKPD tahun 2026. Peraturan Walikota tersebut dijadikan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang kemudian disampaikan pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD Kota Salatiga tahun 2026.

Perumusan Rancangan Perubahan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah dengan rancangan Renja Perangkat Daerah dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi pada tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan perubahan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja OPD serta untuk mengharmoniskan dan mensinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi

1.1.2. Prinsip dan Pendekatan Penyusunan

Proses penyusunan Perubahan RKPD Kota Salatiga tahun 2026 dilaksanakan sesuai regulasi yang disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja RKPD tahun berjalan sampai dengan triwulan 1. Oleh karenanya, penyusunan RKPD ini dilaksanakan dengan memperhatikan dan mendasarkan pada data dan informasi pembangunan daerah serta capaian kinerja perangkat daerah yang telah diverifikasi untuk lebih memperdalam permasalahan termasuk faktor pendukung dan penghambatnya. Untuk memastikan output hasil penyusunan RKPD adalah berkualitas, taat regulasi dan operasional, maka penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip penyusunan rencana pembangunan daerah sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Prinsip dan Indikator Penyusunan Rencana Pembangunan

PRINSIP	INDIKATOR
Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional	Konsistensi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah Kota Salatiga (RKPD) tahun 2026 dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Kerja Pemerintah
Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing	Pelibatan para pemangku kepentingan pada proses penyusunan dokumen perencanaan melalui Musrenbang berjenjang dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Tingkat Kota; forum konsultasi publik, dan “ <i>focused group discussion</i> ” Perubahan RKPD tahun 2026 memperhatikan hasil dari proses-proses tersebut.
Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah	Pendekatan yang berorientasi pada substansi, dengan penyusunan rencana kerja yang diperjelas lokasi kegiatan sesuai dengan RTRW sebagaimana Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang RTRW Kota Salatiga Tahun 2023-2043, pembangunan kewilayahan Propinsi Jawa Tengah dan Nasional
Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional	Penetapan urutan kegiatan sebagai prioritas pembangunan disusun berdasarkan pada data potensi dan kebutuhan lokasi kegiatan, serta menyesuaikan dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional

Dalam aspek yang lain penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada proses yaitu pendekatan teknokratik, politik, *bottom up/top down* serta *partisipatif*, serta pendekatan yang berorientasi pada substansi yaitu pendekatan *tematik-holistik*, *integratif*, dan *spasial*. Konfigurasi pendekatan proses penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 adalah sebagaimana Tabel 1.2 dan Tabel 1.3

Tabel 1. 2 Pendekatan Penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 yang Berorientasi pada Proses

KRITERIA	PARAMETER
TEKNOKRATIK	Dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
	Ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2027.
	Kapasitas Perencana Daerah dalam Penyiapan RKPD Kota Salatiga Tahun 2027.
	Mendasarkan pada hasil evaluasi kinerja RKPD periode tahun 2025
PARTISIPATIF	Dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang dilaksanakan melalui forum-forum yang diselenggarakan seperti Musrenbang dan Konsultasi Publik
DARI BAWAH (BOTTOM – UP)	Usulan dari Musrenbang berjenjang dari tingkat Kelurahan, tingkat kecamatan, dan Tingkat Kota
	Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan
DARI ATAS (TOP-DOWN)	Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD Kota Salatiga Tahun 2027, Prioritas Provinsi Jawa Tengah dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 dan Prioritas Nasional dalam RKP 2027
	Sinergitas program dan kegiatan dalam RKPD Kota Salatiga Tahun 2027, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 dan RKP Tahun 2027
POLITIK	Dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala Daerah terpilih yang dijabarkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD
	Melakukan telaah terhadap pokok-pokok pikiran DPRD Kota Salatiga hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan saat reses pada tahun 2025

Tabel 1.3 Pendekatan Substansi RKPD Kota Salatiga Tahun 2026

PENDEKATAN	PARAMETER
HOLISTIK - TEMATIK	Dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya
INTEGRATIF	Menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah
DARI BAWAH (BOTTOM – UP)	Dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2026, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, yang selanjutnya diperjelas dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Ineventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
26. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga;
27. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043;
29. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
30. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
31. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2025-2045;

32. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025-2029;
33. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
34. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
35. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2026.

1.3. Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Pemerintah Daerah menyusun beberapa dokumen perencanaan yang saling terkait dalam rangka menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan yang tepat. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan tidak menyimpang dari apa yang telah dituangkan pada dokumen perencanaan lainnya. RKPD Kota Salatiga tahun 2026 memiliki hubungan erat dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. RKPD dan RPJPD 2025-2045

RKPD Kota Kota Salatiga Tahun 2026 merupakan penjabaran periode pertama RPJPD yakni periode 2025-2045. RKPD berisikan prioritas program dan kegiatan berdasarkan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Salatiga Tahap pertama yang telah disesuaikan dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPN.

2. RKPD dengan RPJMD 2025-2029

RKPD Kota Salatiga Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun Kedua dari RPJMD tahun 2025-2029. RKPD berisi penjabaran program pembangunan dan capaian kinerja tahunan dalam mendukung target capaian lima tahunan. Melalui RKPD, dapat dilakukan upaya penyesuaian dalam mencapai target pembangunan akhir periode RPJMD.

3. RKPD dan Renja PD

RKPD sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen tahunan OPD yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan dan mengacu pada Renstra OPD.

4. RKPD dan APBD

RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan bahwa APBD telah disusun berdasarkan RKPD.

5. RKPD dan RTRW

Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai rencana pola ruang, rencana struktur ruang, dan rencana kawasan strategis Kota Salatiga sebagai dasar untuk memantapkan lokasi kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

6. RKPD dan RPKD

Dalam penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2027, di mana program-program

dalam RPKD telah masuk ke dalam RKPD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam hal penurunan angka kemiskinan.

7. **RKPD dan TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)**

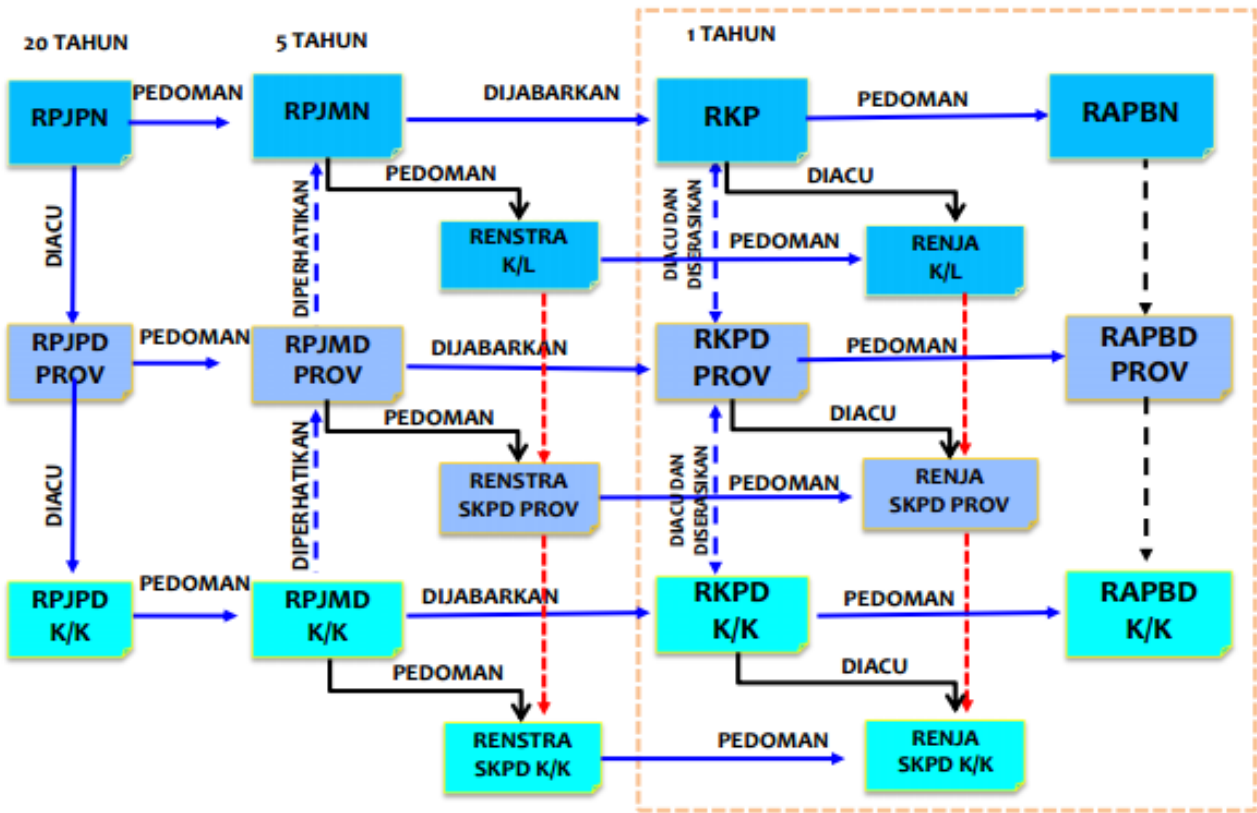
Dalam penyusunan RKPD telah memuat empat pilar pembangunan TPB, yang telah masuk dalam program kegiatan di RKPD

8. **RKPD dan SPM**

Dalam penyusunan RKPD telah memuat indikator SPM ke dalam indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana SPM.

9. **RKPD dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Provinsi**

Dalam siklus manajemen pembangunan yang meliputi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, RKPD memiliki fungsi dan peran yang cukup krusial. RKPD merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan 20 tahunan yaitu RPJPD dan dokumen perencanaan 5 tahunan yaitu RPJMD serta memperhatikan dan mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan provinsi. Dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah.



Gambar 1. 1. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Antara Pusat, Provinsi dan Kota Salatiga

Selain berpedoman pada Dokumen Pusat dan Provinsi yang merupakan dokumen wajib yang perlu diselaraskan, dokumen-dokumen sektoral juga menjadi salah satu sumber informasi yang penting untuk digunakan sebagai bahan telaahan dalam menentukan permasalahan dan isu strategis pembangunan yang selanjutnya menjadi salah satu dasar penentuan prioritas dan

sasaran pembangunan, rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah serta penyelarasan program prioritas dan pagu indikatif.

1.4. Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2026 dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian perkembangan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 serta penyesuaian kerangka pendanaan akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan dan penganggaran yang sudah berjalan berdasarkan evaluasi Tahun 2026 sampai dengan triwulan I.

b) Tujuan

Tujuan perubahan terhadap RKPD Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026;
2. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2026;
3. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026;
4. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah Tahun 2026;
5. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA).

1.5. Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2026

Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan RKPD 2026 yang memuat latar belakang penyusunan Perubahan RKPD, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika dokumen perubahan RKPD, agar urgensi dan kepentingan penyusunan serta sinergitas antar bab dapat dengan mudah dipahami

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2026

Menyajikan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Daerah sampai dengan pelaksanaan hingga triwulan pertama pelaksanaan RKPD Kota Salatiga Tahun 2026

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang realisasi dan prediksi capaian indikator makro, kondisi ekonomi tahun 2025, prediksi 2026, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah; tantangan dan prospek perekonomian daerah; sumber-sumber pendapatan dan arah kebijakan keuangan daerah yang

mencakup pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menyajikan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2026 dan capaian kinerja yang direncanakan, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, serta menyajikan persandingan tema dan arah kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota sebagai landasan dalam permusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Menyajikan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD

BAB VI PENUTUP

Menyajikan penegasan bahwa dalam melaksanakan Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 diperlukan sinergisitas yang kokoh dan terpadu di jajaran pemerintah Kota Salatiga, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2026

2.1. Realisasi Kinerja

Evaluasi hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan evaluasi atas realisasi kinerja yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah. Kinerja yang dievaluasi berupa kinerja utama, kinerja urusan pemerintahan dan kinerja program perangkat daerah. Pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 menjadi acuan dalam perumusan strategi pembangunan berikutnya untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing.

2.2.1. Realisasi Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Untuk memonitoring pencapaian indikator kinerja utama pada triwulan I Tahun 2026, dilakukan evaluasi kinerja dengan hasil sebagaimana pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2026		Keterangan	
			Target	Realisasi TW I	Capaian (%)	Kriteria
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	86,43	86,23	99,76	Sangat Tinggi
2.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,56 – 6,56	5,98	98,68	Sangat Tinggi
3.	PDRB per kapita	Juta Rp	103,48 – 108,48	95,23	92,02	Sangat Tinggi
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,84 – 3,54	3,67	99,46	Sangat Tinggi
5.	Tingkat Kemiskinan	%	4,34 – 4,20	4,20	98,36	Sangat Tinggi
6.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	82,15	81,00	105,65	Sangat Tinggi
7.	Penurunan emisi GRK kumulatif	TonCo2EQ	183.298,80	19.134,02	39,73	Sangat Rendah
8.	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	4,84	4,08	84,30	Tinggi
Rata-rata capaian kinerja					89,75	

Skala Nilai Peringkat Kerja			
91% ≤ 100%	: Sangat tinggi	51% ≤ 65%	: Rendah
76% ≤ 90%	: Tinggi	≤ 50%	: Sangat Rendah
66% ≤ 75%	: Sedang		

Pada tabel tersebut realisasi kinerja yang digunakan untuk menggambarkan kondisi kinerja Triwulan I tahun 2026 adalah data akhir tahun 2025. Kondisi kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2026 ini diharapkan dapat menggambarkan capaian pada tahun 2026 yang selanjutnya menjadi tolok ukur penentuan kebijakan untuk pencapaian target kinerja tahun 2026.

Secara umum, pencapaian kinerja utama Pemerintah Kota Salatiga pada akhir tahun 2026 akan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata capaian kinerja utama pemerintah Kota Salatiga pada triwulan I tahun 2026 adalah 89,30%. Dari 8 indikator yang menjadi acuan kinerja utama Pemerintah Kota Salatiga, status sangat tinggi sebanyak 6 indikator atau 75,00%, status tinggi sebanyak 1 indikator atau 12,50% dan status sangat rendah sebanyak 1 indikator atau 12,50%.

2.2.2. Realisasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan juga menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan yang meliputi realisasi dari indikator kinerja dari setiap aspek kesejahteraan masyarakat, daya saing dan layanan umum serta fokus menurut bidang urusan terhadap capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian indikator kinerja berdasarkan masing-masing urusan pembangunan. Realisasi kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada RKPD tahun 2026 sampai dengan triwulan I tahun 2026 adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 2. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Target tahun 2026	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
I	INDIKATOR KINERJA DAERAH					
	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI					
1	Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik	%	64,7	94,32	145,78	Tercapai
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	69,98	68,70	98,17	Tercapai
3	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	94,4	79,33	84,04	Tercapai
4	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	19,4	12,07	62,22	Tercapai
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitasi Pengolahan Sampah	%	28,63	7,15	24,97	Perlu Upaya Keras
6	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	3,9	4,04	103,59	Tercapai
7	Kepadatan Penduduk	orang/km ²	4.063	3.636	89,49	Tercapai
8	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,6	0,52	86,67	Tercapai
9	Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	43,7	90,2	206,41	Tercapai
10	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,2	1,13	94,17	Tercapai
11	Konsumsi Listrik per Kapita	kwh/kapita	280.630.448	353774373,06*	126,06	Tercapai
12	Indeks Risiko Bencana	Angka	73,71 – 72,69	98,79	134,96	Tercapai

No	Indikator	Satuan	Target tahun 2026	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
13	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	66,09	97,31	147,24	Tercapai
14	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	30	7,50	25,00	Akan Tercapai
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	79,2	93,33*	117,84	Tercapai
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	16,1	15,47	96,09	Tercapai
3	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	%	22,8	8,18	35,88	Akan Tercapai
4	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	%	1,07	0,49	40,83	Akan Tercapai
5	Jumlah Kasus Kematian Ibu (kasus)	Kasus	2	0	200	Tercapai
6	Angka Literasi	%	91,55	93,69	102,34	Tercapai
7	Angka Numerasi	%	91,55	90,14	98,46	Tercapai
8	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,2 – 0,11	0,223	53,81	Tercapai
9	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	100	22,99	82,1	Tercapai
10	Indeks Pembangunan Gender	Angka	95,41	95,49	100,08	Tercapai
11	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	54	77,29	143,13	Tercapai
12	Indeks Gini	Angka	0,372	0,412	89,247	Tercapai
13	Prevalensi Stunting	%	5,6	6,39	85,89	Tercapai
14	Usia Harapan Hidup	Tahun	78,64	78,75	100,14	Tercapai
15	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	18,71	19,53*	104,38	Tercapai
16	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	95	95,57	100,6	Tercapai
17	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok Bahasa daerah/seni budaya yang mengarusutamakan kebudayaan	%	89,93	95,31	105,98	Tercapai
18	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,41	0,00	0,00	Tidak ada data
19	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,52	11,49	99,74	Tercapai
	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	52	48,88	94,00	Tercapai
2	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	16,93 - 17,42	15,61	90,89	Tercapai
3	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,68	1,67	258,50	Tercapai
4	Angka Ketergantungan	%	49,48	43,11	87,11	Tercapai
5	Tingkat Inflasi	%	2,5	2,84	113,6	Tercapai
6	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Nilai	63,50 – 64,82	79,7	124,221	Tercapai
7	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	Ribu orang	1.120	326	29,11	Akan Tercapai

No	Indikator	Satuan	Target tahun 2026	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
8	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,11	21,28	684,24	Tercapai
9	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	34,32	0,86	2,51	Perlu Upaya Keras
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	71,05	70,93	99,83	Tercapai
11	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Angka	0,71	0,64	90,14	Tercapai
12	Indeks Akses Keuangan Daerah	Angka	5,71	6,56	114,89	Tercapai
13	Tingkat Kemantapan Jalan	%	95,53	86,62	90,67	Tercapai
14	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	8,2	13,4	163,41	Tercapai
15	Ekspor Barang dan Jasa	Rp	180.042.471	170.951.432,84	94,95	Tercapai
16	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	42	42,44	101,05	Tercapai
17	Kapabilitas Inovasi	Nilai	3,84	4,05	105,47	Tercapai
18	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah	Orang	14,232	9014	63,34	Tercapai
19	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	44,79	3349	7.477,12	Tercapai
20	Return on Aset (ROA) BUMD	%	3,03	0,46	15,18	Perlu Upaya Keras
21	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	Angka	91,94	100	108,77	Tercapai
22	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	66,74	62,3	93,35	Tercapai
23	Disparitas Harga	Angka	±10	-1,61	-16,1	Tercapai
24	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	0	0	100	Tercapai
25	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	62,6	2.717	4.340,26	Tercapai
26	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,88	2,16	114,894	Tercapai
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,68	4,42	94,44	Tercapai
2	Indeks Integritas Nasional	Nilai	80,06	77,96	97,38	Tercapai
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,75	4,11	109,6	Tercapai
4	Indeks Pemerintahan Digital	Nilai	1,1	0	0	Perlu Upaya Keras
5	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	80,6	98,7	122,46	Tercapai
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI					
	URUSAN PENDIDIKAN					
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100	97	97	Tercapai
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	99,3	99,3	Tercapai
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100	96,81	96,81	Tercapai
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	77,31	77,31	Tercapai

No	Indikator	Satuan	Target tahun 2026	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
	URUSAN KESEHATAN					
1	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100*	100	Tercapai
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100*	100	Tercapai
3	Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	%	100	100	100	Tercapai
4	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100*	100	Tercapai
5	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	%	4	4	100	Tercapai
6	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	25,87	25,87	Akan Tercapai
7	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	32,18	32,18	Akan Tercapai
8	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100*	100	Tercapai
9	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	25,29	25,29	Akan Tercapai
10	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	26,91	26,91	Akan Tercapai
11	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	26,6	26,6	Akan Tercapai
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	25,87	25,87	Akan Tercapai
13	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100*	100	Tercapai
14	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100*	100	Tercapai
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1	Persentase luas daerah irigasi kewenangan Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	100	100	100	Tercapai
2	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	92,25	92,25	Tercapai
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap	%	100	97,31	97,31	Tercapai

No	Indikator	Satuan	Target tahun 2026	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
	rumah tangga di seluruh Kota					
4	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	Tercapai
5	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	25	21,85	87,4	Tercapai
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	88,2	93,57	83,8	Tercapai
7	Rasio kemandapan jalan	%	87,12	86,62	99,43	Tercapai
	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN					
1	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	10,6	36,47	344	Tercapai
2	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	68,32	66,51	97,35	Tercapai
3	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kota	%	100	100*	100	Tercapai
4	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	%	100	100*	100	Tercapai
5	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	4,44	4,47	101	Tercapai
	URUSAN TRANTIBUM & LINMAS					
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	Tercapai
2	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	100	Tercapai
3	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	Tercapai
4	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	Tercapai
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	25	25	Akan Tercapai
6	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	25	25	Akan Tercapai
7	Persentase Cakupan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana (Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana)	%	100	100	100	Tercapai
	URUSAN SOSIAL					
1	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat	%	100	100	100	Tercapai

No	Indikator	Satuan	Target tahun 2026	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
	dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kota					
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100	100	100	Tercapai
	URUSAN TENAGA KERJA					
1	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	100	100*	100	Tercapai
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rp/TK	114,67	110,58	96,44	Tercapai
3	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	%	71,48	73,68	103,08	Tercapai
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar	%	93,79	91,85	97,93	Tercapai
5	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	42,86	42,86	Akan Tercapai
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	9,29	6	64,59	Tercapai
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kota	%	100	100	100	Tercapai
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	68,28:69,28	63,11	108,46	Tercapai
	URUSAN PANGAN					
1	Persentase cadangan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	%	100	100	100	Tercapai
	URUSAN PERTANAHAN					
1	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100	100	Tercapai
2	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	%	100	0	0	Tidak ada data
3	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	Tercapai
4	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	0	0	Tidak ada data

No	Indikator	Satuan	Target tahun 2026	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	100	0	0	Tidak ada data
6	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	100	0	0	Tidak ada data
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota	%	69,98	68,7	98,17	Tercapai
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kota	%	98,25	98,16	99,91	Tercapai
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	9,26	3,33	34,62	Akan Tercapai
	URUSAN ADMINISTRASI PENDUDUK & CATATAN SIPIL					
1	Perekaman KTP Elektronik	%	98,2	98,27	102,15	Tercapai
2	Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun yang mempunyai Akte Kelahiran	%	99,54	99,53	100,64	Tercapai
3	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	100	100	100	Tercapai
4	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	86,7	87,29	109,39	Tercapai
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					
	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun	Rata-rata Anak per Wanita	1,72	2,02	117,44	Tercapai
2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	7,66	11,73	46,87	Akan Tercapai
3	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	67,02	63,19	94,29	Tercapai
	URUSAN PERHUBUNGAN					
1	Rasio konektivitas Kota	Rasio	0,45	0,88	196,96	Tercapai
2	Rasio Kinerja Lalu Lintas (VCR)	Rasio	0,45	0,35	122,22	Tercapai
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI					
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	Tercapai
2	Persentase masyarakat yang	%	100	100*	100	Tercapai

No	Indikator	Satuan	Target tahun 2026	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
	menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kota					
3	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100*	100	Tercapai
	URUSAN KOPERASI DAN UMKM					
1	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	100	48,8	48,8	Akan Tercapai
2	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	74,43	21,14	28,403	Akan Tercapai
	URUSAN PENANAMAN MODAL					
1	Persentase peningkatan investasi di Kota	%	6,91	16,24	234,99	Tercapai
	URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA					
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	2,64	1,02*	38,64	Tercapai
2	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	36	76*	211,11	Tercapai
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	46,13	32,02*	69,41	Tercapai
	URUSAN STATISTIK					
1	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100*	100	Tercapai
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100*	100	Tercapai
	URUSAN PERSANDIAN					
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	72	83,6	116,11	Tercapai
	URUSAN KEBUDAYAAN					
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	40	38,32	95,8	Tercapai
	URUSAN PERPUSTAKAAN					
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	28	22,99	82,11	Tercapai
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Indeks	60,8	54,04	88,88	Tercapai
	URUSAN KEARSIPAN					
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) (Pasal 40 dan Pasal 59 UU Nomor 43 Tahun tentang Kearsipan)	%	88,77	46,15	51,99	Tercapai
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap	%	50	20,83	41,66	Akan Tercapai

No	Indikator	Satuan	Target tahun 2026	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
	aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat					
	URUSAN KELAUTAN PERIKANAN					
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kota di wilayah kota (sumber data: one data KKP)	%	97	224,65	258,22	Tercapai
	URUSAN PARIWISATA					
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,18	0,19	105,56	Tercapai
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	0,5	110,11*	22.022	Tercapai
3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kota	%	0,2	123,45*	61.725	Tercapai
4	Tingkat hunian akomodasi	%	56,69	21,2	37,4	Akan Tercapai
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	7,93	7,92*	99,87	Tercapai
	URUSAN PERTANIAN					
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	720,34	6,9	99,05	Tercapai
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	100	100	100	Tercapai
	URUSAN KEHUTANAN					
	URUSAN PERDAGANGAN					
1	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	73,16	2,69	3,68	Perlu Upaya Keras
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	65,25	16,41	25,15	Akan Tercapai
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	100	100	Tercapai
	URUSAN PERINDUSTRIAN					
1	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di Kota	%	0,5	0	0	Perlu Upaya Keras
2	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	100	100	Tercapai
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	0	0	Perlu Upaya Keras
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan	%	100	0	0	Perlu Upaya Keras

No	Indikator	Satuan	Target tahun 2026	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
	dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait					
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota	%	0	0	0	Perlu Upaya Keras
6	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kota)	%	100	0	0	Perlu Upaya Keras
	URUSAN TRANSMIGRASI					
	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH					
1	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Daerah		1,5	0,94*	62,68	Tercapai
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif		64	64,39*	100,61	Tercapai
3	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang Dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama		0	0	0	Perlu Upaya Keras
4	Persentase Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan		60	56,27	93,8	Tercapai
	PERENCANAAN DAN KEUANGAN					
1	Persentase Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	19,16	30,22	157,72	Tercapai
2	<i>Cash Management</i> : Persentase anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	8,28	5,31	135,87	Tercapai
3	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>Information on resources available to frontline service delivery units</i>)	%	96,44	27,93	28,96	Akan Tercapai
4	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>)	%	100	100	100	Tercapai
5	<i>Revenue mobilization</i> : Deviasi	%	22,45	16,42	73,14	Tercapai

No	Indikator	Satuan	Target tahun 2026	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
	realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD					
6	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	30,85	24,99	77,68	Tercapai
7	<i>Budget execution</i> : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	4,5	20,19	448,67	Tercapai
8	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	100	Tercapai
9	<i>Assets management</i>	Jumlah	4	4	100	Tercapai
	Apakah ada daftar aset tetap?	ada/tidak	Ya	Ya		
	Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap?	ada/tidak	Ya	Ya		
	Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan?	ada/tidak	Ya	Ya		
	Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran?	ada/tidak	Ya	Ya		
10	Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	88,09	89,93	102,09	Tercapai
	KEPEGAWAIAN					
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	74,44	76,33	102,54	Tercapai
2	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	99,5	99,71	100,21	Tercapai
3	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	25,44	24,82	97,56	Tercapai
	INSPEKTORAT DAERAH					
1	Nilai Level Kapabilitas APIP	Level	3	2,29	76,33	Tercapai
2	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,023	2,921	96,63	Tercapai

*)Data tahun 2025

Keterangan :

≥ 50% = Tercapai

50% ≤ 25% = Akan Tercapai

< 25% = Perlu Upaya Keras

Pada tabel tersebut realisasi kinerja yang digunakan untuk menggambarkan kondisi kinerja adalah data pada triwulan I tahun 2026. Ada beberapa data yang menggunakan realisasi tahun 2025 karena data terbaru belum rilis. Diharapkan dapat menggambarkan capaian pada tahun 2026 yang selanjutnya menjadi acuan dalam menentukan kebijakan untuk pencapaian target kinerja tahun 2026. Secara umum, pencapaian kinerja utama Pemerintah Kota Salatiga pada akhir tahun 2026 akan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan

Pada tabel tersebut, dari 183 indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, masih terdapat 5 indikator yang tidak tersedia data karena hanya diperoleh pada akhir tahun anggaran, sehingga terdapat 177 indikator kinerja yang dapat diukur. Realisasi dari 177 indikator kinerja tersebut terdapat 11 indikator (15,30%) yang berstatus perlu upaya keras, 21 indikator

(11,48%) berstatus Akan Tercapai dan 145 indikator (81,92%) berstatus Tercapai sampai dengan Triwulan I Tahun 2026.

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang masih berstatus Perlu Upaya Keras dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut :

1. Timbulan sampah terolah difasilitasi pengolahan sampah :
Ini disebabkan karena kapasitas fasilitas pengolahan masih terbatas, sampah belum dipilah dari sumbernya, peralatan pengolahan yang sering rusak/kurang memadai, keterbatasan anggaran operasional, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah.
2. Indeks Keluarga Sehat :
Kegiatan yang mendukung pencapaian Indeks Keluarga Sehat sudah tidak dijalankan.
3. Tingkat Inflasi :
Hal ini disebabkan karena angka inflasi berdasarkan angka Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang dirilis oleh Kemendagri tetapi tidak rutin diupdate, sehingga sulit untuk mendapatkan angka terbaru.
4. Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) :
Hal ini disebabkan karena kualitas layanan yang rendah dan minimnya promosi.
5. Rasio PDRB Industri Pengolahan :
Hal ini disebabkan karena minimnya jumlah industri pengolahan.
6. Return on Aset (ROA) BUMD :
Hal ini disebabkan karena tingginya biaya operasional dan perputaran total aset yang lambat.
7. Indeks Pemerintahan Digital :
Hal ini disebabkan karena belum ada formula penghitungannya.
8. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar :
Hal ini disebabkan karena pemeriksaan kesehatan pada anaj usia pendidikan dasar banyak dilakukan pada awal tahun ajaran baru (triwulan 3).
9. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan.
Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan ibu tentang tanda-tanda bahaya kehamilan dan persalinan, sehingga merasa tidak perlu memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
10. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar :
Hal ini disebabkan karena adanya stigma negatif terkait dengan penyakit TBC, dimana pasien TBC merasa takut dikucilkan.
11. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil :
Hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat yang masih rendah.
12. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir :
Hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat yang rendah.
13. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar :
Hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat yang rendah.
14. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi :

Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran, terbatasnya jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi yang dapat difasilitasi setiap tahun, kurangnya jumlah assesor kompetensi, kurangnya Tempat Uji Kompetensi (TUK), dan keterbatasan sarana prasarana pelatihan yang sesuai standar.

15. Tersedianya tanah untuk masyarakat :

Hal ini disebabkan karena kegiatannya sudah selesai dilaksanakan pada tahun 2024.

16. Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal :

Hal ini disebabkan karena kegiatannya sudah selesai dilaksanakan pada tahun 2024.

17. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan :

Hal ini disebabkan karena kegiatannya sudah selesai dilaksanakan pada tahun 2024.

18. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee :

Hal ini disebabkan karena kegiatannya sudah selesai dilaksanakan pada tahun 2024.

19. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri :

Hal ini disebabkan karena sebagian usaha pemuda belum memiliki legalitas usaha.

20. Peningkatan prestasi olahraga :

Hal ini disebabkan karena belum adanya kejuaraan olahraga yang diikuti.

21. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan :

Hal ini disebabkan karena koordinasi antarorganisasi yang belum optimal.

22. Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku.

Hal ini disebabkan karena tidak tersedianya kendaraan untuk operasional kemeterologian.

23. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kota.

Hal ini disebabkan karena belum ada alat/mekanisme untuk memantau pertambahan IKM.

24. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

Hal ini disebabkan karena banyak pelaku usaha yang belum memahami aplikasi SIINAS.

25. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

Hal ini disebabkan karena belum diadakan pemantauan dan pengawasan.

26. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota.

Hal ini disebabkan karena Kota Salatiga tidak memiliki Kawasan Industri.

27. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kota :

Hal ini disebabkan karena dokumen RIPIN yang belum optimal dan belum diperbarui, rendahnya daya saing industri, dan keterbatasan anggaran.

28. Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang Dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama :

Hal ini disebabkan karena merupakan indikator baru di tahun 2026 dan penghitungan capaian indikator baru dilakukan di akhir tahun.

Walaupun demikian, secara umum capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Triwulan I tahun 2026 telah sesuai dengan target yang ditetapkan pada dokumen perencanaan. Akan tetapi, perlu langkah-langkah dan strategi khusus dalam merealisasikan indikator-indikator yang berstatus perlu upaya keras dalam pencapaian akhir 2026.

Identifikasi permasalahan dan isu strategis yang mempengaruhi capaian kinerja menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan langkah dan strategi ke depan.

2.2.3. Realisasi Kinerja Program Perangkat Daerah

Kinerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dijabarkan pada pelaksanaan program oleh Perangkat Daerah tersebut. Program yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah adalah program-program yang mendukung urusan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Adapun realisasi kinerja, realisasi fisik dan penyerapan anggaran per urusan dalam setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disajikan pada tabel 2.3 dengan keterangan sebagai berikut :

Tabel 2. 3. Evaluasi Capaian Kinerja Program per Urusan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 Kota Salatiga

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar						
A	Urusan Pendidikan						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Dinas Pendidikan
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	30,15	30,15	Akan Tercapai	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	100	0	0	Perlu Upaya Keras	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79,31	0	0	Perlu Upaya Keras	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
	Tingkat partisipasi warna negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100	97	97	Tercapai	
	Tingkat partisipasi warna negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	99,3	99,3	Tercapai	
	Tingkat partisipasi warna negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100	96,81	96,81	Tercapai	
	Tingkat partisipasi warna negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	77,31	77,31	Tercapai	
	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,004	0	0	Perlu Upaya Keras	
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,057	0,041	71,93	Tercapai	
	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI	%	88,45	85,11	96,22	Perlu Upaya Keras	
	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs	%	87,78	84,45	96,21	Perlu Upaya Keras	
	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	93,79	2,78	2,96	Akan Tercapai	
	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	85,07	2,66	3,13	Akan Tercapai	
	Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen	%	94,76	2,85	3,01	Akan Tercapai	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPd 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (6 = 5/4 *100%)		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
	Nasional						
	Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	90,93	2,75	3,02	Akan Tercapai	
	Persentase sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang	%	78,08	78,07	99,99	Tercapai	
	Persentase kondisi kelas PAUD dalam kondisi baik	%	89,43	89,42	99,99	Tercapai	
	Kondisi sarpras Pendidikan Kesenjangan baik	%	95,46	94,74	99,25	Tercapai	
	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	69,05	69,04	99,99	Tercapai	
	Iklim Kebhinekaan SMP	Nilai	74,58	74,57	99,99	Tercapai	
	Iklim Keamanan SD	Nilai	73,7	73,69	99,99	Tercapai	
	Iklim Keamanan SMP	Nilai	74,4	74,39	99,99	Tercapai	
	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	61,44	61,43	99,98	Tercapai	
	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	64,1	64,09	99,98	Tercapai	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						
	Persentase sekolah yang menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang PKBM	%	75,01	75	99,99	Tercapai	
	Persentase sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SD/MI	%	74,2	74,19	99,99	Tercapai	
	Persentase sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SMP/MTs	%	63,9	63,89	99,98	Tercapai	
4	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN						
	Persentase Guru bersertifikat pendidik jenjang TK/RA	%	44,79	44,78	99,98	Tercapai	
	Persentase Guru bersertifikat pendidik jenjang SD	%	60,07	60,06	99,98	Tercapai	
	Persentase Guru bersertifikat pendidik jenjang SMP	%	66,86	66,85	99,99	Tercapai	
	Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi minimal S1 jenjang PAUD	%	88,27	88,26	99,99	Tercapai	
	Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi minimal S1 jenjang SD	%	97,16	95,72	98,52	Tercapai	
	Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi minimal S1 jenjang SMP	%	99,34	99,33	99,99	Tercapai	
5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN						
	Persentase TK/RA yang terakreditasi	%	90,36	89,57	99,13	Tercapai	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
	Persentase Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terakreditasi	%	83,33	100	120	Tercapai	
	Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan yang berizin	%	92,86	92,86	100	Tercapai	
	Persentase sekolah yang memiliki izin operasional jenjang SD/MI	%	100	100	100	Tercapai	
	Persentase sekolah yang memiliki izin operasional jenjang SMP/MTs	%	100	100	100	Tercapai	
6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA						
	Persentase sekolah yang mengembangkan model pembelajaran Bahasa Jawa jenjang SD/MI	%	20,43	20,43	100	Tercapai	
	Persentase sekolah yang mengembangkan model pembelajaran Bahasa Jawa jenjang SMP/MTs	%	42,86	42,86	100	Tercapai	
	Persentase PKBM yang sudah memasukkan pembelajaran Bahasa Jawa pada mata pelajaran yang diberikan ke siswa	%	66,67	66,67	100	Tercapai	
	Rata-rata Capaian Kinerja%				82,88		
	Predikat				Tinggi		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Kemudahan akses dan kualitas pendidikan serta menurunnya beban biaya yang ditanggung masyarakat untuk menyekolahkan anak dengan adanya bantuan operasional serta Beasiswa kurang mampu					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Pengampu kegiatan tidak bisa melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Melakukan evaluasi berkala dan mencermati schedule yang telah disusun					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Penyusunan perencanaan kegiatan dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan SDM yang ada					
B	Urusan Kesehatan						Dinas Kesehatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	25	25	Akan Tercapai	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,31	98,14	133,87	Tercapai	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	%	86,91	99,94	114,99	Tercapai	
	RUMAH SAKIT						
	Cost Recovery Rumah Sakit	Nilai	100	0	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit	Nilai	86,5	97,18	112,35	Tercapai	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Klinik Paru Masyarakat	Nilai	85	94,39	111,05	Tercapai	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Tegalrejo	Nilai	86,5	96,11	111,11	Tercapai	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Cebongan	Nilai	88,75	98,5	110,99	Tercapai	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Kalicacing	Nilai	88,75	98,5	110,99	Tercapai	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Mangunsari	Nilai	86,5	95,56	110,47	Tercapai	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Sidorejo Lor	Nilai	86,5	94,44	109,18	Tercapai	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Sidorejo Kidul	Nilai	88,75	97,78	110,17	Tercapai	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
	Prevalensi Stunting (EPPBGM)	Angka	5,60	6,39	114,00	Tercapai	
	Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 Kelahiran	11,40	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
	Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	%	85,00	14,59	17,00	Perlu Upaya Keras	
	Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	%	83,00		0,00	Perlu Upaya Keras	
	Cakupan ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapat makanan tambahan	%	100,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Cakupan ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	%	100,00	18,28	18,00	Perlu Upaya Keras	
	Cakupan ibu nifas mendapat kapsul vitamin A	%	99,62	18,29	18,00	Perlu Upaya Keras	
	Cakupan kepesertaan JKN	%	100,00	99,56	100,00	Tercapai	
	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100,00	19,60	20,00	Perlu Upaya Keras	
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100,00	19,33	19,00	Perlu Upaya Keras	
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100,00	22,39	22,00	Perlu Upaya Keras	
	Cakupan pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3)	%	99,55	18,63	19,00	Perlu Upaya Keras	
	Cakupan pelayanan kesehatan lansia	%	100,00	25,87	26,00	Akan Tercapai	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
	Cakupan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	%	100,00	25,87	26,00	Akan Tercapai	
	Cakupan pelayanan kesehatan Orang Terduga TB	%	100,00	20,68	21,00	Perlu Upaya Keras	
	Cakupan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	100,00	3,74	4,00	Perlu Upaya Keras	
	Cakupan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	%	100,00	25,29	25,00	Akan Tercapai	
	Cakupan pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	100,00	26,91	27,00	Akan Tercapai	
	Cakupan pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi	%	100,00	32,18	32,00	Akan Tercapai	
	Cakupan pembinaan remaja di sekolah	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
	Cakupan remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%	99,72	100,00	100,00	Tercapai	
	Deteksi Dini Triple Eliminasi Ibu Hamil	%	75,80	20,29	27,00	Akan Tercapai	
	Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	97,00	24,70	25,00	Akan Tercapai	
	Incident Rate DBD per 100.000 penduduk	100rb penduduk	9,15	0,50	5,00	Perlu Upaya Keras	
	Kasus HIV/AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	%	61,00	68,00	111,00	Tercapai	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	%	73,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan	%	85,00	85,76	101,00	Tercapai	
	Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)	kasus	6,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)	%	7,10	6,12	86,00	Tercapai	
	Persentase Ibu hamil KEK	%	13,50	10,60	79,00	Tercapai	
	Persentase Ibu Hamil yang Anemia	%	10,00	1,65	17,00	Perlu Upaya Keras	
	Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	%	11,40	0,56	5,00	Perlu Upaya Keras	
	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	per 1.000 penduduk	4,00	4,00	100,00	Tercapai	
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional	%	50,00	61,84	124,00	Tercapai	
	Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1x24 jam	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
	Prevalensi obesitas lebih dari 18 tahun	%	23,40	7,10	30,00	Akan Tercapai	
	Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	0,74	0,02	3,00	Perlu Upaya Keras	
	Cakupan imunisasi di usia sekolah dasar	%	98,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Cakupan kepesertaan JKN Aktif	%	81,00	90,31	111,00	Tercapai	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100,00	21,40	21,00	Perlu Upaya Keras	
	Cakupan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	100,00	26,55	27,00	Akan Tercapai	
	Cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah	%	30,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	40,00	10,34	26,00	Akan Tercapai	
	Cakupan Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	65,00	20,51	32,00	Akan Tercapai	
	Capaian penemuan kasus TB (Notifikasi kasus TB)	Kasus	134,50	21,50	16,00	Perlu Upaya Keras	
	Jumlah Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Desa/ Kelurahan	5,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Persentase depresi yang mendapatkan layanan	%	1,50	0,05	3,00	Perlu Upaya Keras	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	85,00		0,00	Perlu Upaya Keras	
	Persentase lanjut usia yang mandiri	%	89,00	24,30	27,00	Akan Tercapai	
	Persentase Puskesmas yang memfasilitasi Kelurahan Sehat Iklim	%	50,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan KKS (SK Forkom Kec., SK Pokja Kel., Sekretariat, Rencana Kegiatan, Anggaran)	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pengawasan kualitas udara dalam ruang memenuhi syarat	%	33,33	16,67	50,00	Tercapai	
	Persentase Pustu, Puskesmas, dan RSUD yang memenuhi standar Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
	Persentase rumah tangga dengan kualitas air minum memenuhi syarat	%	30,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat	%	70,00	8,00	11,00	Perlu Upaya Keras	
	Persentase tempat kerja formal yang melaksanakan kesehatan kerja	%	55,00	48,15	88,00	Tercapai	
	Persentase tempat kerja informal yang melaksanakan kesehatan kerja	%	100,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Persentase penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	20,00	43,89	219,00	Tercapai	
	Persentase pasien TBC yang memulai pengobatan (Enrollment TBC)	Angka	91,00	88,94	98,00	Tercapai	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						
	Persentase tenaga kesehatan yang sudah mengikuti pelatihan sesuai kompetensinya	%	73,50	81,34	111,00	Tercapai	
	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	%	8,91	2,04	23,00	Perlu Upaya Keras	
	Persentase karyawan RSUD yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi minimal 20 jam per tahun	%	60,00	3,61	6,00	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
	Persentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan	%	58,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	%	100,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Persentase pangan Industri Rumah Tangga aman dan bermutu	%	76,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	%	29,76	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah		84,00	12,50	14,88	Perlu Upaya Keras	
	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	90,00	19,33	21,48	Perlu Upaya Keras	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						
	Cakupan desa siaga strata mandiri	%	100,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna	%	97,65	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna	%	95,75	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat	%	100,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat	%	90,45	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat	%	94,45	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Cakupan sosialisasi dan edukasi Kawasan Tanpa Rokok	%	50,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Rata-rata Capaian Kinerja%				47,73		
	Predikat				Sangat Rendah		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Kegiatan dilaksanakan sesuai rencana 2. Sweeping Imunisasi dilakukan 1 bulan sekali di masing masing puskesmas dan banyak jejaring yang sudah					

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
		melaporkan layanan imunisasi					
		3. Kesadaran masyarakat terkait kesehatan jiwa meningkat					
		4. Puskesmas melaksanakan screening HIV secara masif					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Pasien HIV yang ditemukan adalah pasien TB sehingga pengobatan ditunda					
		2. Masih ditemukan kantong kantong penolakan imunisasi (karena faktor kepercayaan)					
		3. Makanan tambahan untuk ibu hamil kurang energi kronik (KEK) belum didistribusi					
		4. Masih banyak kontak erat pasien TB yng menolak minum TPT					
		5. BMHP untuk pemeriksaan kualiatys air minum rumah tangga belum tersedia					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	1.Melaksanakan kegiatan sesuai rencana					
		2. Memenuhi BMHP untuk kegiatan					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	1. Memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia					
C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						DPUPR
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	24,90	24,90	Perlu Upaya Keras	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	88,60	88,60	100,00	Tercapai	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,00	72,65	100,90	Tercapai	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						
	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Angka	66,00	61,51	93,20	Tercapai	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						
	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air	%	66,09	97,31	147,24	Tercapai	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						
	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	19,40	12,07	62,22	Tercapai	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (6 = 5/4 *100%)		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						
	Persentase jaringan drainase kondisi baik	%	96,70	91,90	95,04	Tercapai	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						
	Persentase Bangunan Gedung Negara milik Pemerintah Kota dalam kondisi baik	%	76,93	75,44	98,06	Tercapai	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						
	Persentase Bangunan dan Lingkungan	%	32,24	28,50	88,40	Tercapai	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						
	Rasio kemantapan jalan	%	95,53	86,62	90,67	Tercapai	
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						
	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi	orang	75,00	8,00	10,67	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						
	Jumlah KKPR yang ditertibkan	dokumen	400,00	79,00	19,75	Perlu Upaya Keras	
	Rata-rata Capaian Kinerja%				77,59		
	Predikat				Tinggi		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Pelaksanaan Pekerjaan sesuai jadwal rencana pekerjaan					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Adanya kenaikan harga yang signifikan di pasar sehingga kegiatan belum bisa					

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (6 = 5/4 *100%)		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
		dilaksana n					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	1. Mengawasi jalannya proyek sehingga bisa diselesaikan tepat waktu					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	1. Pengusulan anggaran sesuai kebutuhan					
D	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						DPKP
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	25,00	25,00	Akan Tercapai	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	95,10	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,70	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						
	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana atau relokasi kabupaten/kota	%	100,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						
	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	10,60	36,47	344,06	Tercapai	
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
	KUMUH						
	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	%	5,20	5,18	99,62	Tercapai	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	65,00	66,51	102,32	Tercapai	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
	Persentase terfasilitasinya registrasi pengembang perumahan	%	0,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Rata-rata Capaian Kinerja%				63,44		
	Predikat				Rendah		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	: 1. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perencanaan anggaran kas 2. Kerjasama dan koordinasi tim dengan baik					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	: 1. Pada TW I pekerjaan masih pada tahap perencanaan dan monitoring evaluasi dilakukan pada TW III, sehingga realisasi masih menggunakan tahun sebelumnya.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	: 1. Melakukan monitoring anggaran kas agar tetap dapat terealisasi sesuai rencana					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	: 1. Pengusulan anggaran sesuai kebutuhan					
E	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Satpol PP

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	88,00	89,25	101,42	Tercapai	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,00	69,00	98,57	Tercapai	
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran)	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
	Persentase penegakan Perda dan Per Ka Da (Perentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada)	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						
	Persentase ketersediaan sarana prasarana Damkar yang memadai	%	75,00	80,00	106,67	Tercapai	
	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Kebakaran (Waktu tanggap response time penanganan kebakaran)	menit	15,00	15,00	100,00	Tercapai	
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
	Rata-rata Capaian Kinerja%				100,83		
	Predikat				Sangat Tinggi		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	: 1. Tersedianya Anggaran 2. Kerjasama Tim yang baik					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	: 1. Armada Damkar yang sudah tua (paling baru tahun 2009) 2. Banyaknya PKL yang kucing-kucingan dengan petugas saat melanggar PERDA (berjualan nempel di lapangan pancasila, saat ada personil Satpol PP pada pergi namun saat personil Satpol PP kembali ke kantor pada kembali jualan lagi					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	: 1. Penekanan PERDA secara humanis					

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPd 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPd berikutnya:	: 1. Melaksanakan Sosialisasi PERDA					
F	BPBD						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						BPBD
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	50,00	50,00	Tercapai	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	88,00	88,90	101,02	Tercapai	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	65,00	63,15	97,15	Tercapai	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						
	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	100,00	25,00	25,00	Akan Tercapai	
	Persentase Cakupan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana (Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana)	%	100,00	25,00	25,00	Akan Tercapai	
	Persentase Cakupan Layan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana)	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
	Rata-rata Capaian Kinerja%				66,36		
	Predikat				Rendah		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	: 1. Ketersediaan anggaran 2. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana anggaran kas yang telah dibuat					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	: 1. Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana 2. Belum memiliki personil yang memilki kompetensi di bidang mitigasi 3. Belum memiliki personil yang memilki kompetensi di bidang pencarian dan evakuasi korban bencana					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	: 1. Memaksimal sumber daya yang					

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
		dimiliki dengan melibatkan stakeholder					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	:					
G	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Dinas Sosial
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	90,47	90,49	100,02	Tercapai	
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,90	70,75	99,79	Tercapai	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						
	Persentase Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	%	46,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						
	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
	Persentase penyandang disabilitas telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
	Persentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di lura panti	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
	Persentase lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						
	Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	%	96,00	97,69	101,76	Tercapai	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						
	Persentase TMP yang dikelola dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
	Rata-rata Capaian Kinerja%				100,16		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
	Predikat				Sangat Tinggi		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	: 1. Monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala 2. Dukungan dari instansi terkait, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha 3. Dukungan dan kerjasama dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 4. Dukungan kebijakan dan regulasi pemerintah					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	: 1. Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana 2. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang jumlahnya dinamis					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	: 1. Melaksanak an kegiatan sesuai perencanaa n yang telah ditetapkan					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	: 1. Memaksimal kan Anggaran yang ada					
		2. Terus aktif berkolaborasi dengan instansi terkait, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha					
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
H	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						Disperinaker
	Persentase tenaga kerja terlatih	%	0,31	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						
	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antarkerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	71,48	73,68	103,08	Tercapai	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						
	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja	%	93,71	91,85	98,01	Tercapai	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
	yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skalat Upah, dan terdaftar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan)						
	Rata-rata Capaian Kinerja%				67,03		
	Predikat				Sedang		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	: 1. Dukungan anggaran yang memadai 2. Meningkatnya peserta pelatihan berbasis kompetensi 3. Ketersediaan lapangan usaha 4. Kesesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	: 1. Keterbatasan sarana dan prasarana 2. Keterbatasan anggaran					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	: 1. Mengadaka n sosialisasi tentang penyelengg araan pelatihan					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	: 1. Mengusulka n anggaran kegiatan					
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPEN/KOTA						DP3APPKB
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	85,50	89,85	89,85	Tercapai	
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,00	77,40	77,40	Tercapai	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						
	Persentase kelembagaan PUG Aktif	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
	Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
	Persentase UPTD PPA sesuai standar layanan	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						
	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	Tercapai	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						
	Persentase Perangkat Daerah yang berkontribusi dalam sistem data gender dan anak	%	100	100	100	Tercapai	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						
	Persentase kelembagaan forum anak yang aktif	%	100	100	100	Tercapai	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						
	Persentase korban kekerasan anak yang mendapat layanan komprehensif	%	100	100	100	Tercapai	
	Rata-rata Capaian Kinerja%				100,51		
	Predikat				Sangat Tinggi		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	: 1. Komitmen Pimpinan dan seluruh Perangkat Daerah dalam penerapan akuntabilitas kerja. 2. Komitmen semua Pihak baik internal maupun eksternal untuk memberantas kasus kekerasan. 3. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran kas yang telah ditetapkan. 4. Monev bulanan terkait kendala pelaksanaan kegiatan yang dihadapi. 5. Terbentuknya UPTD-PPA yang menjadi ujung tombak pelayanan kasus kekerasan. 6. Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender yang terus ditingkatkan.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	: 1. Sarana prasarana untuk pelayanan yang masih sangat terbatas. 2. Keterlambatan proses administrasi terutama untuk pengajuan SPJ. 3. Pemahaman pegawai terhadap implementasi SAKIP masih belum merata. 4. Keterbatasan personil untuk melaksanakan layanan. 5. Masih terdapat ego sektoral untuk bidang pekerjaan yang di luar tupoksi. 6. Untuk tahun 2026 tidak mendapatkan DAK-NF-PPA sehingga untuk pelayanan kasus kekerasan harus menggeser anggaran kegiatan.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	: 1. Monev bulanan dan triwulanan supaya kegiatan bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan anggaran kas. 2. Mempercepat pelaksanaan kegiatan serta administrasinya. 3. Melakukan pergeseran anggaran pada kegiatan yang tidak sepenuhnya bisa ter					

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	: 1. Percepatan pelaksanaan kegiatan. 2. Evaluasi untuk prioritas program kegiatan sesuai kemampuan anggaran yang ada. 3. Mengusulkan kembali supaya bisa mendapatkan DAK-NF-PPA, karena UPTD-PPA sudah terbentuk. 4. Mengusulkan tambahan pegawai untuk formasi yang kurang dan kosong. 2. Mengusulkan tambahan pegawai untuk formasi yang kurang & kosong					
J	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Dispangtan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	90,03	89,13	99,00	Tercapai	
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	25,00	25,00	Akan Tercapai	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,35	71,00	99,51	Tercapai	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN						
	Persentase peningkatan Indeks Ketahanan Pangan	%	0,06	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						
	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023	Rasio	1,63	2,35	144,17	Tercapai	
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						
	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	87,74	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						
	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	90,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Rata-rata Capaian Kinerja%				52,53		
	Predikat				Tinggi		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	: 1. Dukungan koordinasi dan komitmen antar bidang dalam pelaksanaan kegiatan pendukung urusan pemerintahan. 2. Ketersediaan bahan pangan pokok di wilayah masih mencukupi. 3. Adanya dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam penguatan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD).					

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
		4. Adanya program pemetaan dan pemantauan daerah rentan rawan pangan secara berkala.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	: 1. Masih terdapat pelayanan publik yang belum seragam standarnya antar unit kerja atau perangkat daerah. 2. Realisasi indeks ketahanan pangan belum mencapai target akibat fluktuasi produksi pangan pada awal tahun. 3. Keterbatasan kapasitas penyimpanan cadangan beras pemerintah daerah. 4. Kondisi cuaca dan bencana alam yang mempengaruhi ketersediaan pangan masyarakat.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	: 1.Melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara berkala untuk memetakan aspek layanan yang perlu diperbaiki. 2. Meningkatkan koordinasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala. 3. Meningkatkan monitoring ketersediaan, distribusi, dan harga pangan secara berkala. 4. Melakukan koordinasi intensif dengan Perum Bulog dan instansi terkait dalam pemenuhan stok CBPD. 5. Meningkatkan pemantauan dan identifikasi wilayah rentan rawan pangan secara berkala.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	: 1. Penguatan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penerapan standar pelayanan publik 2. Penguatan program peningkatan produksi dan cadangan pangan daerah. 3. Penguatan program pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah sesuai ketentuan Perbadan 15/2023. 4. Penguatan program penanggulangan kerawanan pangan berbasis wilayah.					
K	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN						DPKP
	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN						
	Persentase peningkatan penggunaan dan pemanfaatan tanah	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE						
	Persentase bidang tanah yang didistribusi	%	100,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH						
	Persentase luas lahan bersertifikat	%	100	0,00	0,00	Perlu Upaya	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
						Keras	
	Rata-rata Capaian Kinerja%				25		
	Predikat				Sangat Rendah		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	: 1. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perencanaan anggaran kas. 2. Kerjasama dan koordinasi tim dengan baik.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	: 1. Ada program yang kegiatannya sudah tidak dilaksanakan. 2. Realisasi indeks ketahanan pangan belum mencapai target akibat fluktuasi produksi pangan pada awal tahun. 3. Keterbatasan kapasitas penyimpanan cadangan beras pemerintah daerah. 4. Kondisi cuaca dan bencana alam yang mempengaruhi ketersediaan pangan masyarakat.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	: 1.Melakukan monitoring anggaran kas agar tetap dapat terealisasi sesuai rencana.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	: 1. Pengusulan anggaran sesuai kebutuhan.					
L	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPEN/KOTA						DLH
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	84,5	84,17	99,61	Tercapai	
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	23,7	23,70	Perlu Upaya Keras	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,3	76,6	101,73	Tercapai	
	PROGRAM PERECANAAN LINGKUNGAN HIDUP						
	Persentase tersusunnya Dokumen Perencanaan LH	%	30	5	16,67	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						
	Persentase pemantauan status mutu air	%	100	0	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Persentase pemeliharaan sarana prasarana laboratorium	%	100	0	0,00	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						
	Persentase Ruang Terbuka Hijau Tingkat Kota	%	18	17	94,44	Tercapai	
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
	BERACUN (LIMBAH B3)						
	Persentase kelompok masyarakat yang memahami rencana aksi pengurangan dan penghapusan peralatan bermerkuri	%	10	2	20,00	Perlu Upaya Keras	
	Persentase sampah spesifik yang mengandung bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya beracun (limbah B3) yang terkumpul	%	30	8	26,67	Akan Tercapai	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						
	Persentase kegiatan penegakan hukum lingkungan	%	39,23	20	50,98	Tercapai	
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						
	Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh penyuluhan, kampanye dan pelatihan lingkungan hidup	%	60	25	41,67	Akan Tercapai	
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						
	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang terfasilitasi	%	100	35	35,00	Akan Tercapai	
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						
	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00	Tercapai	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						
	Persentase penanganan sampah	%	74	20	27,03	Akan Tercapai	
	Persentase pengurangan sampah perkotaan	%	25	6	24,00	Perlu Upaya Keras	
	Rata-rata Capaian Kinerja %				44,10		
	Predikat				Sangat Rendah		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	: 1. Ketepatan dalam mengaplikasi dan merealisasikan kinerja berdasarkan perencanaan dan anggaran kas. 2. Terpenuhinya sarana dan prasarana. 3. Kompetensi SDM dalam hal teknis terkait.					

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	: 1. Proses pelaksanaan kegiatan masih banyak yang belum dilaksanakan sesuai dengan waktu perencanaan					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	: 1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar bisa dilaksanakan sesuai perencanaan.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	: 1. Percepatan dan ketepatan pelaksanaan pekerjaan berdasar perencanaan					
M	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Disdukcapil
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	91,08	91,265	100,20	Tercapai	
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	87,04	87,04	Tercapai	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,6	68,55	99,93	Tercapai	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						
	Perekaman KTP-Elektronik	%	98,2	98,27	100,07	Tercapai	
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA	%	86,7	87,29	100,68	Tercapai	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL						
	Persentase penduduk usia 0-18 tahun yang mempunyai Akta Kelahiran	%	99,54	99,53	99,99	Tercapai	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						
	Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	100	100	100	Tercapai	
	Rata-rata Capaian Kinerja %				98,27		
	Predikat				Sangat Tinggi		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	: 1. Tersedianya anggaran					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	: 1. Kurangnya antusias masyarakat untuk update elemen data pada Dokumen Kependudukan 2. Kurangnya SDM					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	: 1. Melaksanakan sosialisasi dan jemput bola terkait administrasi kependudukan					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	: 1. Memerlukan penambahan anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan pelayanan di luar jam kerja.					
N	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						DP3APPKB

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	%	100	100	100,00	Tercapai	
	Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun	%	0,08	2,94	3.675,00	Tercapai	
	Persentase OPD yang mengintegrasikan dokumen GDPK 5 pilar ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah	%	100	100	100,00	Tercapai	
	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	tahun	23	21	91,30	Tercapai	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						
	Rasio akseptor KB baru	%	14,4	70,86	492,08	Tercapai	
	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	67,75	65,76	97,06	Tercapai	
	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	%	7,66	11,73	153,13	Tercapai	
	Persentase Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	%	67,02	63,19	94,29	Tercapai	
	Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)	%	11,7	0	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	26,65	41,19	154,56	Tercapai	
	Demand Satisfied (Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi)	%	82,7	0	0,00	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						
	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	Rasio	1:2	1:1.9	97,83	Tercapai	
	Cakupan Balita/Anak dengan tumbuh kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA)	%	100	99,66	99,66	Tercapai	
	Cakupan Kader BKB yang terlatih	%	74,85	87,73	117,21	Tercapai	
	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB	%	95,5	97,47	102,06	Tercapai	
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	57,3	4,35	7,59	Perlu Upaya Keras	
	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	56,6	75,64	133,64	Tercapai	
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	Indeks	93,1	0	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Rata-rata Capaian Kinerja %				306,41		
	Predikat				Sangat Tinggi		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	: 1. Komitmen Pimpinan dan seluruh Perangkat Daerah dalam penerapan akuntabilitas kerja. 2. Komitmen semua Pihak baik internal maupun eksternal dalam menggalakkan MKJP &					

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
		peningkatan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga. 3. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran kas yang telah ditetapkan. 4. Monev bulanan terkait kendala pelaksanaan kegiatan yang dihadapi. 5. Pembinaan & pelatihan rutin kepada kader KB untuk mensosialisasikan penggunaan MKJP. 6. Pembinaan kepada kelompok kegiatan (PIK-R, BKB, BKR, BKL, UPPKA). 7. Telah tersusun GDPK & PJPK sebagai data dasar penyusunan Rencana Kerja.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	: 1. Sarana Prasana untuk pelayanan yang masih sangat terbatas 2. Keterlambatan proses administrasi terutama untuk pengajuan SPJ. 3. Pemahaman pegawai terhadap implementasi SAKIP masih belum merata. 4. Keterbatasan personil untuk melaksanakan layanan. 5. Masih terdapat ego sektoral untuk bidang pekerjaan yang diluar tupoksi 6. Pada tahun 2026 alokasi DAK-NF-BOKB mengalami penurunan yang sangat drastis, sehingga harus menggeser dari APBD untuk pelayanan yang lebih prioritas. 7. Sesuai Juknis Pelaksanaan BOKB untuk penentuan reward kader di lapangan tidak sebanding dengan beban kerja yang lebih berat.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	: 1. Monev bulanan dan triwulanan supaya kegiatan bisa dilaksanakan seesuai dengan perencanaan anggaran kas. 2. Mempercepat pelaksanaan kegiatan serta administrasinya. 3. Melakukan pergeseran anggaran pada kegiatan yang tidak sepenuhnya bisa terlaksana untuk pelayanan yang lebih prioritas.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	: 1. Percepatan pelaksanaan kegiatan. 2. Evaluasi untuk prioritas program kegiatan sesuai kemampuan anggaran yang ada. 3. Mengusulkan tambahan pegawai untuk formasi yang kurang dan kosong. 4. Mengusulkan DAK-BOKB baik fisik maupun non fisik untuk pelaksanaan kegiatan. 5. Menyusun RKPD sesuai GDPK dan PJPK yang ada.					
O	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPEN/KOTA						Dinas Perhubungan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	88	0	0	Perlu Upaya Keras	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,3	74,3	100	Tercapai	
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	49,13	49,13	Akan Tercapai	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
	ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio	0,45	0,88	195,56	Tercapai	
	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota	%	8,05	0,25	3,11	Perlu Upaya Keras	
	Rasio Kinerja Lalu Lintas (VCR)	Rasio	0,45	0,35	77,78	Tercapai	
	Rata-rata Capaian Kinerja %				70,93		
	Predikat				Sedang		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	: 1. Ketersediaan Sarpras yang memadai. 2. Pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan. 3. Penyiapan dokumen-dokumen kegiatan. 4. Komunikasi yang baik dengan pihak-pihak terkait.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	: 1. Penyesuaian SHS dengan harga update.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	: 1. Pengajuan SHS baru ke BPKPD.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	: 1. Pengajuan SHS baru ke BPKPD.					
P	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPEN/KOTA						Diskominfo
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	24,9	24,9	Perlu Upaya Keras	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	90	0	0	Perlu Upaya Keras	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,25	0	0	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	%	100	3,35	3,35	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	Tercapai	
	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara	%	65	65	100	Tercapai	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
	online dan terintegrasi						
	Rata-rata Capaian Kinerja %				38,04		
	Predikat				Sangat Rendah		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	: 1. Komitmen pimpinan dalam mengoordinasikan program digitalisasi. 2. Dukungan infrastruktur dan SDM. 3. Pelaksanaan program prioritas terkait literasi digital dan keamanan informasi yang dievaluasi secara berkala					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	: 1. Keterbatasan kapasitas infrastruktur. 2. Lambatnya koordinasi penyerapan anggaran.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	: 1. Mengoptimalkan pelaksanaan program penyerapan anggaran. 2. Mempercepat proses pengadaan barang/jasa yang tertunda.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	: 1. Penajaman program prioritas digitalisasi agar target tahunan tetap realistis dicapai.					
Q	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Dinkop UKM
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	25	25	Perlu Upaya Keras	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	85,73	0	0	Perlu Upaya Keras	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	69,05	0	0	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						
	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	71,79	0	0	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						
	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	74,43	21,14	28,40	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						
	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	52,58	14,08	26,78	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
	Persentase Koperasi Aktif	%	62,18	55	88,45	Tercapai	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						
	Persentase usaha mikro yang mendapatkan legalitas usaha	%	47,89	45,65	95,32	Tercapai	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						
	Persentase UMKM yang mengakses pembiayaan	%	25,55	27,34	107,01	Tercapai	
	Rata-rata Capaian Kinerja %				41,22		
	Predikat				Sangat Rendah		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	: 1. Melaksanakan kegiatan sesuai anggaran kas.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	: 1. Adanya benturan waktu sehingga jadwal pelaksanaan sedikit mundur.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	: 1. Benar-benar melaksanakan kegiatan sesuai anggaran kas yang ditetapkan.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	: 1. Lebih memperhatikan jadwal pelaksanaan atau penganggaran kas.					
R	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						DPMPTSP
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	90,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	29,60	29,60	Akan Tercapai	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						
	Nilai realisasi PMA dan PMDN	Milyar rupiah	636,44	238,83	37,53	Akan Tercapai	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						
	Jumlah investor berskala nasional	Pelaku Usaha	370,00	117,00	31,62	Akan Tercapai	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	%	97,75	99,63	101,93	Tercapai	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						
	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang	%	67,00	70,00	104,48	Tercapai	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
	dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha						
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						
	Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data	%	80,00	82,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Rata-rata Capaian Kinerja %				38,14		
	Predikat				Sangat Rendah		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	: 1. Optimalisasi layanan melalui DPMPTSP Kota Salatiga yang mempermudah proses perizinan. 2. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sangat mendukung dalam pencapaian investasi daerah.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	: 1. Keterbatasan Lahan dan Kondisi Geologis. 2. Zonasi yang ketat demi menjaga fungsi kelestarian lingkungan dan sumber air baku lokal. 3. Ketidaksesuaian kompetensi pegawai dengan beban kerja teknis di instansi pelayanan, yang memicu keterlambatan administratif dalam ekosistem perizinan					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	: 1. Mendorong terus pelaku usaha untuk tepat waktu dalam melakukan LKPM. 2. Koordinasi antar lembaga dengan mengoptimalkan integrasi sistem perizinan berbasis OSS Indonesia dengan Mall Pelayanan Publik (MPP) Salatiga.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	: 1. Reposisi Sektor Unggulan, ektor prioritas kini diarahkan pada bidang Geriatri (Layanan Lansia), MICE (Pertemuan/Pameran), Pendidikan Vokasi, serta Industri Kreatif dan Jasa digital. 2. Akselerasi Digitalisasi Birokrasi dan Kelembagaan dengan mengoptimalkan integrasi sistem perizinan berbasis OSS Indonesia dengan Mall Pelayanan Publik (MPP) Salatiga.					
S	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Dispora
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	25,00	25,00	Akan Tercapai	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	80,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,20	68,50	100,44	Tercapai	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						
	Persentase Pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan	%	5,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
	KEOLAHRAGAAN						
	Persentase Atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga	%	17,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						
	Persentase fasilitasi pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%	65,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Rata-rata Capaian Kinerja %				20,91		
	Predikat				Sangat Rendah		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	: 1. Pelaksanaan program secara rutin dan evaluasi berkala membantu menjaga capaian target kinerja.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	: 1. Keterbatasan sarana prasarana olahraga dan keterbatasan biaya pembinaan.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	: 1. Meningkatkan ketepatan pelaporan kegiatan, memperkuat sistem monitoring dan evaluasi, serta melakukan evaluasi capaian indikator secara berkala.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	: 1. Memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan monitoring pelaksanaan kegiatan, dan memastikan kegiatan berjalan sesuai target program.					
T	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						Diskominfo
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	90,00	10,80	12,00	Perlu Upaya Keras	
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	90,00	10,80	12,00	Perlu Upaya Keras	
	Rata-rata Capaian Kinerja %				12,00		
	Predikat				Sangat Rendah		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	: 1. Penerapan regulasi Satu Data Indonesia. 2. Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 3. Dukungan anggaran penunjang program					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	: 1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM statistisi. 2. Keterbatasan sarana prasarana penunjang pemrosesan data. 3. Lambatnya sinkronisasi data sektoral dari produsen data (OPD lain)					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	: 1. Peningkatan Kompetensi dan Literasi Data (SDM). 2. Penguatan Tata Kelola Forum Satu Data.					

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
		3. Optimalisasi Infrastruktur dan Integrasi Sistem.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	: 1. Perencanaan Program dan Penganggaran (Aspek Regulasi). 2. Pengembangan Infrastruktur Teknologi (Aspek Sistem). 3. Pengembangan Kompetensi Aparatur (Aspek SDM).					
U	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						Diskominfo
	Persentase tingkat kematangan daerah dalam penyelenggaraan keamanan informasi	%	70,09	83,60	119,28	Tercapai	
	Rata-rata Capaian Kinerja %				119,28		
	Predikat				Sangat Tinggi		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	: 1. Pengamanan informasi pemerintah daerah yang optimal. 2. Optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). 3. penetapan pola hubungan komunikasi sandi.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	: 1. Infrastruktur Khusus Persandian. 2. Keterbatasan sarana prasarana penunjang siber. 3. Kebijakan & Regulasi Lokal. 4. Kesadaran Pengamanan Informasi.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	: 1. Penguatan Regulasi dan Standardisasi. 2. Peningkatan Kapasitas SDM dan Kesadaran Siber. 3. Pemenuhan Infrastruktur dan Evaluasi Teknologi. 4. Respons Tanggap Insiden Bersama Salatiga CSIRT.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	: 1. Perencanaan Program dan Anggaran Strategi. 2. Formulasi Kebijakan dan Regulasi Lokal. 3. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Sandi. 4. Optimalisasi Layanan Tanggap Insiden.					
V	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Disbudpar
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	87,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,00	70,10	100,14	Tercapai	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						
	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	%	58,00	20,00	34,48	Akan Tercapai	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						
	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	%	58,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH						
	Persentase sejarah yang dilestarikan dan dikembangkan	%	25,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						
	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	%	40,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						
	Persentase penambahan jumlah koleksi museum	%	36,68	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Rata-rata Capaian Kinerja %				29,33		
	Predikat				Sangat Rendah		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	: 1. Ketersediaan anggaran. 2. Kerja sama/kolaborasi dengan OPD terkait, pihak swasta dan pelaku budaya dalam mengembangkan kebudayaan di Salatiga. 3. penetapan pola hubungan komunikasi sandi.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	: 1. Kurangnya kepedulian terhadap pengembangan kebudayaan.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	: 1.Promosi dan pelaksanaan kegiatan pelestarian budaya secara rutin.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	: 1. Pengusulan kegiatan pada Program Pengembangan Kebudayaan.					
W	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Dinpersip
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	82,82	87,48	105,63	Tercapai	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,12	78,80	102,18	Tercapai	
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	25,00	25,00	Akan Tercapai	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	60,80	54,04	88,88	Tercapai	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						
	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki	%	100,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Rata-rata Capaian Kinerja %				64,34		
	Predikat				Rendah		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	: 1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, baik ketepatan waktu pelayanan kemudahan prosedur, maupun sikap petugas pelayanan yang semakin responsif dan komunikatif, tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai serta adanya komitmen peningkatan pelayanan publik turut mendorong meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. 2. Meningkatnya komitmen perangkat daerah dalam penerapan akuntabilitas kinerja, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang semakin berkualitas, serta adanya keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program kegiatan. 3. Tindak lanjut membaca/pasca baca menunjukkan capaian yang paling tinggi, namun masih belum konsisten dan belum menjadi kebiasaan luas. 4. Mulai terbentuknya perilaku membaca di masyarakat. 5. Aktivitas membaca sudah berjalan. 6. Adanya dukungan program literasi dari pemerintah daerah seperti Slnisa, Perpustakaan rintisan, Perling 7. Ketersediaan ruang baca dan fasilitas perpustakaan. 8. Mulai adanya keterlibatan pemangku kepentingan seperti safari bunda literasi. 9. Telah terjalin kerja sama dengan pemilik naskah kuno untuk dialihmediakan.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	: 1. Peningkatan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan menjadi tantangan dalam mempertahankan tingkat kepuasan yang tinggi. 2. Belum optimalnya pemahaman seluruh pegawai terhadap implementasi SAKIP, keterbatasan kualitas data dukung kinerja, serta belum maksimalnya pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja. 3. Kesiapan membaca/pra baca mencakup perencanaan, pemilihan bahan, dukungan lingkungan masih sangat terbatas dan belum menjadi praktik stabil. 4. Aktivitas membaca berlangsung, namun intensitas dan kualitas keterlibatan masih belum merata 5. Belum tersedianya alat alih media yang memadai. 6. Naskah dalam keadaan rapuh.					

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	: 1. Dilakukan evaluasi hasil survei kepuasan masyarakat secara berkala guna mengidentifikasi aspek pelayanan yang masih perlu diperbaiki. 2. Peningkatan koordinasi dan pendampingan penyusunan dokumen kinerja, penguatan monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja, serta peningkatan kualitas data dukung pelaporan kinerja. 3. Memperkuat kesiapan membaca berupa akses bahan bacaan relevan, pendampingan pemilihan bacaan, serta program literasi keluarga/sekolah (rencana baca mingguan, pojok baca aktif). Kerjasama dengan dinas yang memiliki alat alih media (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	: 1. Peningkatan kapasitas SDM pelayanan secara berkelanjutan dan monitoring evaluasi secara rutin. 2. Penguatan implementasi manajemen kinerja berbasis hasil, peningkatan integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan SAKIP. 3. Penguatan ekosistem literasi daerah, melalui sinergi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan komunitas literasi. 4. Pengembangan koleksi bahan bacaan yang beragam, termasuk bahan bacaan digital untuk menjangkau masyarakat lebih luas. 5. Penguatan kampanye budaya membaca, untuk membangun kebiasaan membaca sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat.					
X	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						Dinpersip
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	%	88,77	46,15	51,99	Tercapai	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	50,00	20,83	41,66	Akan Tercapai	
	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP						
	Persentase akses masyarakat terhadap penggunaan arsip	%	25,00	0,00	0,00	Perlu Upaya	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
	yang bersifat tertutup					Keras	
	Rata-rata Capaian Kinerja %				31,22		
	Predikat				Sangat Rendah		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	: 1. Semua perangkat daerah sudah menggunakan aplikasi Srikandi. 2. Adanya OPD yang telah melaksanakan pemusnahan arsip. 3. Sudah ada SOP.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	: 1. Belum dilaksanakan pemberkasan dan pemindahan arsip melalui aplikasi Srikandi. 2. Belum terdapat kegiatan penyelamatan arsip, autentifikasi arsip, dan pencarian arsip. 3. Belum teridentifikasi adanya arsip yang bersifat tertutup.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	: 1. Pembinaan rutin ke Perangkat Daerah. 2. Memberikan pendampingan kepada perangkat daerah yang akan melaksanakan pemusnahan dan berupaya mengajukan anggaran perubahan. 3. Koordinasi dengan Bakesbangpol yang berpotensi menyimpan arsip yang bersifat tertutup.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	: 1. Melakukan review melalui pengawasan kearsipan internal. 2. Peningkatan pembinaan dan pendampingan pengelolaan arsip pada seluruh perangkat daerah, percepatan penataan arsip aktif dan inaktif, peningkatan kualitas sdm kearsipan melalui bimbingan teknis, optimalisasi penggunaan aplikasi srikandi, monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan arsip. 3. Meningkatkan koordinasi baik di tingkat kota maupun provinsi.					
Y	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						Dispangtan
	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	%	100,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Persentase kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	%	35,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	705,09	224,65	31,86	Akan Tercapai	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						
	Cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan	%	100,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Persentase peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan	%	1,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Rata-rata Capaian Kinerja %				6,37		
	Predikat				Sangat Rendah		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	: 1. Adanya dukungan program pembinaan dan pendampingan kelompok pembudidaya ikan. 2. Adanya dukungan pembinaan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. 3. Adanya pembinaan dan pendampingan teknis kepada kelompok pembudidaya ikan. 4. Meningkatnya minat masyarakat dan kelompok usaha dalam pengolahan hasil perikanan. 5. Ketersediaan lahan dan sumber air yang mendukung kegiatan budidaya perikanan.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	: 1. Keterbatasan sarana produksi dan akses permodalan. 2. Kondisi kualitas air dan lingkungan yang kurang mendukung. 3. Fluktuasi harga pakan yang mempengaruhi biaya produksi. 4. Keterbatasan kemampuan pemasaran dan inovasi produk kelompok. 5. Keterbatasan sarana dan peralatan pengolahan hasil perikanan.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	: 1. Meningkatkan intensitas pembinaan dan monitoring kelompok budidaya ikan.. 2. Meningkatkan sosialisasi dan pelatihan penerapan CBIB kepada kelompok pembudidaya ikan. 3. Adanya pembinaan dan pendampingan teknis kepada kelompok pembudidaya ikan. 4. Meningkatkan pembinaan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. 5. Melaksanakan pelatihan peningkatan mutu dan diversifikasi produk olahan ikan.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	: 1. Penguatan program pemberdayaan dan pengembangan kelompok budidaya ikan. 2. Penguatan program sertifikasi dan penerapan CBIB pada kelompok pembudidaya ikan. 3. Penguatan program pengembangan budidaya perikanan berbasis potensi daerah. 4. Penguatan program pemberdayaan kelompok pengolah dan pemasar ikan. 5. Penguatan program pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan.					
Z	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						Disbudpar
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	5,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	5,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Tingkat Hunian Akomodasi	%	56,42	21,12	37,43	Akan Tercapai	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						
	Persentase fasilitasi pemasaran pariwisata	%	100,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	%	3,00	0,69	23,00	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						
	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan tervalidasi	%	50,00	0,69	1,38	Perlu Upaya Keras	
	Rata-rata Capaian Kinerja %				10,30		
	Predikat				Sangat Rendah		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	: 1. Pelaksanaan event pariwisata untuk menarik wisatawan. 2. Optimalisasi Destinasi Pariwisata dan DTW yang ada di Salatiga.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	: 1.Minimnya destinasi pariwisata, kurang menariknya DTW di Salatiga.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	: 1. Pelaksanaan even di triwulan berikutnya. 2. Pemeliharaan destinasi wisata.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	: 1. Promosi pariwisata dengan pengadaan even-even kegiatan. 2. Pengusulan kegiatan pemeliharaan/revitalisasi destinasi wisata yang ada.					
AA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						Dispangtan
	Produksi tanaman pangan	ton/ha	6,97	6,90	99,05	Tercapai	
	Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian	%	75,00	20,00	26,67	Akan Tercapai	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						
	Pemenuhan kebutuhan prasarana pertanian	%	75,00	20,00	26,67	Akan Tercapai	
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						
	Mortalitas hewan/ternak akibat penyakit zoonosis	%	0,00	0,00	100,00	Tercapai	
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						
	Persentase penanganan bencana pertanian	%	100,00	20,00	20,00	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						
	Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani PEMULA	%	58,56	58,56	100,00	Tercapai	
	Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani LANJUT	%	58,56	58,56	100,00	Tercapai	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPd 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
	Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani MADYA	%	15,31	15,31	98,82	Tercapai	
	Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani UTAMA	%	2,60	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Rata-rata Capaian Kinerja %				63,47		
	Predikat				Rendah		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	: 1. Ketersediaan lahan pertanian dan dukungan kondisi alam yang cukup baik. 2. Dukungan pengadaan sarana pertanian dari pemerintah. 3. Dukungan pembangunan dan rehabilitasi prasarana pertanian. 4. Adanya kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan hewan secara berkala. 5. Adanya koordinasi penanganan bencana pertanian dengan instansi terkait. 6. Adanya program pembinaan dan pendampingan bagi kelompok tani pemula. 7. Adanya pembinaan rutin dan pendampingan kepada kelompok tani lanjut. 8. Adanya pembinaan dan pendampingan berkelanjutan kepada kelompok tani madya.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	: 1. Perubahan cuaca dan serangan organisme pengganggu tanaman. 2. Keterbatasan anggaran pengadaan sarana dan prasarana pertanian. 3. Penyebaran penyakit zoonosis yang cepat pada wilayah tertentu.. 4. Intensitas bencana alam yang mempengaruhi lahan pertanian. 5. Keterbatasan jumlah penyuluh dan tenaga pendamping lapangan 6. Keterbatasan sarana produksi dan akses permodalan usaha tani. 7. Keterbatasan akses pengembangan usaha dan permodalan kelompok.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	: 1. Meningkatkan pendampingan teknis budidaya tanaman pangan. 2. Melakukan validasi kebutuhan sarana pertanian secara berkala. 3. Melakukan monitoring kondisi prasarana pertanian secara berkala. 4. Meningkatkan pengawasan lalu lintas ternak dan kesehatan hewan. 5. Meningkatkan monitoring dan pendataan dampak bencana pertanian. 6. Meningkatkan intensitas pembinaan dan pendampingan kelompok tani pemula. 7. Meningkatkan pembinaan teknis dan manajemen kelompok tani lanjut. 8. Meningkatkan pembinaan manajemen usaha dan administrasi kelompok tani madya.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPd berikutnya:	: 1. Penguatan program peningkatan produksi tanaman pangan. 2. Penguatan program penyediaan sarana pertanian sesuai kebutuhan petani. 3. Penguatan pembangunan dan rehabilitasi prasarana pertanian. 4. Penguatan program pengendalian dan pencegahan penyakit zoonosis. 5. Penguatan program mitigasi dan penanganan bencana pertanian. 6. Penguatan program pemberdayaan dan pembinaan kelompok tani pemula.					

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
		7. Penguatan program pemberdayaan dan pengembangan kelompok tani lanjut. 8. Penguatan program pengembangan kapasitas kelompok tani madya menuju kelompok tani utama.					
AB	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Disdag
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	25,00	25,00	Akan Tercapai	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	87,06	87,09	100,03	Tercapai	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	67,65	67,80	100,22	Tercapai	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						
	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang difasilitasi	%	100,00	25,00	25,00	Tercapai	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						
	Persentase fasilitasi pedagang pasar rakyat yang menggunakan platform digital	%	25,00	6,25	25,00	Tercapai	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						
	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	100,00	25,00	25,00	Tercapai	
	Disparitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	-0,64	-1,61	251,56	Tercapai	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						
	Fasilitasi pelaku usaha ekspor barang dan jasa	%	3,50	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						
	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	45,00	2,69	5,98	Perlu Upaya Keras	
	Rata-rata Capaian Kinerja %				61,98		
	Predikat				Rendah		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	: 1. Adanya dukungan anggaran untuk melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana perekonomian daerah dan pelaksanaan kegiatan.					

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
		2. Sumber daya manusia yang kompeten.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	: 1.Terdapat beberapa kegiatan yang jadwal pelaksanaannya pada Triwulan III dan IV.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	: 1. Mengoptimalkan penyerapan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	: 1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana.					
AC	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Disperinaker
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	88,78	88,31	99,47	Tercapai	
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00		0,00	Perlu Upaya Keras	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,60	74,75	100,20	Tercapai	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						
	Persentase industri kota Salatiga yang berkembang	%	0,44	0,44	0,00	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dilakukan oleh instansi terkait	%	20,00	5,00	25,00	Akan Tercapai	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	2,47	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100,00	6,00	6,00	Perlu Upaya Keras	
	Rata-rata Capaian Kinerja %				32,95		
	Predikat				Sangat Rendah		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	: 1. Perencanaan yang matang dan berkesinambungan. 2. Dukungan anggaran.					

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
		3. Kemudahan perizinan, pendampingan kepada pelaku usaha industri.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	: 1. Keterbatasan anggaran. 2. Kurangnya minat pelaku usaha untuk melegalkan usahanya dan melaporkan usahanya.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	: 1. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada IKM.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	: 1. Mengusulkan anggaran kegiatan.					
AD	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI						Disperinaker
	Persentase pelaksanaan proses transmigrasi	%	60,00	20,00	33,33	Akan Tercapai	
	Rata-rata Capaian Kinerja %				32,95		
	Predikat				Sangat Rendah		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	: 1. Tingginya minat untuk mengikuti program transmigrasi.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	: 1. Ketidaksesuaian daerah tujuan transmigrasi dengan keinginan calon transmigran. 2. Keterbatasan anggaran.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	: 1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ingin mengetahui tentang program transmigrasi.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	: 1. Mengusulkan anggaran kegiatan.					
	FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
AE	SEKRETARIAT DAERAH						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Sekretariat Daerah
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	41,57	41,57	Akan Tercapai	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	85,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,50	18,20	25,10	Akan Tercapai	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
	Cakupan Koordinasi Administrasi Pemerintahan	%	99,60	12,27	12,32	Perlu Upaya Keras	
	Cakupan Koordinasi Bidang Administrasi Kewilayahan	%	59,47	12,61	21,20	Perlu Upaya Keras	
	Ketepatan waktu penyampaian LKPJ (30 Maret)	%	100,00	74,60	74,60	Tercapai	
	Cakupan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	%	100,00	17,10	17,10	Perlu Upaya	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
						Keras	
	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	100,00	53,77	53,77	Tercapai	
	Persentase Pelaksanaan Bidang Hukum	%	100,00	25,23	25,23	Akan Tercapai	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						
	Cakupan Koordinasi Program Perekonomian dan Pembangunan	%	74,58	35,12	47,09	Akan Tercapai	
	Cakupan Koordinasi OPD Pengampu DBHCHT	%	90,47	30,89	34,14	Akan Tercapai	
	Cakupan Koordinasi dan Pembinaan BUMD/BLUD	%	23,75	35,28	148,55	Tercapai	
	Cakupan Koordinasi bidang Lingkungan Hidup dan SDA	%	90,57	33,00	36,44	Akan Tercapai	
	Cakupan Kooordinasi POK	%	100,00	70,00	70,00	Tercapai	
	Persentase Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan	%	119,05	28,92	24,29	Perlu Upaya Keras	
	Rata-rata Capaian Kinerja %				42,09		
	Predikat				Sangat Rendah		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	: 1. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perencanaan anggaran kas. 2. Koordinasi dan Kerjasama tiap bagian untuk pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. 3. Adanya sarana dan prasarana pendukung kegiatan.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	: 1. Kurang maksimalnya implementasi sistem manajemen kinerja. 2. Belum optimalnya koordinasi serta adanya kendala teknis administrasi.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	: 1. Melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 2. Mengoptimalkan anggaran yang sudah di rencanakan agar tepat sasaran dan sesuai anggaran kas nya.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	: 1. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan. 2. Melaksanakan perhitungan kebutuhan anggaran secara cermat dan efisien agar lebih optimal.					
AF	SEKRETARIAT DPRD						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Sekretariat DPRD
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	86,00	85,00	98,84	Tercapai	
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan	%	100,00	25,00	25,00	Akan Tercapai	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (6 = 5/4 *100%)		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
	pemerintahan						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,00	74,81	102,48	Tercapai	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
	Tingkat capaian kinerja dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100,00	25,00	25,00	Akan Tercapai	
	Rata-rata Capaian Kinerja %				62,83		
	Predikat				Rendah		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	: 1. Jadwal pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun. 2. Komitmen pengampu kegiatan. 3. Koordinasi dan kerjasama tiap bagian untuk pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan dengan mematuhi jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	: 1. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan anggaran kas yang telah disusun pada saat perencaaan. 2. Pelaksanaan dan Pencairan anggaran ada beberapa yang belum sesuai jadwal yang telah direncanakan sehingga perputaraan UP tidak maksimal. 3. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan triwulan berikutnya sehingga belum ada realisasi anggaran.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	: 1. Evaluasi dan monitoring untuk pelaksanaan kegiatan triwulan berikutnya. 2. Melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 3. Koordinasi dengan pengelola kegiatan lebih ditingkatkan agar pelaksanaan sub kegiatan berjalan lancar.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	: 1. Merencanakan kegiatan dengan menyusun jadwal pelaksanaan per sub kegiatan dan melaksanakan pengendalian antar bagian dengan melaksanakan koordinasi dan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. 2. Evaluasi jadwal dan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan agar sesuai dengan jadwal yang telah disusun agar tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan program kegiatan setiap triwulannya dengan melihat hasil evaluasi triwulan sebelumnya. 3. Dalam menyusun anggaran memperhatikan kaidah dan peraturan terkait dengan perencanaan anggaran.					
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
AG	PERENCANAAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						Bappeda

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
	DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	83,00	83,02	100,02	Tercapai	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,50	71,50	100,00	Tercapai	
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	23,36	23,36	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
	Indeks Manajemen Risiko	Angka	2,91	2,91	100,00	Tercapai	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
	Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Kesra	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
	Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Ekbang	%	90,00	90,00	100,00	Tercapai	
	Rata-rata Capaian Kinerja %				89,05		
	Predikat				Tinggi		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	: 1. Adanya perencanaan anggaran dan sapras pendukung kegiatan. 2. Adanya komitmen bersama dalam mencapai tujuan organisasi. 3. Adanya koordinasi internal perangkat daerah. 4. Dukungan sumber daya manusia yang kompeten.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	: 1. Kurang maksimalnya koordinasi internal dan eksternal. 2. Keterlambatan dalam pengadministrasi kegiatan. 3. Jadwal kegiatan berbenturan dengan kegiatan lain.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	: 1. Mengidentifikasi kegiatan dan menjadwalkan ulang kegiatan. 2. Memberikan pemahaman dalam mematuhi anggaran kas yang sudah disusun.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	: 1. Melakukan evaluasi dan perbaikan demi kelancaran kegiatan.					
AH	KEUANGAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						BPKPD
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	82,75	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan	%	100,00	19,12	19,12	Perlu Upaya	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
	pemerintahan					Keras	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,15	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
	Persentase belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	19,16	30,22	157,72	Tercapai	
	Cash Management : Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	8,28	5,31	64,13	Tercapai	
	Persentase laporan keuangan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						
	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	3,00	3,87	129,00	Tercapai	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
	Rata-rata Capaian Kinerja %				74,25		
	Predikat				Sedang		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	: 1. Dukungan pimpinan. 2. Ketersediaan anggaran. 3. Kompetensi SDM. 4. Pemanfaatan teknologi informasi. 5. Koordinasi yang baik antarperangkat daerah.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	: 1. Perubahan regulasi. 2. Keterlambatan dalam penyampaian data. 3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. 4. Kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan data.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	: 1. Evaluasi realisasi fisik dan keuangan triwulan pertama. 2. Percepatan pelaksanaan kegiatan yang belum sesuai target.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	: 1. Melakukan evaluasi dan perbaikan demi kelancaran kegiatan.					
AI	KEPEGAWAIAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						BKPSDM
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	87,55	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79,95	79,92	99,96	Tercapai	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
	Nilai Indeks NSPK Manajemen ASN	Nilai	76,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Rata-rata Capaian Kinerja %				49,99		
	Predikat				Sangat Rendah		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	: 1. Pemberlakuan Tim Kerja menjadikan Koordinasi dan pembagian tugas menjadi baik.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	: 1. Beberapa kegiatan pelaksanaannya belum diketahui, bergantung pada kebijakan pimpinan dan pusat. 2. Efisiensi anggaran.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	: 1. Kegiatan tetap dilaksanakan sesuai perencanaan kegiatan yang sudah terjadwal.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	: 1. Melakukan perencanaan kegiatan dan anggaran dengan lebih cermat.					
AJ	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						Bappeda
	Persentase terfasilitasinya inovasi masyarakat daerah	%	44,44	53,61	120,63	Tercapai	
	Rata-rata Capaian Kinerja %				120,63		
	Predikat				Sangat Tinggi		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	: 1. Adanya perencanaan anggaran dan sapras pendukung kegiatan. 2. Adanya komitmen bersama dalam mencapai tujuan organisasi. 3. Adanya koordinasi internal perangkat daerah. 4. Dukungan sumber daya manusia yang kompeten.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	: 1. Kurang maksimalnya koordinasi internal dan eksternal. 2. Keterlambatan dalam pengadministrasi kegiatan. 3. Jadwal kegiatan berbenturan dengan kegiatan lain.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	: 1. Mengidentifikasi kegiatan dan menjadwal ulang kegiatan. 2. Memberikan pemahaman dalam mematuhi anggaran kas yang sudah disusun.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	: 1. Melakukan evaluasi dan perbaikan demi kelancaran kegiatan.					
AK	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						BKPSDM
	Persentase PNS yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	15,00	0,0007	0,01	Perlu Upaya Keras	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
	Rata-rata Capaian Kinerja %				0,01		
	Predikat				Sangat Rendah		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	: 1. Pemberlakuan Tim Kerja menjadikan Koordinasi dan pembagian tugas menjadi baik.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	: 1. Beberapa kegiatan pelaksanaannya belum diketahui, bergantung pada kebijakan pimpinan dan pusat. 2. Efisiensi anggaran.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	: 1. Kegiatan tetap dilaksanakan sesuai perencanaan kegiatan yang sudah terjadwal.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	: 1. Melakukan perencanaan kegiatan dan anggaran dengan lebih cermat.					
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
AL	INSPEKTORAT DAERAH						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Inspektorat Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	81,40	80,61	99,03	Tercapai	
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	25,00	25,00	Akan Tercapai	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,20	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						
	Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	94,10	96,77	102,84	Tercapai	
	Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Tahun Anggaran N-1	%	90,10	89,98	99,87	Tercapai	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						
	Nilai Monitoring Controlling Suveillance for Prevention (MCSP)	%	94,60	90,30	95,45	Tercapai	
	Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat (DUMAS)	%	100,00	25,00	25,00	Akan Tercapai	
	Rata-rata Capaian Kinerja %				63,88		
	Predikat				Rendah		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	: 1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan daerah, para pengambil kebijakan dan semua pihak yang terlibat dalam mendukung pencapaian kinerja yang optimal. 2. Adanya kerjasama yang baik dengan Instansi vertikal yang terlibat seperti Kementerian Dalam Negeri, BPKP, BPK,KPK, Kejaksanaan Negeri, Pihak Kepolisian RI dan Badan Pusat Statistik serta para pihak terkait lainnya.					

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
		3. Adanya regulasi yang mendukung serta diterapkan dengan komitmen yang kuat oleh seluruh perangkat daerah yang terlibat. 4. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memberikan baku mutu dalam pelaksanaan.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	: 1. Kurang optimalnya penyerapan anggaran di tw. 1 karena pelaksanaan kegiatan masih terkendala persiapan, sehingga perencanaan yang sudah di tetapkan dalam anggaran kas belum bisa terlaksana. 2. Adanya kegiatan yang berhubungan dengan instansi vertikal seperti Kementerian Dalam Negeri, BPKP, BPK,KPK, Kejaksaan Negeri, Pihak Kepolisian RI dan Badan Pusat Statistik serta para pihak terkait lainnya yang pelaksanaannya sulit di prediksi tergantung rencana dari instansi tersebut. 3. Adanya semangat efisiensi dimana kegiatan bisa terlaksana tanpa membutuhkan penyerapan anggaran.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	: 1. Mengoptimalkan anggaran yang sudah di rencanakan agar tepat sasaran dan sesuai anggaran kasnya. 2. Melaksanakan komunikasi dengan instansi vertikal seperti Kementerian Dalam Negeri, BPKP, BPK,KPK, Kejaksaan Negeri, Pihak Kepolisian RI dan Badan Pusat Statistik serta para pihak terkait agar kegiatan bisa di laksanakan tepat waktu.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	: 1. Merencanakan kegiatan dengan mengoptimalkan pagu anggaran yang ada agar kegiatan dapat berjalan optimal. 2. Merencanakan kegiatan yang berhubungan dengan instansi vertikal secara lebih optimal dengan komunikasi yang lebih intensif. 3. Melaksanakan perhitungan kebutuhan anggaran secara cermat dan efisien agar lebih optimal.					
	UNSUR KEWILAYAHAN						
AM	KECAMATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Kecamatan Sidorejo
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	25,00	25,00	Akan Tercapai	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	89,00	89,23	100,26	Tercapai	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,00		0,00	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
	PELAYANAN PUBLIK						
	Tingkat Pencapaian Pembangunan Kelurahan dalam 1 tahun	%	80,00	17,39	21,74	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	100,00	20,00	20,00	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
	Persentase terlaksananya tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	100,00	25,00	25,00	Akan Tercapai	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP	%	83,00	25,00	30,12	Akan Tercapai	
	Rata-rata Capaian Kinerja %				31,73		
	Predikat				Sangat Rendah		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	: 1. Adanya kerja sama yang baik semua pihak.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	: 1. Kurang cermat dalam penyusunan anggaran kas.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	: 1. Meningkatkan koordinasi.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	: 1. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.					
AN	KECAMATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Kecamatan Tingkir
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	25,00	25,00	Akan Tercapai	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	89,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
	Tingkat Pencapaian Pembangunan Kelurahan dalam 1 tahun	%	80,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	100,00	34,70	34,70	Akan Tercapai	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
	Persentase terlaksananya tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	100,00	25,00	25,00	Akan Tercapai	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP	%	83,49	19,65	23,54	Perlu Upaya Keras	
	Rata-rata Capaian Kinerja %				15,46		
	Predikat				Sangat Rendah		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	: 1. Koordinasi dan sinergi yang baik semua pihak yang terlibat. 2. Komitmen untuk melaksanakan kegiatan dengan maksimal.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	: 1. Waktu pelaksanaan yang tidak sesuai perencanaan.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	: 1. Koordinasi dan penentuan waktu pelaksanaan yang lebih terprogram.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	: 1. Monev pelaksanaan tahun ini untuk peningkatan di tahun berikutnya.					
AO	KECAMATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Kecamatan Argomulyo
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	66,67	66,67	Tercapai	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	86,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
	Tingkat Pencapaian Pembangunan Kelurahan dalam 1 tahun	%	80,00	25,00	31,25	Akan Tercapai	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	100,00	20,00	20,00	Perlu Upaya	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
						Keras	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
	Persentase terlaksananya tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	100,00	25,00	25,00	Akan Tercapai	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP	%	75,00	19,17	25,56	Akan Tercapai	
	Rata-rata Capaian Kinerja %				24,07		
	Predikat				Sangat Rendah		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	: 1. Perencanaan yang tepat dan realistis dengan penyusunan program dan kegiatan sesuai kebutuhan OPD. 2. Ketersediaan anggaran yang memadai dengan alokasi anggaran sesuai kebutuhan OPD dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. 3. Kerja sama antara kecamatan dan kelurahan berjalan efektif serta koordinasi untuk mempercepat penyelesaian di lapangan serta sumber daya manusi yang memiliki komitmen terhadap target kinerja. 4. Partisipasi dan dukungan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	: 1. Keterlambatan realisasi anggaran, keterbatasan SDM, belum optimalnya koordinasi serta adanya kendala teknis administrasi. 2. Kurang optimalnya monitoring dan evaluasi sehingga pengawasan tidak berjalan maksimal.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	: 1. Memperbaiki administrasi dan kualitas pelayanan guna mendukung pencapaian target kinerja secara maksimal. 2. Percepatan realisasi anggaran denga menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan yang lebih terukur. 3. Peningkatan pengawasan dan pengendalian dengan memperkuat monev.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	: 1. Dengan meningkatkan capaian kinerja yang belum optimal. 2. Optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memperbaiki efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan meningkatkan penyerapan anggaran tepat waktu. 3. Peningkatan kualitas program, penguatan koordinasi, optimalisasi hasil musrenbang serta peningkatan monitoring dan evaluasi guna mendukung tercapainya target berkelanjutan.					
AP	KECAMATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						Kecamatan

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
	DAERAH KABUPATEN/KOTA						Sidomukti
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	25,00	25,00	Akan Tercapai	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	90,29	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,95	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
	Tingkat Pencapaian Pembangunan Kelurahan dalam 1 tahun	%	80,00	15,49	19,36	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	100,00	22,72	22,72	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
	Persentase terlaksananya tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	100,00	25,00	25,00	Akan Tercapai	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP	%	89,74	19,65	21,90	Perlu Upaya Keras	
	Rata-rata Capaian Kinerja %				16,28		
	Predikat				Sangat Rendah		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	: 1. Komitmen pelaksana kegiatan dalam menjalankan rencana anggaran yang telah disusun.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	: 1. Penentuan jadwal kegiatan dari pihak eksternal yang belum pasti.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	: 1. Koordinasi yang tepat dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	: 1. Penentuan indikator dan anggaran berdasarkan evaluasi RKPD tahun ini.					
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
AQ	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Kesbangpol

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	86,13	93,67	108,75	Tercapai	
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	24,32	24,32	Perlu Upaya Keras	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,70	69,30	100,87	Tercapai	
	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						
	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	5,00	0,12	2,40	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik						
	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	55,00	0,04	0,07	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						
	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	60,00	0,11	0,18	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya						
	Persentase kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	%	80,00	0,60	0,75	Perlu Upaya Keras	
	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial						
	Persentase Penyelesaian Konflik	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
	Rata-rata Capaian Kinerja %				42,17		
	Predikat				Sangat Rendah		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	: 1. Ketersediaan anggaran, kepemimpinan yang kuat, formasi pegawai, sarana prasarana yang memadai, budaya kerja yang mendukung. 2. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	: 1. Kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan mitra kerja, perencanaan yang kurang cermat, kurangnya kompetensi pegawai, kebijakan pemerintah.					

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2026			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2026	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I		
1	2	3	4	5	(6 = 5/4 *100%)	7	8
		2. Adanya semangat efisiensi dimana kegiatan bisa terlaksana tanpa membutuhkan penyerapan anggaran.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	: 1. Merencanakan strategi dan jadwal pelaksanaan setiap tahap dengan tepat, meningkatkan kompetensi serta koordinasi sesuai dengan yang telah direncanakan. 2. Mengoptimalkan anggaran yang sudah di rencanakan agar tepat sasaran dan sesuai anggaran kasnya.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	: 1. Meningkatkan perencanaan kegiatan yang lebih cermat sesuai dengan perkembangan situasi dan yang dapat meningkatkan pencapaian kinerja, evaluasi dan penyesuaian terhadap rencana kerja yang sudah berjalan. 2. Memperhitungan kebutuhan anggaran secara cermat dan efisien agar lebih optimal.					

Pada tabel tersebut, pada Triwulan I masih ada beberapa indikator kinerja program urusan pemerintah daerah yang masih berstatus perlu upaya keras. Walaupun demikian, secara umum capaian kinerja program pemerintah daerah pada Triwulan I tahun 2026 telah sesuai dengan target yang ditetapkan pada dokumen perencanaan dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 58,77%. Akan tetapi, perlu langkah-langkah dan strategi khusus dalam merealisasikan indikator-indikator yang berstatus perlu upaya keras dalam pencapaian akhir triwulan I tahun 2026. Identifikasi permasalahan dan isu strategis yang mempengaruhi capaian kinerja program menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan langkah dan strategi ke depan adalah sebagaimana pada tabel 2.4 berikut ini

Tabel 2. 4. Evaluasi Rata – Rata Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 Kota Salatiga

URAIAN		CAPAIAN (%)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
1	PENDIDIKAN				82,88	
2	KESEHATAN	47,73				
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				77,59	
4	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (Perumahan)			63,44		
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATPOL PP)					100,83
6	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (BPBD)			66,36		
7	SOSIAL					91,05
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR						
1	TENAGA KERJA			67,03		
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					100,51
3	PANGAN		52,53			
4	PERTANAHAN	25				
5	LINGKUNGAN HIDUP	44,1				
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					98,27
7	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB					306,41
8	PERHUBUNGAN			70,93		
9	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	38,04				
10	KOPERASI DAN UKM	41,22				
11	PENANAMAN MODAL	38,14				
12	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	20,91				
13	STATISTIK	12				
14	PERSANDIAN					119,28
15	KEBUDAYAAN	29,33				
16	PERPUSTAKAAN		64,34			
17	KEARSIPAN	31,22				
URUSAN PILIHAN						
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	6,37				

URAIAN		CAPAIAN (%)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
2	PARIWISATA	10,3				
3	PERTANIAN		63,47			
4	PERDAGANGAN		61,98			
5	PERINDUSTRIAN	32,95				
6	TRANSMIGRASI	33,33				
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
1	SEKRETARIAT DAERAH	42,09				
2	SEKRETARIAT DPRD		62,83			
3	PERENCANAAN				89,05	
4	KEUANGAN			71,25		
5	KEPEGAWAIAN	49,99				
6	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					120,63
7	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0,01				
8	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		63,88			
URUSAN KEWILAYAHAN						
1	KECAMATAN SIDOREJO	31,73				
2	KECAMATAN TINGKIR	15,46				
3	KECAMATAN ARGOMULYO	24,07				
4	KECAMATAN SIDOMUKTI	16,28				
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
1	KESBANGPOL	42,17				
RATA-RATA CAPAIAN		58,77				

Sedangkan gambaran kinerja masing-masing urusan pemerintah daerah secara terperinci sebagai berikut :

2.1.3.1 **Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar**

1. **Urusan Pendidikan**

a. **Dinas Pendidikan**

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Pendidikan sampai dengan Triwulaan I Tahun 2026 adalah sebesar 82,88% atau masuk ke dalam kategori tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Pendidikan tahun 2026 sebesar Rp182.738.364.501,00. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp53.327.822.398,00 atau sebesar 29,18%, dengan realisasi fisik mencapai 33,83%.

Walaupun pencapaian kinerja program untuk urusan Pendidikan sampai dengan Triwulaan I Tahun 2026 sudah masuk kategori tinggi, namun masih ada kendala yaitu pengampu kegiatan tidak bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

2. **Urusan Kesehatan**

a. **Dinas Kesehatan**

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Kesehatan yang diampu oleh Dinas Kesehatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 47,73% atau masuk ke dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan tahun 2026 sebesar Rp294.006.340.312,00 sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp54.244.394.965, atau sebesar 18,55%, sedangkan realisasi fisik sebesar 98,43%.

Pencapaian kinerja program untuk urusan Kesehatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 masuk kategori sangat rendah, karena masih banyak realisasi kinerja yang belum tersedia pada Triwulan I tahun 2026. Sedangkan kinerja yang sudah bisa diketahui pada triwulan I 2026, masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan yang disebabkan antara lain karena :

- 1) Pasien HIV yang ditemukan adalah pasien TB sehingga pengobatan ditunda;
- 2) Masih ditemukan kantong-kantong penolakan imunisasi (karena faktor kepercayaan);
- 3) Makanan tambahan untuk ibu hamil kurang energi kronik (KEK) belum didistribusi;
- 4) Masih banyak kontak erat pasien TB yang menolak minum TPT;
- 5) BMHP untuk pemeriksaan kualitas air minum rumah tangga belum tersedia.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 77,59% atau masuk ke dalam kategori tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2026 sebesar Rp49.618.043.732,00. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp2.305.775.744,00 atau sebesar 4,65%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 15,03%.

Walaupun pencapaian kinerja program urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah masuk kategori tinggi, namun ada kendala yaitu adanya kenaikan harga yang signifikan di pasar sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan.

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Perumahan dan Permukiman yang diampu oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 63,44% atau masuk ke dalam kategori sedang.

Alokasi anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2026 sebesar Rp20.708.901.199,00 sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp4.833.836.902,00 atau sebesar 23,34%, sedangkan realisasi fisik sebesar 41,65%

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Satuan Polisi Pamong Praja

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 100,83% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran untuk Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2026 sebesar Rp11.418.466.545,00 sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp2.612.043.588,00 atau sebesar 22,88%, sedangkan realisasi fisik sebesar 35,12%.

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diampu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa Program Penanggulangan Bencana sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 66,36% atau masuk ke dalam kategori sedang.

Alokasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 sebesar Rp2.896.044.427,00 sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp651.329.234,00 atau sebesar 22,49% sedangkan realisasi fisik sebesar 35,16%.

6. Urusan Sosial

a. Dinas Sosial

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Sosial yang diampu oleh Dinas Sosial sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 91,05% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Sosial tahun 2026 sebesar Rp6.387.296.636,00 sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp1.554.172.966,00 atau sebesar 24,33%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 31,66%.

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

a. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Tenaga Kerja yang diampu oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 67,03% atau masuk ke dalam kategori sedang.

Alokasi anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026 sebesar Rp6.337.712.767,00 sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp1.230.870.937,00 atau sebesar 19,42%. sedangkan realisasi fisik sebesar 41,94%.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 105,51%, masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2026 sebesar Rp8.976.911.662,00. Sampai dengan Triwulan I, realisasi keuangan adalah Rp1.782.367.307,00 atau sebesar 19,86%, sedangkan realisasi fisik sebesar 30,82%.

3. Urusan Pangan

a. Dinas Pangan dan Pertanian.

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Pangan yang diampu oleh Dinas Pangan dan Pertanian sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar -100,98% atau masuk ke dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran untuk Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2026 sebesar Rp11.300.823.883,00 sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp1.989.487.749,00 atau sebesar 17,60%, sedangkan realisasi fisik masih sebesar 37,81%.

Pencapaian kinerja program untuk urusan Pangan yang diampu Dinas Pangan dan Pertanian masuk kategori sangat rendah. Hal ini disebabkan karena :

- 1) Masih terdapat pelayanan publik yang belum seragam standarnya antarunit kerja atau perangkat daerah.
- 2) Realisasi indeks ketahanan pangan belum mencapai target akibat fluktuasi produksi pangan pada awal tahun.

- 3) Keterbatasan kapasitas penyimpanan cadangan beras pemerintah daerah.
- 4) Kondisi cuaca dan bencana alam yang mempengaruhi ketersediaan pangan masyarakat.

4. Urusan Pertanahan

a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Pertanahan yang diampu oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 60,43% atau masuk ke dalam kategori rendah.

Alokasi anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2026 sebesar Rp20.708.901.199,00. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp4.833.836.902,00 atau sebesar 23,34%, sedangkan realisasi fisik sebesar 41,65%.

Pencapaian kinerja program urusan Pertanahan yang diampu oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman masih rendah. Hal ini disebabkan karena adanya program yang kegiatannya sudah tidak dilaksanakan di tahun 2026

5. Urusan Lingkungan Hidup

a. Dinas Lingkungan Hidup.

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Lingkungan Hidup yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 44,10% atau masuk ke dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup anggaran tahun 2026 sebesar Rp24.814.867.941,00. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp5.480.645.782,00 atau sebesar 22,09%, sedangkan realisasi fisik sebesar 35,00%.

Pencapaian kinerja program urusan Lingkungan Hidup yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup masuk kategori sangat rendah. Hal ini disebabkan karena proses pelaksanaan kegiatan masih banyak yang belum dilaksanakan sesuai dengan waktu perencanaan.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diampu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 98,27%, masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil anggaran tahun 2026 sebesar Rp5.273.202.504,00. Sampai dengan Triwulan I, realisasi keuangan terhadap target Maret adalah Rp1.291.930.399,00 atau sebesar 24,50%, sedangkan realisasi fisik sebesar 59,50%%.

7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 306,41%, masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2026 sebesar Rp8.976.911.662,00. Sampai dengan Triwulan I, realisasi keuangan adalah Rp1.782.367.307,00 atau sebesar 19,86%, sedangkan realisasi fisik sebesar 30,82%%.

8. Urusan Perhubungan

a. Dinas Perhubungan.

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Perhubungan yang diampu oleh Dinas Perhubungan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 70,93% atau masuk ke dalam kategori sedang.

Alokasi anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2026 sebesar Rp19.475.210.401,00. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp5.231.435.232,00 atau sebesar 26,86%, sedangkan realisasi fisik sebesar 35,89%.

9. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Dinas Komunikasi dan Informatika

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Komunikasi dan Informatika yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 38,04% atau masuk ke dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2026 sebesar Rp10.662.183.245,00. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp1.930.915.214,00 sebesar 18,11%, sedangkan realisasi fisik sebesar 43,43%.

Pencapaian kinerja program urusan komunikasi dan informatika yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika masuk kategori sangat rendah. Hal ini disebabkan karena :

- 1) Keterbatasan kapasitas infrastruktur;
- 2) Lambatnya koordinasi penyerapan anggaran.

10. Urusan Koperasi dan UKM

a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diampu oleh Dinas Koperasi dan UKM sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 41,22% atau masuk ke dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Kecil dan Menengah Tahun 2026 sebesar Rp5.821.717.611 Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp1.032.478.458,00 atau sebesar 17,73%, sedangkan realisasi fisik masih sebesar 23,93%.

Pencapaian kinerja program urusan Koperasi dan UKM yang diampu oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah masuk kategori sangat rendah. Hal ini disebabkan karena adanya benturan waktu sehingga jadwal pelaksanaan sedikit mundur.

Pencapaian kinerja program urusan Koperasi dan UKM yang diampu oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah masuk dalam kategori sangat rendah. Hal ini disebabkan karena adanya benturan waktu pelaksanaan beberapa kegiatan, sehingga jadwal pelaksanaan kegiatan sedikit mundur.

11. Urusan Penanaman Modal

a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Investasi yang diampu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 38,14% atau masuk ke dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2026 sebesar Rp4.015.918.853,00. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp1.121.965.344 atau sebesar 27,94%, sedangkan realisasi fisik masih sebesar 41,85%.

Pencapaian kinerja program urusan Penanaman Modal yang diampu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masuk dalam kategori sangat rendah. Hal ini disebabkan karena :

- 1) Keterbatasan lahan dan kondisi geologis;

- 2) Zonasi yang ketat demi menjaga kelestarian lingkungan dan sumber air baku lokal;
- 3) Ketidaksesuaian kompetensi pegawai dengan beban kerja teknis di instansi pelayanan yang memicu keterlambatan administrative dalam ekosistem perizinan.

12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

a. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Kepemudaan dan Olahraga yang diampu oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 20,91% atau masuk ke dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2026 sebesar Rp19.460.759.094,00. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp11.120.825.704,00 atau sebesar 57,14%, sedangkan realisasi fisik sebesar 37,41%.

Pencapaian kinerja program urusan Kepemudaan dan Olahraga yang diampu oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga masuk dalam kategori sangat rendah. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sarana prasarana olahraga dan biaya pembinaan.

13. Urusan Statistik

a. Dinas Komunikasi dan Informatika.

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Statistik yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Triwulan I tahun 2026 adalah sebesar 12,00% atau masuk ke dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 sebesar Rp10.662.183.245,00. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp1.930.915.214,00 atau sebesar 18,11%, sedangkan realisasi fisik sebesar 43,43%.

Pencapaian kinerja program urusan Statistik yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika masuk dalam kategori sangat rendah. Hal ini disebabkan karena :

- 1) Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM statistisi;
- 2) Keterbatasan sarana prasarana penunjang pemrosesan data.
- 3) Lambatnya sinkronisasi data sektoral dari produsen data (OPD lain).

14. Urusan Persandian

a. Dinas Komunikasi dan Informatika.

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Persandian yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Triwulan I tahun 2026 adalah sebesar 119,28% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi. Alokasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 sebesar Rp10.662.183.245,00. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp1.930.915.214,00 atau sebesar 18,11%, sedangkan realisasi fisik sebesar 43,43%.

15. Urusan Kebudayaan

a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Kebudayaan yang diampu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan Triwulan I tahun 2026 adalah sebesar 29,33% atau masuk ke dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2026 sebesar Rp5.302.580.898. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp1.091.562.198 atau sebesar 20,59%, sedangkan realisasi fisik sebesar 27,91%.

Pencapaian kinerja program urusan Kebudayaan yang diampu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masuk kategori sangat rendah. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kepedulian terhadap pengembangan kebudayaan;

16. Urusan Perpustakaan

a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Perpustakaan yang diampu oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 64,34%, masuk ke dalam kategori rendah.

Alokasi anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2025 sebesar Rp6.777.916.775,00. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp1.564.541.456,00 atau sebesar 23,08%, sedangkan realisasi fisik sebesar 25,69%.

Pencapaian kinerja program urusan Perpustakaan yang diampu oleh Dinas Perpustakaan dan kearsipan masuk dalam kategori rendah. Hal ini disebabkan karena :

- 1) Peningkatan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan menjadi tantangan dalam mempertahankan tingkat kepuasan yang tinggi;
- 2) Belum optimalnya pemahaman seluruh pegawai terhadap implementasi SAKIP, keterbatasan kualitas data dukung kinerja, serta belum maksimalnya pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja;
- 3) Kesiapan membaca/prabaca mencakup perencanaan, pemilihan bahan, dukungan lingkungan yang masih sangat terbatas dan belum menjadi praktik stabil;
- 4) Aktivitas membaca berlangsung, namun intensitas dan kualitas keterlibatan masih belum merata;
- 5) Belum tersedianya alat alih media yang memadai;
- 6) Naskah dalam keadaan rapuh.

17. Urusan Kearsipan

a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Kearsipan yang diampu oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 31,22%, masuk ke dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2026 sebesar Rp6.777.916.775,00. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp1.564.541.456,00 atau sebesar 23,08%, sedangkan realisasi fisik sebesar 25,69%.

Pencapaian kinerja program urusan Kearsipan yang diampu oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan masuk dalam kategori sangat rendah. hal ini disebabkan karena :

- 1) Belum dilaksanakan pemberkasan dan pemindahan arsip melalui aplikasi Srikandi;
- 2) Belum terdapat kegiatan penyelamatan arsip, autentifikasi arsip, dan pencarian arsip;
- 3) Belum teridentifikasi adanya arsip yang bersifat tertutup.

2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Dinas Pangan dan Pertanian.

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Kelautan dan Perikanan yang diampu oleh Dinas Pangan dan Pertanian sampai dengan Triwulan I

Tahun 2026 adalah sebesar 6,37% atau masuk ke dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran untuk Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2026 sebesar Rp11.300.823.883,00 sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp1.989.487.749,00 atau sebesar 17,60%, sedangkan realisasi fisik masih sebesar 37,81%.

Pencapaian kinerja program urusan Kelautan dan Pertanian yang diampu Dinas Pangan dan Pertanian masuk kategori sangat rendah. Hal ini disebabkan karena :

- 1) Keterbatasan sarana produksi dan akses permodalan;
- 2) Kondisi kualitas air dan lingkungan yang kurang mendukung;
- 3) Fluktuasi harga pakan yang mempengaruhi biaya produksi;
- 4) Keterbatasan kemampuan pemasaran dan inovasi produk kelompok;
- 5) Keterbatasan sarana dan peralatan pengolahan hasil pertanian.

2. Urusan Pariwisata

a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Pariwisata yang diampu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan Triwulan I tahun 2026 adalah sebesar -564,30% atau masuk ke dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2026 sebesar Rp5.302.580.898. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp1.091.562.198 atau sebesar 20,59%, sedangkan realisasi fisik sebesar 27,91%.

3. Urusan Pertanian

a. Dinas Pangan dan Pertanian.

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Pertanian yang diampu oleh Dinas Pangan dan Pertanian sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 63,47% atau masuk ke dalam kategori rendah.

Alokasi anggaran untuk Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2026 sebesar Rp11.300.823.883,00 sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp1.989.487.749,00 atau sebesar 17,60%, sedangkan realisasi fisik masih sebesar 37,81%.

Pencapaian kinerja program urusan Kelautan dan Pertanian yang diampu Dinas Pangan dan Pertanian masuk kategori rendah. Hal ini disebabkan karena :

- 1) Perubahan cuaca dan serangan organisme pengganggu tanaman;
- 2) Keterbatasan anggaran pengadaan sarana dan prasarana pertanian;

- 3) Penyebaran penyakit zoonosis yang cepat pada wilayah tertentu;
- 4) Intensitas bencana alam yang mempengaruhi lahan pertanian;
- 5) Keterbatasan jumlah penyuluh dan tenaga pendamping lapangan;
- 6) Keterbatasan sarana produksi dan akses permodalan usaha tani;
- 7) Keterbatasan akses pengembangan usaha dan permodalan kelompok.

4. Urusan Perdagangan

a. Dinas Perdagangan

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Perdagangan yang diampu oleh Dinas Perdagangan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 61,98% atau masuk ke dalam kategori rendah.

Alokasi anggaran untuk Dinas Perdagangan Tahun 2026 sebesar Rp11.526.665.764. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp2.878.363.142 atau sebesar 24.97%, sedangkan realisasi fisik sebesar 35.77%.

Pencapaian kinerja program urusan Perdagangan yang diampu Dinas Perdagangan masuk kategori rendah. Hal ini disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang jadwal pelaksanaannya pada triwulan 3 dan 4 tahun 2026.

5. Urusan Perindustrian

a. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Perindustrian yang diampu oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 32,95% atau masuk ke dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026 sebesar Rp6.337.712.767. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp1.230.870.937 atau sebesar 19,42% dan realisasi fisik sebesar 41,94%.

Pencapaian kinerja program urusan Perindustrian yang diampu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja masuk dalam kategori sangat rendah. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya minat pelaku usaha untuk melegalkan usahanya dan melaporkan usahanya.

6. Urusan Transmigrasi

a. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Transmigrasi yang diampu oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan

I Tahun 2026 adalah sebesar 33,33% atau masuk ke dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026 sebesar Rp6.337.712.767. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp1.230.870.937 atau sebesar 19,42% dan realisasi fisik sebesar 41,94%.

Pencapaian kinerja program urusan Transmigrasi yang diampu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja masuk dalam kategori sangat rendah. Hal ini disebabkan karena ketidaksesuaian daerah tujuan transmigrasi dengan keinginan calon transmigran;

2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Sekretariat Daerah yang diampu oleh Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 42,09% atau masuk ke dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 32.282.856.658,00. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp7.1185.066.309,00 atau sebesar 22,26% dan realisasi fisik 35,43%.

Pencapaian kinerja program urusan Sekretariat Daerah yang diampu oleh Sekretariat Daerah masuk kategori sangat rendah. Hal ini disebabkan karena :

- 1) Kurang maksimalnya implementasi sistem manajemen kerja;
- 2) Belum optimalnya koordinasi serta adanya kendala teknis administrasi.

2. Sekretariat DPRD

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Sekretariat DPRD yang diampu oleh Sekretariat DPRD sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 62,83% atau masuk ke dalam kategori rendah.

Alokasi anggaran Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp38.220.064.222,00. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp7.389.225.251,00 atau sebesar 19,33% dan realisasi fisik sebesar 28,14%

Pencapaian kinerja program urusan Sekretariat DPRD yang diampu oleh Sekretariat DPRD masuk dalam kategori rendah. Hal ini disebabkan karena :

- 1) Pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan tidak sesuai dengan perencanaan anggaran kas yang telah disusun;
- 2) Pelaksanaan dan pencairan anggaran ada beberapa yang belum sesuai jadwal yang telah direncanakan, sehingga uang persediaan tidak maksimal;
- 3) Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di triwulan berikutnya sehingga belum ada realisasinya.

2.1.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Unsur Penunjang Perencanaan

a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Perencanaan yang diampu oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 89,05% atau masuk ke dalam kategori tinggi.

Alokasi anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp6.157.870.753,00 sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp1.377.559.184,00 atau sebesar 22,37%, sedangkan realisasi fisik sebesar 26,36%.

2. Unsur Penunjang Keuangan

a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Keuangan yang diampu oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan I tahun 2026 adalah sebesar 74,25% atau masuk ke dalam kategori sedang.

Alokasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2026 sebesar Rp26.704.975.658,00. Sampai dengan Triwulan I realisasi adalah Rp4.099.255.423,00 atau sebesar 15,35% dan realisasi fisik sebesar 49,77%.

3. Unsur Penunjang Kepegawaian

a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Kepegawaian yang diampu oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 49,99%, masuk ke dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 sebesar Rp8.989.339.040,00. Sampai dengan Triwulan I, realisasi keuangan adalah Rp1.712.270.022,00 atau sebesar 19,05% dan realisasi fisik sebesar 43,95%.

Pencapaian kinerja program urusan Kepegawaian yang diampu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia masuk kategori sangat rendah. Hal ini disebabkan karena beberapa kegiatan pelaksanaannya belum dapat diketahui karena bergantung pada kebijakan pimpinan dan pemerintah pusat;

1) Adanya efisiensi anggaran.

4. Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

a. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Penelitian dan Pengembangan yang diampu oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 120,63% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi

Alokasi anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp6.157.870.753,00 sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp1.377.559.184,00 atau sebesar 22,37%, sedangkan realisasi fisik sebesar 26,36%.

5. Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Kepegawaian yang diampu oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 0,01%, masuk ke dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 sebesar Rp8.989.339.040,00. Sampai dengan Triwulan I, realisasi keuangan adalah Rp1.712.270.022,00 atau sebesar 19,05% dan realisasi fisik sebesar 43,95%.

Pencapaian kinerja program urusan Kepegawaian yang diampu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia masuk kategori sangat rendah. Hal ini disebabkan karena beberapa kegiatan pelaksanaannya belum dapat diketahui karena bergantung pada kebijakan pimpinan dan pemerintah pusat.

2.1.3.6 Unsur Pengawas Urusan Pemerintah

1. Inspektorat

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Pengawasan yang diampu oleh Inspektorat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 63,88% atau masuk ke dalam kategori rendah.

Alokasi anggaran Inspektorat tahun 2026 sebesar Rp8.080.328.025,00 sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp1.854.807.695,00 atau sebesar 22,95%, sedangkan realisasi fisik sebesar 30,08%.

Pencapaian kinerja program unsur Pengawas Urusan Pemerintah yang diampu Inspektorat Daerah masuk kategori rendah. Hal ini disebabkan karena :

- 1) Kurang optimalnya penyerapan anggaran di triwulan 1 karena pelaksanaan kegiatan masih terkendala persiapan sehingga perencanaan yang sudah ditetapkan belum bisa terlaksana;

- 2) Adanya kegiatan yang berhubungan dengan instansi vertikal seperti Kementerian Dalam Negeri, BPKP, BPK, KPK, Kejaksaan Negeri, Kepolisian RI, BPS, dan pihak terkait lainnya yang pelaksanaannya sulit diprediksi, tergantung rencana dari instansi tersebut;

2.1.3.7 Unsur Kewilayahan

a. Kecamatan Sidomukti

Rata-rata capaian kinerja program urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Kecamatan Sidomukti sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 16,28% atau masuk kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran untuk kecamatan Sidomukti tahun 2026 sebesar Rp11.557.947.072,00. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp3.419.732.333,00 atau sebesar 29,59%, sedangkan realisasi fisik sebesar 37,43%.

Pencapaian kinerja program urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diampu Kecamatan Sidomukti masuk kategori sangat rendah. Hal ini disebabkan karena adanya penentuan jadwal kegiatan dari pihak eksternal yang belum pasti.

b. Kecamatan Sidorejo

Rata-rata capaian kinerja program urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Kecamatan Sidorejo sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 31,73% atau masuk kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran untuk kecamatan Sidorejo tahun 2026 sebesar Rp13.996.177.627,00. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp4.528.252.242,00 atau sebesar 32,35%, sedangkan realisasi fisik sebesar 35,66%.

Pencapaian kinerja program urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diampu Kecamatan Sidorejo masuk kategori sangat rendah. Hal ini disebabkan karena kurang cermat dalam penyusunan anggaran.

c. Kecamatan Tingkir

Rata-rata capaian kinerja program urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Kecamatan Tingkir sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 15,46% atau masuk kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran untuk kecamatan Tingkir tahun 2026 sebesar Rp16.529.009.426,00. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah

Rp4.878.818.008,00 atau sebesar 29,52%, sedangkan realisasi fisik sebesar 40,89%

Pencapaian kinerja program urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Kecamatan Tingkir masuk dalam kategori sangat rendah. Hal ini disebabkan karena waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

d. Kecamatan Argomulyo

Rata- rata capaian kinerja program urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Kecamatan Argomulyo sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 24,07% atau masuk kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran untuk kecamatan Argomulyo tahun 2026 sebesar Rp13.678.894.381,00. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp3.990.803.578,00 atau sebesar 29,17%, sedangkan realisasi fisik sebesar 35,42%.

2.1.3.8 Unsur Pemerintahan Umum

a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Pemerintahan Umum yang diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 42,17% atau masuk ke dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 sebesar Rp8.126.480.267,00 sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp1.271.781.188,00 atau sebesar 15,65%. sedangkan realisasi fisik sebesar 15,74%.

Adapun realisasi keuangan dan fisik tersaji pada lampiran hasil kinerja sebagaimana terlampir.

Tabel 2. 5. Rekap Realisasi Pelaksanaan Kegiatan s.d. Bulan Maret 2026

No	OPD	Pagu	Keuangan					Fisik	
			Target s.d Maret 2026		Realisasi			Target (%)	Realisasi (%)
			Rp.	(%)	Rp.	(%) terhadap target Maret	(%) terhadap Pagu		
1.	Dinas Pendidikan	182.738.364.501	60.613.251.834	33,17	53.327.822.398	87,98	29,18	33,17	100
2.	Dinas Kesehatan	294.006.340.312	96.570.770.375	32,85	54.244.394.965	57,88	18,55	32,8	98,43
3.	DPUPR	49.618.043.732	3.816.339.573	7,69	2.305.775.744	60,42	4,65	7,69	100
4.	Dinas Perkim	20.708.901.199	6.022.476.743	29,08	4.833.836.902	80,26	23,34	29,08	100
5.	Satpol PP	11.418.466.545	3.419.297.273	29,95	2.612.043.588	76,39	22,88	29,95	98,62
6.	BPBD	2.896.044.427	994.704.712	34,35	651.329.234	65,48	22,49	34,35	100
7.	Dinas Sosial	6.387.296.636	2.044.745.338	32,01	1.554.172.966	76,01	24,33	32,01	99,48
8.	Disperinaker	6.337.712.767	2.073.451.500	32,72	1.230.870.937	59,36	19,42	32,72	99,7
9.	DP3APPKB	8.976.911.662	2.606.132.373	29,03	1.782.367.307	68,39	19,86	29,03	100
10.	Dinas Lingkungan Hidup	24.814.867.941	8.146.916.667	32,83	5.480.645.782	67,27	22,09	32,83	97,81
11.	Dispangtan	11.300.823.883	2.620.851.607	23,19	1.989.487.749	75,91	17,6	23,19	100
12.	Disdukcapil	5.273.292.504	1.692.461.102	32,1	1.291.930.399	76,33	24,5	32,1	100
13.	Dinas Perhubungan	19.475.210.401	60.710.016.708	31,17	5.231.435.232	86,17	26,86	31,17	100
14.	Diskominfo	10.662.183.245	2.573.987.317	24,14	1.930.915.214	75,02	18,11	24,14	100
15.	Dinkop UKM	5.821.717.611	1.238.744.446	21,28	1.032.478.458	83,35	17,73	21,28	100
16.	DPMTSPSP	4.015.918.852	1.568.506.717	39,06	1.121.965.344	71,53	27,94	39,06	100
17.	Dispora	19.460.759.094	12.159.147.256	62,48	11.120.825.704	91,46	57,14	62,48	59,94
18.	Disbudpar	5.302.580.898	1.517.632.584	28,62	1.091.562.198	71,93	20,59	28,62	98,67
19.	Dinpersip	6.777.916.775	1.775.769.500	25,2	1.564.541.456	88,1	23,08	26,2	100
20.	Disdag	11.526.665.764	5.224.628.018	45,33	2.878.363.142	55,09	24,97	45,33	69,72
21.	Sekretariat Daerah	32.282.856.658	9.976.563.923	30,9	7.185.066.309	72,02	22,26	30,9	98,51
22.	Sekretariat DPRD	38.220.064.222	11.084.075.850	29	7.689.225.251	66,67	19,33	29	100
23.	Bappeda	6.157.870.753	2.622.668.486	42,59	1.377.559.184	52,53	22,37	42,59	100
24.	BPKPD	26.704.975.658	14.031.277.836	52,54	4.099.255.423	29,22	15,35	52,54	92,94
25.	BKPSDM	8.989.339.040	2.454.198.346	27,3	1.712.270.022	69,77	19,05	27,3	100
26.	Inspektorat	8.080.328.025	2.977.204.580	36,85	1.854.807.695	62,3	22,95	36,85	100
27.	Kec. Sidorejo	13.996.177.627	5.101.640.848	36,45	4.528.252.242	88,76	32,35	36,45	100

No	OPD	Pagu	Keuangan					Fisik	
			Target s.d Maret 2026		Realisasi			Target (%)	Realisasi (%)
			Rp.	(%)	Rp.	(%) terhadap target Maret	(%) terhadap Pagu		
28.	Kec. Tingkir	16.529.009.426	5.851.435.623	35,4	4.878.818.008	83,38	29,52	35,4	100
29.	Kec. Argomulyo	13.678.894.381	4.568.034.768	33,39	3.990.803.578	87,36	29,17	33,39	100
30.	Kec. Sidomukti	11.557.947.072	4.045.080.994	35	3.419.732.333	84,54	29,59	35	100
31.	Bakesbangpol	8.126.480.267	2.018.082.700	24,83	1.271.781.188	63,02	15,65	24,83	100
Total		891.843.871.878	287.481.095.597	32,23	198.984.335.952	69,22	22,31	32,23	97,26

2.2. Kendala dan Permasalahan

Dari hasil Evaluasi Capaian Kinerja Program per Urusan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala yang dihadapi perlu ditindaklanjuti, antara lain:

2.2.1. Kondisi Internal

Secara umum kendala dan permasalahan internal yang mempengaruhi pencapaian Kinerja Indikator Pembangunan Daerah sampai dengan Triwulan I tahun 2026 adalah pencapaian realisasi keuangan dan fisik kegiatan yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan oleh :

- a) Proses pelaksanaan kegiatan yang belum sesuai dengan perencanaan atau Kerangka Acuan Kerja yang telah ditetapkan terkait termasuk pemenuhan personil organisasi kegiatan, proses pengadaan barang dan jasa, penentuan sasaran/lokasi kegiatan serta pembiayaan;
- b) Masih banyaknya OPD yang menjadwalkan pelaksanaan kegiatannya di Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV, sehingga berakibat minimnya realisasi fisik kegiatan dan serapan keuangan di Triwulan I Tahun 2026.

Sedangkan secara khusus kendala dan permasalahan per urusan yang capaian indikator program masih rendah adalah sebagai berikut:

a. Urusan Pendidikan

Walaupun rata-rata capaian kinerja sudah masuk kategori tinggi, tetapi indikator kinerja urusan Pendidikan masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena pengampu kegiatan tidak melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.

b. Urusan Kesehatan

Realisasi kinerja program pada urusan belum seluruhnya tersedia pada Triwulan I tahun 2026 karena bisa disediakan pada akhir tahun, sehingga capaian kinerja program pada kategori rendah. Akan tetapi secara umum, masih ada beberapa kinerja yang memang realisasinya masih tidak sesuai dengan target yang diharapkan, antara lain disebabkan :

- 1) Pasien HIV yang ditemukan adalah pasien TB sehingga pengobatan ditunda.
- 2) Masih ditemukan penolakan terkait imunisasi (karena faktor kepercayaan).
- 3) Makanan tambahan untuk ibu hamil kurang energi kronik (KEK) belum didistribusi.
- 4) Masih banyak kontak erat pasien TB yang menolak minum TPT.
- 5) BMHP untuk pemeriksaan kualitas air minum rumah tangga belum tersedia.

c. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Capaian kinerja program terkendala karena pada triwulan I pekerjaan masih pada tahap perencanaan dan monitoring evaluasi baru akan dilaksanakan mulai triwulan 3, sehingga pada triwulan I belum dapat dinilai capaian kinerja programnya.

d. Urusan Pangan

Capaian kinerja program belum optimal. Hal ini disebabkan karena :

- 1) Masih terdapat pelayanan publik yang belum seragam standarnya antar unit kerja atau perangkat daerah.
 - 2) Realisasi indeks ketahanan pangan belum mencapai target akibat fluktuasi produksi pangan pada awal tahun.
 - 3) Keterbatasan kapasitas penyimpanan cadangan beras pemerintah daerah.
- e. Urusan Lingkungan Hidup**
- Pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, sehingga kinerja belum mencapai target yang ditetapkan.
- f. Urusan Komunikasi dan Informatika**
- Pencapaian kinerja urusan komunikasi dan informatika belum sesuai dengan target yang ditetapkan karena masih kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan anggaran dan belanja untuk pencapaian kinerja.
- g. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
- Terdapat beberapa kegiatan yang waktu pelaksanaannya berbenturan, sehingga jadwal pelaksanaan kegiatan sedikit mundur.
- h. Urusan Penanaman Modal**
- Ketidaksesuaian kompetensi pegawai dengan beban kerja teknis di instansi pelayanan yang memicu keterlambatan administratif dalam ekosistem perizinan.
- i. Urusan Pemuda dan Olahraga**
- Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga dalam pemenuhan dukungan peningkatan daya saing keolahragaan
- j. Urusan Statistik**
- 1) Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM statistisi.
 - 2) Keterbatasan sarana prasarana penunjang pemrosesan data.
- k. Urusan Persandian**
- 1) Keterbatasan infrastruktur khusus persandian dan penunjang siber.
 - 2) Kesadaran pengamanan informasi yang kurang.
- l. Urusan Kebudayaan**
- 1) Beberapa kegiatan untuk dukungan pencapaian kinerja program dilaksanakan dengan dukungan penuh anggaran, sedangkan proses penyusunan anggaran kas di Triwulan III dan IV sehingga pada Triwulan I masih terbatas pada pemenuhan personil organisasi kegiatan.
 - 2) Kurangnya kepedulian terhadap pengembangan kebudayaan.
- m. Urusan Perpustakaan**
- 1) Peningkatan ekspektasi terhadap kualitas pelayanan menjadi tantangan dalam mempertahankan tingkat kepuasan yang tinggi.
 - 2) Belum optimalnya pemahaman seluruh pegawai terhadap implementasi SAKIP, keterbatasan kualitas data dukung kinerja, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kerja yang belum maksimal.
 - 3) Belum tersedianya alat alih media yang memadai.

- 4) Naskah dalam keadaan rapuh.

n. Urusan Kearsipan

- 1) Belum dilaksanakan pemberkasan dan pemindahan arsip melalui aplikasi Srikandi.
- 2) Belum terdapat kegiatan penyelamatan arsip, autentifikasi arsip, dan pencarian arsip.
- 3) Belum teridentifikasi adanya arsip yang bersifat tertutup.

o. Urusan Kelautan dan Perikanan

- 1) Keterbatasan sarana produksi dan akses permodalan.
- 2) Kondisi kualitas air dan lingkungan yang kurang mendukung.
- 3) Keterbatasan kemampuan pemasaran dan inovasi produk kelompok.
- 4) Keterbatasan sarana dan peralatan pengolahan hasil perikanan.

p. Urusan Pariwisata

Masih terbatasnya destinasi pariwisata potensial dan kurang menariknya daerah tujuan wisata yang ada.

q. Urusan Pertanian

- 1) Keterbatasan sarana dan prasarana pertanian.
- 2) Penyebaran penyakit zoonosis yang cepat pada wilayah tertentu.
- 3) Keterbatasan sarana produksi, akses pengembangan usaha dan permodalan usaha tani.

r. Urusan Perdagangan

Terdapat beberapa kegiatan yang jadwal pelaksanaannya pada triwulan 2, 3, dan 4.

s. Sekretariat Daerah

- 1) Kurang maksimalnya implementasi sistem manajemen kinerja.
- 2) Belum optimalnya koordinasi serta adanya kendala teknis administrasi.

t. Sekretariat DPRD

- 1) Pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan tidak sesuai dengan perencanaan;
- 2) Pelaksanaan dan pencairan anggaran ada beberapa yang belum sesuai jadwal yang telah direncanakan sehingga perputaran UP tidak maksimal.
- 3) Ada beberapa kegiatan yang baru akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya, sehingga pada triwulan 1 belum ada realisasinya.

u. Urusan Pengawasan

- 1) Kurang optimalnya penyerapan anggaran di triwulan 1 disebabkan karena pelaksanaan kegiatan masih terkendala persiapan, sehingga perencanaan yang sudah ditetapkan dalam anggaran kas belum dapat terlaksana.
- 2) Adanya semangat efisiensi di mana kegiatan bisa terlaksana tanpa membutuhkan penyerapan anggaran.

v. Kecamatan

- 1) Kurang cermat dalam penyusunan anggaran kas.
- 2) Waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai perencanaan.

- 3) Keterlambatan realisasi anggaran, keterbatasan SDM, belum optimalnya koordinasi serta adanya kendala teknis administrasi
- 4) Kurang optimalnya monitoring dan evaluasi sehingga pengawasan tidak berjalan maksimal.

w. Kesbangpol

- 1) Kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan mitra kerja
- 2) Perencanaan yang kurang cermat.
- 3) Kurangnya kompetensi pegawai.

2.2.2. Kondisi Eksternal

Secara umum kendala dan permasalahan eksternal yang mempengaruhi pencapaian Kinerja Indikator Pembangunan Daerah tahun 2026 sampai dengan Triwulan I adalah :

1. Munculnya peraturan atau kebijakan yang baru dari pusat maupun provinsi yang harus ditindaklanjuti oleh daerah, yang berakibat pada penyesuaian APBD 2026 termasuk keterlambatan dalam penerbitan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang berasal dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat, sehingga dalam pelaksanaan belum bisa sesuai waktu yang direncanakan;
2. Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan atau berhubungan dengan instansi eksternal menyebabkan realisasi kegiatan tergantung pada jadwal instansi tersebut yang berakibat pada pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Sedangkan kendala dan permasalahan eksternal per urusan yang capaian indikator program masih rendah adalah sebagai berikut :

a. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Adanya kenaikan harga yang signifikan di pasar sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan.

b. Urusan Pangan

- 1) Kondisi cuaca dan bencana alam yang mempengaruhi ketersediaan pangan masyarakat.

c. Urusan Penanaman Modal

- 1) Keterbatasan lahan dan kondisi geologis.
- 2) Zonasi yang ketat demi menjaga fungsi kelestarian lingkungan dan sumber air baku lokal.

d. Urusan Statistik

- 1) Lambatnya sinkronisasi data sektoral dari produsen data (OPD lain).

e. Urusan persandian

- 1) Kebijakan dan regulasi lokal.

f. Urusan Perpustakaan

- 1) Peningkatan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan menjadi tantangan dalam mempertahankan tingkat kepuasan yang tinggi.

- 2) Kesiapan membaca/prabaca mencakup perencanaan, pemilihan bahan, dukungan lingkungan masih sangat terbatas dan belum menjadi praktik yang stabil.
- 3) Aktivitas membaca sudah berlangsung, namun intensitas dan kualitas keterlibatan masih belum merata.

g. Urusan Pertanian

- 1) Perubahan cuaca, intensitas bencana alam, dan serangan organisme pengganggu tanaman.

h. Urusan Kelautan dan Perikanan

- 1) Fluktuasi harga pakan yang mempengaruhi biaya produksi.

i. Urusan Perindustrian

Kurangnya minat pelaku usaha untuk melegalkan dan melaporkan usahanya.

j. Urusan Transmigrasi

Ketidaksesuaian daerah tujuan transmigrasi dengan keinginan calon transmigran

k. Pengawasan

Adanya kegiatan yang berhubungan dengan instansi vertikal seperti Kementerian Dalam Negeri, BPKP, BPK, KPK, Kejaksaan Negeri, Pihak Kepolisian RI dan Badan Pusat Statistik serta para pihak terkait lainnya serta para pihak terkait lainnya yang pelaksanaannya sulit diprediksi tergantung rencana dari instansi tersebut.

l. Urusan Kepegawaian dan Diklat

Beberapa kegiatan belum dapat diketahui pelaksanaannya karena bergantung pada kebijakan pimpinan dan pemerintah pusat.

m. Urusan Kewilayahan

Penentuan jadwal kegiatan dari pihak eksternal yang belum pasti.

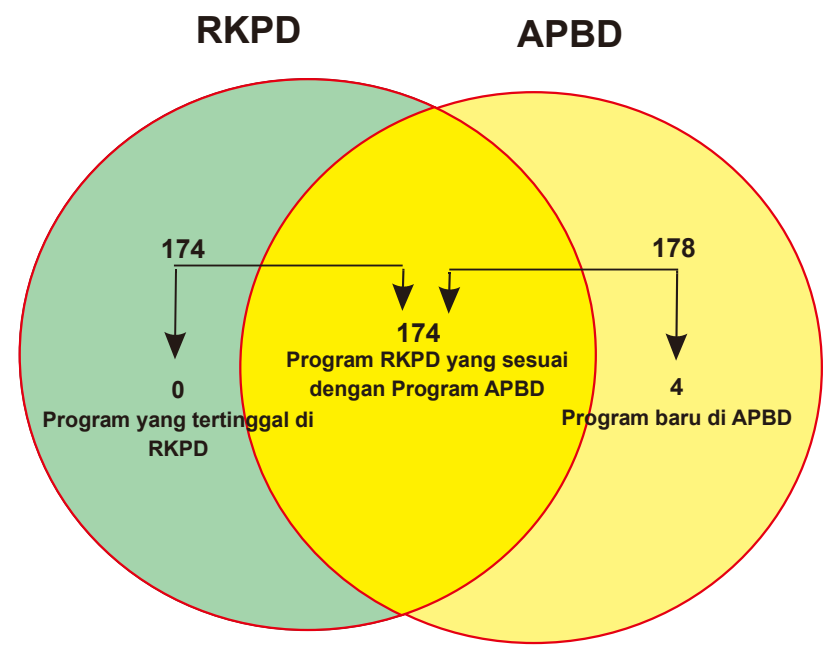
n. Urusan Pemerintahan Umum

Perubahan kebijakan pemerintah

Beberapa permasalahan tersebut mengakibatkan ketidaksesuaian dokumen antara APBD dengan RKPD Tahun 2026 sebagai berikut :

a. **Perbandingan Jumlah Program dalam RKPD Tahun 2026 dengan Jumlah Program dalam APBD Tahun 2026**

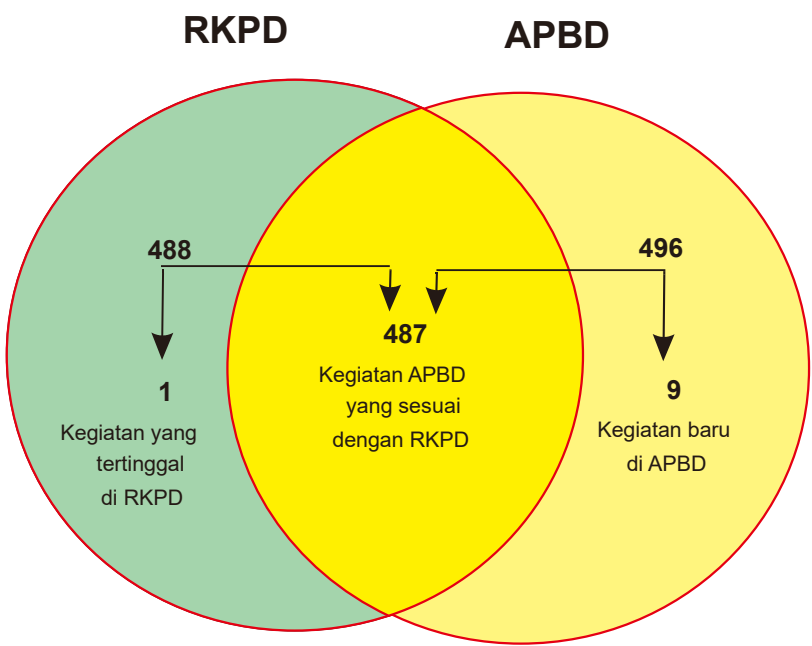
Gambar 2. 1. Diagram Perbandingan Jumlah Program dalam RKPD Tahun 2026 dengan Jumlah Program dalam APBD Tahun 2026



Sumber : Diolah Bappeda, 2026

b. **Perbandingan Jumlah Kegiatan dalam RKPD Tahun 2026 dengan Jumlah Kegiatan dalam APBD Tahun 2026**

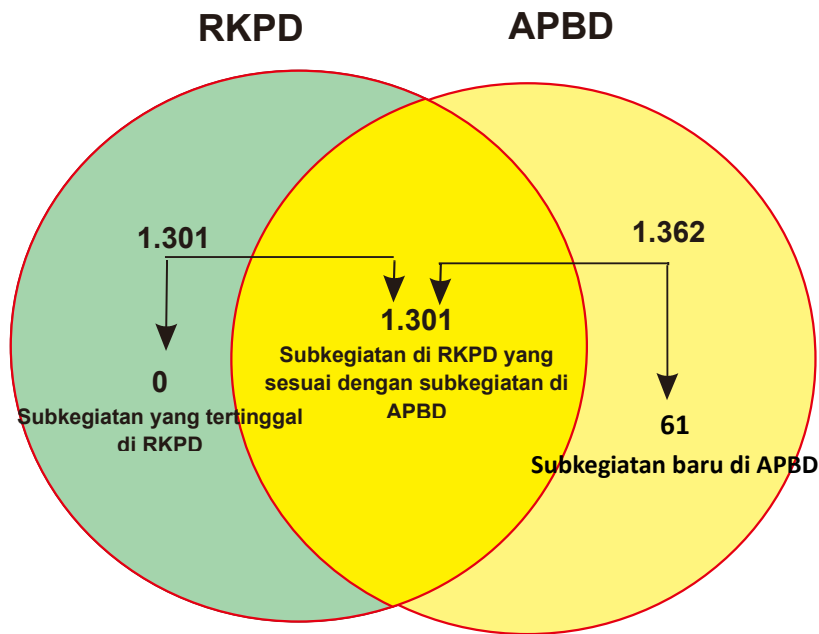
Gambar 2. 2. Diagram Perbandingan Jumlah Kegiatan dalam RKPD Tahun 2026 dengan Jumlah Kegiatan dalam APBD Tahun 2026



Sumber : Diolah Bappeda, 2026

c. Perbandingan Jumlah Subkegiatan dalam RKPD Tahun 2026 dengan Jumlah Subkegiatan dalam APBD Tahun 2026

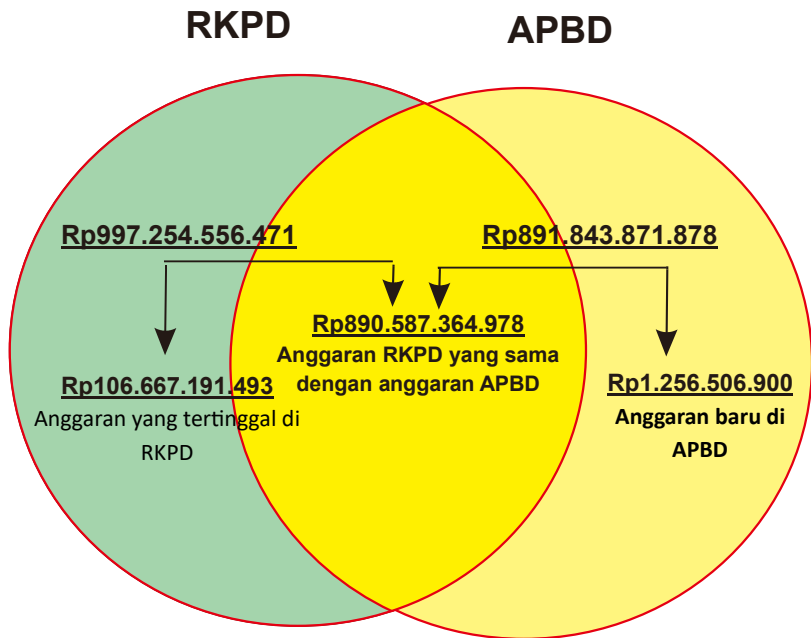
Gambar 2. 3. Diagram Perbandingan Jumlah Subkegiatan dalam RKPD Tahun 2026 dengan Jumlah Subkegiatan dalam APBD Tahun 2026



Sumber : Diolah Bappeda, 2026

d. Perbandingan Jumlah Anggaran dalam RKPD Tahun 2026 dengan Jumlah Anggaran dalam APBD Tahun 2026

Gambar 2. 4. Diagram Perbandingan Jumlah Anggaran dalam RKPD Tahun 2026 dengan Jumlah Anggaran dalam APBD Tahun 2026



Sumber : Diolah Bappeda, 2026

2.3. Isu Strategis Pembangunan pada Perubahan Tahun 2026

Isu strategis pembangunan di Kota Salatiga berdasarkan hasil analisis pada berbagai permasalahan pembangunan serta prioritas pembangunan pada tahun 2026 dirumuskan pada beberapa isu, sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia;
- 2) Peningkatan pengelolaan potensi perekonomian daerah;
- 3) Peningkatan identifikasi dan inventarisasi sumber daya serta masalah lingkungan hidup;
- 4) Peningkatan infrastruktur kewilayahan guna menunjang efektifitas layanan perkotaan;
- 5) Peningkatan kualitas ASN dan Implementasi budaya kerja yang berintegritas dan handal

Tabel 2. 6. Sinkronisasi Permasalahan dan Isu Strategis

No	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis Pembangunan Daerah
1	Optimalisasi penurunan Angka Kematian Balita, Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), Belum optimalnya pencapaian tingkat kesehatan keluarga, Masih adanya kasus gizi buruk dan stunting pada anak	Peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia
2	Masih perlunya peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/Paket	
3	Belum optimalnya peran pemuda dalam mendukung kegiatan ekonomi dan prestasi olahraga	
4	Masih kurangnya dukungan pengembangan dan pelestarian nilai seni dan budaya daerah dan peningkatan pelestarian kota pusaka	
5	Belum optimalnya peningkatan keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif	
6	Belum optimalnya pencapaian perlindungan perempuan dan anak	
7	Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam terutama dalam pengembangan teknologi pertanian dan pengelolaan potensi wisata dalam mendukung perkembangan ekonomi masyarakat	Peningkatan pengelolaan potensi perekonomian daerah
8	belum sepenuhnya menciptakan pemerataan kesejahteraan dengan masih didominasi oleh sektor industri pengolahan dan konsumsi rumah tangga	
9	Keterbatasan investasi dan belum optimalnya pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah	
10	Belum semua masyarakat mendapatkan akses terhadap pemenuhan rumah layak huni	Peningkatan infrastruktur kewilayahan guna menunjang efektifitas layanan perkotaan
11	Belum optimalnya pemenuhan dan pemerataan insfrastruktur daerah dalam menunjang pelayanan	
12	Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	Peningkatan identifikasi dan inventarisasi sumber daya serta masalah lingkungan hidup
13	Daya dukung lahan tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup layak penduduk	
14	Tata Kelola Pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang masih belum optimal	Peningkatan kualitas ASN dan Implementasi budaya kerja yang berintegritas dan handal

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2026, menggambarkan kebijakan perekonomian daerah yang diambil sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indikator makro daerah. Kerangka ekonomi ini memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Selain itu dalam bab ini juga akan membahas kerangka pendanaan daerah agar dapat memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan daerah tahun 2026. Melalui analisis kondisi ekonomi terkini dapat diketahui berapa kapasitas riil keuangan daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir Tahun 2025.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting di dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Guna mengetahui pertumbuhan keuangan daerah diperlukan suatu analisis pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai dasar di dalam penentuan proyeksi penerimaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.

3.1. Kerangka Ekonomi Nasional Tahun 2026

Sepanjang Semester I Tahun 2026, perekonomian global diwarnai oleh meningkatnya ketidakpastian akibat konflik geopolitik di Timur Tengah yang berlangsung sejak akhir Februari 2026, yang menimbulkan gangguan produksi, distribusi, dan rantai pasok perdagangan antarnegara. Pertumbuhan ekonomi dunia Tahun 2026 diperkirakan tetap rendah pada kisaran 3,0 persen, diikuti naiknya tekanan inflasi global ke sekitar 4,4 persen, mendorong sejumlah bank sentral dunia menaikkan suku bunga kebijakannya.

Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) mempertahankan Fed Funds Rate pada level 3,50–3,75 persen dengan potensi kenaikan lanjutan sejalan prospek inflasi AS yang lebih tinggi, sementara imbal hasil US Treasury tetap tinggi (4,49 persen untuk tenor 10 tahun). Tekanan ini,

ditambah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik regional, turut menekan nilai tukar mata uang negara berkembang, termasuk Rupiah, meskipun tensi global sedikit mereda setelah tercapainya kesepakatan sementara (interim deal) Amerika Serikat–Iran pada 14 Juni 2026.

Perekonomian nasional pada Triwulan I Tahun 2026 tumbuh 5,61 persen (yoy), lebih tinggi dari asumsi APBN 2026 sebesar 5,4 persen, ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Pertumbuhan kredit perbankan turut menguat dari 9,98 persen (yoy) pada April 2026 menjadi 11,51 persen (yoy) pada Mei 2026, mengindikasikan aktivitas ekonomi riil yang tetap solid.

Inflasi nasional menunjukkan pola fluktuatif: tercatat 3,48 persen (yoy) pada Maret 2026, turun menjadi 2,42 persen (yoy) pada April 2026 — level terendah dalam delapan bulan — sebelum kembali naik menjadi 3,08 persen (yoy) pada Mei 2026 dengan inflasi bulanan 0,28 persen. Kenaikan inflasi Mei 2026 didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau (cabai merah, minyak goreng, bawang merah) serta komponen harga diatur pemerintah. Meskipun demikian, inflasi tahun kalender (ytd) tetap terjaga pada 1,35 persen dan secara keseluruhan masih berada dalam rentang sasaran Bank Indonesia $2,5 \pm 1$ persen.

Perkembangan paling signifikan pada Semester I 2026 adalah pelemahan tajam nilai tukar Rupiah, yang sempat menyentuh level Rp18.000 per dolar AS pada awal Juni 2026 — jauh melampaui asumsi APBN 2026 sebesar Rp16.500 per dolar AS — akibat penguatan dolar AS, kenaikan harga minyak dunia, dan tingginya tensi geopolitik global. Merespons kondisi tersebut, Bank Indonesia menempuh pengetatan moneter signifikan dengan menaikkan BI-Rate secara kumulatif sebesar 100 basis poin sejak Mei 2026: dari kenaikan 50 bps pada RDG Mei 2026, kenaikan darurat 25 bps pada RDG di luar jadwal 9 Juni 2026, hingga kenaikan 25 bps pada RDG 17–18 Juni 2026 menjadi 5,75 persen — level tertinggi sejak April 2025.

Langkah stabilisasi tersebut membawa hasil awal, dengan Rupiah menguat 0,76 persen (ptp) pada 17 Juni 2026 dibandingkan akhir Mei 2026, didukung intensifikasi intervensi valuta asing, kenaikan suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang mencapai outstanding Rp1.021,1 triliun (dengan kepemilikan nonresiden 23,3 persen), serta insentif penurunan biaya lindung nilai (hedging swap) bagi investor asing. Cadangan devisa tetap kuat pada level USD144,9 miliar (setara 5,6 bulan impor) per akhir Mei 2026.

Surplus neraca perdagangan April 2026 tercatat hanya USD89,1 juta — terendah sejak Mei 2020 — akibat lonjakan impor barang konsumsi dan defisit migas, dengan ekspor USD25,30 miliar dan impor USD25,21 miliar. Bank Indonesia memperkirakan defisit transaksi berjalan sepanjang 2026 tetap terkendali pada kisaran 0,5–1,3 persen PDB.

Tingkat kemiskinan nasional pada September 2025 tercatat 8,25 persen (23,36 juta jiwa), menurun dari 8,47 persen pada Maret 2025, melanjutkan tren perbaikan meski masih berada di atas target RKP 2026 (6,5–7,5 persen), seiring kenaikan garis kemiskinan sebesar 7,76 persen (yoy) menjadi Rp641.443 per kapita per bulan yang mengindikasikan tekanan biaya hidup yang tetap tinggi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional pada Februari 2025 tercatat 4,76 persen, sedikit menurun dari 4,82 persen pada periode sebelumnya.

Perbandingan antara asumsi dasar APBN 2026 dengan indikasi realisasi/kondisi terkini menunjukkan deviasi yang signifikan, khususnya pada nilai tukar Rupiah, yang menjadi salah satu pertimbangan utama perlunya Perubahan RKPD Tahun 2026:

Indikator	Asumsi APBN 2026	Kondisi Terkini (s.d. Juni 2026)
Pertumbuhan Ekonomi	5,4%	5,61% (Triwulan I) — lebih baik dari asumsi
Inflasi (yoy)	2,5%	3,08% (Mei) — sedikit di atas asumsi, masih dalam rentang sasaran BI
Nilai Tukar Rupiah	Rp16.500/US\$	Rp17.700–18.000/US\$ — deviasi signifikan, tertekan
Suku Bunga Acuan (BI-Rate)	mengacu SBN 10th 6,9%	BI-Rate naik kumulatif 100 bps menjadi 5,75%
Neraca Perdagangan	surplus terjaga	surplus menipis tajam (April: USD89,1 juta)

Deviasi nilai tukar Rupiah terhadap asumsi APBN 2026 berpotensi meningkatkan beban biaya barang/jasa impor, bahan baku industri, dan proyek infrastruktur berkomponen impor di tingkat daerah, sekaligus memberi tekanan tambahan pada inflasi domestik melalui jalur imported inflation

3.2. Kerangka Ekonomi Jawa Tengah dan Kota Salatiga Tahun 2026

Perekonomian nasional pada Triwulan I Tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61 persen (year on year/yoy). Provinsi Jawa Tengah mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, yaitu 5,89 persen (yoy) pada Triwulan I 2026, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (4,96 persen) dan melanjutkan tren positif sepanjang tahun 2025 yang tumbuh 5,37 persen (dengan capaian Triwulan IV 2025 sebesar 5,84 persen). Secara nominal, PDRB Jawa Tengah pada Triwulan I 2026 tercatat Rp511,99 triliun atas dasar harga berlaku (ADHB) dan Rp315,73 triliun atas dasar harga konstan (ADHK).

Industri pengolahan masih menjadi kontributor utama PDRB Jawa Tengah dengan porsi 32,69 persen meski pertumbuhannya relatif moderat (4,04 persen), sementara penopang pertumbuhan mulai meluas ke sektor berbasis jasa dan mobilitas. Struktur ini relevan bagi Kota Salatiga mengingat sektor industri pengolahan juga merupakan sektor unggulan utama perekonomian kota.

Investasi

Realisasi investasi di Jawa Tengah pada Triwulan I 2026 mencapai Rp23,02 triliun atau 23,23 persen dari target tahunan sebesar Rp99,09 triliun, terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp12,98 triliun (56,40 persen) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp10,04 triliun (43,60 persen), dengan estimasi penyerapan tenaga kerja sekitar 92.000 orang dari 24.957 proyek. Investasi masih terkonsentrasi pada industri pengolahan (karet dan plastik, mesin dan elektronik, tekstil, dan alas kaki).

Inflasi

Tekanan inflasi sepanjang Semester I 2026 di Jawa Tengah relatif terkendali dan berada dalam rentang sasaran nasional $2,5\pm 1$ persen. Inflasi tahunan (yoy) tercatat 2,83 persen pada Januari 2026 dan naik menjadi 3,54 persen pada Maret 2026. Memasuki April 2026, terjadi deflasi bulanan (mtm) sebesar 0,03 persen pasca Idulfitri dengan inflasi tahunan turun ke 2,11 persen, didorong turunnya harga pangan dan tarif transportasi. Pada Mei 2026 terjadi pembalikan arah dengan inflasi bulanan 0,23 persen, dipicu antara lain penyesuaian harga LPG non-subsidi dan kenaikan harga komponen elektronik.

Indikator kesejahteraan Jawa Tengah pada Triwulan I 2026 menunjukkan perbaikan: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 4,32 persen, tingkat kemiskinan berada di 9,39 persen, dan ketimpangan (Gini Ratio) menurun ke 0,350. Indeks Keyakinan Konsumen Jawa Tengah pada Maret 2026 berada di level optimis 116,3.

Hingga akhir Triwulan I 2026, realisasi pendapatan negara di Jawa Tengah mencapai Rp27,15 triliun (20,73 persen dari target) dan belanja negara Rp25,81 triliun (26,67 persen dari pagu), mencatatkan surplus APBN sebesar Rp1,34 triliun. Sementara itu, pendapatan APBD konsolidasi Jawa Tengah tercatat Rp24,72 triliun (24,27 persen dari target), didominasi pendapatan transfer sebesar Rp18,53 triliun. Kondisi ini mengindikasikan ruang fiskal daerah yang masih terjaga namun tetap perlu diwaspadai mengingat adanya kebijakan efisiensi anggaran dan penyesuaian Transfer ke Daerah dari Pemerintah Pusat.

3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pada saat dokumen ini disusun, BPS Kota Salatiga belum merilis angka resmi pertumbuhan PDRB dan inflasi tingkat kota untuk Semester I Tahun 2026 secara lengkap. Dengan mengacu pada pola historis (inflasi Kota Salatiga secara konsisten berada di bawah rata-rata inflasi nasional dan provinsi) serta tren regional Jawa Tengah pada Triwulan I–II 2026, dapat disusun indikasi arah capaian sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi diindikasikan bergerak pada kisaran target RKPD (5,56–6,56 persen), seiring penguatan pertumbuhan regional Jawa Tengah pada Triwulan I 2026 (5,89 persen, yoy) yang ditopang industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi — tiga sektor unggulan yang juga mendominasi struktur PDRB Kota Salatiga;
2. Tekanan inflasi diperkirakan masih terkendali dalam rentang sasaran nasional $2,5\pm 1$ persen, mengikuti pola deflasi pasca Idulfitri pada April 2026 dan moderasi harga pangan di tingkat regional, meskipun perlu diwaspadai dampak penyesuaian harga LPG non-subsidi dan kenaikan harga komoditas global (emas, komponen elektronik) terhadap Indeks Harga Konsumen lokal;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka diperkirakan melanjutkan tren penurunan dua tahun terakhir, didukung stabilitas industri padat karya (makanan-minuman dan tekstil) serta penetapan UMK 2026 yang diproyeksikan naik moderat 3–5 persen dari UMK 2025;
4. Tingkat kemiskinan diperkirakan bergerak mendekati target (4,30–4,34 persen) dengan tetap menjadi salah satu yang terendah di Jawa Tengah, didukung program perlindungan sosial dan penguatan ketahanan pangan daerah.

Seluruh indikasi pada bagian ini bersifat proyeksi sementara berbasis proksi data regional dan historis kota, dan harus dikonfirmasi/disesuaikan dengan rilis resmi BPS Kota Salatiga (Berita Resmi Statistik PDRB dan Inflasi) begitu tersedia, sebelum ditetapkan sebagai angka final dalam dokumen Perubahan RKPD.

3.3.1. Permasalahan dan Tantangan Ekonomi Tahun 2026

1. Risiko rambatan ketidakpastian global, antara lain ketegangan geopolitik, kebijakan suku bunga The Fed, dan fluktuasi harga komoditas (emas, energi), yang berpotensi memengaruhi daya beli dan iklim investasi daerah;
2. Tekanan harga musiman pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (Idulfitri dan Iduladha 2026) yang memerlukan kesinambungan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID);
3. Keterbatasan ruang fiskal daerah sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran dan penyesuaian Transfer ke Daerah dari Pemerintah Pusat, yang memerlukan penajaman prioritas belanja;
4. Perlunya akselerasi hilirisasi produk pertanian dan penguatan ketahanan pangan berbasis komunitas, sejalan dengan arah kebijakan RKPD Tahun 2026, di tengah tren urbanisasi dan penyusutan lahan pertanian akibat pertumbuhan kawasan komersial di sekitar akses Gerbang Tol Salatiga;
5. Penguatan daya saing UMKM dan jejaring usaha agar mampu menyerap dampak pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa secara lebih inklusif.

3.3.2. Strategi

Mengacu pada tema pembangunan Tahun 2026, yaitu “Peningkatan Pembangunan SDM dan Pengelolaan Potensi Perekonomian Daerah didukung Pemerintahan Berintegrasi dan Infrastruktur Berkualitas”, arah kebijakan ekonomi daerah pada Semester II Tahun 2026 tetap difokuskan pada pengembangan Kota Salatiga sebagai jaringan distribusi pangan lokal untuk peningkatan ketahanan pangan daerah, melalui:

1. Pengembangan ketahanan pangan berbasis komunitas dan urban farming, serta perluasan kerja sama petani–pedagang–konsumen;
2. Peningkatan infrastruktur dan teknologi pertanian guna mengakselerasi hilirisasi produk pertanian;
3. Peningkatan produksi peternakan dan perikanan budidaya lokal;
4. Pemberdayaan dan penguatan kapasitas UMKM untuk mendukung kualitas produk dan jejaring usaha;
5. Penguatan koordinasi pengendalian inflasi daerah (TPID) untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

3.3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah adalah pedoman untuk mengelola seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, hingga pengawasan keuangan untuk mencapai tujuan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Kebijakan ini memastikan pengelolaan dana daerah berjalan baik dan bermanfaat maksimal bagi publik sesuai undang-undang yang berlaku. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disusun setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Secara umum kebijakan keuangan daerah difokuskan pada pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat asas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut:

- a) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
- b) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c) Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
- d) Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e) Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f) APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Secara umum, kebijakan keuangan daerah difokuskan pada pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta didasarkan pada

kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan.

Sumber pendapatan daerah yang merupakan cerminan kemandirian daerah dalam melakukan pembiayaan pembangunan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Derajat kemandirian fiskal menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu untuk mendanai kegiatan pembangunan daerah. Proporsi target Pendapatan Asli Daerah terhadap total target Pendapatan Daerah Kota Salatiga menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kota Salatiga dalam penyelenggaraan otonomi daerah masih belum dapat berjalan optimal dilihat dari sisi pendapatan asli daerah. Oleh karena itu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah daerah yang dipisahkan harus terus digali potensinya, tanpa harus memberatkan dunia usaha, dengan berbagai regulasi dan kebijakan daerah. Peningkatan penerimaan pajak mengacu pada Perda Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi pendapatan daerah untuk pembangunan Kota Salatiga sangat bergantung pada sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Salatiga dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD.

3.4. Pertimbangan dalam Melakukan Perubahan

Dinamika yang terjadi dalam kurun waktu triwulan satu tahun 2026 serta adanya hasil evaluasi terhadap capaian RKPD Triwulan I Tahun 2026 menjadi pertimbangan dalam melakukan perubahan RKPD dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya perkembangan pada kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan APBD Tahun 2026 dengan memperhatikan penyesuaian turunnya Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, sehingga proyeksi pendapatan dan belanja daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b. Keadaan Prognosis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp123.313.206.289,00 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dapat digunakan untuk tahun berjalan;
- c. Adanya pergeseran pagu antar OPD; penambahan alokasi anggaran; penambahan, pengurangan dan/atau penyesuaian target dan pagu serta penambahan lokasi dan kelompok sasaran pelaksanaan kegiatan.

3.5. Kerangka Pendanaan Keuangan

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Salatiga tahun 2026 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2030. Kerangka Pendanaan Keuangan pada Perubahan RKPD 2025 sebagaimana terlihat dalam tabel 3.1 berikut:

Tabel 3. 1. Kerangka Pendanaan Keuangan pada Perubahan RKPD 2026

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH	865.843.871.878	878.645.500.728	12.801.628.850
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	324.861.630.878	337.196.018.728	12.334.387.850
04.01.01	Pajak Daerah	111.820.000.000	120.935.122.000	9.115.122.000
04.01.02	Retribusi Daerah	179.031.738.900	181.603.303.544	2.571.564.644
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.866.077.000	23.119.242.000	-1.746.835.000
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	9.143.814.978	11.538.351.184	2.394.536.206
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	540.982.241.000	541.449.482.000	467.241.000
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	494.778.301.000	494.944.568.000	166.267.000
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	46.203.940.000	46.504.914.000	300.974.000
5	BELANJA	891.843.871.878	981.805.264.481	89.961.392.603
05.01	BELANJA OPERASI	829.050.675.911	898.790.388.177	69.739.712.266
05.01.01	Belanja Pegawai	435.040.445.465	458.262.350.436	23.221.904.971
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	365.333.242.230	411.469.617.525	46.136.375.295
05.01.03	Bunga	0	0	0
05.01.04	Belanja Subsidi	150.000.000	175.000.000	25.000.000
05.01.05	Belanja Hibah	28.272.488.216	28.706.870.216	434.382.000
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	254.500.000	176.550.000	-77.950.000
05.02	BELANJA MODAL	59.993.195.967	80.214.876.304	20.221.680.337
05.02.01	Belanja Modal Tanah	25.606.000.305	25.606.000.305	0
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.235.352.140	34.441.594.433	19.206.242.293
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.719.905.422	4.704.585.042	984.679.620
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	13.183.057.500	13.064.598.500	-118.459.000

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.687.888.300	1.822.507.924	134.619.624
05.02.05	Belanja Aset Lainnya	560.992.300	575.590.100	14.597.800
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.800.000.000	2.800.000.000	0
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	2.800.000.000	2.800.000.000	0
	Total Surplus/(Defisit)	-26.000.000.000	-103.159.763.753	-77.159.763.753
6	PEMBIAYAAN			
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	26.000.000.000	123.313.206.289	97.313.206.289
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	26.000.000.000	123.313.206.289	97.313.206.289
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	26.000.000.000	123.313.206.289	97.313.206.289
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	23.000.000.000	23.000.000.000
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	0	23.000.000.000	23.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	23.000.000.000	23.000.000.000
	Pembiayaan Netto	26.000.000.000	100.313.206.289	74.313.206.289
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	-2.846.557.464	-2.846.557.464
	TOTAL APBD	891.843.871.878	1.001.958.707.017	110.114.835.139

3.5.1. Kerangka Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena besaran pendapatan akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Realisasi pendapatan terhadap target selama 3 tahun terakhir tercatat mengalami fluktuasi. Capaian realisasi tahun 2025 sebesar 101,55% dengan nilai realisasi Rp1.056.413.528.549.00, sedangkan realisasi pendapatan pada Triwulan II tahun 2026 adalah sebesar Rp449.643.787.457,00 atau sebesar 51,93% dengan capaian 103,86% dari target 50% pada Triwulan II tahun 2026.

Pada perubahan tahun 2026, target pendapatan diproyeksikan naik sebesar Rp11.047.945.428,00, seiring dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan hasil sinkronisasi pendapatan transfer daerah. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan naik Rp12.334.387.850,00 dan Pendapatan Transfer diproyeksikan naik sebesar Rp467.241.000,00, sebagaimana terlihat dalam tabel 3.2 berikut:

Tabel 3. 2. Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2026

NO	JENIS PENDAPATAN	APBD 2025	REALISASI 2025 (Un Audited)	%	TARGET APBD 2026	Realisasi APBD 2026 s.d TW II	%	Proyeksi Perubahan RKPD 2026	Bertambah/ (Berkurang)
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	333.657.921.500	349.238.343.626	104,67	324.861.630.878	160.847.248.016	49,51	337.196.018.728	12.334.387.850
1	Pendapatan Pajak Daerah	114.000.000.000	124.494.504.885	109,21	111.820.000.000	62.423.748.182	55,83	120.629.000.000	8.809.000.000
2	Pendapatan Retribusi Daerah	181.688.836.367	181.834.960.570	100,08	179.031.738.900	79.602.023.210	44,46	181.839.724.816	2.807.985.916
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	23.891.948.700	27.320.556.073	114,35	24.866.077.000	15.677.922.022	63,05	23.119.242.000	-1.746.835.000
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	14.077.136.433	15.588.322.098	110,74	9.143.814.978	3.143.554.602	34,38	11.608.051.912	2.464.236.934
II	PENDAPATAN TRANSFER	704.804.248.000	705.334.018.585	100,08	540.982.241.000	288.796.494.176	53,38	541.449.482.000	467.241.000
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	645.991.430.000	651.030.414.525	100,78	494.778.301.000	272.481.245.235	55,07	494.944.568.000	166.267.000
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	58.812.818.000	54.303.604.060	92,33	46.203.940.000	16.315.248.941	35,31	46.504.914.000	300.974.000
V	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	1.841.166.000	1.841.166.338	100,00	0	45.265	0,00	0	0
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan	0	0	0,00	0	45.265	0,00	0	0
1	Pendapatan Hibah	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
2	Pendapatan Dana Darurat	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
3	Pendapatan Lainnya	1.841.166.000	1.841.166.338	100,00	0	0	0,00	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.040.303.335.500	1.056.413.528.549	101,55	865.843.871.878	449.643.787.457	51,93	878.645.500.728	12.801.628.850

3.5.2. Kerangka Belanja Daerah

Anggaran belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2026 ditargetkan sebesar Rp 891.843.871.878,00. Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 belanja diproyeksikan naik sebesar Rp981.805.264.481,00.

Proyeksi kenaikan belanja pada rekening Belanja Operasi sebesar Rp55.660.219.560,00 dengan rincian:

- a) Belanja pegawai naik Rp23.221.904.971,00 sebagai pemenuhan kebutuhan Gaji dan TPP yang baru di anggarkan 10 bulan pada penetapan Tahun 2026;
- b) Belanja Barang dan Jasa naik sebesar Rp46.136.375.295,00 sebagai pemenuhan kebutuhan rutin termasuk pemenuhan honor ke-13 dan THR untuk THL, Honor PPPK Paruh Waktu, Insentif Guru, LPJU, dan Outsourcing;
- c) Belanja Subsidi naik Rp25.000.000,00;
- d) Belanja Hibah naik sebesar Rp434.382.000,00;
- e) Belanja Bantuan Sosial turun sebesar Rp77.950.000,00 terdiri dari Bantuan Sosial ke beberapa Sekolah oleh Dinas Pendidikan serta Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada individu oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- f) Belanja Tidak Terduga (BTT) tetap pada Anggaran Penetapan Tahun 2025, yaitu sebesar Rp2.800.000.000,00;

Belanja Modal yang mengalami kenaikan sebesar Rp20.221.680.337,00 terdiri dari :

- a) Belanja Modal Tanah diproyeksikan tetap yaitu sebesar Rp25.606.000.305,00
- b) Belanja modal peralatan dan mesin mengalami kenaikan sebesar Rp19.206.242.293,00 untuk pemenuhan kebutuhan Mesin Pemusnah Incinerator sebagai upaya pengelolaan sampah di TPA pada Dinas Lingkungan Hidup dan pemenuhan peralatan dan mesin perangkat daerah dengan melakukan pergeseran anggaran belanja barang dan jasa;
- c) Belanja modal gedung dan bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp984.679.620,00 sebagai upaya untuk memenuhi belanja rehabilitasi kantor pemerintahan pada tahun 2026;
- d) Belanja jalan, irigasi dan jaringan mengalami penurunan sebesar Rp118.459.000,00 sebagai tindak lanjut pelaksanaan efisiensi belanja daerah;
- e) Belanja modal aset tetap lainnya naik sebesar Rp134.619.624,00 sebagai upaya pemenuhan aset tetap lainnya berupa buku-buku dan bahan ajar sekolah baik pendidikan dasar maupun menengah yang harus dipenuhi pada tahun 2026; dan
- f) Belanja modal aset lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp14.597.800,00 sebagai upaya untuk pemenuhan pengadaan lisensi dan franchise untuk yang harus dipenuhi pada tahun 2026.

Penggunaan alokasi belanja di fokuskan pada Prioritas Pembangunan Daerah, kebijakan ekonomi nasional untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, swasembada pangan, energi, dan air serta peningkatan pendidikan dan kesehatan. Selain itu

kebijakan belanja juga mendukung kebijakan Transfer ke Daerah yang diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di daerah, berfokus pada: (1) penguatan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui optimalisasi penggunaan TKD; (2) penguatan daya saing daerah melalui belanja produktif, sinergi dengan pembiayaan inovatif, dan penguatan *local taxing power* (3) peningkatan efektivitas peran TKD agar sejalan dengan Prioritas Nasional; serta (4) penyeimbangan kebijakan fiskal pusat dan daerah untuk mewujudkan konvergensi antardaerah.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Salatiga merencanakan belanja untuk pelaksanaan program-program yang berdampak pada akselerasi pertumbuhan ekonomi dan mendukung ketahanan pangan daerah. Pembangunan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia terus dilanjutkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas infrastruktur daerah, termasuk konektivitas antar wilayah, peningkatan produktivitas SDM, melalui sektor pendidikan, pelatihan dan kesehatan, untuk pelaksanaan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, Kota Salatiga juga tetap mengacu pada belanja untuk merealisasikan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dengan tetap memperhatikan dinamika, potensi dan kondisi serta permasalahan yang timbul di daerah. Selain itu, proporsi belanja wajib, mengikat, *mandatory* dan prioritas lainnya dalam dokumen Perubahan RKPD khususnya urusan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Belanja Pegawai, dan Peningkatan Kapasitas SDM, serta alokasi *mandatory DAU Special Grant*.

Alokasi belanja daerah RKPD Tahun 2026 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah yang dilaksanakan secara proporsional, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Arah kebijakan pengelolaan belanja daerah tahun 2026 diarahkan pada prioritas sebagai berikut :

- 1) Pemenuhan belanja yang bersifat *mandatory spending* antara lain : pendidikan (20%), kesehatan (10%), infrastruktur pelayanan publik (40%), dana kelurahan (5%), Pengawasan (1%);
- 2) Pemenuhan belanja pegawai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maksimal 30% pada tahun 2027 melalui penguatan kinerja pegawai dengan memaksimalkan potensi SDM pegawai sesuai dengan analisa jabatan dan analisa beban kerja. Selain itu akan dilakukan peninjauan kembali besaran tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan kinerja yang dicapai;
- 3) Pemenuhan belanja untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, yang terdiri dari 6 urusan yaitu Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- 4) Pemenuhan program prioritas Wali Kota yang tertuang dalam penjabaran visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029;

- 5) Penyelesaian permasalahan dan isu strategis daerah;
- 6) Dukungan terhadap prioritas nasional dan arahan presiden, yaitu terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, makan bergizi gratis dan pengendalian inflasi.

Kebijakan belanja daerah juga perlu dimaksimalkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang difokuskan pada program dan kegiatan yang didanai dari penerimaan daerah. Kebijakan belanja daerah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

a) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Mendorong peningkatan Belanja Daerah yang Produktif, Efektif dan Efisien. Memprioritaskan belanja daerah untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki daya ungkit tinggi dalam pencapaian indikator pembangunan daerah. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b) Prioritas

Penggunaan anggaran tahun 2026 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang menjadi isu strategis pada tahun 2023. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat mengacu Standar Pelayanan Minimal, mengalokasikan belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat dan memenuhi alokasi minimal mandatory spending yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan diantaranya fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan serta memenuhi alokasi minimal untuk belanja infrastruktur daerah. Peningkatan belanja produktif melalui Penguatan TKD, Penguatan Local Taxing Power dan Inovative Financing.

Belanja Daerah 2026 juga memprioritaskan untuk menindaklanjuti INPRES Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

c) Tolok Ukur dan target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sehingga alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur

d) Optimalisasi Belanja Modal

Belanja modal diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja modal disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.

e) Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak

mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggung jawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya. Pelaksanaan tertib administrasi pencatatan keuangan yang diatur dalam kebijakan akuntansi untuk memperoleh laporan keuangan yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabel serta sesuai dengan SAP.

f) Kesesuaian Kegiatan dengan Sumber Pembiayaan

Alokasi anggaran belanja untuk kegiatan-kegiatan yang sudah jelas sumber pembiayaannya seperti dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT), Dana Insentif Fiskal dan Dana Hibah harus sudah seimbang dengan target penerimaannya dan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana tersebut.

g) Kesesuaian dengan Peraturan perundang-undangan

Mengimplementasikan ketentuan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Dalam mekanisme implementasi belanja daerah memanfaatkan sistem informasi dalam mengimplementasikannya sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja dan /atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Peningkatan sinergitas kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah

Dengan memperhatikan prioritas program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian target-target kinerja dalam perencanaan, realisasi belanja daerah tahun 2025 dan Triwulan II tahun 2026, dan target belanja daerah tahun 2026, maka dan proyeksi perubahan belanja tahun 2026 adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 3. 3. Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2026

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	APBD 2026	Realisasi APBD 2026 TW II	%	Proyeksi Perubahan RKPD 2026	Bertambah/ (Berkurang)
5	BELANJA DAN TRANSFER	1.134.849.392.788	1.027.646.379.548	90,55	891.843.871.878	412.344.799.461	46,24	981.805.264.481	89.961.392.603
5.1	BELANJA OPERASI	1.001.171.576.349	914.179.929.481	91,31	829.050.675.911	405.829.680.034	48,95	898.790.388.177	69.739.712.266
	Belanja Pegawai	468.476.794.553	436.075.782.480	93,08	435.040.445.465	239.777.606.920	55,12	458.262.350.436	23.221.904.971
	Belanja Barang dan Jasa	505.351.816.580	451.061.630.446	89,26	365.333.242.230	146.173.994.898	40,01	411.469.617.525	46.136.375.295
	Belanja Bunga	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
	Belanja Subsidi	165.000.000	147.815.000	89,58	150.000.000	77.890.000	51,93	175.000.000	25.000.000
	Belanja Hibah	26.748.915.216	26.618.601.555	99,51	28.272.488.216	19.800.188.216	70,03	28.706.870.216	434.382.000
	Belanja Bantuan Sosial	429.050.000	276.100.000	64,35	254.500.000	0	0,00	176.550.000	-77.950.000
5.2	BELANJA MODAL	132.677.816.439	113.178.360.067	85,30	59.993.195.967	6.350.118.287	10,58	80.214.876.304	20.221.680.337
	Belanja Tanah	1.664.899.115	1.299.823.380	78,07	25.606.000.305	2.765.225.400	10,80	25.606.000.305	0
	Belanja Peralatan dan Mesin	44.806.937.280	30.920.426.680	69,01	15.235.352.140	3.339.619.387	21,92	34.441.594.433	19.206.242.293
	Belanja Gedung dan Bangunan	38.480.934.733	36.146.271.182	93,93	3.719.905.422	0	0,00	4.704.585.042	984.679.620
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	44.960.880.888	42.392.857.840	94,29	13.183.057.500	22.000.000	0,17	13.064.598.500	-118.459.000
	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.674.762.071	2.361.563.299	88,29	1.687.888.300	223.043.500	13,21	1.822.507.924	134.619.624
	Belanja Aset Lainnya	89.402.352	57.417.686	64,22	560.992.300	230.000	0,04	575.590.100	14.597.800
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000	288.090.000	28,81	2.800.000.000	165.001.140	5,89	2.800.000.000	0
	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	288.090.000	28,81	2.800.000.000	165.001.140	5,89	2.800.000.000	0
5.4	TRANSFER	0	0	0	0	0	0	0	0
	Transfer / Bantuan Keuangan Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0

Komposisi dan persentase alokasi anggaran yang bersifat *Mandatory Spending*, seperti Pendidikan (20%), Kesehatan (10%), Infrastruktur (40%), Belanja Pegawai termasuk didalamnya P3K disesuaikan dengan peraturan yang berlaku termasuk pendanaan kelurahan (baik proporsi belanja daerah maupun alokasi yang bersumber dari DAU *Special Grant*). Adapun perkembangan proyeksi alokasi belanja mandatory tahun 2026 sebagaimana berikut di bawah ini

Tabel 3. 4. *Proyeksi Belanja Mandatory, Pegawai dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2026*

No	Jenis Belanja	Proporsi	Proporsi 2026	
			APBD	PRKPD
1	Belanja Mandatory			
	a. Pendidikan	Min 20%	22,21%	21,14%
	b. Infrastruktur	Min 40%	40,35%	37,27%
	c. Kesehatan	Min 10% di luar gaji	20,83%	23,23%
	d. Pengawasan	Min 0,75%	0,91%	0,85%
	e. Peningkatan Kompetensi ASN	Min 0,16%	0,27%	0,25%
2	Belanja Pegawai	Maks 30%	48,78%	42,40%
3	Belanja Peningkatan Kapasitas Pegawai	PMDN 15/2024 min. 0,16%	0,30%	0,25%
4	DAU Spesifik Grant	24.463.798.000	24.463.798.000	24.463.798.000
	a. Bidang Pendidikan	17.772.974.000	17.772.974.000	17.772.974.000
	b. PPPK	2.090.824.000	2.090.824.000	2.090.824.000
	c. Dana Kelurahan	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000
5	Belanja Daerah		891.843.871.878	1.102.999.341.572

3.5.3. Kerangka Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, yang pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Kota Salatiga pada perubahan tahun 20265 berasal dari pemanfaatan SILPA hasil audit BPK atas elaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan Penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan penerimaan yang bersumber dari :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman daerah;
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan/atau;

f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Sementara itu, kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pengeluaran untuk pembiayaan :

- a. pembayaran cicilan pokok piutang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal daerah;
- c. pembentukan dana cadangan;
- d. pemberian pinjaman daerah;
- e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran. Kebijakan defisit masih menggunakan kebijakan pemberian ruang pengalokasian program dan kegiatan yang diusulkan oleh Masyarakat melalui Musrenbang dan Anggota Dewan melalui Pokir yang sudah disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan tahun 2026. Selanjutnya pengalokasian anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam KUA PPAS serta analisis kemampuan fiskal oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Untuk SILPA pada Struktur APBD dibuat sama dengan Defisit Belanja.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Penerimaan Pembiayaan Daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Adapun Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di Kota Salatiga adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Salatiga dilakukan sesuai regulasi dan memperhitungkan secara cermat dan rasional dan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan. Perluasan akses terhadap alternatif pembiayaan untuk akselerasi pembangunan, memulai memanfaatkan alternatif pembiayaan seperti Pinjaman Daerah, KPBU, Sukuk Daerah.

Pembiayaan Netto tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp26.000.000.000,00, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 pembiayaan netto diproyeksikan Rp100.313.206.289,00 Nilai tersebut memperhitungkan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 yang bisa dijabarkan dari total SILPA Rp123.313.206.289,00.

Adapun rincian SiLPA Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1) Kas di Kas Umum Daerah	Rp90.146.498.210,00
2) Kas di BLUD RSUD	Rp30.639.828.232,00
3) Kas di BLUD Puskesmas dan KPM	Rp1.450.422.148,00
4) Kas Dana BOK Puskesmas	Rp1.028.192.586,00
5) Kas di Bendahara BOS (Dinas Pendidikan)	Rp42.384.492,00
6) Kas di Bendahara Penerimaan	Rp5.880.621,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tersebut digunakan untuk menutup proyeksi defisit anggaran tahun berkenaan dan belanja serta tambahan kebutuhan belanja pada tahun 2026. Penggunaan tersebut memperhatikan alokasi yang bersifat “terikat” (harus dianggarkan kembali) dan alokasi yang bersifat “bebas” (bisa dialokasikan sesuai prioritas daerah), dalam rangka pemenuhan kebutuhan prioritas daerah pada kebijakan Perubahan RKPD Tahun 2026

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kota Salatiga diarahkan untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan modal daerah. Penyertaan modal kepada BUMD (Perusda) dilakukan secara bertahap. Penyertaan modal diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Kebijakan penyertaan modal di Kota Salatiga didasarkan pada analisis investasi dan kemampuan keuangan daerah sehingga dana publik yang diinvestasikan tidak memiliki risiko tinggi. Selain itu penyertaan modal perlu sejalan dengan rencana bisnis dan rencana pembangunan pemerintah daerah sehingga sinkron dengan concern pemerintah pusat untuk mendorong peran strategis BUMD dalam transformasi ekonomi sebagai value creator maupun agent development.

Pada perubahan tahun 2026, pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal daerah untuk pengoptimalan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp3.000.000.000,00 dan penggunaan Dana BLUD untuk investasi sebesar Rp20.000.000.000,00 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Investasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.

Perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkan pada realisasi dan pencapaian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, sehingga perkiraan/proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk perubahan RKPD tahun 2026 adalah sebagaimana terinci pada tabel berikut.

Tabel 3. 5. Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2026

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	APBD 2026	Realisasi APBD 2026 TW II	Proyeksi Perubahan RKPD 2026	Bertambah/ (Berkurang)
Surplus/Defisit pendapatan dan belanja	-94.546.057.288	28.767.149.001	-26.000.000.000	37.298.987.996	-103.159.763.753	-77.159.763.753
PEMBIAYAAN NETTO	94.546.057.288	94.546.057.288	26.000.000.000	26.888.840.256	100.313.206.289	74.313.206.289
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	94.546.057.288	94.546.057.288	26.000.000.000	26.888.840.256	123.313.206.289	97.313.206.289
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	94.546.057.288	94.546.057.288	26.000.000.000	26.888.840.256	123.313.206.289	97.313.206.289
Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0	0
Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0
Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0	0	23.000.000.000	23.000.000.000
Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0	0	0	23.000.000.000	23.000.000.000
Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0	0
Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan	0	123.313.206.289	0	64.187.828.252	-2.846.557.464	-2.846.557.464

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tahun 2026 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025-2029, sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dan program strategis nasional yang ditetapkan serta program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Nasional dan Provinsi tahun bersangkutan. Selain itu, berdasarkan Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, untuk mewujudkan keselarasan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan di Kota Salatiga, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 harus memperhatikan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029.

4.1.1. Visi Pembangunan Daerah

Visi menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Adapun visi pembangunan daerah adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam periode masa jabatannya. Visi pembangunan daerah Kota Salatiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Salatiga tahun 2025-2029 serta menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 yaitu: **“Terwujudnya Kota Salatiga Sebagai Kota **BEDA: Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif** menuju Salatiga yang Mendunia”**

Makna dari visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Bergerak

Kata "Bergerak" dalam rumusan visi pembangunan Kota Salatiga bermakna bahwa pembangunan Kota Salatiga bertujuan untuk mewujudkan transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif, mewujudkan kota yang produktif, sejahtera, harmonis dan berkemajuan, bergeraknya pembangunan Kota Salatiga secara adil dan merata

2. Energik

"Energik" dalam rumusan visi pembangunan Kota Salatiga bermakna Kota Salatiga dapat mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dalam menggerakkan kemajuan daerah, meningkatkan kesejahteraan, karakter kerja, dan mewujudkan indeks pembangunan manusia yang tinggi, seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada paradigma pembangunan yang inklusif - adil dan merata dengan optimalisasi sektor

potensi perdagangan dan jasa, serta didukung sektor strategis ekonomi kreatif, koperasi, Usaha Mikro dan pariwisata.

3. Dinamis

"Dinamis" dalam rumusan visi pembangunan Kota Salatiga bermakna untuk mewujudkan keberadaan pemerintah kota yang mampu mengurus dan memecahkan setiap masalah yang timbul, dengan mengoptimalkan segala sumber daya pemerintahan yang dimiliki, dengan trus aktif mendayagunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk memaksimalkan pelayanan publik serta berjalannya prinsip kolaborasi pemerintahan Pentahelix (pemerintah, masyarakat, akademisi, swasta dan media), dalam mewujudkan pemerintahan kota yang partisipatif, akuntabel, transparan dan berkelanjutan.

4. Adaptif

"Adaptif" dalam rumusan visi pembangunan Kota Salatiga bermakna untuk mewujudkan Pemerintah dan masyarakat Kota Salatiga yang selalu mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang berbeda, khususnya di tengah arus perubahan sosial, lingkungan dan distrupsi teknologi. Kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan upaya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan yang didukung dengan masyarakat yang adaptif dan inovatif.

Perwujudan Kapasitas inovasi yang tinggi sebagai upaya memperkuat daya saing Kota Salatiga dalam interaksi sosial dan ekonomi di Tingkat nasional bahkan internasional Lingkungan hidup Kota Salatiga harus dibangun untuk mampu menjadi lahan bertumbuhnya insan-insan berkualitas, agile terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karakteristik adaptif karenanya juga ditanamkan khususnya pada pemuda, utamanya Generasi Z dan generasi millenial agar dapat mengembangkan diri serta berkontribusi optimal dalam pembangunan daerah secara produktif dan berkelanjutan

5. Salatiga yang Mendunia

Salatiga Kota "mendunia" berarti dikenal luas di seluruh dunia, atau menjadi salah satu kota yang berperan dalam interaksi hubungan internasional. Salatiga kota "mendunia" juga bisa merujuk pada sikap mental, perilaku, dan cara pandang pemerintah dan warga Kota Salatiga yang mencerminkan semakin luasnya pergaulan dan persaingan dunia. Pada saat yang sama, Kota Salatiga juga memiliki strategi pembangunan dan pemerintahan yang selaras dengan kondisi globalisasi di mana jarak ruang dan batas waktu antara satu komunitas dengan komunitas dunia lainnya juga semakin tidak terbatas (*borderless*).

4.1.2. Misi Pembangun Daerah

Dalam rangka menuju pencapaian Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029, ditetapkan melalui 5 (lima) misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing melalui peningkatan Pendidikan, keterampilan dan kesehatan.

Fondasi pembangunan Kota Salatiga adalah sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi dengan didukung pemenuhan aksesibilitas sarana pendidikan dan kesehatan yang

berkualitas, berstandar internasional. Idealitas tersebut didukung dengan pembentukan profil Kota Salatiga sebagai pusat keunggulan pelayanan pendidikan dan Kesehatan. Kota yang mampu menyediakan ekosistem bagi warganya untuk mengaktualisasikan pengetahuan, keterampilan, dan keahliannya untuk mencapai kualitas hidup yang dicita-citakan.

2. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis sektor unggulan daerah melalui kolaborasi investasi daerah dan permodalan UMKM.

Bonus demografi yang telah terjadi di Kota Salatiga menjadi peluang dan tantangan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun demikian, inklusivitas laju pertumbuhan ekonomi akan dijaga melalui titik berat kebijakan ekonomi daerah yang lebih memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Diharapkan melalui kolaborasi bersama investasi sektor swasta dan perluasan akses layanan permodalan UMKM akan menurunkan angka pengangguran dan angka penduduk miskin.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap pelayanan publik yang berkualitas melalui peningkatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya aparatur.

Upaya mendorong pemerataan pelayanan publik yang berkualitas memerlukan kompetensi Sumber Daya Aparatur (*supply side*) dan adopsi atau pemanfaatan teknologi informasi. Seiring itu, Upaya peningkatan partisipasi masyarakat Kota Salatiga (*demand side*) dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dapat ditempuh melalui keterbukaan informasi pemerintah yang lebih besar ke data dan dokumen pemerintah. Sinergi kedua sisi (*side*) pelayanan publik tersebut diharapkan memperkuat akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah daerah, koordinasi antar sektor/instansi dalam meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

4. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berorientasi pemanfaatan tata ruang yang inklusif dan berkualitas melalui peningkatan kesadaran Masyarakat, pemanfaatan teknologi dan penegakan hukum.

Upaya mewujudkan profil Kota Salatiga sebagai Kota inklusif, kota yang mampu yang menjamin hak — hak warganya secara setara, khususnya dalam dimensi ketersediaan layanan publik yang nyaman untuk semua. Hal ini memerlukan kualitas tata ruang lingkungan kota sesuai RTRW yang telah disepakati bersama, pengelolaan persampahan, akses air bersih dan sanitasi rumah tangga merata.

5. Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui pemerataan dan peningkatan kualitas.

Pembangunan infrastruktur pelayanan publik dasar di Kota Salatiga diarahkan untuk meningkatkan akses rumah tangga pada kawasan hunian yang sehat, air bersih dan akses sanitasi. Sekaligus dalam misi ke 5 ini adalah kebijakan revitalisasi sarana-sarana publik, termasuk rehabilitasi jalan lingkungan kelurahan dan jalan antar kecamatan untuk mobilisasi orang dan barang.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kota Salatiga untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kota Salatiga. Penyusunan rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Salatiga Tahun 2026 dilaksanakan dengan mengacu dan memperhatikan : (1) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029; (2) Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga yang tertuang pada dokumen RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029; (3) RTRW Kota Salatiga Tahun 2023-2043; (4) Sasaran Pokok RPJPD 2025-2045 Tahap ke-1 (5) Hasil evaluasi kinerja RKPD triwulan I tahun berkenaan; dan (6) Prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Jawa Tengah guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga tingkat daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun pertama dari RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029. Target tahun pertama dalam RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 diupayakan akan tercapai melalui penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 yang diarahkan pada tahap **“Peningkatan Pembangunan SDM dan pengelolaan potensi perekonomian daerah didukung pemerintahan berintegritas dan infrastruktur berkualitas”**. Tahun 2026 ini difokuskan pada **“Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan yang didukung oleh infrastruktur berkualitas yang mempermudah akses pasar”**.

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Salatiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 diukur melalui indikator kinerja yang ditetapkan dengan target yang akan dicapai per satu tahun periode perencanaan. Adapun target capaian indikator tujuan dan sasaran untuk tahun 2026 dan perubahan pada RKPD 2026 adalah sebagaimana tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Salatiga beserta target pada Perubahan RKPD Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Realisasi tahun 2025	Target Kinerja 2026		Urusan
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
Mewujudkan Kota Salatiga yang Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga Mendunia		Angka Kemiskinan	Persen	4,2	4,34 - 4,20	4,20 - 3,87	
		PDRB Perkapita	Juta Rp	95,23	103,48 - 108,48	103,48 - 108,48	
		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	81	82,15	82,15	
		Penurunan emisi GRK kumulatif	TonCO2eq	19.134,02	183.298,80	183.298,80	
		Indeks Daya saing Daerah	Angka	4,08	4,84	4,84	
	Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	86,23	86,43	86,43	Pendidikan, Kesehatan, Perpustakaan, Kebudayaan
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,67	3,84 – 3,54	3,84 – 3,54	Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tenaga Kerja
	Terwujudnya transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,98	5,56 – 6,56	5,56 – 6,56	Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Investasi, Perdagangan, Pariwisata
		Indeks Ketahanan Pangan Daerah (IKP)	Nilai	79,33	81,04	81,04	Pangan, Pertanian, Sosial
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Digital	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,42	4,68	4,68	Sekretariat Daerah, Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat, Kesbangpol, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Indeks Integritas Nasional	Nilai	77,95	80,06	80,06	Inspektorat, Kepegawaian, Keuangan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Realisasi tahun 2025	Target Kinerja 2026		Urusan
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	4,11	3,75	4,15	Statistik, Persandian, Komunikasi dan Informatika, Perencanaan, Kearsipan
		Indeks Pemerintahan Digital	Nilai	Tidak ada data	1,1	1,1	
	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik	Nilai	94,32	64,7	95,66	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan
		Indeks kualitas lingkungan Hidup	Nilai	68,7	69,98	69,98	Lingkungan Hidup, Trantibunlinmas, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Indeks Inovasi Daerah	Nilai	48,88	52	52	Penelitian dan Pengembangan

Sementara itu, ukuran tentang keberhasilan pencapaian arah kebijakan pembangunan pemerintah Kota Salatiga dapat diukur secara kuantitatif dari Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah dari setiap aspek dan lokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang ada di Kota Salatiga. Lebih lanjut, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan indikator program prioritas pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kota Salatiga. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 beserta perubahannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 2. Target Indikator Kinerja Utama Kota Salatiga Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Kinerja 2026		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (tahun 2030)
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	86,23	86,43	86,43	87,67
2.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,98	5,56-6,56	5,56-6,56	7,80-8,30
3.	PDRB Perkapita	Juta RP	95,23	103,48-108,48	103,48-108,48	143,28-145,28
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,67	3,84-3,54	3,84-3,54	3,76-3,37
5.	Tingkat Kemiskinan	%	4,2	4,34-4,20	4,20 - 3,87	3,44-2,54
6.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	81	82,15	82,15	84
7.	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCo2EQ	19.134,02	183.298,80	183.298,80	631.314
8.	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	4,08	4,84	4,84	6

Tabel 4. 3. Target Indikator Kinerja Daerah Kota Salatiga Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (tahun 2030)	Perangkat Daerah
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
I	INDIKATOR KINERJA DAERAH						
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI						
1	Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik	%	94,32	64,7	95,66	70,29	DPUPR
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	68,7	69,98	69,98	70,16	DLH
3	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	79,33	81,04	81,04	94,85	Dispangtan
4	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	12,07	19,4	19,40	36,9	DPUPR
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	26,3	28,63	28,63	31,75	DLH
6	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	4,67	3,9	3,90	2,34	Dispangtan
7	Kepadatan Penduduk	Orang/km2	3.626	4.063	4.063	4.863	Disdukcapil
8	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,52	0,6	0,55	0,78	BPBD
9	Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	Tidak ada data	43,7	43,70	56,1	DPUPR
10	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,13	1,2	1,2	1,1	DPA3P2KB
11	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/kapita	345.960.615,97	262.271.447	364.319.617	367.849.272	Setda
12	Indeks Risiko Bencana	Angka	98,79	73,71-72,69	98,44	70,52-68,20	BPBD
13	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	97,31	66,09	97,85	75,13	DPUPR

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (tahun 2030)	Perangkat Daerah
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
14	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	3,1	30	30	90	DLH
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Angka	93,33	79,2	94,00	80	Kesbangpol
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,47	16,1	16,10	16,47	Disdik
3	Proporsi Penduduk Berusia 15 tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	%	8,18	22,8	22,80	26	Disdukcapil
4	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	%	1,12	1,07	1,15	1,27	Dinpersip
5	Jumlah Kasus Kematian Ibu (kasus)	kasus	1	2	2	1	Dinkes
6	Angka Literasi	%	93,69	91,55	93,93	92,55	Disdik
7	Angka Numerasi	%	90,14	91,55	93,93	92,55	Dlsdik
8	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,223	0,12-0,11	0,12 – 0,11	0,12-0,11	DPA3P2KB
9	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	21,01	28	28,00	100	Dinpersip
10	Indeks Pembangunan Gender	Angka	95,75	95,41	95,80	95,33	DPA3P2KB
11	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	66,49	54	67,61	62,5	Disnaker
12	Indeks Gini	Angka	0,402	0,372	0,372	0,312	Bappeda
13	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	6,4	5,6	5,60	5	Dinkes
14	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	78,75	78,64	78,90	79,73	Dinkes
15	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan	%	19,53	18,71	19,76	19,6	Disbudpar

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (tahun 2030)	Perangkat Daerah
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir						
16	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	95,57	95	96,00	97	DPKP
17	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	95,31	89,93	95,41	90,33	Disdik
18	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,468	0,41		0,45	Dinkes
19	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,49	11,52	11,52	11,73	Disdik
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	48,88	52	52,00	56	Bappeda
2	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	15,89	16,93-17,42	16,93-17,42	18,42-19,51	Setda - BPKPD
3	Rasio Pajak daerah terhadap PDRB	%	0,532	0,65	0,65	0,59	BPKPD
4	Angka Ketergantungan	%	43,11	49,49	49,49	49,53	Disdukcapil
5	Tingkat Inflasi	%	2,89	2,5	2,5	2,5	Setda
6	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Nilai	79,7	63,50-64,82	80,00	64,83:65,52	DP3APPKB
7	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	ribu orang	1.600	1.120	1.654	1.228	Disbudpar
8	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	5,35	3,11	5,49	3,65	Dinkop
9	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	33,14	34,32	34,32	36,06	Setda
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,93	71,05	71,05	72,11	Disperinaker
11	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Angka	0,67	0,71	0,71	0,79	Setda
12	Indeks Akses Keuangan Daerah	Angka	6,56	5,71	6,57	5,74	Setda
13	Tingkat Kemantapan Jalan	%	86,62	95,53	95,53	95,57	DPUPR

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (tahun 2030)	Perangkat Daerah
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
14	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	7,92	8,2	8,20	8,71	Setda
15	Ekspor Barang dan Jasa	Rupiah	170.951.432,84	180.042.471	180.042.471	235.998.953	Disdag
16	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	42,44	42	42,00	39,75	BPKPD
17	Kapabilitas Inovasi	Nilai	4,05	3,84	4,06	4	Bappeda
18	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah	Orang	31.693	14.232	31.920	15.141	Disbudpar
19	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	110	44,79	44,79	55	Setda
20	Return on Aset (ROA) BUMD	%	0,46	3,03	3,03	4,13	BPKPD
21	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	100	91,94	100	93	Diskominfo
22	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	62,3	66,74	66,74	69,85	Disperinaker
23	Disparitas Harga	Angka	-1,61	10	±10	10	Disdag
24	Jumlah kejadian konflik SARA	Kali	83,1	0	0	0	Kesbangpol
25	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	100	62,6	100	68	Setda
26	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,8	1,88	1,88	2,04	Dinkop
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM						
1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,42	4,68	4,68	4,76	Setda
2	Indeks Integritas Nasional	Angka	77,95	80,06	80,06	82,56	Irda
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	4,11	3,75	4,12	4	Diskominfo
4	Indeks Pemerintahan Digital	Angka	Tidak adq data	1,1	1,1	1,5	Diskominfo
5	Indeks Reformasi Hukum	Angka	100	80,6	100	83,45	Setda

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (tahun 2030)	Perangkat Daerah
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	INDIKATOR KINERJA KUNCI						
AA	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	97	100	100	100	DISDIK
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,3	100	100	100	DISDIK
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	96,81	100	100	100	DISDIK
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	77,31	100	100	100	DISDIK
AB	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
1	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	DINKES
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	DINKES
3	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	DINKES

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (tahun 2030)	Perangkat Daerah
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
4	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	DINKES
5	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	%	4,6	4	4	4,2	DINKES
6	Persentase warga negara usia 60 ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	DINKES
7	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	DINKES
8	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	DINKES
9	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	DINKES
10	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	DINKES
11	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	DINKES
12	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	DINKES

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (tahun 2030)	Perangkat Daerah
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
13	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	DINKES
14	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	DINKES
AC	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
1	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	100	100	100	100	DPUPR
2	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	92,25	100	100	1000	DPUPR
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	%	97,31	100	100	100	DPUPR
4	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	DPUPR
5	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	21,85	25	25	35	DPUPR
6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	93,57	88,2	88,2	89,26	DPUPR
7	Rasio kemantapan jalan	%	86,62	87,12	87,12	89,12	DPUPR

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (tahun 2030)	Perangkat Daerah
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
AD	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	%	100	100	100	40,73	DPKP
2	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	%	36,47	10,6	10,6	79,92	DPKP
3	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	66,51	68,32	68,32	100	DPKP
4	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota	%	100	100	100	100	DPKP
5	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	4,47	4,44	4,44	2,41	DPKP
AE	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	Satpol PP
2	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	6,59	15	15	15	Satpol PP
3	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	Satpol PP

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (tahun 2030)	Perangkat Daerah
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
4	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	Satpol PP
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	BPBD
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	BPBD
7	Persentase cakupan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana)	%	100	100	100	100	BPBD
AF	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
1	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	%	100	100	100	100	Dinas Sosial
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100	100	100	100	Dinas Sosial
AG	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (tahun 2030)	Perangkat Daerah
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	100	100	100	100	Disperinaker
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rp/TK	104.297	114,67	114,67	132	Disperinaker
3	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	%	79,38	71,48	71,48	72,34	Disperinaker
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	46,47	93,79	93,79	94,92	Disperinaker
5	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	Disperinaker
AH	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	6	9,69	9,69	9,38	DP3APPKB
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kota	%	100	100	100	100	DP3APPKB
3	Rasio kekerasan terhadap TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	69,63	68,94	68,94	67,57:67,57	DP3APPKB
AI	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (tahun 2030)	Perangkat Daerah
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	Persentase cadangan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	%	100	100	100	100	Dispangtan
AJ	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						
1	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100	100	100	DPKP
2	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	0	100	100	100	DPKP
3	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	DPKP
4	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	0	100	100	100	DPKP
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	0	100	100	100	DPKP
6	Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	0	100	100	100	DPKP
AK	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota	Indeks	68,7	69,98	69,98	70,16	DLH

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (tahun 2030)	Perangkat Daerah
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kota	%	98,16	98,25	98,25	98,5	DLH
3	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	9,23	9,62	9,62	6,19	DLH
AL	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
1	Perekaman KTP Elektronik	%	97,16	98,2	98,2	99	Disdukcakil
2	Persentase penduduk usia 0-18 tahun yang mempunyai akta kelahiran	%	99,53	99,54	99,54	99,58	Disdukcakil
3	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	100	100	100	100	Disdukcakil
4	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	87,52	86,7	87,30	86,77	Disdukcakil
AM	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (tahun 2030)	Perangkat Daerah
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun	Rata-rata Anak per Wanita	1,71	1,72	1,72	1,82	DP3APPKB
2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	3,65	7,66	7,66	5,02	DP3APPKB
3	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	63,19	67,02	67,02	70,44	DP3APPKB
AN	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio	0,88	0,45	0,88	0,65	Dishub
2	Rasio Kinerja Lalu Lintas (VCR)	Rasio	0,23	0,45	0,23	0,43	Dishub
AO	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	Diskominfo
2	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota	%	100	100	100	100	Diskominfo

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (tahun 2030)	Perangkat Daerah
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
3	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	Diskominfo
AP	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						
1	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	48,8	100	100	100	Dinkop UKM
2	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	71,88	74,43	74,43	87,08	Dinkop UKM
AQ	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
1	Persentase peningkatan investasi di kota	%	76,91	6,91	6,91	6,98	DPMP TSP
AR	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	1,02	2,64	2,64	8,95	Dispora
2	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	76	36	36	63	Dispora
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	32,02	46,13	46,13	56	Dispora
AS	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (tahun 2030)	Perangkat Daerah
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	Diskominfo
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	Diskominfo
AT	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	70,85	72	72,00	75	Diskominfo
AU	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100	40	100	57	Disbudpar
AV	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	21,01	28	28	32	Dinpersip
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	54,04	60,8	60,80	64,8	Dinpersip
AW	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (pasal 40 dan pasal 59 UU	%	90,16	88,77	90,17	89,67	Dinpersip

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (tahun 2030)	Perangkat Daerah
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan)						
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	66,67	50	67,00	75	Dinpersip
AX	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kota di wilayah kota (sumber data : one data KKP)	%	-483,33	87	87,00	93	Dispangtan
AY	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,18	0,18	0,18	0,21	Disbudpar
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	110,11	0,5	0,50	0,5	Disbudpar
3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kota	%	123,45	0,2	0,20	0,2	Disbudpar
4	Tingkat hunian akomodasi	%	52,2	56,69	56,69	68,91	Disbudpar

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (tahun 2030)	Perangkat Daerah
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	7,92	7,9	7,93	7,99	Disbudpar
AZ	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	6,3	720,34	720,34	727,21	Dispangtan
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	100	100	100	100	Dispangtan
BA	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	19,54	73,16	73,16	79,19	Disdag
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	70	65,25	70,56	70,63	Disdag
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUST/SIUP Toko Swalayan	%	100	100	100	100	Disdag
BB	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kota	%	1,85	0,5	0,50	0,7	Disperinaker
2	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Ada/tidak	100	100	100	100	Disperinaker

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (tahun 2030)	Perangkat Daerah
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	9,54	100	100	100	Disperinaker
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	100	100	100	Disperinaker
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	0	0	Disperinaker
6	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RIPIP	%	145,73	100	100	100	Disperinaker
BC	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
1	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	%	0,94	1,5	1,5	4	Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (tahun 2030)	Perangkat Daerah
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Daerah						
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	64,39	64	64	70	Sekretariat Daerah
3	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
4	Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui Pengadaan	%	100	60	100	72,93	Sekretariat Daerah
BD	5.02 - KEUANGAN						
1	Persentase Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	28,11	19,16	19,16	19,95	BPKPD
2	Cash Management	%	12	8,28	8,28	4,59	BPKPD
	Persentase anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya						
3	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>information on resources available to frontline service delivery units</i>)	%	91,7	96,44	96,44	97,88	BPKPD
4	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public acces to fiscal information</i>)	%	100	100	100	100	BPKPD

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (tahun 2030)	Perangkat Daerah
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
5	<i>Revenue mobilization</i> : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	82	22,45	22,45	22,65	BPKPD
6	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	31,47	32,17	32,17	41,18	BPKPD
7	<i>Budgetexecution</i> : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	62,1	4,5	4,5	5,1	BPKPD
8	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKPD
9	<i>Asset management</i>	Jumlah				4	BPKPD
	Apakah ada daftar aset tetap ?	ada/tidak	ada	Ya	Ya	Ya	
	Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap?	ada/tidak	ada	Ya	Ya	Ya	
	Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan ?	ada/tidak	ada	Ya	Ya	Ya	
	Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran ?	ada/tidak	ada	Ya	Ya	Ya	
10	Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum	%	86,25	88,09	88,09	91,67	BPKPD
BE	5.03 - KEPEGAWAIAN						
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	76,33	74,44	76,34	74,44	BKPSDM
2	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak	%	99,72	99,5	99,73	99,6	BKPSDM

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (tahun 2030)	Perangkat Daerah
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	termasuk guru dan tenaga kesehatan)						
3	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	25,21	25,44	25,44	26,47	BKPSDM
BF	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH						
1	Nilai Level kapabilitas APIP	Level	2,34	3	3	3	IRDA
2	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	2,92	3,023	3,023	3,1	IRDA

4.2. Prioritas Pembangunan

Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan penajaman, perluasan cakupan, dan lanjutan prioritas pembangunan tahun sebelumnya serta merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Prioritas pembangunan ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis, korelasi terhadap Standar Pelayanan Minimal, Sustainable Development Goal's (SDG's), kebijakan transformasi pelayanan kesehatan, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang.

RKPD tahun 2026 merupakan penjabaran tahun ke-1 (kesatu) RPJMD Kota Salatiga tahun 2025-2029. Penyusunan RKPD tahun 2026 memperhatikan keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kota Salatiga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain :

- a. Kesesuaian dengan dokumen perencanaan;
- b. Urgensitas penanganan permasalahan pembangunan; dan
- c. Kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat.

Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan :

- a. Arah Kebijakan Pembangunan Menengah Kota Salatiga sebagaimana RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029;
- b. Isu Strategis, dan
- c. Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Tingkat Nasional (ProSN).

Perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan pembangunan di setiap urusan sehingga terlihat upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Prioritas pembangunan tersebut dirumuskan ke dalam fokus prioritas tahun rencana yang berisi program-program unggulan yang paling tinggi daya dukungnya untuk mengatasi permasalahan yang ada atau untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah. Fokus prioritas pembangunan pada tahun rencana tersebut, mendukung tema pembangunan yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD yang merupakan benang merah menuju sasaran pembangunan.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah menyusut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan di tahun sebelumnya yang telah berhasil dicapai tidak lagi diprioritaskan di masa berikutnya, akan tetapi tetap dijaga kesinambungannya. Suatu prioritas pembangunan dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan.

4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan di masa yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan

Indonesia Emas 2045. Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2026 mempedomani Rancangan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan Visi Presiden “**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**”, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 8 Misi Asta Cita; 17 Program Prioritas; dan 8 Program Hasil Terbaik yang di dukung oleh 320 Program Kerja. Asta cita sebagai Misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029.

Sasaran pembangunan tahun 2026 diarahkan untuk Target indikator sasaran pembangunan tahun 2026 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 4. Target Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Target 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,2 – 5,8
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,44 – 4,96
3	Tingkat Kemiskinan	%	6,5-7,5
4	Kemiskinan Ekstrem	%	0
5	Nilai Tukar Nelayan	kumulatif	106 – 108
6	Rasio Gini	Nilai	0,377-0,380
7	Indeks Modal Manusia	Nilai	0,57
8	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	37,95
9	Indeks Kesejahteraan Petani		0,7731

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :

1. **Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial**

Prioritas Nasional 1 berfokus pada upaya simultan yang ditujukan untuk memperkuat ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia. Dalam mewujudkan sasaran pembangunan memperkuat ideologi Pancasila, arah kebijakan akan dilaksanakan melalui (1) penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara; (2) pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme; dan (3) pengembangan ekosistem teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan di kalangan pemuda, generasi milenial, dan gen Z; serta diperkuat dengan (4) internalisasi ideologi Pancasila dan konstitusi.

Pada aspek penguatan demokrasi, arah kebijakan yang akan dilaksanakan, yaitu (1) mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat; (2) menegakkan kembali kebebasan mimbar akademik sebagai sarana tidak hanya pengembangan budaya ilmiah, tetapi juga

perwujudan proses demokrasi yang taat asas; (3) menjamin kemerdekaan, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum; (4) penguatan kebebasan sipil dan kesetaraan; (5) peningkatan kinerja lembaga legislatif menuju parlemen modern yang transparan, transformatif, dan responsif.

Dalam aspek penguatan demokrasi, perlu diperkuat juga dengan pelaksanaan komunikasi pembangunan dan informasi publik melalui (6) penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik; (7) pembangunan media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri; serta (8) peningkatan kualitas konten isi siaran dan pers yang bebas dari kekerasan, pornografi, dan stereotip gender.

Dalam upaya penegakan hak asasi manusia dilaksanakan melalui beberapa strategi berikut (1) melindungi hak asasi manusia seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku; (2) memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta memperkuat penegakan hukumnya; (3) memastikan setiap kebijakan bersifat humanis, inklusif, berperspektif gender; serta memprioritaskan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (4) memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan marginal lainnya; serta (5) transformasi layanan akses terhadap keadilan terutama dan tidak terbatas bagi kelompok rentan..

2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Arah kebijakan penguatan pertahanan negara dilakukan melalui (1) meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap untuk memenuhi kekuatan optimal dan melakukan modernisasi alat utama sistem senjata TNI, (2) memperkuat komponen cadangan, (3) meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem pertahanan negara, (4) memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber, (5) melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep optimum essential force dalam rangka meningkatkan efektivitas menjaga kedaulatan NKRI, (6) meningkatkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia di daerah perbatasan dan pulau terluar, (7) memperkuat instrumen pertahanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme (8) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, serta (9) pemeliharaan dan perawatan alutsista strategis.

Selanjutnya arah kebijakan dalam pembangunan dan pengembangan industri pertahanan dilaksanakan melalui strategi (1) mempercepat peningkatan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata bagi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, (2) meningkatkan komitmen untuk menggunakan produk-produk industri strategis nasional dan

mendayagunakan sebesar mungkin kapasitas industri strategis dalam negeri, (3) pembentukan ekosistem industri pertahanan, (4) transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema spend to invest, dan (5) kolaborasi penelitian dan pengembangan alpalhankam.

Dalam penguatan keamanan negara, arah kebijakan dilaksanakan melalui strategi (1) melakukan sinergi pendekatan sejarah, budaya, kearifan lokal, dan sosial ekonomi, serta paham kebhinekaan di daerah-daerah yang rawan konflik serta rentan isu separatisme, (2) meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem keamanan negara, (3) memperkuat konsep dan praktik wawasan nusantara bagi seluruh rakyat Indonesia, (4) memperkuat instrumen keamanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme, (5) penguatan sistem keamanan negara di wilayah perbatasan dan pulau terluar, (6) pencegahan, penanganan, dan deradikalisasi terorisme.

Selanjutnya arah kebijakan dalam profesionalisme dan pelayanan kepolisian dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat polisi dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme, (2) peningkatan jumlah dan proporsi polisi wanita; (3) pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat; (4) penguatan kapabilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan pelanggaran hukum, pemeliharaan keamanan, dan penanganan kriminalitas; (5) Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personil.

Dalam penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi, arah kebijakan dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat strategi diplomasi maritim untuk meneguhkan kedaulatan dan meningkatkan keamanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) penguatan kapabilitas lembaga keamanan laut, (3) kolaborasi pengawasan dan pemeliharaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, alur laut kepulauan Indonesia dan choke point, (4) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personil lembaga keamanan laut, (5) pemetaan batimetri dan alur laut. Selanjutnya arah kebijakan dalam keamanan siber, sandi, dan sinyal dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat keamanan teknologi informasi telekomunikasi; (2) pengembangan sumber daya manusia, peningkatan profesionalisme, dan kesejahteraan sumber daya manusia keamanan siber, sandi, dan sinyal; (3) penguatan kelembagaan keamanan siber, sandi, dan sinyal; serta (4) penguatan operasi keamanan siber, sandi, dan sinyal strategis. Arah kebijakan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif dilaksanakan melalui strategi (1) mempercepat penyelesaian perjanjian batas maritim Indonesia dengan 10 negara tetangga dengan tetap mengedepankan prinsip kedaulatan dan kesejahteraan rakyat dalam skema good neighbour policy, (2) meningkatkan peran aktif untuk memperkuat supremasi dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global di tengah dinamika geopolitik internasional melalui diplomasi yang berdasarkan atas asas bebas aktif dan melanjutkan peran aktif dalam menciptakan perdamaian dunia dalam forum-

forum bilateral maupun multilateral sesuai amanat konstitusi, (3) meningkatkan peran aktif Indonesia dalam usaha mendorong perdamaian dunia, khususnya di antara negara-negara yang sedang berkonflik, (4) mengintensifkan dan memperluas diplomasi budaya di forum internasional untuk memperjuangkan warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia, (5) penyelesaian perundingan perbatasan darat negara, (6) mengintensifkan pemutakhiran dokumen dan bukti historis bersejarah di daerah perbatasan/prioritas, (7) perbaikan tata kelola perizinan organisasi masyarakat asing, dan (8) optimalisasi promosi aset soft power Indonesia. Selanjutnya, arah kebijakan penguatan infrastruktur dan jejaring smart diplomacy dilaksanakan melalui strategi (1) meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia sebagai negara yang besar dan berdaulat di mata masyarakat internasional dengan pemenuhan suprastruktur dan infrastruktur smart diplomacy, (2) melibatkan secara aktif potensi diaspora Indonesia dalam mewujudkan kepentingan nasional dengan memperluas akses dan meningkatkan fasilitas bagi masyarakat Indonesia di luar negeri yang mencakup eks warga negara Indonesia, anak eks warga negara Indonesia, dan warga negara asing yang orang tua kandungnya warga negara Indonesia yang menetap atau bekerja di luar negeri, serta (3) memperkuat dukungan diplomasi terhadap upaya kemerdekaan dan kedaulatan Palestina antara lain dengan memperjuangkan pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Palestina dan mengangkat utusan khusus untuk mendorong proses kemerdekaan Palestina.

Arah Kebijakan Kerja Sama Pembangunan Internasional dilaksanakan melalui (1) penguatan pelaksanaan Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular, (2) Integrated National Financing Framework, (3) pembangunan data economic intelligence berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, (4) promosi Trade, Tourism, Investment (TTI) Terintegrasi, serta (5) penguatan kelembagaan kerja sama pembangunan dan pembiayaan.

Penguatan diplomasi ekonomi diarahkan melalui (1) penguatan dan perluasan kerja sama ekonomi internasional, (2) kerja sama ekonomi internasional yang adaptif, (3) optimalisasi kerja sama ekonomi internasional dengan negara tetangga dan perbatasan, (4) partisipasi aktif mewujudkan pencapaian sasaran dan komitmen pembangunan global, (5) perluasan kesepakatan kerja sama internasional tentang ketenagakerjaan dan pergerakan orang, dan (6) pengawalan proses akses Indonesia ke Organization for Economic Co-operation and Development.

Arah kebijakan swasembada pangan dilaksanakan melalui, (1) menjalankan agenda reformasi agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan; (2) memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mempercepat pengembangan industri pupuk bio; (3) meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (digital

farming), memperbaiki tata kelola dan rantai nilai hasil pertanian; (4) mengutamakan produksi pangan pokok dalam negeri dan mengendalikan impor untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga di tingkat petani, terutama di saat panen raya; (5) merevitalisasi lahan rusak menjadi lahan produktif untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional; (6) memberdayakan dan memperkuat peran dan fungsi Badan Pangan Nasional, Badan Urusan Logistik, bersama Badan Usaha Milik Negara holding pangan ID Food sebagai regulator dan produsen pangan pokok yang strategis, baik untuk peningkatan produksi berkesinambungan, pertumbuhan ekspor, dan upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian strategis lainnya; (7) menjamin pembiayaan untuk petani, peternak dan nelayan melalui bank, koperasi, dan lembaga pembiayaan non-bank lainnya, termasuk start-up untuk mendukung akses dengan mudah dan cepat dalam memperkuat struktur permodalan, menjamin keberlangsungan usaha, pengembangan usaha, dan memperluas cakupan asuransi untuk petani, peternak dan nelayan; (8) melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau food estate secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu; serta (9) memastikan kedaulatan pangan berbasis protein ikan (blue food) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas input produksi (antara lain benih, bibit, pupuk, pakan, dan bahan bakar minyak), sarana prasarana produksi, sarana prasarana pascapanen, sistem rantai dingin dan pengolahan, serta pengembangan kawasan berbasis komoditas lokal dan/atau unggulan serta penerapan perikanan berkelanjutan (perikanan berbasis kuota dan transformasi akuakultur) (10) meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penganeekaragaman konsumsi pangan, biofortifikasi dan fortifikasi pangan, dan pangan lokal; (11) menjamin mutu, keamanan dan ketelusuran pangan melalui penguatan infrastruktur pengawasan-pengujian pangan; (12) merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak untuk dimanfaatkan menjadi lahan untuk aren untuk bioetanol untuk mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional. Diantaranya akan ditanam pula ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, dan kelapa dengan sistem tumpang sari untuk tambahan pangan nasional; serta (13) memperkuat tata kelola sistem pangan melalui penguatan satu data pangan yang terintegrasi dengan satu data Indonesia, stabilisasi rantai pasok dan rantai nilai, serta peningkatan pengelolaan susut dan sisa/limbah pangan.

Arah kebijakan swasembada energi dilaksanakan melalui (1) mempercepat transisi energi dengan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau dunia (super power) dalam bidang energi baru dan terbarukan (renewables) dan energi berbasis bahan baku nabati (bioenergy); (2) mengembalikan tata kelola migas dan pertambangan nasional sesuai amanat konstitusi, terutama Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; (3) memperbaiki skema insentif untuk mendorong aktivitas temuan cadangan sumber energi baru untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional; serta (4) mendirikan kilang

minyak bumi, pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas, baik oleh Badan Usaha Milik Negara atau swasta.

Arah kebijakan swasembada air dilaksanakan melalui (1) penyediaan tampungan dan pasokan air berkelanjutan untuk kegiatan sosial ekonomi produktif sebagai bagian dari pengelolaan air sehingga tidak menjadi bencana pada saat musim hujan dan kekurangan pada saat musim kemarau; (2) peningkatan kinerja layanan irigasi multikomoditas untuk mendukung ketahanan pangan lokal, peningkatan produktivitas, dan swasembada pangan yang ditempuh dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi serta inisiasi modernisasi irigasi; (3) pengelolaan risiko bencana daya rusak air; (4) penyempurnaan tata kelola infrastruktur sumber daya air yang terintegrasi dari hulu ke hilir; serta (5) revitalisasi daerah aliran sungai, menjaga kebersihan sungai, dan sekaligus mengamankan kualitas air permukaan dari polusi yang salah satunya bersumber dari air limbah domestik rumah tangga. Swasembada pangan, energi, dan air dicapai melalui pembangunan yang terintegrasi dan memprioritaskan sinergi pemanfaatan sumber daya dan mengurangi trade off melalui pendekatan yang berkesinambungan (Food, Energy, Water Nexus). Pendekatan konsep Food, Energy, Water Nexus berfokus pada efektivitas pemanfaatan sumber daya pangan, energi, dan air sehingga dapat tersedia dan diakses oleh masyarakat secara merata dan lintas generasi. Pemahaman pendekatan tersebut menjadi krusial dalam tata kelola sumber daya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan memastikan ketahanan dalam menghadapi perubahan iklim. Untuk mencapai pengelolaan sumber daya melalui pendekatan Food, Energy, Water Nexus memerlukan tata kelola lintas sektor yang baik.

Arah kebijakan pengembangan ekonomi syariah dilaksanakan dalam rangka mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah global, melalui (1) penguatan industri halal, diantaranya dengan peningkatan halal value chain, penguatan promosi industri halal, dan pengembangan pariwisata ramah muslim; (2) penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional; (3) penguatan ekosistem usaha mikro kecil menengah halal melalui dukungan fasilitasi sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro kecil menengah dan penguatan infrastruktur pendukung usaha mikro kecil menengah halal; (4) penguatan keuangan syariah, meliputi penguatan lembaga keuangan syariah (perbankan syariah, industri keuangan nonbank syariah termasuk penyempurnaan peran bank wakaf), dan penguatan pasar modal syariah; dan (5) penguatan dana sosial syariah (zakat, infaq, sedekah dan wakaf). Keseluruhan upaya di atas didukung oleh penguatan pendidikan dan penelitian ekonomi syariah, penyediaan insentif yang diperlukan, penguatan regulasi dan kelembagaan terkait ekonomi dan keuangan syariah baik di tingkat pusat dan daerah, serta penguatan dukungan bagi pelaku ekonomi syariah baik dari badan usaha milik negara dan swasta nasional.

Arah kebijakan ekonomi digital dilaksanakan melalui, (1) melakukan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu jalan utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia dan menghasilkan manfaat sosio ekonomi yang lebih luas bagi komunitas dan masyarakat, (2) mengembangkan sistem pembiayaan alternatif usaha mikro, kecil, dan menengah melalui digitalisasi keuangan serta program pembiayaan ultra mikro, (3) menciptakan iklim investasi yang kondusif di bidang ekonomi digital. Hal ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan regulasi dan memberikan insentif bagi investor asing, (4) mendorong pendidikan yang membantu peningkatan literasi digital untuk mendukung digitalisasi ekonomi.

Arah kebijakan ekonomi hijau dilaksanakan melalui strategi, (1) mendorong dan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi berputar (circular economy); (2) menerapkan ekonomi sirkular industri; (3) menerapkan efisiensi sumber daya; (4) mengembangkan produk ramah lingkungan; (5) menerapkan guna ulang dan perpanjangan masa pakai produk dan material; (6) menguatkan ekosistem daur ulang; (7) mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan; (8) melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari aset bangsa; (9) peningkatan pengelolaan sampah di hulu dengan mengurangi dan memilah sampah di sumber; (10) meningkatkan fasilitas pengolahan berbasis reduce, reuse, dan recycle, (11) peningkatan pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; (12) optimalisasi tempat pengolahan sampah terpadu, konservasi tempat pembuangan akhir dan landfill mining; (13) perbaikan tata kelola persampahan; (14) mengampanyekan budaya ramah lingkungan seperti mengganti penggunaan kantong plastik dengan bahan yang ramah lingkungan dan bisa daur ulang; serta (15) meningkatkan pemanfaatan kawasan hutan melalui pengelolaan hutan berkelanjutan dengan melibatkan kelompok masyarakat (skema Perhutanan Sosial) dan badan usaha (skema Multi Usaha Kehutanan).

Strategi terkait keanekaragaman hayati meliputi strategi (16) mengurangi ancaman terhadap kelestarian keanekaragaman ekosistem dan spesies; (17) memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; (18) mengelola sumber daya genetik; (19) menguatkan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi; (20) memulihkan ekosistem yang telah terdegradasi; (21) pengendalian dan eradikasi spesies asing invasif; (22) pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem; (23) peningkatan peran masyarakat yang terlibat dalam aksi perlindungan dan pengamanan keanekaragaman hayati; (24) penguatan data, informasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi keanekaragaman hayati; (25) peningkatan pendanaan inovatif pengelolaan keanekaragaman hayati; (26) pemanfaatan, pemanenan, dan perdagangan spesies liar secara berkelanjutan, legal, dan aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan; (27) peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem secara berkelanjutan; (28) inventarisasi sumber daya genetik yang memiliki potensi nilai

ekonomi baru; (29) pengembangan mekanisme pembagian keuntungan dari sumber daya genetik termasuk pengetahuan tradisional; (30) peningkatan bioprospeksi sumber daya genetik; dan (31) pengembangan pengelolaan keamanan hayati (biosafety); (32) meningkatkan perlindungan satwa dan tumbuhan langka, endemik, dan terancam punah melalui penghentian perdagangan satwa liar dan tumbuhan langka, upaya konservasi dan perlindungan genetik, habitat, serta ekosistemnya; (33) meningkatkan anggaran untuk memperkuat riset dan kompetensi peneliti di bidang pelestarian satwa/tumbuhan liar, langka, dan terancam punah; (34) merehabilitasi hutan rusak menjadi Hutan Tanaman Industri, dan hutan produksi dengan menerapkan skema public private people partnership dimana manfaat terbesar akan dirasakan oleh masyarakat; (35) menerapkan standar pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui sistem sertifikasi produk yang dihasilkan dari praktik pengelolaan sumber daya ramah lingkungan.

Strategi terkait peningkatan kualitas lingkungan meliputi strategi (36) meningkatkan pengelolaan kualitas air di sungai dan danau; (37) meningkatkan pengelolaan air limbah; (38) meningkatkan pengelolaan kualitas udara di kabupaten/kota di Indonesia; (39) meningkatkan pengelolaan emisi udara dari industri, prasarana, dan jasa; (40) meningkatkan pengelolaan kualitas dan kesehatan air laut; (41) meningkatkan kualitas lahan; (42) menurunkan laju deforestasi; (43) meningkatkan kualitas ekosistem gambut; (44) melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun; (45) menguatkan perencanaan, kelembagaan, dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; (46) pengawasan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan; (47) pengendalian dan penertiban penyelesaian kasus penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta pemanfaatan ruang; (48) penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; serta (49) penguatan instrumen pencegahan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (50) menindak tegas praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mendorong upaya restorasi, rehabilitasi, dan pemulihan lingkungan terdegradasi untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan produktif; (51) memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pemilik perusahaan yang terlibat dalam pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi; (52) mencegah deforestasi melalui pemanfaatan areal kurang produktif atau lahan terdegradasi dan meningkatkan peran serta multipihak dalam pengawasan potensi kebakaran dan perambahan hutan.

Strategi terkait pembangunan rendah karbon meliputi strategi (53) menerapkan regulasi untuk membatasi produksi karbon dan aktivitas yang merusak lingkungan; (54) melakukan pembangunan rendah karbon; (55) peningkatan proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi primer; (56) efisiensi energi; (57) peningkatan transportasi berkelanjutan; (58) peningkatan cadangan karbon; (59) pencegahan pengurangan cadangan karbon; (60) implementasi praktik pertanian yang rendah

karbon; (61) peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru; (62) pengembangan industri hijau; dan (63) pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular; (64) mengembangkan ekosistem yang terus mengakselerasi pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam yang berkaitan dengan carbon sink dan carbon offset untuk mengakselerasi target net zero emission dan memanfaatkan kesempatan dari ekonomi hijau; (65) mengakselerasi perdagangan karbon baik di Bursa Efek Indonesia maupun penyempurnaan regulasi terkait carbon trade dan kelengkapan lembaga penunjang carbon trade; (66) melanjutkan program memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (coal-fired power plant retirement) dengan berdasarkan pada asas keadilan dan keberimbangan; (67) menstimulasi konversi penggunaan energi fosil menjadi renewable energy sesuai dengan potensi alam masing-masing daerah; (68) mengembangkan sumber energi hijau alternatif, terutama energi air, angin, matahari, gelombang laut dan panas bumi untuk pelestarian lingkungan yang berkelanjutan; (69) mendorong adopsi kendaraan listrik (electric vehicle) untuk transportasi umum.

Strategi terkait pekerjaan hijau meliputi strategi (70) mengembangkan ekosistem yang mendukung penciptaan pekerjaan hijau (green jobs) yang berkualitas, produktif dan berdaya saing; (71) meningkatkan keahlian, keterampilan, dan kompetensi tenaga kerja hijau; serta (72) memperkuat peran asosiasi dan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk menumbuhkan lapangan kerja hijau.

Arah kebijakan ekonomi biru sebagai penghela pertumbuhan ekonomi (prime mover) dan sumber pertumbuhan baru, maka perlu dilaksanakan melalui (1) menguatkan tata kelola ekosistem ekonomi biru dan diplomasi maritim, melalui antara lain penyederhanaan perizinan, fasilitasi akses pendanaan, penguatan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, pengembangan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi maritim, blue finance dan good neighbor policy; (2) meningkatkan kesehatan laut yang mencakup pengelolaan ekosistem dan kawasan konservasi perairan, penanganan sampah laut, dan rehabilitasi pesisir, melalui identifikasi dan pencadangan kawasan konservasi perairan baru di daerah, peningkatan kapasitas kompetensi pengelola kawasan konservasi dengan jejaring dan kemitraan, pembangunan sarana prasarana pengolahan dan penanganan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terkait dampak sampah laut, serta rehabilitasi ekosistem mangrove, terumbu karang, dan lamun; (3) mengembangkan industrialisasi perikanan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan, mencakup antara lain peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan hilirisasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan termasuk perikanan tangkap, perikanan budidaya, rumput laut, dan garam melalui pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya yang berdaya saing serta penguatan sistem rantai dingin dan efisiensi rantai pasok produksi; (4) menguatkan industri manufaktur berbasis kelautan, terutama industri perkapalan dan

garam, antara lain melalui penguatan sarana dan prasarana industri garam, pengembangan industri galangan kapal, dan penguatan rantai pasok bahan baku industri perkapalan; (5) menguatkan sistem transportasi, logistik, dan perdagangan jalur perairan, termasuk untuk peningkatan konektivitas di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan, pulau-pulau kecil dan terluar; (6) mengembangkan destinasi pariwisata berbasis bahari dan danau serta pemanfaatan jasa kelautan berkelanjutan melalui peningkatan perkuatan sarana dan prasarana pariwisata bahari, penguatan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan usaha dan investasi, memperkuat pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, meningkatkan investasi pariwisata berkelanjutan, mengembangkan pariwisata bahari berbasis masyarakat berkelanjutan, dan memperkuat keberlanjutan dan ketahanan rantai pasok pariwisata; (7) meningkatkan kapasitas dan optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas ekonomi biru, serta peningkatan sumber daya manusia maritim, melalui perbaikan sistem pendidikan terutama terkait science, technology, engineering, art, and mathematics, penyusunan rencana terpadu dan fasilitasi pelaksanaan untuk pengembangan, alih teknologi dan adopsi teknologi, meningkatkan investasi untuk pendidikan dan riset berkualitas, serta penguatan faktor-faktor pendukung pembangkitan energi terbarukan dan lepas pantai, perikanan tangkap dan budi daya, rumput laut dan hilirisasinya, konservasi dan kelestarian biodiversitas kelautan, serta penguatan konektivitas maritim untuk mendukung rantai pasok nasional dan global.

3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

Terdapat lima arah kebijakan yang difokuskan untuk melaksanakan amanat Prioritas Nasional 3 yang tertuang dalam sasaran dan indikator pada tabel di atas, antara lain :

a. Melanjutkan pembangunan infrastruktur,

Arah kebijakan melanjutkan pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui (1) membangun dan memperbaiki jalan daerah yang tidak mampu ditangani oleh pemerintah daerah; (2) menyinergikan pembangunan jaringan transportasi dan pengembangan kawasan strategis yang dilakukan secara terintegrasi dalam suatu konsep perencanaan serta pengelolaan yang terpadu; (3) menyediakan layanan dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas orang, barang, dan informasi; (4) mengembangkan pelabuhan simpul transshipment sebagai infrastruktur terhubung dengan simpul logistik di Kawasan Timur Indonesia yang dibangun untuk meningkatkan muatan balik; (5) membangun infrastruktur digital dan teknologi secara merata di kabupaten/kota di Indonesia sehingga tidak ada

- desa yang tidak terakses internet atau internet sinyal lemah; serta (6) memperkuat konektivitas digital di seluruh wilayah untuk seluruh kelompok masyarakat;
- b. mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, Arah kebijakan mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dilaksanakan melalui (1) menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan mengutamakan tenaga kerja lokal untuk mengurangi tingkat pengangguran; (2) memberikan bantuan dan insentif untuk membuka dan melakukan formalisasi usaha, termasuk melalui gerakan ekonomi kerakyatan dengan membangun pusat kewirausahaan di tingkat kabupaten untuk memperkuat produk-produk usaha mikro, kecil dan menengah dengan standardisasi dan sertifikasi; (3) melindungi dan merevitalisasi pasar tradisional dan menjaga ekosistem pasar rakyat; (4) mendorong pertumbuhan wirausaha yang inovatif, inklusif dan berkelanjutan dengan menyederhanakan birokrasi dan regulasi, serta melakukan sinkronisasi program kewirausahaan; (5) melakukan pendampingan pemanfaatan riset dan teknologi bagi wirausaha dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, termasuk melalui inkubasi usaha; (6) mengembangkan dan memperkuat kemitraan usaha melalui pengembangan ekosistem rantai pasok domestik dan global; (7) mengembangkan skema dan inovasi pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi dan start-up; serta (8) mengoptimalkan perwujudan satu data koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- c. penguatan koperasi, Arah kebijakan mengembangkan industri kreatif akan dijalankan melalui (1) penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual dan disinergikan dengan upaya menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, termasuk pariwisata, ekonomi digital, usaha rintisan, industri syariah, dan maritim berbasis komunitas; (2) integrasi data ekonomi kreatif; (3) percepatan pengembangan ekosistem kekayaan intelektual yang mencakup pendaftaran, edukasi, perlindungan, dan komersialisasi untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum atas inovasi-inovasi yang dihasilkan, sehingga para artis, musisi, seniman, pekerja seni, penulis buku, dan peneliti lebih dihargai secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan mereka; (4) perluasan dan peningkatan pangsa pasar di tingkat domestik dan global melalui aktivitas pemasaran, termasuk membangun lebih banyak ruang pameran, layar bioskop, dan ruang pertunjukan seni di seluruh Indonesia sebagai sarana pengembangan diri seniman Indonesia; (5) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku kreatif serta inkubasi produk berbasis riset untuk peningkatan daya saing produk kreatif; (6) pengembangan infrastruktur (termasuk pembangunan hub/sentra kreatif dan kluster kreatif) yang didukung pendanaan, pembiayaan, dan insentif untuk membangun industri berbasis digital yang berorientasi global; (7) penguatan regulasi, kebijakan, dan kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat nasional dan daerah (termasuk

pengembangan badan layanan umum); (8) mendukung terlaksananya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan demi kesejahteraan para pelaku industri kreatif di Indonesia; (9) memberikan insentif bagi pengembangan destinasi wisata tematik yang memiliki pasar wisatawan global; (10) perbaikan sistem manajemen promosi pariwisata; (11) menerapkan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata; (12) menerapkan prinsip Blue-Green-Circular Economy bagi para pelaku usaha pariwisata; (13) penataan kawasan wisata serta pembangunan sarana kebutuhan dasar dan aksesibilitas yang menerapkan prinsip berkelanjutan; (14) reaktivasi pelaksanaan event dan meetings, incentives, conventions, and exhibitions serta peningkatan kualitas produk wisata yang terstandardisasi; (15) meningkatkan kapasitas kelembagaan dan dukungan destinasi tangguh bencana; (16) pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia pariwisata, (17) pengembangan kewilayahan pada 10 destinasi pariwisata prioritas yang dipandu pembangunannya berdasarkan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional/Integrated Tourism Master Plan, 3 destinasi regeneratif Bali, greater Kepri, greater Jakarta, serta pengembangan Klaster Pariwisata Ibu Kota Nusantara (18) diversifikasi jenis pariwisata geopark (terutama di 10 UNESCO Global Geopark), gastronomi, kesehatan dan kebugaran, meetings, incentives, conventions, and exhibitions, olahraga, ramah muslim, yacht and cruise, desa wisata, dan wisata berbasis konservasi; serta (19) pembangunan pariwisata melalui dukungan skema dan sumber pembiayaan, termasuk sumber pembiayaan alternatif seperti pembiayaan campuran (blended finance).

d. mengembangkan industri kreatif,

Arah kebijakan penguatan koperasi dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat kelembagaan dan tata kelola koperasi agar sesuai dengan tantangan ekonomi saat ini, termasuk melalui undang-undang perkoperasian serta aturan turunan yang mengatur koperasi multipihak; (2) memperkuat Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi untuk menjadikan koperasi yang unbankable menjadi koperasi bankable; (3) menyosialisasikan bentuk hukum koperasi agar dapat dijadikan alternatif utama bagi milenial dan Gen Z yang ingin mendirikan usaha berbadan hukum serta memperkuat kelembagaan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata, dan ekonomi kreatif; (4) memberikan bantuan peningkatan kemampuan manajemen koperasi untuk bisa mengembangkan usaha dan meningkatkan keuntungan anggota; (5) mengembangkan koperasi sektor produksi, termasuk melalui perkuatan dan revitalisasi Koperasi Unit Desa; (6) mengembangkan sistem pengawasan koperasi simpan pinjam; serta (7) memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara sebagai alat negara untuk benteng pertahanan ekonomi nasional, penyediaan layanan dasar dan strategis, meningkatkan daya saing nasional,

sekaligus sebagai salah satu motor pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.

e. pendalaman sektor keuangan

Arah kebijakan pendalaman sektor keuangan dilakukan melalui (1) penguatan peran perbankan; (2) penguatan peran sektor keuangan nonbank, serta (3) peningkatan inklusi dan literasi keuangan. Penguatan peran perbankan dilakukan melalui peningkatan keberagaman produk perbankan, kredit sektor produktif, pemerataan penyaluran kredit antar wilayah dan antarsektor, serta penguatan struktur sektor perbankan. Penguatan peran sektor keuangan nonbank dilakukan melalui peningkatan kelolaan dana pensiun, kepesertaan dan inovasi produk asuransi, perluasan akses fintech, penguatan pengawasan sektor keuangan nonbank, penguatan kolaborasi multipihak baik di level pusat maupun daerah, serta pendalaman pasar modal yang dilakukan dengan mempermudah investor dan emiten. Peningkatan inklusi dan literasi keuangan dilakukan melalui literasi dan edukasi keuangan, perlindungan konsumen dan investor, serta penguatan layanan keuangan pada sektor pemerintah.

4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

Pembangunan dan pembentukan modal manusia harus menjamin bahwa sejak dalam kandungan, setiap anak termasuk anak dalam kondisi khusus, dapat tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan, serta didukung oleh lingkungan keluarga dan masyarakat yang kondusif. Pembentukan modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi. Untuk mewujudkan hal tersebut, arah kebijakan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, diarahkan untuk ::

a. Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia,

mencakup (a) percepatan Wajib Belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); (b) penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenjang; (c) revitalisasi pendidikan nonformal; (d) penguatan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI); (e) penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas; (f) penguatan tata kelola pendidikan; (g) menguatkan peran, fungsi, kelembagaan, dan anggaran yang terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (h) memperluas kesempatan kerja baru di bidang keahlian menengah ke atas di sektor produktif; (i) memfasilitasi mobilitas dan perlindungan tenaga kerja meliputi penyediaan informasi pasar kerja yang kredibel, penguatan sistem perlindungan adaptif bagi tenaga kerja, penguatan pengawasan

ketenagakerjaan, serta penciptaan iklim ketenagakerjaan yang responsif dan inklusif; (j) meningkatkan keahlian tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja; (k) meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan kerja dan memperkuat program sertifikasi kompetensi; (l) melaksanakan reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja yang masih bekerja terutama angkatan kerja perempuan dan angkatan kerja dengan low-skilled berbasis pembelajaran sepanjang hayat; (m) memfasilitasi transisi school to work dan integrasi soft skills bagi angkatan kerja dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat dan memanfaatkan teknologi; (n) melakukan revitalisasi balai latihan kerja dengan penerapan berbasis kompetensi kriya dan seni kreatif guna meningkatkan kualitas tenaga kerja agar produktif dan berdaya saing; (o) mengembangkan manajemen talenta di bidang riset dan inovasi, seni budaya, dan olahraga; serta (p) mengembangkan budaya literasi dan meningkatkan kegemaran membaca untuk mendukung kreativitas dan inovasi melalui penguatan akses bahan bacaan berkualitas dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

b. Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi,

mencakup (a) perluasan layanan pendidikan anak usia dini melalui bantuan pendidikan afirmatif, revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini; (b) pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah; (c) melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar hingga jenjang perguruan tinggi (termasuk pesantren dan sekolah-sekolah berbasis agama lain) dan meningkatkan ketepatan sasaran penerima; (d) penguatan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif, dan berdaya saing global; (e) meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi berbasis agama, serta memberikan beasiswa bagi para siswa untuk melanjutkan pendidikan, baik di tingkat nasional maupun internasional; (f) mengembangkan dan meningkatkan kualitas sekolah kejuruan dalam bidang keahlian teknis termasuk yang berorientasi kepada industri kreatif dan seni budaya; (g) memberikan akses yang mudah bagi generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan dengan meningkatkan ketersediaan daya tampung perguruan tinggi, standardisasi kualitas lembaga perguruan tinggi (akreditasi, dosen, dan tenaga kependidikan), dan mempermudah akses masuk perguruan tinggi, terutama di bidang Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics; (h) memperkuat kurikulum perguruan tinggi yang adaptif, dan didukung dengan inovasi pembelajaran berbasis kompetensi, serta relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri; (i) memperkuat daya saing perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan yang didukung oleh implementasi diferensiasi misi; (j) meningkatkan dana ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk penguatan

kapasitas optimalisasi pemanfaatan secara masif di berbagai bidang, serta peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatannya; (k) meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi nasional; (l) meningkatkan rekognisi internasional talenta di bidang riset dan inovasi berbasis ajang dan portofolio; serta (m) menjamin insentif bagi perguruan tinggi dan dunia usaha yang berkolaborasi dalam ilmu pengetahuan dan riset yang mendukung kemajuan dan daya saing bangsa, serta membuka kesempatan untuk melakukan kolaborasi global.

Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, mencakup (a) memperkuat Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan memastikan seluruh penduduk memiliki jaminan kesehatan (universal health coverage) dan memperkuat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif; (b) menambahkan kartu anak sehat yang dimasukkan dalam program perlindungan sosial dan kesehatan sebagai pencegahan dan penanggulangan stunting; (c) mencegah terjadinya stunting pada anak Indonesia dengan Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu dan Penambahan Vitamin); (d) memperkuat program gerakan masyarakat hidup sehat untuk mencegah penyakit, baik penyakit menular dan penyakit tidak menular (jantung, stroke, dan lain lain); (e) meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan merata melalui peningkatan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan; (f) memperjuangkan kemandirian industri obat, vaksin, dan alat kesehatan nasional secara bertahap; (g) meningkatkan industri obat tradisional untuk mewujudkan harga obat yang terjangkau dan berbiaya murah serta vaksin yang halal untuk masyarakat melalui kekuatan lokal; (h) mendorong pengembangan industri jamu yang merupakan ramuan herbal kearifan lokal dan berasal dari keragaman hayati nusantara; (i) menurunkan dan bahkan menghapuskan bea masuk sejumlah alat kesehatan yang masih belum mampu diproduksi di dalam negeri melalui perubahan kategori dari barang mewah; (j) memastikan ketersediaan obat, vaksin, alat kesehatan, dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas; (k) memperbaiki tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk mencegah defisit dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan memprioritaskan upaya promotif dan preventif, dan perumusan kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang lebih prorakyat, protenaga kesehatan, profasilitas kesehatan, dan propengadaan farmasi; (l) memperkuat program pemberdayaan masyarakat (gotong royong) untuk hidup sehat seperti revitalisasi posyandu, revitalisasi pos pembinaan terpadu, usaha kesehatan sekolah, pos kesehatan desa, dan pos kesehatan pesantren; (m) memperbaiki kualitas gizi, air bersih, air layak minum, dan sanitasi masyarakat dalam mengatasi ancaman stunting (gizi buruk); (n) meningkatkan akses dan layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, sesuai karakteristik wilayah

dan segmentasi sasaran; (o) memperbaiki program kesehatan jiwa yang lebih responsif, menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan; (p) membangun layanan baru yakni pelayanan kesehatan keluarga yang menjembatani pelayanan kesehatan masyarakat dan individu agar tercapai pelayanan kesehatan nasional yang efektif dan efisien (family medicine); (q) penguatan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan dan pelayanan promotif dan preventif kesehatan ibu dan anak sesuai standar untuk percepatan penurunan kematian ibu dan anak; (r) penguatan kelembagaan dan peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, lansia, dan kelompok rentan lainnya, seperti penyandang disabilitas, perempuan dan anak korban kekerasan; (s) eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta, schistosomiasis, rabies, dan lain lain), serta rekayasa lingkungan dan biologis untuk pengendalian penyakit vektor lainnya; (t) mendorong promosi produk pangan olahan sehat, pengendalian produk berdampak negatif bagi kesehatan, seperti produk hasil tembakau, minuman beralkohol, serta makanan dan minuman tinggi gula, garam dan lemak antara lain melalui pengenaan cukai, pembatasan iklan dan pelarangan promosi; (u) penguatan surveilans, laboratorium, pos pintu masuk negara, pengendalian kejadian luar biasa/wabah dan penanganan bencana, serta pengendalian resistensi antimikroba; (v) penguatan sistem pengawasan pangan, sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan penguatan regulasi pre-market, penguatan pengawasan siber, dan farmakovigilans; (w) investasi pelayanan kesehatan primer dengan peningkatan kapasitas, peran, jaringan puskesmas dan peningkatan peran kader kesehatan; serta (x) peningkatan produksi, pendayagunaan, dan kualitas sumber daya manusia kesehatan serta peningkatan kualitas pendanaan kesehatan, tata kelola, data, informasi, dan inovasi teknologi kesehatan.

- c. Menguatkan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, mencakup (a) penguatan kapasitas dan keterampilan keluarga dalam melaksanakan fungsinya, termasuk pengasuhan dan perawatan; (b) penyediaan fasilitas pendukung keluarga; (c) penguatan hak sipil, hukum, dan ekonomi keluarga, serta afirmasi bagi keluarga rentan; (d) pemenuhan hak anak secara universal; (e) perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk perkawinan anak; (f) peningkatan partisipasi anak secara bermakna dan pewujudan lingkungan yang ramah anak; (g) penguatan resiliensi anak dan karakter pemuda untuk mencegah timbulnya perilaku berisiko; (h) penguatan kapasitas, kemandirian, serta kepemimpinan pemuda dan perempuan; (i) peningkatan partisipasi aktif perempuan dan pemuda di ketenagakerjaan, politik, dan ekonomi; (j) penguatan penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di proses pembangunan; (k) penghormatan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lansia; (l) mempercepat penerbitan peraturan pemerintah yang belum lengkap, petunjuk pelaksana, dan petunjuk teknis dari

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; (m) mengintensifkan dan memperluas program peningkatan kesadaran publik untuk tidak memarginalkan dan merendahkan serta memberikan kesempatan yang sama untuk dapat maju dan berkembang bagi kelompok penyandang disabilitas; (n) mendorong pembangunan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas, terutama untuk fasilitas-fasilitas umum; (o) memperluas program pendidikan formal maupun nonformal yang bersifat inklusif, aplikatif, dan humanis agar segenap potensi diri setiap individu penyandang disabilitas dapat dikembangkan; (p) meningkatkan dan memperluas akses pelayanan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi, mendapatkan informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi politik penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan dalam masyarakat; (q) mendorong perusahaan-perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara untuk memberikan kuota lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas; (r) membangun sarana, prasarana, dan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas; serta (s) memperluas program-program perlindungan kelompok difabel dari berbagai macam bentuk stereotype, pelecehan, kekerasan, dan perlakuan yang tidak semestinya di masyarakat.

- d. Meningkatkan Prestasi Olahraga,
mencakup (a) mendorong pembudayaan olahraga melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan penyelenggaraan kompetisi/festival olahraga; (b) mengembangkan program siswa olahragawan (student athlete program) secara berjenjang dan berkelanjutan; (c) meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana olahraga yang terstandar dan ramah disabilitas, serta dikelola melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha; (d) mengembangkan jaminan kesejahteraan olahraga melalui skema insentif, kemitraan, pendanaan inovatif serta dukungan pasca karier; (e) memperkuat pembinaan olahragawan elit kelas dunia dalam pemusatan latihan nasional, didukung tenaga keolahragaan bersertifikat internasional.

5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Prioritas Nasional 5 ditujukan untuk membangun fondasi industrialisasi yang terintegrasi domestik dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri yang berdaya saing global sehingga menjadi pengungkit perekonomian. Dalam mewujudkan sasaran pembangunan Prioritas Nasional 5 di tahun 2026, arah kebijakan difokuskan pada :

- a. pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru
Keberlanjutan hilirisasi untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru terutama akan dilakukan terhadap komoditas yang memiliki kenaikan nilai tambah tinggi, potensi penyerapan tenaga kerja lokal, kesiapan industri dan

rencana investasi, serta ketersediaan cadangan sumber daya alam. Untuk itu, komoditas prioritas hilirisasi yang akan dikembangkan menjadi produk berdaya saing tinggi adalah nikel, tembaga, bauksit, produk agro (seperti sawit, karet, kelapa, dan kakao) serta produk maritim (seperti rumput laut)

- b. penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional

Pembangunan kembali industri padat karya berkelanjutan akan fokus pada peningkatan produktivitas dan daya saing industri padat karya terampil guna menopang kebutuhan masyarakat akan barang konsumsi berkelanjutan seperti industri makanan dan minuman, industri tekstil dan produk tekstil, serta industri alas kaki. Penguatan industri dasar akan difokuskan pada peningkatan investasi di industri kimia hulu guna mengurangi ketergantungan impor, serta peningkatan produktivitas dan daya saing industri besi-baja untuk meningkatkan utilisasi kapasitas produksi terpasang yang masih rendah dan diversifikasi ke arah produk besibaja nonkonstruksi. Sementara, pengembangan industri strategis nasional akan dilakukan terhadap (1) industri berteknologi menengah-tinggi yang menjadi turunan proses hilirisasi seperti industri kimia hilir dan farmasi, industri elektronik dan digital (diantaranya baterai kendaraan bermotor), industri alat angkutan (termasuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan industri dirgantara); serta (2) industri yang memproduksi barang modal untuk industri lainnya seperti industri semikonduktor.

Keberlanjutan hilirisasi dan industrialisasi akan dilakukan melalui (1) pengembangan pembiayaan inovatif (innovatif financing) dan optimalisasi insentif fiskal/nonfiskal untuk menarik investasi dalam rangka pendalaman struktur industri dan pengembangan industri yang berorientasi ekspor; (2) penguatan ekosistem industrialisasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri melalui peningkatan ketersediaan efisiensi faktor produksi (bahan baku/penolong dan energi), perbaikan produktivitas dan peningkatan jumlah tenaga kerja terampil dan profesional, adopsi teknologi dalam proses produksi, dan optimalisasi penerapan standarisasi; (3) aglomerasi industri secara merata dalam pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus baik yang baru maupun yang sudah ada; (4) optimalisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk peningkatan nilai tingkat komponen dalam negeri secara bertahap; (5) penguatan industri kecil dan menengah sebagai rantai pasok industri besar dan sedang; (6) akselerasi penerapan industri hijau melalui dekarbonisasi industri, pemanfaatan teknologi bersih, dan sirkular ekonomi. Peningkatan ketersediaan dan efisiensi faktor produksi berupa bahan baku/penolong yang berbasis sumber daya hayati akan didukung oleh peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan yang diiringi dengan penguatan korporasi

petani, regenerasi petani, modernisasi, serta pertanian berkelanjutan yang sejalan dengan perbaikan tata kelola yurisdiksi berkelanjutan.

c. pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global

Pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global yang mendukung perekonomian diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi, berdaya saing, dan mendukung partisipasi pada rantai pasok global dalam produksi komoditas bernilai tambah tinggi. Dengan demikian, integrasi ekonomi domestik dan global akan berfokus pada (1) pengembangan pusat pertumbuhan terintegrasi melalui (a) penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru, (b) penguatan ekosistem rantai pasok di pusat pertumbuhan, dan (c) peningkatan infrastruktur dan layanan konektivitas pendukung kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru; (2) optimalisasi backbone dalam mendukung integrasi ekonomi melalui (a) standardisasi infrastruktur dan fasilitas pada pelabuhan dan bandara yang menjadi simpul utama, serta (b) peningkatan konektivitas integrasi hinterland dengan simpul utama; (3) penguatan sistem logistik nasional melalui (a) penguatan kebijakan logistik, (b) pengintegrasian dan digitalisasi logistik, (c) pengembangan infrastruktur penunjang logistik, (d) penguatan pelaku logistik, serta (e) peningkatan sumber daya manusia logistik; (4) peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global melalui (a) peningkatan investasi swasta prioritas sebagai pendorong transformasi ekonomi, (b) peningkatan investasi yang berorientasi ekspor dan mendukung partisipasi dalam rantai nilai global, serta (c) peningkatan investasi dalam infrastruktur konektivitas dan logistik; (5) peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global melalui (a) peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai domestik, antardaerah, dan global; (b) peningkatan ekspor produk berteknologi menengah tinggi; (c) peningkatan ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi; (d) peningkatan ekspor pertanian, perikanan, dan industri berbasis sumber daya alam; (e) peningkatan ekspor jasa dan produk kreatif; (f) peningkatan ekspor produk usaha mikro, kecil, dan menengah dan integrasi dalam rantai nilai global; (g) peningkatan rantai nilai produk elektronik dan otomotif termasuk electric vehicle; serta (h) peningkatan utilisasi Free Trade Agreement/Comprehensive Economic Partnership Agreement untuk mendorong partisipasi dalam rantai nilai global.

6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

Arah Kebijakan untuk Prioritas Nasional 6 difokuskan pada :

a. membangun dari desa dan dari bawah

dilaksanakan melalui (a) peningkatan daya saing, produktivitas, penguatan lembaga ekonomi desa, serta pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan desa,

melalui program sosial seperti Program Keluarga Harapan, Dana Desa, Subsidi Pupuk, Mekar, dan kartu bantuan pangan non-tunai bagi masyarakat desa; (b) penguatan ekonomi lokal melalui diversifikasi dan intensifikasi kegiatan ekonomi desa dalam rangka peningkatan produktivitas dan inklusivitas sektor ekonomi dengan memanfaatkan hasil kekayaan alam dan potensi lokal desa; (c) pemenuhan ketersediaan infrastruktur perdesaan (ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan permukiman, konektivitas, energi, telekomunikasi, dan informatika) guna mendukung terciptanya kualitas hidup rakyat di desa setara dengan di kota; (d) pengelolaan keruangan sumber daya desa secara berkelanjutan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung desa serta kawasan perdesaan; (e) peningkatan kompetensi, kapabilitas, dan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa; (f) penyederhanaan dan penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, profesional, dan akuntabel melalui perbaikan birokrasi, serta pemanfaatan sistem informasi desa; (g) optimalisasi sinergitas dukungan pendanaan pembangunan desa dan kelurahan, melalui peningkatan kualitas pemanfaatan Dana Desa serta memperluas cakupan transfer dana daerah ke kelurahan (Dana Kelurahan); (h) pengarusutamaan kebijakan pembangunan desa asimetris berbasis karakteristik dan potensi desa serta kawasan perdesaan; (i) penguatan peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelarasan pembangunan desa dan supra-desa; (j) pengelolaan urbanisasi melalui pembagian peran dan kewenangan penyediaan layanan dasar serta pengaturan penataan desa berkarakteristik urban (delineasi wilayah, kepadatan penduduk, dan tata ruang desa); (k) pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan lokal melalui peningkatan nilai tambah dan diversifikasi aktivitas ekonomi perdesaan strategis yang berkelanjutan; (l) pembangunan desa-desa di kawasan perbatasan yang tercakup pada kecamatan perbatasan prioritas dan pusat kegiatan strategis nasional sebagai upaya afirmasi pembangunan desa dari pinggiran; (m) percepatan pembangunan daerah lambat tumbuh (daerah tertinggal dan sangat tertinggal) didorong untuk bertransformasi menjadi daerah berkembang, maju, hingga mandiri sebagai upaya pengurangan kesenjangan wilayah yang menyasar hingga ke akar masalah pembangunan di level desa/ kelurahan/ kampung.

b. pemerataan ekonomi

dilaksanakan melalui (a) pembangunan 10 Wilayah Metropolitan (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Manado, dan Makassar) menjadi kota layak huni, inklusif, berbudaya, hijau, berketahanan, maju, dan menyejahterakan; (b) pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai simbol identitas nasional dengan tata kelola berstandar global berdasarkan prinsip hijau dan berkelanjutan yang menjadi referensi pembangunan perkotaan lainnya di Indonesia, dan sekaligus menjadi pemicu penguatan rantai

nilai domestik Kawasan Timur Indonesia yang didukung oleh kerangka ekosistem kerja sama tiga kota (Nusantara–Balikpapan–Samarinda); (c) peningkatan akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan termasuk dalam rangka penanganan permukiman kumuh terpadu melalui penyediaan atau perbaikan rumah layak huni berdasarkan karakteristik wilayah yang didukung dengan fasilitas pembiayaan perumahan yang terjangkau khususnya pembelian rumah pertama, penegakan implementasi standar keandalan bangunan hunian, serta peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengembangan perumahan berbasis sistem informasi; (d) pemberdayaan serta penumbuhan usaha mikro kecil dan menengah serta peningkatan akses pembiayaan yang murah bagi usaha mikro; (e) pengembangan infrastruktur konektivitas, penyediaan layanan transportasi penumpang dan barang yang memadai dengan tarif terjangkau, penyediaan layanan perintis serta pemenuhan Kewajiban Pelayanan Publik/Public Service Obligation.

c. Memberantas kemiskinan.

Strategi dalam mendukung arah kebijakan pemberantasan kemiskinan di tahun 2025 dilaksanakan melalui (a) penguatan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi untuk mendorong penggunaan satu data terpadu dan sinergi program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat; (b) penerapan graduasi bantuan sosial dan penguatan kemandirian masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup secara berkesinambungan; (c) penyaluran bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dan adaptif sesuai dengan tingkat kerentanan penduduk; (d) peningkatan cakupan kepesertaan melalui penjangkauan berbasis keagenan maupun komunitas dan peningkatan literasi secara masif pada program jaminan sosial; (e) penguatan integrasi dan interoperabilitas data jaminan sosial berbasis Nomor Induk Kependudukan dengan data terkait lainnya; (f) reformasi perlindungan hari tua, baik melalui bantuan maupun jaminan sosial; (g) penguatan inklusivitas program jaminan sosial termasuk perlindungan bagi pekerja miskin dan tidak mampu, termasuk untuk penyandang disabilitas, lansia, dan penduduk rentan lain; (h) peningkatan koordinasi serta peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program jaminan sosial; (i) pengembangan dan penyediaan layanan sosial dan pengasuhan bagi anak, penyandang disabilitas, lansia, dan penduduk rentan lain; (j) akses yang setara terhadap perekonomian, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan; (k) penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lansia dalam proses pembangunan. Pelaksanaan dilakukan secara nasional dengan mengutamakan lokasi yang memiliki tingkat kemiskinan absolut tinggi, risiko kerentanan tinggi, dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Arah Kebijakan untuk Prioritas Nasional 7 difokuskan pada :

a. arah kebijakan reformasi politik

dilaksanakan melalui (1) mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi, transparansi, mencegah korupsi, dan menjaga keberlangsungan demokrasi; (2) membangun Single Identity Number dan Sistem Informasi Administrasi dan Data Base Kependudukan untuk mencegah identitas ganda, mencegah penyalahgunaannya, dan memudahkan pelacakan aset, pajak, maupun persoalan Nomor Induk Kependudukan Ganda pada Daftar Pemilih Tetap di dalam Pemilu; (3) menjamin penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas, termasuk memperbaiki manajemen pelaksanaan Pemilu dan Pilkada; (4) menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, terutama dengan memperbaiki data pemilih menggunakan sistem yang terintegrasi dengan sistem kependudukan yang telah diperbaiki; dan (5) penerapan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, dan sistem rekrutmen pada partai politik

b. arah kebijakan juga difokuskan pada reformasi hukum,

yang dilaksanakan melalui (1) mendirikan Pusat Legislasi Nasional sebagai think-tank dalam penyusunan kajian terkait dengan peraturan perundang-undangan, sebagai cikal bakal pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi dalam rangka penguatan tata kelola regulasi; (2) meningkatkan kompetensi hakim dan aparat peradilan lainnya dan penguatan independensi peradilan; (3) menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai center of excellence dalam upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui kerja sama untuk melakukan edukasi langsung dengan sektor pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; (4) memperkuat program edukasi antikorupsi bagi generasi muda, serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan antikorupsi di sektor swasta dan publik; (5) memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman; (6) meningkatkan pelayanan terhadap seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri; (7) mewujudkan penegakan hukum yang adil, tidak tebang pilih, transparan, dan mewujudkan penerapan reformasi birokrasi yang berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara dan peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesejahteraan jaksa; (8) penguatan budaya hukum; serta (9) penguatan kelembagaan hukum melalui penguatan lembaga kekuasaan kehakiman dan lembaga hukum di bidang pelayanan, penerapan, dan pembangunan hukum

- c. arah kebijakan yang difokuskan pada reformasi tata kelola pemerintahan meliputi (1) membangun Sistem Integritas Nasional yang memberikan perhatian pada peningkatan integritas dan soft competency Aparatur Sipil Negara maupun Aparat Penegak Hukum; (2) memperkuat kepemimpinan budaya kerja dan citra institusi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, sehingga profesi Aparatur Sipil Negara menarik bagi targeted talent untuk mau bergabung; (3) mempermudah akses belajar bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga mereka siap menghadapi perubahan dunia yang semakin cepat, termasuk untuk mengantisipasi future jobs di era digital; (4) memperkuat sistem manajemen kinerja yang mampu mendorong pegawai Aparatur Sipil Negara untuk menunjukkan kinerja terbaiknya, kinerja akan dikaitkan dengan total reward dan manajemen talenta yang akan menentukan perkembangan dan keberlangsungan karier seorang pegawai Aparatur Sipil Negara; (5) memperbaiki kesejahteraan Aparatur Sipil Negara melalui penerapan konsep total reward, yang mencakup perbaikan sistem penggajian, sistem insentif kinerja, tunjangan/fasilitas (termasuk sistem pensiun), lingkungan kerja, dan kesempatan untuk berkembang bagi Aparatur Sipil Negara; (6) memperkuat sistem manajemen talenta dan menyelaraskannya dengan strategi pembangunan nasional, termasuk di dalamnya strategi dan kebijakan rekrutmen, penempatan, pembangunan talent pool dan mobilitas talenta; (7) memperbaiki sistem pelayanan kepegawaian Aparatur Sipil Negara dalam platform digital yang terintegrasi secara nasional; (8) penyederhanaan dan penguatan proses bisnis pemerintah; (9) penataan kelembagaan program pembangunan dan prioritas nasional; (10) harmonisasi dan kolaborasi kewenangan dan keuangan pusat dan daerah melalui (a) penataan otonomi daerah menasar pada penguatan harmonisasi regulasi pusat dan daerah serta kebijakan kerja sama multi-aktor, (b) peningkatan kapasitas dan tata kelola sumber daya manusia pemerintah daerah, kelembagaan daerah, dan keuangan daerah, (c) pemanfaatan digitalisasi pelayanan publik, serta (d) optimalisasi penerapan desentralisasi asimetris dengan memperhatikan tipologi wilayah (geografis, kapasitas, dan kinerja daerah); dan (11) penguatan manajemen kinerja pembangunan.
- d. arah kebijakan yang difokuskan pada penanggulangan judi dan penyelundupan melalui (a) menutup semua akses ke situs perjudian online, (b) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi, (c) meningkatkan program deteksi dini di kalangan masyarakat terkait tindak pidana perjudian melalui kerja sama dengan berbagai pihak, (d) memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia, serta (e) memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan barang ilegal.

8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Arah Kebijakan untuk Prioritas Nasional 8 difokuskan pada :

a. Masyarakat adil, makmur, dan harmonis,

melalui (a) mengedepankan semangat Tunggal Ika yang tidak terpisahkan di masyarakat yang berkebhinekaan untuk memperkuat rasa persaudaraan, toleransi, persatuan, dan kesatuan antarumat beragama serta sesama anak bangsa; (b) mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui jalan demokrasi yang sesungguhnya, yaitu demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; (c) mengaktifkan kembali kegiatan kolektif kemasyarakatan yang bersifat gotong royong agar bisa menjalin kembali jalinan persatuan antar-elemen masyarakat sejak dini; (d) mereaktualisasi dan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal bagi generasi saat ini dalam aktivitas pendidikan dan pengajaran, baik yang bersifat formal maupun nonformal; (e) menghentikan ancaman persekusi terhadap tiap individu, organisasi, dan kelompok masyarakat terlepas dari latar belakangnya; (f) menjamin kebebasan beribadah dan menjalankan kewajiban sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing; (g) memperkuat moderasi beragama dan kualitas layanan bimbingan keagamaan; (h) meningkatkan sarana dan prasarana peribadatan; (i) memperkuat jaminan produk halal dalam rangka layanan keumatan sekaligus mendukung ekosistem industri halal; (j) meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang akuntabel, aman, dan nyaman; (k) merevitalisasi layanan Kantor Urusan Agama yang berkualitas dan merata; (l) meningkatkan peran tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan; serta (m) mengembangkan dana sosial keagamaan yang produktif.

b. Melestarikan budaya,

melalui (a) meningkatkan anggaran untuk penelitian dan pelestarian situs budaya dan sejarah, termasuk menyiapkan dana abadi kebudayaan; (b) menghidupkan kembali cerita-cerita rakyat bagi generasi muda melalui aktivitas kreatif, inovatif, dan berbasis digital; (c) membangun dan revitalisasi sentra kebudayaan termasuk bioskop rakyat dan gedung kesenian rakyat di seluruh Indonesia; (d) merevitalisasi bangunan kuno dan cagar budaya di seluruh Indonesia sebagai wahana pembelajaran nilai-nilai luhur bangsa bagi generasi muda; (e) membangun kembali taman-taman budaya sebagai wadah perlindungan, pengembangan, dan pemajuan seni-seni tradisional Indonesia; (f) memperluas program-program afirmasi bagi peningkatan kesejahteraan, perlindungan kesenian tradisional yang terancam punah akibat kurangnya regenerasi, rendahnya frekuensi pertunjukan, dan kurangnya sarana prasarana pendukungnya; (g) mengalokasikan dana budaya dan memperbesar dukungan pendanaan untuk mendorong kemandirian

komunitas-komunitas seni budaya di seluruh Indonesia; (h) melengkapi pemutakhiran pendataan, inventarisasi, dan dokumentasi seni tradisional Indonesia; (i) membangun kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya dan seni tradisional dengan meningkatkan partisipasi publik melalui pelibatan masyarakat, media, institusi perguruan tinggi, perusahaan swasta, dan badan usaha milik negara; (j) memperluas dan mengintensifkan kerja sama dengan masyarakat dan komunitas dalam pengembangan kampung seni dan wisata budaya; (k) menjamin keberlangsungan serta memajukan ekosistem seni tradisional agar Indonesia terhindar sebagai negara konsumen budaya dunia; (l) mengintensifkan dan memperluas diplomasi budaya di forum internasional untuk memperjuangkan warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia; (m) mendorong penyelenggaraan festival budaya di seluruh Indonesia agar tidak hanya apresiasi seni masyarakat semakin meningkat, tetapi juga semakin mengasah keterampilan di bidang seni, budaya, dan kreativitas; (n) menjamin kebebasan para seniman serta pelaku budaya untuk berkarya, menyampaikan pendapat, dan berkreasi di muka umum; (o) memperkuat karakter dan jati diri bangsa berdasarkan Pancasila; (p) mengembangkan kawasan pemajuan kebudayaan; (q) memperkuat jaminan hak berkebudayaan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat; (r) mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia; (s) mengembangkan budaya bahari dan merevitalisasi jalur rempah; serta (t) melakukan transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan.

c. Penanganan bencana,

melalui (a) meningkatkan anggaran mitigasi dan penanggulangan bencana, termasuk memutakhirkan sistem peringatan dini bencana; (b) memperkuat sistem deteksi bencana (early warning system) dengan penerapan teknologi terkini; (c) meningkatkan anggaran penanganan bencana untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana dan mengembalikan kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut; (d) membangun infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan untuk menghadapi situasi bencana; (e) menata koordinasi antarlembaga terkait untuk mempercepat penanggulangan dan penanganan bencana; (f) mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab yang berpotensi mengakibatkan timbulnya bencana; (g) menata sinergi antara pemerintah dengan swasta, kelompok masyarakat, dan lembaga donor asing dalam penanganan dan penanggulangan bencana; (h) pemanfaatan ruang budi daya yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan bencana; (i) mengembangkan riset, inovasi, dan teknologi bidang penanggulangan bencana; (j) mengurangi kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim khususnya pada empat sektor, yaitu kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan dengan melakukan intervensi aksi ketahanan iklim; serta

- (k) meningkatkan keandalan pencarian dan pertolongan serta meningkatkan keamanan dan keselamatan seluruh moda transportasi.

4.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Jawa tengah tahun 2026

Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026 Provinsi Jawa Tengah merupakan tahap **“Penguatan Landasan Pembangunan Daerah”** pada RPJMD sebagai tahun pertama, maka tema Pembangunan diarahkan pada **“Meneguhkan Posisi Jawa tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional”**, dengan prioritas daerah dengan focus strategi sebagai berikut:

1. Penguatan Landsan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah;
2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berbasis Lingkungan;
3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Target sasaran makro pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang akan dicapai antara lain meliputi :

1. Angka Kemiskinan sebesar 8,70-8,53%;
2. PDRB Per Kapita sebesar 52,0-55,7 juta Rupiah;
3. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 92,00;
4. Indeks Integritas Nasional sebesar 80,97;
5. Indeks Demokrasi Indonesia 86,46-89,50;
6. Otonomi Fiskal Daerah sebesar 65,72%
7. Pertumbuhan Ekonomi antara 5,00-6,00%;
8. Indeks Modal Manusia sebesar 0,62;
9. Inflasi pada angka 1,50-3,50%
10. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71-4,27%;
11. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 75,73.

4.2.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2026

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan Arah Kebijakan berdasarkan tahapan pembangunan tahunan. Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga.

Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga. Tahapan pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk memberikan tema, nuansa dan arah pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, yang kemudian akan diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap tahunnya. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2026 adalah “Pengembangan Kota Salatiga sebagai jaringan distribusi Pangan Lokal untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah melalui

Pengelolaan SDA secara Berkelanjutan yang didukung oleh Infrastruktur Berkualitas yang Mempermudah Akses Pasar”, dengan difokuskan pada :

1. Mengembangkan ketahanan pangan berbasis komunitas, pengembangan urban farming, memperluas kerjasama antar petani, pedagang dan konsumen untuk menciptakan sistem pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan infrastruktur dan teknologi pertanian guna mempercepat hilirisasi produk pertanian yang didukung dengan pemberdayaan kelompok dalam meningkatkan produksi pertanian;
3. Meningkatkan produksi peternakan dan perikanan budidaya local didukung pelatihan, teknologi dan akses terhadap bibit unggul dan akses pasar.

Pembangunan tahap pertama selain difokuskan pada peningkatan ketahanan pangan daerah, juga diarahkan pada **“Peningkatan Pembangunan SDM dan Pengelolaan potensi perekonomian daerah didukung pemerintahan berintegritas dan infrastruktur berkualitas”**.

Pengoptimalan Pelaksanaan Program pendukung Penerapan SPM Kesehatan, dan Pendidikan yang mendukung peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia, juga menjadi prioritas pembangunan Kota Salatiga pada tahun 2026. Prioritas pembangunan Nasional pada transformasi sosial pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial dan prioritas pembangunan provinsi Jawa Tengah tahun 2026 yang berkaitan dengan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata, tetap dilaksanakan dengan arah kebijakan pada Pemantapan kualitas pendidikan dan kesehatan guna mewujudkan SDM yang berdaya saing.

Sasaran pembangunan pada tahun 2026 berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025-2029 dan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2026, dengan memperhatikan capaian kinerja pada tahun 2025 dan target RPJMD tahun 2026, sebagaimana tersaji pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 4. 5. Sinkronisasi Target Indikator Makro Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Makro	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026		
			Berdasarkan RPJMD	Berdasarkan Rakotekrenbang	Perubahan
1	Angka Kemiskinan	4,2	4,34-4,20	4,34-4,20	4,20 – 3,87
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,67	3,84-3,54	3,84-3,54	3,84-3,54
3	Pertumbuhan Ekonomi	5,98	5,56-6,56	5,56-6,56	5,56-6,56
4	Indeks Pembangunan Manusia	86,23	86,43	86,43	86,43
5	PDRB Perkapita	95,58	103,48-108,48	103,48-108,48	103,48-108,48
6	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	19.134	183.298,80	183.298,80	183.298,80
7	Indeks Daya Saing Daerah	4,08	4,84	4,84	4,84
8	Indeks Reformasi Birokrasi	82,15	82,15	82,15	82,15

Selain berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Salatiga yang telah ditetapkan pada tahapan RPJMD tahun 2025-2026, arah kebijakan pembangunan Kota Salatiga pada Perubahan RKPD Tahun 2026, juga memperhatikan :

1. Prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi.

Persandingan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah serta prioritas pembangunan Kota Salatiga sebagaimana dalam tabel 4.6. 4.7. 4.8, 4.9 dan 4.10;

2. Upaya penanganan permasalahan dan isu strategis

Sinkronisasi permasalahan, isu strategis dan program prioritas sebagaimana tersaji dalam tabel 4.11;

3. Upaya mendukung kebijakan Nasional antara lain Penerapan SPM, Pembangunan Berkelanjutan, dan Stunting yang akan dilaksanakan tahun 2026.

Tabel 4. 6. Penyandingan Prioritas Pembangunan Nasional (Asta Cita), Provinsi Jawa Tengah, dan Kota Salatiga Tahun 2026

No	Nasional			Provinsi Jawa Tengah	Kota Salatiga
	Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif				
	Asta Cita	Quick Wins	Kegiatan Prioritas Utama	Penguatan Landasan Pembangunan Daerah	Peningkatan Pembangunan SDM dan Pengelolaan Potensi Perekonomian Daerah Didukung Pemerintahan Berintegritas Dan Infrastruktur Berkualitas
PN1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia		1 Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	PP1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah	PD3. Peningkatan kualitas ASN dan Implementasi budaya kerja yang berintegritas dan handal
PN7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh), TNI/Polri dan pejabat negara	1 Pencegahan tindak pidana korupsi	a. pelayanan publik yang merata dan inklusif	a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dan selaras dengan perencanaan nasional
			2 Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN	b. kapabilitas teknologi penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi infrastruktur, sumber daya manusia, dan regulasi guna mendukung transformasi digital	b. Meningkatkan sistem pengelolaan kemananan informasi daerah
			3 Transformasi digital layanan publik prioritas	c. penguatan landasan kebijakan perencanaan	c. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan

No	Nasional			Provinsi Jawa Tengah	Kota Salatiga
	Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif				
	Asta Cita	Quick Wins	Kegiatan Prioritas Utama	Penguatan Landasan Pembangunan Daerah	Peningkatan Pembangunan SDM dan Pengelolaan Potensi Perekonomian Daerah Didukung Pemerintahan Berintegritas Dan Infrastruktur Berkualitas
				berbasis data terintegrasi, riset dan risiko serta berorientasi kinerja	pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat
			4 Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan	d. penguatan landasan kebijakan data terintegrasi berbasis teknologi informasi	d. Perluasan jaringan internet broadband dan penyediaan akses WiFi publik di fasilitas layanan umum
			5 Intensifikasi penerimaan negara bukan pajak	e. penguatan landasan ekosistem riset dan inovasi, integrasi IPTEK dalam sektor-sektor prioritas daerah, hilirisasi hasil riset, serta kolaborasi dalam pengembangan riset dan inovasi	e. Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dan kelurahan, dan memperkuat koordinasi dan kerjasama dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan perangkat daerah ditingkat kecamatan dan kelurahan
PN8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat		1 Penguatan karakter dan jati diri bangsa	f. penguatan manajemen ASN melalui pemetaan kebutuhan jabatan berdasarkan kompetensi dan kinerja didukung dengan peningkatan akurasi data kepegawaian	f. Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip daerah yang didukung pemanfaatan tekonologi informasi

No	Nasional			Provinsi Jawa Tengah	Kota Salatiga
	Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif				
	Asta Cita	Quick Wins	Kegiatan Prioritas Utama	Penguatan Landasan Pembangunan Daerah	Peningkatan Pembangunan SDM dan Pengelolaan Potensi Perekonomian Daerah Didukung Pemerintahan Berintegritas Dan Infrastruktur Berkualitas
	Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur				
			2 Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan	g. penguatan pengembangan kompetensi melalui pemetaan kompetensi berbasis tujuan pembangunan daerah	g. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang efektif dan efisien
			3 Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut	h. penguatan nilai-nilai anti korupsi dan budaya integritas penyelenggara pemerintahan	h Penguatan kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat melalui peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dalam berbagai kegiatan guna meningkatkan cinta tanah air, nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari
				i. penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal serta pemetaan risiko dan titik rawan korupsi didukung	

No	Nasional			Provinsi Jawa Tengah	Kota Salatiga
	Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif				
	Asta Cita	Quick Wins	Kegiatan Prioritas Utama	Penguatan Landasan Pembangunan Daerah	Peningkatan Pembangunan SDM dan Pengelolaan Potensi Perekonomian Daerah Didukung Pemerintahan Berintegritas Dan Infrastruktur Berkualitas
				dengan peningkatan kapabilitas APIP	
				j. penguatan pelaksanaan analisis evaluasi dan pengawasan produk hukum, penguatan dokumentasi hukum, serta dasar peningkatan kualitas penyusunan produk hukum	
				k. penguatan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum	
				l. penguatan kualitas pengelolaan digitalisasi manajemen kearsipan	
				m. penguatan kelembagaan agar lebih efektif	
				n. penguatan sinergi pelaksanaan reforma agraria	
				o penguatan koordinasi dan pengawasan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta mendorong inovasi layanan	

No	Nasional			Provinsi Jawa Tengah	Kota Salatiga
	Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif				
	Asta Cita	Quick Wins	Kegiatan Prioritas Utama	Penguatan Landasan Pembangunan Daerah	Peningkatan Pembangunan SDM dan Pengelolaan Potensi Perekonomian Daerah Didukung Pemerintahan Berintegritas Dan Infrastruktur Berkualitas
				administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis digitalisasi sebagai data yang valid dan termutakhir dalam pembangunan daerah	
				p. penguatan pelaksanaan pemetaan daerah rawan secara sinergis, serta penguatan penegakan produk hukum daerah, pembinaan PPNS dan perlindungan masyarakat	
				q. penguatan pelaksanaan pemenuhan hak asasi manusia bagi kelompok rentan terkait layanan dasar serta penjaminan kesetaraan dan kebebasan sipil	
				r. meningkatkan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi	
				s. pembentukan jejaring global dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan regional	

No	Nasional			Provinsi Jawa Tengah	Kota Salatiga
	Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif				
	Asta Cita	Quick Wins	Kegiatan Prioritas Utama	Penguatan Landasan Pembangunan Daerah	Peningkatan Pembangunan SDM dan Pengelolaan Potensi Perekonomian Daerah Didukung Pemerintahan Berintegritas Dan Infrastruktur Berkualitas
				t. peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah	
				u. penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah	
				v. sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional	
				w. perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas	
PN2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian	Mencetak dan meningkatkan produktivityas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional	1 Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema <i>spend to invest</i>	PP2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berbasis Lingkungan	PD2. Peningkatan pengelolaan potensi perekonomian daerah
			2 Pengembangan kawasan sentra produksi pangan	a. penguatan pondasi sektor industri pengolahan dengan pemetaan potensi	a. Pemberdayaan dan penguatan kapasitas UMKM untuk mendukung

No	Nasional			Provinsi Jawa Tengah	Kota Salatiga
	Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif				
	Asta Cita	Quick Wins	Kegiatan Prioritas Utama	Penguatan Landasan Pembangunan Daerah	Peningkatan Pembangunan SDM dan Pengelolaan Potensi Perekonomian Daerah Didukung Pemerintahan Berintegritas Dan Infrastruktur Berkualitas
	Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru		(KSPP)/lumbung pangan Kalimantan Tengah	maupun kelembagaan, dan peningkatan kapasitas dasar pelaku industri	kualitas produk dan jejaring usaha
			3 Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung Pangan Sumatra Selatan	b. penguatan pondasi sektor perdagangan	b. Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat
			4 Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Papua Selatan	c. penguatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif	c. Penguatan kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat melalui peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dalam berbagai kegiatan guna meningkatkan cinta tanah air, nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari
			5 Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan lainnya	d. peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM)	
			6 Pembangunan pangan akuatik (<i>blue food</i>)	e. peningkatan produksi sektor pertanian,	

No	Nasional			Provinsi Jawa Tengah	Kota Salatiga
	Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif				
	Asta Cita	Quick Wins	Kegiatan Prioritas Utama	Penguatan Landasan Pembangunan Daerah	Peningkatan Pembangunan SDM dan Pengelolaan Potensi Perekonomian Daerah Didukung Pemerintahan Berintegritas Dan Infrastruktur Berkualitas
				perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan berbasis riset dan inovasi	
			7 Pembangunan pangan hewani	f. pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan	
			8 Pembangunan pangan lokal dan nabati	g. penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan	
			9 Fortifikasi dan biofortifikasi pangan	h. peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (<i>large scale food fortification/LSFF</i>)	

No	Nasional			Provinsi Jawa Tengah	Kota Salatiga
	Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif				
	Asta Cita	Quick Wins	Kegiatan Prioritas Utama	Penguatan Landasan Pembangunan Daerah	Peningkatan Pembangunan SDM dan Pengelolaan Potensi Perekonomian Daerah Didukung Pemerintahan Berintegritas Dan Infrastruktur Berkualitas
			10 Peningkatan penyediaan energi	i. pencegahan pemborosan pangan (<i>food loss and waste</i>)	
			11 Perluasan akses dan jangkuan pelayanan energi	j. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air guna mendukung peningkatan produksi pangan	
			12 Penguatan implementasi transisi energi berkeadilan	k. pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	
			13 Konservasi sumberdaya air	l. penguatan pembinaan pertambangan dengan penerapan <i>Good Mining Practice</i>	
			14 Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir	m. peningkatan pertumbuhan penanaman modal	
			15 Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS	n. pengembangan ekosistem halal, industri halal dan penguatan keuangan syariah	
			16 Pengembangan terpadu pesisir utara jawa	o peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan	

No	Nasional			Provinsi Jawa Tengah	Kota Salatiga
	Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif				
	Asta Cita	Quick Wins	Kegiatan Prioritas Utama	Penguatan Landasan Pembangunan Daerah	Peningkatan Pembangunan SDM dan Pengelolaan Potensi Perekonomian Daerah Didukung Pemerintahan Berintegritas Dan Infrastruktur Berkualitas
				penumpang, serta keterhubungan antar daerah (utamanya pada jalur logistik sentra kawasan pertanian) dan kewilayahan	
			17 Penguatan faktor pendukung ekonomi digital	p. peningkatan produktivitas tanaman pangan desa	
			18 Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya	q. penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa	
			19 Pengelolaan susut dan sisa pangan	r. penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa	
			20 Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik	s. penguatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan termasuk integrasi kegiatan posyandu untuk mendukung SPM, serta penguatan peran lembaga kemasyarakatan	

No	Nasional			Provinsi Jawa Tengah	Kota Salatiga
	Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif				
	Asta Cita	Quick Wins	Kegiatan Prioritas Utama	Penguatan Landasan Pembangunan Daerah	Peningkatan Pembangunan SDM dan Pengelolaan Potensi Perekonomian Daerah Didukung Pemerintahan Berintegritas Dan Infrastruktur Berkualitas
				desa/kelurahan dan lembaga adat desa	
			21 Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	t. penguatan landasan tata kelola pemerintahan desa	
			22 Peningkatan kualitas ekosistem gambut	u. peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah	
			23 Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan	v. pemetaan dan pemutakhiran status sumber daya alam strategiskelembagaan dan regulasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	
			24 peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR	w. penguatan inisiatif skema insentif/disinsentif bagi pelaku usaha serta apresiasi untuk masyarakat yang menerapkan praktik berkelanjutan	
			25 Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut	x. penguatan upaya dan inisiatif konservasi berbasis masyarakat dengan pendekatan keterpaduan/integrasi pengelolaan lanskap darat dan laut	

No	Nasional			Provinsi Jawa Tengah	Kota Salatiga
	Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif				
	Asta Cita	Quick Wins	Kegiatan Prioritas Utama	Penguatan Landasan Pembangunan Daerah	Peningkatan Pembangunan SDM dan Pengelolaan Potensi Perekonomian Daerah Didukung Pemerintahan Berintegritas Dan Infrastruktur Berkualitas
PN3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	1 Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya	y. identifikasi potensi pendanaan hijau-wilayah strategis/aktivitas yang mendukung keberlanjutan lingkungan hidup	
			2 Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital	aa. penguatan pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	
			3 Percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	bb. penguatan ketahanan energi berbasis potensi lokal (utamanya mendukung produktivitas pertanian)	

No	Nasional			Provinsi Jawa Tengah	Kota Salatiga
	Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif				
	Asta Cita	Quick Wins	Kegiatan Prioritas Utama	Penguatan Landasan Pembangunan Daerah	Peningkatan Pembangunan SDM dan Pengelolaan Potensi Perekonomian Daerah Didukung Pemerintahan Berintegritas Dan Infrastruktur Berkualitas
			4 Percepatan pembangunan destinasi prioritas Lombok-Gili Tramena	cc. peningkatan kapasitas adaptasi perubahan iklim	
			5 Percepatan pembagunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba	dd. harmonisasi kebijakan dan tata kelola lintas sektor penerapan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim	
			6 Percepatan pembangunan destinasi prioritas Labuan Bajo	ee. penguatan upaya reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir yang mencakup seluruh rantai layanan yang disertai dengan penguatan serta penegakan hukum dan peraturan	
			7 Penguatan ekosistem aplikasi dan Gim	ff. peningkatan kualitas air melalui pengelolaan limbah industri UMKM	
			8 Pengembangan koperasi sektor produksi	gg. penguatan infrastruktur sanitasi air limbah domestik	
PN5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya		1 Pengembangan hilirisasi Nikel	hh. penguatan infrastruktur akses air minum yang dikelola secara aman dalam rangka optimalisasi	PD4 Peningkatan identifikasi dan inventarisasi sumber daya serta masalah lingkungan hidup

No	Nasional			Provinsi Jawa Tengah	Kota Salatiga
	Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif				
	Asta Cita	Quick Wins	Kegiatan Prioritas Utama	Penguatan Landasan Pembangunan Daerah	Peningkatan Pembangunan SDM dan Pengelolaan Potensi Perekonomian Daerah Didukung Pemerintahan Berintegritas Dan Infrastruktur Berkualitas
	Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri			pemanfaatan sumber daya air	
			2 Pengembangan hilirisasi Tembaga	ii. penguatan perwujudan ruang Jawa Tengah dengan mengintegrasikan rencana pembangunan dengan rencana tata ruang melalui SPPR	PD5 Peningkatan infrastruktur kewilayahan guna menunjang efektifitas layanan perkotaan
			3 Pengembangan hilirisasi Bauksit	jj. penguatan kelembagaan dan kapasitas institusi penanggulangan bencana	a. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar (air minum, sanitasi dan rumah layak) bagi masyarakat
			4 Pengembangan hilirisasi Timah	kk. peningkatan kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat bencana	b. Mengembangkan sistem manajemen transportasi cerdas guna meningkatkan efisiensi, keselamatan dan kenyamanan sistem transportasi
			5 Pengembangan hilirisasi Kelapa Sawit	ll. pemberdayaan sosial dan ekonomi untuk membangun ketahanan masyarakat;	c. Meningkatkan sistem peringatan dini dan koordinasi antar instansi terkait dalam pencegahan dan penanggulangan

No	Nasional			Provinsi Jawa Tengah	Kota Salatiga
	Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif				
	Asta Cita	Quick Wins	Kegiatan Prioritas Utama	Penguatan Landasan Pembangunan Daerah	Peningkatan Pembangunan SDM dan Pengelolaan Potensi Perekonomian Daerah Didukung Pemerintahan Berintegritas Dan Infrastruktur Berkualitas
					bencana maupun peristiwa kebakaran
			6 Pengembangan hilirisasi Kelapa	mm. pengelolaan data dan informasi untuk pengambilan keputusan	d. Mengembangkan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat
			7 Pengembangan hilirisasi Rumput Laut	nn. pengembangan literasi kebencanaan, pemberdayaan masyarakat, dan inklusi sosial dalam penanggulangan bencana	
			8 Pengembangan hilirisasi Kimia	oo. perluasan jejaring kemitraan serta pendanaan alternatif;	
			9 Pengembangan hilirisasi Semikonduktor	pp. pengembangan riset dan inovasi kebencanaan serta pemanfaatan teknologi	
			10 Pengembangan industri tekstil dan produk tekstil	oo. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berbasis Lingkungan	

No	Nasional			Provinsi Jawa Tengah	Kota Salatiga
	Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif				
	Asta Cita	Quick Wins	Kegiatan Prioritas Utama	Penguatan Landasan Pembangunan Daerah	Peningkatan Pembangunan SDM dan Pengelolaan Potensi Perekonomian Daerah Didukung Pemerintahan Berintegritas Dan Infrastruktur Berkualitas
			11 Penguatan industri logam dasar, besi dan baja		
			12 Pengembangan industri dirgantara		
			13 Pengembangan KEK Sei Mangkei		
			14 Pengembangan KIT Batang		
			15 Pengembangan KI Weda bay		
PN6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut	1 Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan		
			2 Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif		
			3 Peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif		
			4 Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara		

No	Nasional			Provinsi Jawa Tengah	Kota Salatiga
	Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif				
	Asta Cita	Quick Wins	Kegiatan Prioritas Utama	Penguatan Landasan Pembangunan Daerah	Peningkatan Pembangunan SDM dan Pengelolaan Potensi Perekonomian Daerah Didukung Pemerintahan Berintegritas Dan Infrastruktur Berkualitas
			5 Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU		
			6 Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa		
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil	1 Perluasan layanan pendidikan anak usia dini	PP3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	PD1 Peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia
		Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah	2 Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah yang berkualitas	a. pemantapan identifikasi pemetaan SMK dengan potensi lokal, pengembangan dan penguatan kerjasama DUDI	a. Meningkatkan kualitas dan pemerataan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan kurikulum berbasis digital pada pendidikan anak usia dini,

No	Nasional			Provinsi Jawa Tengah	Kota Salatiga
	Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif				
	Asta Cita	Quick Wins	Kegiatan Prioritas Utama	Penguatan Landasan Pembangunan Daerah	Peningkatan Pembangunan SDM dan Pengelolaan Potensi Perekonomian Daerah Didukung Pemerintahan Berintegritas Dan Infrastruktur Berkualitas
		Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten		serta rintisan SMK Unggulan	pendidikan dasar dan menengah menuju Pendidikan Salatiga Standar Internasional
		Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi	3 Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah	b. pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), evaluasi dan pelaksanaan SMK Boarding dan Semi Boarding serta pemberian bantuan biaya pendidikan (beasiswa)	b. Pemetaan dan pendataan anak-anak dari keluarga miskin yang membutuhkan akses pendidikan, didukung dengan penyediaan lokasi dan SDM dalam mendukung implementasi sekolah rakyat di Kota Salatiga
			4 Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul	c. pemerataan mutu layanan pendidikan dengan pemenuhan biaya operasional sekolah dan revitalisasi prasarana sarana pendidikan	c. Meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat untuk mendukung promotif dan preventif terutama dalam edukasi gaya hidup sehat, kesehatan mental, pencegahan penyakit menular dan tidak menular
			5 Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi	d. penguatan pendidikan karakter dan inklusi dengan meningkatkan kapasitas guru dalam pencegahan serta penanganan <i>bullying</i>	d. Meningkatkan jaminan pemerlihaan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan

No	Nasional			Provinsi Jawa Tengah	Kota Salatiga
	Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif				
	Asta Cita	Quick Wins	Kegiatan Prioritas Utama	Penguatan Landasan Pembangunan Daerah	Peningkatan Pembangunan SDM dan Pengelolaan Potensi Perekonomian Daerah Didukung Pemerintahan Berintegritas Dan Infrastruktur Berkualitas
			6 Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi	e. penguatan tata kelola pendidikan berbasis perencanaan, hasil evaluasi serta pemantauan perizinan penyelenggaraan pendidikan	e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga dan pengembangan potensi atlet lokal
			7 Penurunan kematian ibu dan anak	f. pemetaan kebutuhan prasarana dan sarana di pelayanan kesehatan primer dan lanjutan	f. Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, pemberdayaan pelaku seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi dan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat identitas dan keberlangsungan budaya daerah
			8 Pencegahan dan penurunan stunting	g. pengembangan program pemerataan SDM kesehatan	g. Penguatan regulasi dan kebijakan perlindungan perempuan dan anak serta kesejahteraan keluarga
			9 Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	h. pengembangan keterampilan kader kesehatan	
			10 Penuntasan TBC	i. peningkatan kepesertaan aktif untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	

No	Nasional			Provinsi Jawa Tengah	Kota Salatiga
	Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif				
	Asta Cita	Quick Wins	Kegiatan Prioritas Utama	Penguatan Landasan Pembangunan Daerah	Peningkatan Pembangunan SDM dan Pengelolaan Potensi Perekonomian Daerah Didukung Pemerintahan Berintegritas Dan Infrastruktur Berkualitas
			11 Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita	j. pengembangan sistem informasi kesehatan terintegrasi	
			12 Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi	k. pemetaan seluruh faktor risiko dan determinan kesehatan di setiap kabupaten/kota serta inisiasi penyelesaian faktor risiko	
			13 Eliminasi penyakit kusta dan <i>Schistosomiasis</i>	l. peningkatan dan penguatan literasi masyarakat dibidang kesehatan	
			14 Investasi pelayanan kesehatan primer	m. peningkatan jejaring pelayanan dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah dan nasional	
			15 Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	n. penyediaan data dan informasi ObjekPemajuan Kebudayaan, cagar budaya yang akurat, serta SDM dan lembaga kebudayaan untuk mewujudkan talenta nasional seni budaya	

No	Nasional			Provinsi Jawa Tengah	Kota Salatiga
	Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif				
	Asta Cita	Quick Wins	Kegiatan Prioritas Utama	Penguatan Landasan Pembangunan Daerah	Peningkatan Pembangunan SDM dan Pengelolaan Potensi Perekonomian Daerah Didukung Pemerintahan Berintegritas Dan Infrastruktur Berkualitas
			16 Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) seni budaya	o peningkatan perlindungan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya	
			17 Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi	p. peningkatan kapasitas SDM dan lembaga kebudayaan	
			18 Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga	q. pemetaan kerja sama lintas sektor dan kemitraan potensial dalam pemajuan kebudayaan	
				r. penguatan pondasi pembangunan olahraga melalui partisipasi aktif berolahraga di masyarakat dan satuan pendidikan, mobilisasi olahraga masyarakat dan pendidikan secara masif, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan, pemetaan atlet potensial, pemetaan prasarana sarana olahraga, serta pemetaan cabang olahraga unggulan	

No	Nasional			Provinsi Jawa Tengah	Kota Salatiga
	Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif				
	Asta Cita	Quick Wins	Kegiatan Prioritas Utama	Penguatan Landasan Pembangunan Daerah	Peningkatan Pembangunan SDM dan Pengelolaan Potensi Perekonomian Daerah Didukung Pemerintahan Berintegritas Dan Infrastruktur Berkualitas
				s. penguatan tata kelola literasi melalui koordinasi antar <i>stakeholder</i> , pelibatan komunitas literasi dalam penyadaran gemar membaca masyarakat, peningkatan kapasitas SDM perpustakaan, peningkatan prasarana sarana perpustakaan	
				t. pemetaan potensi sumber arsip untuk melengkapi khazanah arsip	
				u. peningkatan penyadaran, kapasitas pemuda serta penguatan kewirausahaan pemuda	
				v. peningkatan pemerataan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	
				w. peningkatan pembangunan berbasis gender	
				x. peningkatan ketahanan keluarga	

No	Nasional			Provinsi Jawa Tengah	Kota Salatiga
	Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif				
	Asta Cita	Quick Wins	Kegiatan Prioritas Utama	Penguatan Landasan Pembangunan Daerah	Peningkatan Pembangunan SDM dan Pengelolaan Potensi Perekonomian Daerah Didukung Pemerintahan Berintegritas Dan Infrastruktur Berkualitas
				y. pemetaan kompetensi tenaga kerja pada sektor unggulan yang memiliki tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah, dan penguatan kapasitas lembaga pelatihan dan kualitas instruktur.	

Tabel 4. 7. Penyandingan Prioritas Nasional, Tema Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Kota Salatiga Tahun 2026

No	Nasional			Jawa Tengah 2026	Kota Salatiga 2026
	Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif			Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Pengembangan Kota Salatiga sebagai jaringan distribusi pangan lokal untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan yang didukung oleh infrastruktur berkualitas yang mempermudah akses pasar
	Asta Cita	Quick Wins	Kegiatan Prioritas Utama		
PN1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia		1 Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S)		
PN2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional	1 Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema <i>spend to invest</i>	1 peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan	1 Mengembangkan ketahanan pangan berbasis komunitas, pengembangan urban farming, memperluas kerjasama antara petani, pedagang, dan konsumen untuk menciptakan sistem pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan
			2 Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Kalimantan Tengah	2 penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan	2 Meningkatkan infrastruktur dan teknologi pertanian guna mempercepat hilirisasi produk pertanian yang didukung dengan pemberdayaan kelompok dalam meningkatkan produksi pertanian
			3 Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung Pangan Sumatra Selatan	3 pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	3 Meningkatkan produksi peternakan dan perikanan budidaya lokal didukung pelatihan, teknologi, dan akses terhadap bibit unggul dan akses pasar
			4 Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Papua Selatan	4 penguatan sistem <i>agroforestry</i> berbasis potensi lokal	

No	Nasional			Jawa Tengah 2026	Kota Salatiga 2026
	Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif			Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Pengembangan Kota Salatiga sebagai jaringan distribusi pangan lokal untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan yang didukung oleh infrastruktur berkualitas yang mempermudah akses pasar
	Asta Cita	Quick Wins	Kegiatan Prioritas Utama		
			5 Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan lainnya	5 pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan	
			6 Pembangunan pangan akuatik (<i>blue food</i>)	6 penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan	
			7 Pembangunan pangan hewani	7 peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (<i>large scale food fortification/LSFF</i>)	
			8 Pembangunan pangan lokal dan nabati	8 pencegahan pemborosan pangan (<i>food loss and waste</i>)	
			9 Fortifikasi dan biofortifikasi pangan	9 penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif	

No	Nasional			Jawa Tengah 2026	Kota Salatiga 2026
	Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif			Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Pengembangan Kota Salatiga sebagai jaringan distribusi pangan lokal untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan yang didukung oleh infrastruktur berkualitas yang mempermudah akses pasar
	Asta Cita	Quick Wins	Kegiatan Prioritas Utama		
			10 Peningkatan penyediaan energi	10 peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian dan ketahanan pangan desa	
			11 Perluasan akses dan jangkuan pelayanan energi	11 peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi	
			12 Penguatan implementasi transisi energi berkeadilan	12 penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa	
			13 Konservasi sumberdaya air	13 penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa	
			14 Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir	14 penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah	
			15 Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan	15 peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK	

No	Nasional			Jawa Tengah 2026	Kota Salatiga 2026
	Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif			Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Pengembangan Kota Salatiga sebagai jaringan distribusi pangan lokal untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan yang didukung oleh infrastruktur berkualitas yang mempermudah akses pasar
	Asta Cita	Quick Wins	Kegiatan Prioritas Utama		
			berketahanan iklim berbasis CWIS	dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal	
			16 Pengembangan terpadu pesisir utara jawa	16 reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras dengan teknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanian berkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB	
			17 Penguatan faktor pendukung ekonomi digital	17 penguatan kerja sama DUDI bidang agritech, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian	
			18 Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya	18 peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, perlindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan	

No	Nasional			Jawa Tengah 2026	Kota Salatiga 2026
	Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif			Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Pengembangan Kota Salatiga sebagai jaringan distribusi pangan lokal untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan yang didukung oleh infrastruktur berkualitas yang mempermudah akses pasar
	Asta Cita	Quick Wins	Kegiatan Prioritas Utama		
				lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal	
			19 Pengelolaan susut dan sisa pangan	19 mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong sport <i>tourism</i> sebagai penggerak ekonomi pangan lokal	
			20 Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik	20 mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan	
			21 Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	21 peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori	

No	Nasional			Jawa Tengah 2026	Kota Salatiga 2026
	Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif			Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Pengembangan Kota Salatiga sebagai jaringan distribusi pangan lokal untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan yang didukung oleh infrastruktur berkualitas yang mempermudah akses pasar
	Asta Cita	Quick Wins	Kegiatan Prioritas Utama		
				kolektif agraris Jawa Tengah	
			22 Peningkatan kualitas ekosistem gambut	22 mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui program inkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian	
			23 Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan		
			24 peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR		
			25 Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut		
PN3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong	Melanjutkan pembangunan Infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan menjamin penyediaan rumah murah	1 Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya		
			2 Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital		

No	Nasional			Jawa Tengah 2026	Kota Salatiga 2026
	Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif			Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Pengembangan Kota Salatiga sebagai jaringan distribusi pangan lokal untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan yang didukung oleh infrastruktur berkualitas yang mempermudah akses pasar
	Asta Cita	Quick Wins	Kegiatan Prioritas Utama		
	Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	3 Percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan		
			4 Percepatan pembangunan destinasi prioritas Lombok-Gili Tramena		
			5 Percepatan pembagunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba		
			6 Percepatan pembangunan destinasi prioritas Labuan Bajo		
			7 Penguatan ekosistem aplikasi dan Gim		
			8 Pengembangan koperasi sektor produksi		
PN4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi	Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil	1 Perluasan layanan pendidikan anak usia dini		

No	Nasional			Jawa Tengah 2026	Kota Salatiga 2026
	Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif			Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Pengembangan Kota Salatiga sebagai jaringan distribusi pangan lokal untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan yang didukung oleh infrastruktur berkualitas yang mempermudah akses pasar
	Asta Cita	Quick Wins	Kegiatan Prioritas Utama		
	Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten	2 Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah yang berkualitas		
		Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi	3 Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah		
			4 Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul		
			5 Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi		
			6 Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi		
			7 Penurunan kematian ibu dan anak		
			8 Pencegahan dan penurunan stunting		

No	Nasional			Jawa Tengah 2026	Kota Salatiga 2026
	Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif			Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Pengembangan Kota Salatiga sebagai jaringan distribusi pangan lokal untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan yang didukung oleh infrastruktur berkualitas yang mempermudah akses pasar
	Asta Cita	Quick Wins	Kegiatan Prioritas Utama		
			9 Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis		
			10 Penuntasan TBC		
			11 Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita		
			12 Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi		
			13 Eliminasi penyakit kusta dan <i>Schistosomiasis</i>		
			14 Investasi pelayanan kesehatan primer		
			15 Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses		
			16 Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) seni budaya		

No	Nasional			Jawa Tengah 2026	Kota Salatiga 2026
	Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif			Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Pengembangan Kota Salatiga sebagai jaringan distribusi pangan lokal untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan yang didukung oleh infrastruktur berkualitas yang mempermudah akses pasar
	Asta Cita	Quick Wins	Kegiatan Prioritas Utama		
PN5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri		17 Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi		
			18 Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga		
			1 Pengembangan hilirisasi Nikel		
			2 Pengembangan hilirisasi Tembaga		
			3 Pengembangan hilirisasi Bauksit		
			4 Pengembangan hilirisasi Timah		
			5 Pengembangan hilirisasi Kelapa Sawit		
			6 Pengembangan hilirisasi Kelapa		
			7 Pengembangan hilirisasi Rumput Laut		
			8 Pengembangan hilirisasi Kimia		
			9 Pengembangan hilirisasi Semikonduktor		

No	Nasional			Jawa Tengah 2026	Kota Salatiga 2026
	Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif			Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Pengembangan Kota Salatiga sebagai jaringan distribusi pangan lokal untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan yang didukung oleh infrastruktur berkualitas yang mempermudah akses pasar
	Asta Cita	Quick Wins	Kegiatan Prioritas Utama		
			10 Pengembangan industri tekstil dan produk tekstil		
			11 Penguatan industri logam dasar, besi dan baja		
			12 Pengembangan industri dirgantara		
			13 Pengembangan KEK Sei Mangkei		
			14 Pengembangan KIT Batang		
			15 Pengembangan KI Weda bay		
PN6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut	1 Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan		
			2 Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif		
			3 Peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif		
			4 Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara		

No	Nasional			Jawa Tengah 2026	Kota Salatiga 2026
	Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif			Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Pengembangan Kota Salatiga sebagai jaringan distribusi pangan lokal untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan yang didukung oleh infrastruktur berkualitas yang mempermudah akses pasar
	Asta Cita	Quick Wins	Kegiatan Prioritas Utama		
			5 Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU		
			6 Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa		
PN7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh), TNI/Polri dan pejabat negara	1 Pencegahan tindak pidana korupsi		
			2 Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN		
			3 Transformasi digital layanan publik prioritas		
			4 Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan		
			5 Intensifikasi penerimaan negara bukan pajak		
PN8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan		1 Penguatan karakter dan jati diri bangsa		
			2 Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan		

No	Nasional			Jawa Tengah 2026	Kota Salatiga 2026
	Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif			Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Pengembangan Kota Salatiga sebagai jaringan distribusi pangan lokal untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan yang didukung oleh infrastruktur berkualitas yang mempermudah akses pasar
	Asta Cita	Quick Wins	Kegiatan Prioritas Utama		
	Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur		3 Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut		

Tabel 4. 8. Penyandingan Program Pusat, Jawa Tengah dan Program Kota Salatiga Tahun 2026

No.	Program Hasil Terbaik Cepat	Program Jawa Tengah	Program Salatiga
1	Memberikan makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil	Percepatan penanganan stunting melalui pemberian suplemen dan pemenuhan gizi bagi balita dan ibu hamil	PROGRAM SEHATI: Salatiga Sehat Terlindungi
			Layanan pendampingan tenaga medis di saat kehamilan, kelahiran dan nifas.
			Layanan Kesehatan Ibu bebas Anemia dan Terpenuhi Nutrisi
			Layanan Jaminan Kesehatan bayi periode 1000 HPK menuju Salatiga Zero stunting.
2	Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten	Pap Smear gratis	PROGRAM SEHATI: Salatiga Sehat Terlindungi
		Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin	Pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
		Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa	Meningkatkan fasilitas Kesehatan dan Menyiapkan Tenaga Medis Profesional untuk RSUD berstandar Internasional
		Mendorong penyediaan 1 Desa/Kelurahan 1 setiap Puskesmas Pembantu;	
3	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional	Mendorong Pembangunan desa berdaya (lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional dan Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana)	PROGRAM SMART URBAN FARMING
		Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi	Meningkatkan infrastruktur distribusi pangan untuk memastikan kelancaran aliran pangan dari produsen ke konsumen.
4	Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap Kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi	Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta	pengelolaan budidaya pangan yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan pertanian on farm dan off farm untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan pengembangan sektor unggulan daerah
			PROGRAM SALATIGA CERDAS
5	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilennial untuk membuka lapangan kerja	Meningkatkan kualitas sarana prasarana, tenaga pendidik, dan bahan ajar pendidikan dasar dan menengah menuju Pendidikan Salatiga Standar Internasional.
			JARKOM MABAR
			Penyaluran bantuan Insentif Penambahan Modal Kerja sebesar Rp. 10 Juta untuk 1.000 usaha rintisan/startup, yang sudah melalui fase inkubator bisnis.

No.	Program Hasil Terbaik Cepat	Program Jawa Tengah	Program Salatiga
			PROGRAM SEKAR: (Salatiga Berkarya)
			Pengembangan ekonomi kreatif dengan mengutamakan komoditas unggulan lokal melalui pendampingan UMKM
6	Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh) TNI/POLRI, dan pejabat negara	Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, ASN, program agama dan beasiswa untuk siswa miskin, Guru, Santri, penghafal quran, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi	Peningkatan dukungan kelembagaan dan operasional pada pendidikan kesetaraan dan lembaga keterampilan dalam pembelajaran kewirausahaan berorientasi global
7	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersubsidi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Infrastruktur dan Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni;	PROGRAM BIRULAH (Bangun Rumah Layak Huni)
		Subsidi Pangan Murah	Program bantuan sosial untuk pemugaran rumah tangga miskin untuk mendapatkan rumah yang sehat
		Fasilitas rumah susun untuk MBR bekerjasama dengan BUMN, BUMD, dan swasta	PROGRAM STBM
		Taruna karya mandiri melalui program kartu zilennial untuk membuka lapangan kerja	Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pemberian bantuan keuangan kelurahan/RW untuk merubah perilaku higiene dan membangun sarana sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat
8	Mendirikan Badan Penerimaan negara daerah untuk memaksimalkan penerimaan negara terhadap pendapatan bruto (PDB) ke 23%	Membentuk Biro Pembinaan BUMD dan Pemanfaatan Aset Daerah, Membentuk UPTD Pengelolaan Aset, Riset Potensi Probis dan BUMD, Riset Potensi Daerah serta Sumber Daya; Transparansi Tata Kelola Tambang Galian C;Transparansi Tata Kelola CSR untuk Meningkatkan PAD Daerah	PROGRAM SEKAR: (Salatiga Berkarya)
			Optimalisasi aset Pemerintah Kota Salatiga dan revitalisasi BUMD menjadi lebih produktif berkolaborasi dengan investasi swasta.

Pada tahun 2026 Kota Salatiga mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk Provinsi Jawa Tengah dengan dukungan arah kebijakan sebagai berikut :

- (1) Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), antara lain melalui:
 - Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas;
 - Menyediakan sarana madrasah untuk menunjang pembelajaran;
 - Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran;
 - Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah;
 - Revitalisasi pendidikan nonformal;
 - Penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas.
- (2) Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui:
 - Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro;
 - Pendayagunaan dokter spesialis.
 - Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis melalui:
 - Melakukan sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis;
 - Membina puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis;
 - Melakukan pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu
 - Pemeriksaan kesehatan gratis.
- (3) Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, antara lain melalui:
 - Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa;
 - Penyehatan lingkungan;
 - Pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan gratis;
 - Penguatan surveilans, pengendalian KLB/wabah dan penanganan bencana;
 - Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba;
 - Penguatan sistem pengawasan pangan, sediaan farmasi.
- (4) Penuntasan TBC melalui:
 - Menyediakan bahan dan alat pencegahan dan pengendalian TBC (TPT);
 - Menanggulangi TB di tempat kerja;
 - Melakukan penemuan aktif dan skrining mobile;
 - Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat.
- (5) Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kab/Kota melalui:
 - Meningkatkan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah;
 - Mengembangkan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak;

- Pengadaan peralatan Kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit (SIHREN) (LR - 11).
- (6) Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, melalui:
 - Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan;
 - Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan;
 - Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;
 - Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan;
 - Penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam proses pembangunan.
- (7) Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, antara lain melalui:
 - Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia;
 - Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan
- (8) Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir, antara lain melalui:
 - Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan;
 - Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR.
- (9) Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, melalui:
 - Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan (PLTM);
 - Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan gardu induk;
 - Penerapan jaringan cerdas (smart grid) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi;
 - Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik;
 - Penerapan Internet of Things (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara real-time;
 - Perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan;
 - Pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU);
 - Percepatan konversi BBM ke BBG.
- (10) Percepatan transformasi digital, antara lain melalui:
 - Perluasan infrastruktur digital;
 - Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital;
 - Pembangunan jaringan broadband hingga ke pelosok.
- (11) Pelestarian dan pemajuan kebudayaan di Jawa Tengah, antara lain melalui:
 - Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan;
 - Pelestarian Cagar Budaya, ODCB, dan OPK;
 - Event film, musik, dan seni;
 - Peningkatan kompetensi SDM kebudayaan;

- Pengembangan pariwisata berbasis cagar budaya dan/atau objek pemajuan kebudayaan;
 - Penguatan industri kreatif berbasis seni dan budaya;
 - Pelindungan dan pelestarian warisan budaya;
 - Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- (12) Pengelolaan hutan secara lestari melalui:
- Peningkatan produktivitas hasil kehutanan;
 - Pengembangan produk melalui agroforestri;
 - Pengembangan kapasitas pengelola kawasan;
 - Penguatan kelompok perhutanan sosial, dan perlindungan serta pengamanan.
- (13) Penguatan ekonomi syariah melalui:
- Pengembangan Industri dan UMKM Halal;
 - Peningkatan Ekspor Halal dan Kerjasama Ekonomi Syariah Internasional;
 - Penguatan Ekosistem Halal;
 - Penguatan Keuangan Syariah;
 - Penguatan Dana Sosial Syariah.
- (14) Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi, antara lain melalui:
- Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi, terutama koperasi sektor produksi;
 - Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif;
 - Pengembangan kewirausahaan.
 - Peningkatan kapasitas dan pengembangan infrastruktur SDM transportasi;
 - Irigasi Perpompaan (QW);
 - Sarana Sistem Rantai Dingin Hasil KP;
 - Peserta Pelatihan Vokasi Bidang Industri dan Jasa;
 - Kawasan Bawang Merah;
 - Kawasan Aneka Cabai;
 - Ternak Ruminansia Perah;
 - Pengembangan kawasan Perkebunan dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas perkebunan;
 - Penyediaan Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat;
 - Penyusunan Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional;
- (15) Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S) melalui:
- Mendampingi perusahaan pers dalam pengembangan kapasitas pengelolaan perusahaan pers;
 - Menyelesaikan pengaduan masyarakat atas kasus pers;
 - Memfasilitasi uji kompetensi wartawan;
 - Melaksanakan pelatihan bidang jurnalistik;

- Melaksanakan pelatihan SDM bidang penyiaran.
- (16) Internalisasi HAM untuk Kebijakan Humanis, Inklusif dan Berperspektif Gender melalui:
 - Pemajuan kerangka regulasi dan kolaborasi untuk mendorong Peran dan Kepemimpinan Perempuan dalam menjaga keberagaman dan pemenuhan HAM perempuan;
 - Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pemerintah daerah melalui penilaian HAM;
 - Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi K/L melalui penilaian HAM;
 - Pendidikan HAM bagi K/L/D.
- (17) Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim melalui:
 - Indonesia Game Academy;
 - Fasilitas Akses Pendanaan dan Pembiayaan Industri Gim.
- (18) Pencegahan tindak pidana korupsi melalui:
 - Roadmap penguatan sistem antikorupsi;
 - Pemenuhan kewajiban Indonesia untuk akses Konversi Anti-Suap (OECD);
 - Integrasi pencegahan korupsi di K/L dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
- (19) Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk melalui:
 - Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha;
 - Penguatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM;
 - Pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal;
 - Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;
 - Fasilitas pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.

Selain itu, Kota Salatiga melakukan dukungan dan penyelarasan dengan 136 program prioritas Provinsi Jawa Tengah, yang di dalamnya termasuk 35 program delegatif, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4. 9. Dukungan Program Pembangunan Daerah Kota Salatiga terhadap Prioritas Nasional (Asta Cita) Tahun 2026

No	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
		2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
		3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
		4	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
		5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
		2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
		3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

No	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	
	Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
		5	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
		6	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
		7	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
		8	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
		9	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
		10	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
		11	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		12	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
		2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		3	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
		5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
		6	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
		7	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
		8	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
		9	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
		10	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
		4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
		5	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
		6	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
		7	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
		8	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
		9	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
		10	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
		11	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
		12	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
		13	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
		14	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
		2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
		3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		5	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
		6	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

No	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	
		7	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
		8	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
		9	PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
		10	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
		11	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
		12	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
		13	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
		14	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
		15	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
		2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
		3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
		4	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
		5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
		6	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
		7	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
		8	PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	1	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
		2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
		3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
		2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
		3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
		4	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
		5	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
		6	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
		7	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
		8	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
		9	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
		10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Adapun dukungan Kegiatan Kota Salatiga terhadap Program Prioritas Pendukung Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 10. Dukungan Pemerintah Kota Salatiga terhadap Program Strategis Nasional (ProSN) Tahun 2026

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	Dukungan Program Daerah		Rencana Kerja
1	Pengentasan Kemiskinan	1 Penanggulangan Kemiskinan	1	Program Pemberdayaan Sosial	Program ini di arahkan pada peningkatan pemberdayaan sosial
			2	Program Rehabilitasi Sosial	Program ini di arahkan pada peningkatan rehabilitasi sosial
			3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Program ini di arahkan pada peningkatan perlindungan dan jaminan sosial
			4	Program Penanggulangan Bencana	Program ini di arahkan pada peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
			5	Program Hubungan Industrial	Program ini di arahkan pada peningkatan pekerja Indonesia yang terlindungi
			6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat
			7	Program Pendaftaran Penduduk	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas layanan pendaftaran penduduk
			8	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program ini di arahkan pada peningkatan pemanfaatan informasi kependudukan
			9	Program Pengelolaan Pendidikan	Program ini di arahkan pada peningkatan partisipasi anak usia sekolah
			10	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Program ini di arahkan pada peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera
			11	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program ini di arahkan pada peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
			12	Program Pengembangan UMKM	Program ini di arahkan pada peningkatan daya saing UMKM
			13	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program ini di arahkan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja
			14	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Program ini di arahkan pada peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional
			15	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program ini di arahkan pada peningkatan produksi perikanan budidaya
			16	Program Pengolahan Dan	Program ini di arahkan pada peningkatan produksi perikanan budidaya

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	Dukungan Program Daerah		Rencana Kerja
				Pemasaran Hasil Perikanan	
			17	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program ini di arahkan pada peningkatan distribusi dan kualitas sarana pertanian
			18	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program ini di arahkan pada peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
			19	Program Penyuluhan Pertanian	Program ini di arahkan pada peningkatan kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian
			20	Program Kawasan Permukiman	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas kawasan permukiman
			21	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Program ini di arahkan pada peningkatan penyediaan PSU Permukiman
			22	Program Pengelolaan Pendidikan	Program ini di arahkan pada peningkatan partisipasi anak usia sekolah
			23	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Program ini di arahkan pada peningkatan perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi
			24	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program ini di arahkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum
			25	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Program ini di arahkan pada peningkatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
			26	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program ini di arahkan pada peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
			27	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program ini di arahkan pada peningkatan penanganan kerawanan pangan
			28	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program ini di arahkan pada peningkatan distribusi dan kualitas prasarana pertanian
			29	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas layanan transportasi darat

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	Dukungan Program Daerah		Rencana Kerja
		2 Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1	Program Pemberdayaan Sosial	Program ini di arahkan pada peningkatan pemberdayaan sosial
			2	Program Rehabilitasi Sosial	Program ini di arahkan pada peningkatan rehabilitasi sosial
			3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Program ini di arahkan pada peningkatan perlindungan dan jaminan sosial
			4	Program Penanggulangan Bencana	Program ini di arahkan pada peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
			5	Program Hubungan Industrial	Program ini di arahkan pada peningkatan pekerja Indonesia yang terlindungi
			6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat
			7	Program Pendaftaran Penduduk	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas layanan pendaftaran penduduk
			8	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program ini di arahkan pada peningkatan pemanfaatan informasi kependudukan
			9	Program Pengelolaan Pendidikan	Program ini di arahkan pada peningkatan partisipasi anak usia sekolah
			10	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Program ini di arahkan pada peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera
			11	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program ini di arahkan pada peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
			12	Program Pengembangan UMKM	Program ini di arahkan pada peningkatan daya saing UMKM
			13	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program ini di arahkan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja
			14	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Program ini di arahkan pada peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional
			15	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program ini di arahkan pada peningkatan produksi perikanan budidaya
			16	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program ini di arahkan pada peningkatan produksi perikanan budidaya

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN		Dukungan Program Daerah		Rencana Kerja
				17	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program ini di arahkan pada peningkatan distribusi dan kualitas sarana pertanian
				18	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program ini di arahkan pada peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
				19	Program Penyuluhan Pertanian	Program ini di arahkan pada peningkatan kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian
				20	Program Kawasan Permukiman	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas kawasan permukiman
				21	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Program ini di arahkan pada peningkatan penyediaan PSU Permukiman
				22	Program Pengelolaan Pendidikan	Program ini di arahkan pada peningkatan partisipasi anak usia sekolah
				23	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Program ini di arahkan pada peningkatan perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi
				24	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program ini di arahkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum
				25	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Program ini di arahkan pada peningkatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
				26	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program ini di arahkan pada peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
				27	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program ini di arahkan pada peningkatan penanganan kerawanan pangan
				28	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program ini di arahkan pada peningkatan distribusi dan kualitas prasarana pertanian
			29	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas layanan transportasi darat	
		3	Sekolah Rakyat			

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN		Dukungan Program Daerah		Rencana Kerja
		4	Pembangunan 3 Juta Rumah	1	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
				2	Program Kawasan Permukiman	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas kawasan permukiman
2	Ketahanan Pangan	1	Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	1	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program ini di arahkan pada peningkatan kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
				2	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas layanan transportasi darat
				3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Program ini di arahkan pada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada dan Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
				4	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program ini di arahkan pada peningkatan distribusi dan kualitas prasarana pertanian
				5	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program ini di arahkan pada peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
				6	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program ini di arahkan pada peningkatan penanganan kerawanan pangan
				7	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program ini di arahkan pada peningkatan produksi perikanan budidaya
				8	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program ini di arahkan pada peningkatan produksi perikanan budidaya
				9	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program ini di arahkan pada peningkatan rehabilitasi sosial
				10	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program ini di arahkan pada peningkatan distribusi dan kualitas sarana pertanian
				11	Program Rehabilitasi Sosial	Program ini di arahkan pada peningkatan rehabilitasi sosial
3	Kesehatan untuk Semua	1	Jaminan Kesehatan Nasional	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN		Dukungan Program Daerah		Rencana Kerja
					Upaya Kesehatan Masyarakat	
				2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program ini di arahkan pada peningkatan mutu dan distribusi tenaga kesehatan
				3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas dan distribusi sediaan farmasi alat kesehatan, dan makanan minuman
				4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
				5	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program ini di arahkan pada peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)
		2	Makan Bergizi Gratis	1.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program ini diarahkan pada kegiatan administrasi tata pemerintahan, fasilitasi dan koordinasi hukum, fasilitasi kerjasama daerah dan Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat
4	Perluasan Akses Pendidikan	1	Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Program ini di arahkan pada peningkatan partisipasi anak usia sekolah
5	Pertumbuhan Ekonomi	1	Pengendalian Inflasi	1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Program ini di arahkan pada peningkatan kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri
				2	Program Pengembangan UMKM	Program ini di arahkan pada peningkatan daya saing UMKM
				3	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang
				4	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Program ini di arahkan pada peningkatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
				5	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program ini di arahkan pada peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN		Dukungan Program Daerah		Rencana Kerja
				6	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Program ini di arahkan pada peningkatan jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah
				7	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program ini di arahkan pada peningkatan kemudahan berinvestasi
				8	Program Promosi Penanaman Modal	Program ini di arahkan pada peningkatan jangkauan promosi penanaman modal
				9	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program ini di arahkan pada peningkatan perizinan berusaha berbasis risiko
				10	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program ini di arahkan pada peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
				11	Program Pemasaran Pariwisata	Program ini di arahkan pada peningkatan jangkauan pemasaran pariwisata
				12	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi
				13	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program ini di arahkan pada peningkatan kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
				14	Program Pengembangan Ekspor	Program ini di arahkan pada peningkatan pelaku usaha yang berorientasi ekspor
				15	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Program ini di arahkan pada peningkatan tertib niaga dan mutu produk
				16	Program Penempatan Tenaga Kerja	Program ini di arahkan pada peningkatan penempatan tenaga kerja
		2	Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program ini di arahkan pada peningkatan pembinaan dan pengawasan koperasi
				2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Program ini di arahkan pada peningkatan kinerja pengelolaan koperasi
				3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas SDM Perkoperasian
				4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Program ini di arahkan pada peningkatan produktivitas koperasi
		3	Kemudahan Perizinan	1	Program Penataan Bangunan Gedung	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas bangunan gedung

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN		Dukungan Program Daerah		Rencana Kerja
				2	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Program ini di arahkan pada peningkatan kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan
				3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Program ini di arahkan pada peningkatan perizinan berusaha berbasis risiko
				4	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Program ini di arahkan pada peningkatan kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha
				5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Program ini di arahkan pada peningkatan kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri
				6	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian

Tabel 4. 11. Dukungan Kegiatan Kota Salatiga terhadap Program Prioritas Delegasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

NO	Program Delegasi Gubernur	Aktivitas riil	Dukungan Kebijakan Kota	Implementasi di Kabupaten /Kota	Volume	Satuan	Target s.d Tahun 2030	Target Tahun 2026	Perangkat Daerah Pendukung
1	PP	Melahirkan Pemerintahan yang <i>Good Clear Government</i> dan <i>Collaborative Governance</i> melalui peningkatan kesejahteraan, profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa;	Peningkatan Profesionalitas ASN dengan menerapkan Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit Pembinaan Kelurahan dan LPMK						BPKPD, BKPSDM, SETDA
				Pengembangan kompetensi bagi ASN		Orang	2.100	173	
								0	
2	PP	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim;	Pembinaan kepada Pelaku Usaha Pariwisata terkait Program Pengembangan Wisata Ramah Muslim						Disbudpar dan Setda
3	PP	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana;							Disperinaker, Disdag, Dinkop UKM, Disbudpar, Dispangtan dan BPBD

NO	Program Delegasi Gubernur	Aktivitas riil	Dukungan Kebijakan Kota	Implementasi di Kabupaten /Kota	Volume	Satuan	Target s.d Tahun 2030	Target Tahun 2026	Perangkat Daerah Pendukung
4	PP	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional;	Verifikasi dan Validasi dalam rangka penyiapan Database Rumah Layak Huni	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota					Dinas PKP
				- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					
			Penyiapan Data Intervensi Teknis <i>Backlog</i> Perumahan	- Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh					

NO	Program Delegasi Gubernur	Aktivitas riil	Dukungan Kebijakan Kota	Implementasi di Kabupaten /Kota	Volume	Satuan	Target s.d Tahun 2030	Target Tahun 2026	Perangkat Daerah Pendukung
			dan Permukiman Kumuh Baru"						
5	PP	Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan;	Menyusun Regulasi Daerah terkait kerukunan umat beragama	- Sosialisasi Peningkatan Rasa Solidaritas					Kesbangpol
			Peningkatan toleransi beragama kepada Masyarakat	- Antisipasi Kerawanan Sosial Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru					
				- Sosialisasi Pencegahan Ekstrimisme dan Radikalisme					
7	PI	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center);	Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas	Menerbitkan SK Wali Kota yang mengatur Penggunaan Dana Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat	Mengatur Penggunaan Dana Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarkat				Kecamatan, Dinsos, DP3AP2KB
			Pemberdayaan ekonomi bagi Perempuan	Mengatur Penggunaan Dana Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarkat					
			Pemberdayaan ekonomi bagi Perempuan	Memberikan Pelatihan untuk Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan	25	orang	75 orang	25 orang	
8	PI		Pemetaan sasaran desa wisata						Disbudpar, BPKPD

NO	Program Delegasi Gubernur	Aktivitas riil	Dukungan Kebijakan Kota	Implementasi di Kabupaten /Kota	Volume	Satuan	Target s.d Tahun 2030	Target Tahun 2026	Perangkat Daerah Pendukung
	Membangun 1.000 desa/kampung wisata baru;	Penambahan anggaran	Sosialisasi dan Penetapan Desa Wisata						
9 PI	Mengembangkan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru;	Pembentukan Kelembagaan							Setda
10 PA	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK;	Pendidikan Anti Korupsi untuk ASN	Peningkatan kapasitas APIP dengan penyediaan anggaran 1% dari APBD di luar Gaji	1) Forum Anti Gratifikasi (FAG) 2) Sosialisasi SPIP dengan tema anti korupsi 3) Penyuluhan anti korupsi (PAK) bagi ASN 4) Game Base Learning (GBS) bagi guru ASN untuk menanamkan budaya anti korupsi di siswa 5) Sosialisasi anti gratifikasi 6) Pendidikan anti korupsi dalam orientasi bagi CPNS dan PP3K 7) Sosialisasi WBK WBBM bagi OPD	9	Kegiatan	9	9	Inspektorat, Kesbangpol

NO	Program Delegasi Gubernur	Aktivitas riil	Dukungan Kebijakan Kota	Implementasi di Kabupaten /Kota	Volume	Satuan	Target s.d Tahun 2030	Target Tahun 2026	Perangkat Darah Pendukung
				8) Rapat koordinasi MCSP Kota Salatiga 9) Sosialiasi Survey Penilaian Integritas (SPI)					
		Pendidikan Anti Korupsi untuk Pemerintah Desa		-					
		Pendidikan Anti Korupsi untuk Pelajar SMA, SMK		1) Penyuluhan Anti Korupsi bagi SMA, SMK dan sederajat 2) Lomba anti korupsi bagi pelajar	2	Kegiatan	2	2	
11	PA	Spesialis keliling (Spelling), puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa;	Posyandu ILP (Integrasi Layanan Primer) : 213 Posyandu, Rehab (Revitalisasi) Puskesmas Pembantu						Dinkes
				1. Pemenuhan sarana dan prasarana Pustu 2. Rehab pada 4 bangunan pustu	19	Pustu	19	19	
				Optimalisasi pelayanan di Puskesmas dan Pustu	25	Pustu dan Puskesmas	25	25	
12	PA	Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan	Penetapan SMA/SMK Unggulan di Jawa Tengah, dengan tahapan:						

NO	Program Delegasi Gubernur	Aktivitas riil	Dukungan Kebijakan Kota	Implementasi di Kabupaten /Kota	Volume	Satuan	Target s.d Tahun 2030	Target Tahun 2026	Perangkat Daerah Pendukung
	bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta;								
13 PA	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan Disabilitas di setiap Kecamatan;	Sosialisasi Kecamatan Berdaya dan RPPA ke 35 Kabupaten/Kota Pembentukan Rumah Perlindungan Anak dan Perempuan	Penyediaan Rumah Aman untuk korban kekerasan	1) Pembentukan Kecamatan Berdaya di 4 Kecamatan 2) Penguatan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak di 4 Kecamatan 3) Pembentukan Tim Pembina Kecamatan Berdaya Kota Salatiga 4) Pembentukan Tim SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) di semua Kelurahan Kota Salatiga 5) Sosialisasi dan Pelatihan untuk seluruh Tim RPPA se-Kota Salatiga 6) Advokasi Kampung Keluarga Berkualitas Ramah	4	kecamatan	4	4 kecamatan	DP3APPKB

NO	Program Delegasi Gubernur	Aktivitas riil	Dukungan Kebijakan Kota	Implementasi di Kabupaten /Kota	Volume	Satuan	Target s.d Tahun 2030	Target Tahun 2026	Perangkat Daerah Pendukung
				Perempuan dan Peduli Anak kepada Tim SAPA dan Satgas RPPA					
		Pembentukan Rumah Perlindungan Disabilitas							Dinsos
14	PA	Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu;	Penyediaan 1 Dokter di setiap puskesmas pembantu Penyediaan 1 bidan di setiap puskesmas pembantu	Penerapan Puskesmas dengan Integrasi Layanan Primer (ILP)					Dinkes
15	PA	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak;	Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan	UPTD Pelindungan Perempuan Anak, pelaporan dan penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Bimtek Satgas Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan					Setda, Disdik dan Dinsos
			Penyusunan Kebijakan Perlindungan Hukum Guru		270	orang	270	140	
16	PA	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara gratis;	Pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM	Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi Produk UKM berbahan daging (Program Reguler) dan rekomendasi HAKI secara gratis. Penyelenggaraan Bimtek Keamanan pangan bagi pelaku usaha P-IRT.					Dinkop UKM, Setda
17	PA	Meningkatkan pelatihan untuk	Pelatihan dan Sertifikasi juru sembelih halal	Pelatihan Juleha dan Sertifikasi Juru					Dispangtan

NO	Program Delegasi Gubernur	Aktivitas riil	Dukungan Kebijakan Kota	Implementasi di Kabupaten /Kota	Volume	Satuan	Target s.d Tahun 2030	Target Tahun 2026	Perangkat Daerah Pendukung
		sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan;	Standarisasi rumah pemotongan hewan	Sembelih Halal, Perbaikan Sarana Prasarana Rumah Potong Hewan					
18	PA	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata;	Pelatihan dan pendampingan untuk menciptakan 1.000 Konten kreator di Desa wisata	Pelatihan bagi Pengelola Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata)					Diskominfo, Disbudpar
19	PA	Subsidi modal dan pendampingan UMKM 1 RT 1 kelompok UMKM;	Subsidi Modal kepada UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM (Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa)	Subsidi Kredit bagi UMKM melalui BPR Salatiga serta Pemdampingan bagi Kelompok UMKM					Dinkop UKM
			Pendampingan Usaha dan Promosi UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM yang bekerjasama dengan Diaspora	agar mempunyai Legalililitas usaha (berbadan hukum)					
20	PA	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa;	RTH Perkotaan	Pemeliharaan taman (RTH) se Kota Salatiga, Belanja bibit tanaman					DLH
			RTH Perdesaan						
21	PA	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa;	Penguatan koperasi desa	Peningkatan SDM bagi Pengurus dan pengawas Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) bagi 23 Kelurahan					Dinkop UKM
22	PA	Meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan manajemen olahraga;	Peningkatan insentif bagi atlet dan pelatih	Pemberian penghargaan bagi atlet dan pelatih di popda provinsi, uang	Pemberian penghargaan olahraga yang berprestasi bagi atlet dan pelatih	orang	2000	0	Dispora

NO	Program Delegasi Gubernur	Aktivitas riil	Dukungan Kebijakan Kota	Implementasi di Kabupaten /Kota	Volume	Satuan	Target s.d Tahun 2030	Target Tahun 2026	Perangkat Darah Pendukung
			saku bagi atlet dan pelatih PPLOPD						
23	PA	Pengembangan sekolah inklusif di setiap kecamatan;	Pemetaan dan Penetapan Sekolah Percontohan Inklusi	Layanan konseling pendidikan inklusi, Pelatihan Guru					Disdik
			Peningkatan kuantitas dan kualitas pendamping disabilitas	Pembimbing Khusus dan Shadow Teacher, Psikotest Inklusi, Parenting Anak Berkebutuhan Khusus, Sosialisasi Hasil Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus	Pelatihan Guru Pendamping Khusus dan Shadow Teacher	130 orang	390	0	
24	PA	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana;	Identifikasi wilayah rawan bencana di Jawa Tengah	Pemasangan alat Early Warning Sistem (EWS) di wilayah rawan banjir/luapan air dan longsor					BPBD
			Sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi						
25	PT	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;	Penyediaan benih, pengembangan pakan mandiri, bantuan sarpras, polikultur nila-udang						Dispangtan
			Pengembangan pakan mandiri						Dispangtan
26	PT	BUMDes Berdaya (kepastian hukum dan bantuan modal usaha setiap BUMDes di Jawa Tengah);	Lapak Bumdes						Dispangtan
			Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDes dan Fasilitasi Pembentukan Badan Hukum untuk Bumdes						
27	PT	Penguatan BPBD dan Tagana dalam	Pelatihan dan sertifikasi Penanganan Bencana	Sosialisasi Kegiatan Pencegahan dan					BPBD

NO	Program Delegasi Gubernur	Aktivitas riil	Dukungan Kebijakan Kota	Implementasi di Kabupaten /Kota	Volume	Satuan	Target s.d Tahun 2030	Target Tahun 2026	Perangkat Darah Pendukung	
	penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat;	- Masyarakat	mitigasi bencana di setiap kecamatan di Salatiga yang salah satunya ada praktik Dapur Umum (DU)							
28	PT	Cek kesehatan gratis;	Bayi Baru Lahir	Pemenuhan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai), Penyiapan sarana dan prasarana di puskesmas, Sosialisasi, Promosi Media sosial	CKG pada bayi baru lahir di puskesmas, rumah sakit, klinik bersalin, dan bidan praktik	3165	Bayi	80%	70%	Dinkes
			Balita dan Pra Sekolah		CKG pada balita dan pra sekolah 1-6 tahun di masyarakat, Posyandu ILP, Puskesmas	14794	Anak	70%	55%	Dinkes
			Anak Sekolah (SD, SMP, SMA)		CKG anak usia sekolah di masyarakat, Posyandu ILP, Puskesmas, sekolah, pondok pesantren, dan pendidikan non formal	33566	Anak	70%	70%	Dinkes
			Dewasa		CKG di pada usia dewasa di masyarakat, Posyandu ILP, Puskesmas, perkantoran, perusahaan,	120561	Orang	70%	46%	Dinkes

NO	Program Delegasi Gubernur	Aktivitas riil	Dukungan Kebijakan Kota	Implementasi di Kabupaten /Kota	Volume	Satuan	Target s.d Tahun 2030	Target Tahun 2026	Perangkat Daerah Pendukung
				tempat kerja non formal, rumah sakit, klinik, dan kegiatan-kegiatan umum di masyarakat					
		Lansia		CKG di pada lanjut usia di masyarakat, Posyandu ILP, Puskesmas, kunjungan rumah, kegiatan keagamaan lansia, panti whreda, kelompok lansia masyarakat, PWRI dan kegiatan-kegiatan umum di masyarakat	29694	Orang	70%	55%	Dinkes
29	PT	Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin;	Penguatan anggaran dan perubahan manajemen Balai Rehabilitasi Sosial	Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Pelatihan PRSE (Perempuan Rawan Sosial Ekonomi), Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Bintek Peningkatan Kapasitas 7 Pilar					Dinsos
									Dinsos

NO	Program Delegasi Gubernur	Aktivitas riil	Dukungan Kebijakan Kota	Implementasi di Kabupaten /Kota	Volume	Satuan	Target s.d Tahun 2030	Target Tahun 2026	Perangkat Daerah Pendukung
			PSKS, Fasilitasi Adopsi, Visit dan Pendampingan Anak Terlantar, Anak Berhadapan dengan Hukum dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Fasilitasi Program Bantuan Yapi (Yatim Piatu), Fasilitiasi Rujukan LKSA, Pelatihan Kemandirian Anak Terlantar, Porseni/Jambore Anak Terlantar, Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Orang Tua Anak Terlantar, Fasilitasi Akses SPMB Jalur Afirmasi Panti Dikdas dan Dikmen						
30	PT	Peningkatan desa mandiri energi melalui pengembangan biogas, hidro, maupun tenaga surya;	Menyusun Regulasi Daerah terkait Energi Baru Terbarukan						DLH, DPU PR
31	PT	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan;	Pelatihan pasaca panen bagi KWT / Poktan penerima program Pekarangan Pangan Lestari						

NO	Program Delegasi Gubernur	Aktivitas riil	Dukungan Kebijakan Kota	Implementasi di Kabupaten /Kota	Volume	Satuan	Target s.d Tahun 2030	Target Tahun 2026	Perangkat Daerah Pendukung
32	PT	Hilirisasi produk unggulan dengan semangat ekonomi hijau;	Pemetaan Potensi Produk Unggulan di Jawa Tengah						Disperinaker, Disdag, Dinkop UKM, Disbudpar
			Promosi produk unggulan di Jawa Tengah						
33	PT	Mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan;	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Penghayat Kepercayaan	- Audiens Walikota dan Forkopimda dengan ormas					Kesbangpol
			Rembug Jagong Tokoh Agama dan Penghayat Kepercayaan	- Fasilitasi Ormas					
			Hibah FKUB	- Hibah Ormas					
34	PT	Peningkatan operasional kader Posyandu;	Pemberian insentif diberikan kepada 2 orang kader di pustu (@Rp500000 per 3 bulan)	Honor petugas kesehatan Kader Posyandu ILP, Honor petugas kesehatan Kader Puskesmas Pembantu ILP					Dinkes
			Dukungan kelembagaan Posyandu 6 Bidang SPM (Bimtek dan Rapat Koordinasi TP Posyandu)						
35	PT	Peningkatan kualitas hidup lansia.	Peningkatan fasilitasi Posyandu lansia	Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi lansia melalui pemeriksaan / skrining kesehatan lansia sesuai standar, Puskesmas santun lansia dan lansia dengan ketergantungan sedang, berat dan total mendapatkan perawatan jangka panjang (PJP)					Dinkes , DP3APPKB

NO	Program Delegasi Gubernur	Aktivitas riil	Dukungan Kebijakan Kota	Implementasi di Kabupaten /Kota	Volume	Satuan	Target s.d Tahun 2030	Target Tahun 2026	Perangkat Darah Pendukung
		Pendampingan sekolah Lansia	Sekolah Lansia (Bina Keluarga Lansia /BKL)	Pemberian materi tentang berbagai penyakit, kerentanan dan disabilitas kepada lansia yang memerlukan perawatan jangka panjang				3 sekolah lansia	
		Pemeriksaan kesehatan							
		Pemberian sumplemen dan pemenuhan gizi							

Tabel 4. 12. Dukungan Kegiatan Kota Salatiga terhadap Program Prioritas Pendukung Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

No	Program Delegasi Pendukung Pangan	Dukungan Kegiatan Kabupaten/Kota	Keterangan
1	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila	-	
2	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Pelatihan dan sertifikasi Juru Sembelih Halal	
3	Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri	Peningkatan pelayanan dan peran penyuluh pertanian	
4	Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari	-	
5	Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida	-	
6	Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati)	-	
7	Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM	-	
8	Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian	Penyelerasan Perda Ketahanan Pangan dengan Rencana Induk Pangan Provinsi Membangun sistem pemantauan stok pangan antar-daerah berbasis platform digital bersama Dinas Provinsi terkait	
9	Petani milenial gajian	Pemberian modal dan fasilitasi kepada anak muda petani untuk pengembangan usahatani	
10	Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa	-	
11	Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi	Hilirisasi pertanian, menjadikan Salatiga sebagai pusat Distribusi dan Pengolahan hasil pertanian Rehabilitasi Gudang Penyimpanan Hasil Pertanian/ lumbung Pangan yang representatif sebagai “Modern Food Storage”	
12	Revitalisasi embung	Rehabilitasi / Normalisasi Bendung	
13	Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan	Mengembangkan tanaman hidroponik di area binaan	
14	Subsidi Pangan Murah	Bazar Pangan Murah tiap Kecamatan	
15	Penyediaan benih yang berkualitas	Bantuan benih padi unggul	
16	Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian	Bantuan sarpras pertanian Pembuatan / Rehabilitasi Irigasi Pertanian di kawasan budidaya padi	

4.2.3.1. Penanganan Isu Strategis berdasarkan Evaluasi Kinerja Pembangunan sampai dengan TW I tahun 2026

Isu strategis yang muncul pada saat evaluasi capaian kinerja Triwulan I tahun 2026 perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah pemantapan arah kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan pada RKPD 2026. Langkah yang perlu dilaksanakan adalah dengan sinkronisasi isu strategis, penetapan prioritas pembangunan dan penentuan program-program yang akan mendukung pencapaian penanganan isu strategis. Berikut disajikan sinkronisasi isu strategis dan prioritas pembangunan serta penguatan program yang dilaksanakan pada Perubahan RKPD 2026.

Tabel 4. 13. Konsistensi Permasalahan, Isu Strategis dengan Program Prioritas Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2026

No	Permasalahan	Isu Strategis				Prioritas Pembangunan
		Global	Nasional	Provinsi	Isu Strategis 2026	
1	Optimalisasi penurunan Angka Kematian Balita, Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), Belum optimalnya pencapaian tingkat kesehatan keluarga, Masih adanya kasus gizi buruk dan stunting pada anak	Demografi Global	Rendahnya produktivitas	Penurunan Tingkat Kemiskinan	Kualitas hidup dan daya	Peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia
2	Masih perlunya peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/Paket	Urbanisasi dunia	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	saing sumber daya manusia	
3	Belum optimalnya peran pemuda dalam mendukung kegiatan ekonomi dan prestasi olahraga					
4	Peningkatan angka ketergantungan penduduk					
5	Masih kurangnya dukungan pengembangan dan pelestarian nilai seni dan budaya daerah dan peningkatan pelestarian kota pusaka			Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat	Pengelolaan dan pelestarian budaya daerah	
6	Belum optimalnya peningkatan keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif				Kesenjangan gender, belum optimalnya perlindungan anak dan perempuan serta pelayanan lansia	
7	Belum optimalnya pencapaian perlindungan perempuan dan anak					
8	Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam terutama dalam pengembangan teknologi pertanian dan pengelolaan potensi wisata dalam mendukung perkembangan ekonomi masyarakat	Geopolitik dan Geoekonomi	Geopolitik dan Geoekonomi	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Pertumbuhan ekonomi yang merata didukung investasi dan produk unggulan yang berdaya saing	Peningkatan pengelolaan potensi perekonomian daerah
9	belum sepenuhnya menciptakan pemerataan kesejahteraan dengan masih didominasi oleh sektor industri pengolahan dan konsumsi rumah tangga	Perdagangan internasional	Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	Ketahanan pangan yang berkelanjutan		

No	Permasalahan	Isu Strategis				Prioritas Pembangunan
		Global	Nasional	Provinsi	Isu Strategis 2026	
10	Keterbatasan investasi dan belum optimalnya pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah	Keuangan Internasional	Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif			
11	Belum semua masyarakat mendapatkan akses terhadap pemenuhan rumah layak huni	Persaingan Sumber Daya Alam	Krisis Lingkungan	Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	Pemenuhan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur	Peningkatan infrastruktur kewilayahan guna menunjang efektifitas layanan perkotaan
12	Belum optimalnya pemenuhan dan pemerataan insfrastruktur daerah dalam menunjang pelayanan					
13	Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	Perubahan Iklim		Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	Peningkatan identifikasi dan inventarisasi sumber daya serta masalah lingkungan hidup
14	Daya dukung lahan tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup layak penduduk					
15	Tata Kelola Pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang masih belum optimal	Disrupsi Teknologi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Kolaboratif	Peningkatan kualitas ASN dan Implementasi budaya kerja yang berintegritas dan handal

Tabel 4. 14. Sinkronisasi Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan serta Program pada Perubahan RKPD 2026

No	Isu Strategis 2026	Prioritas Pembangunan 2026	Dukungan Program Nomenklatur Tahun 2026		Keterangan	Program Unggulan Kepala Daerah
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	1 Peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia			Perubahan dukungan Program Nomenklatur menyesuaikan arah kebijakan berdasarkan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029	SALATIGA CERDAS Peningkatan kualitas sarana prasarana, tenaga pendidik, dan bahan ajar pendidikan dasar dan menengah menuju Pendidikan Salatiga Standar Internasional Pengembangan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri
2	Pengelolaan dan pelestarian budaya daerah	a. Meningkatkan kualitas dan pemerataan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan kurikulum berbasis digital pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah menuju Pendidikan Salatiga Standar Internasional	1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
3	Kesenjangan gender, belum optimalnya perlindungan anak dan perempuan serta pelayanan lansia	b. Pemetaan dan pendataan anak-anak dari keluarga miskin yang membutuhkan akses pendidikan, didukung dengan penyediaan lokasi dan SDM dalam mendukung implementasi sekolah rakyat di Kota Salatiga	2 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	2 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
			3 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
			4 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	4 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
			5 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			
			6 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			

No	Isu Strategis 2026	Prioritas Pembangunan 2026	Dukungan Program Nomenklatur Tahun 2026		Keterangan	Program Unggulan Kepala Daerah
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
			7 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
			8 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
		c. Meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat untuk mendukung promotif dan preventif terutama dalam edukasi gaya hidup sehat, kesehatan mental, pencegahan penyakit menular dan tidak menular	9 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		SALATIGA SEHATI : Salatiga Sehat dan Terlindungi Layanan pendampingan tenaga medis di saat kehamilan, kelahiran dan Nifas Layanan kesehatan ibu bebas anemia dan terpenuhi nutrisi Layanan jaminan kesehatan bayi periode 1000 HPK menuju Salatiga zero stunting Pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Meningkatkan asilitas kesehatan dan menyiapkan tenaga medis profesional untuk RSUD berstandar Internasional
		d. Meningkatkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan	10 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
			11 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT	3 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT		

No	Isu Strategis 2026	Prioritas Pembangunan 2026	Dukungan Program Nomenklatur Tahun 2026		Keterangan	Program Unggulan Kepala Daerah
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
			KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		
			12 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
		e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga dan pengembangan potensi atlet lokal	13 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		KOMIK : (Kolaborasi Minelial Kreatif) Pengembangan ruang ekspresi gaya hidup positif, seni dan budaya bagi Gen-Z, pemuda dan pelaku seni
		f. Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, pemberdayaan pelaku seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi dan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat identitas dan keberlangsungan budaya daerah	14 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		
			15 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		
			16 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
		g. Penguatan regulasi dan kebijakan perlindungan perempuan dan anak serta kesejahteraan keluarga	17 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
			18 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		

No	Isu Strategis 2026	Prioritas Pembangunan 2026	Dukungan Program Nomenklatur Tahun 2026		Keterangan	Program Unggulan Kepala Daerah
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
			19 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	3 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		
4	Pertumbuhan ekonomi yang merata didukung investasi dan produk unggulan yang berdaya saing	2	Peningkatan pengelolaan potensi perekonomian daerah		Perubahan dukungan Program Nomenklatur menyesuaikan arah kebijakan berdasarkan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 dan Dukungan Tematik Provinsi Jawa Tengah untuk Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	SEKAR : SALATIGA BERKARYA Pengembangan ekonomi kreatif dengan mengutamakan komoditas unggulan lokal melalui pendampingan UMKM, pemberdayaan kewirausahaan melalui akses pendanaan dan pengembangan UMKM
			a. Pemberdayaan dan penguatan kapasitas UMKM untuk mendukung kualitas produk dan jejaring usaha	1 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		
				1 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		
				2 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		
				2 PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		
			b. Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat	3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		JARKOM MABAR : Jaringan Komunitas Mahasiswa dan Anak Muda berwirausaha Jaringan Komunitas Mahasiswa dan Anak Muda berwirausaha
				4 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		
				1 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		
				2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		
				2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
				3 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN		

No	Isu Strategis 2026	Prioritas Pembangunan 2026	Dukungan Program Nomenklatur Tahun 2026		Keterangan	Program Unggulan Kepala Daerah
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
			PRASARANA PERTANIAN	PRASARANA PERTANIAN		
			7 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	4 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		
			8 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	5 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
				6 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
		c. Penguatan kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat melalui peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dalam berbagai kegiatan guna meningkatkan cinta tanah air, nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari		1 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		SMART URBAN FARMING Pengelolaan budidaya pangan yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan pertanian on farm dan off farm untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan pengembangan sektor unggulan daerah

No	Isu Strategis 2026	Prioritas Pembangunan 2026		Dukungan Program Nomenklatur Tahun 2026		Keterangan	Program Unggulan Kepala Daerah
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
5	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Kolaboratif	3	Peningkatan kualitas ASN dan Implementasi budaya kerja yang berintegritas dan handal			Perubahan dukungan Program Nomenklatur menyesuaikan arah kebijakan berdasarkan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029	SI AKAS : Salatiga Akuntabel, Kolaboratif, Adaptif dan Sigap Pemerintahan yang berintegritas akan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan, serta memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan
			a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dan selaras dengan perencanaan nasional	1 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		
			b. Meningkatkan sistem pengelolaan kemananan informasi daerah	2 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		
			c. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat	3 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	3 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
			d. Perluasan jaringan internet broadband dan penyediaan akses WiFi publik di fasilitas layanan umum	4 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		

No	Isu Strategis 2026	Prioritas Pembangunan 2026	Dukungan Program Nomenklatur Tahun 2026		Keterangan	Program Unggulan Kepala Daerah
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
				5 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		
		e. Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dan kelurahan, dan memperkuat koordinasi dan kerjasama dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan perangkat daerah ditingkat kecamatan dan kelurahan	5 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
		f. Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip daerah yang didukung pemanfaatan teknologi informasi	6 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	7 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		
		g. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang efektif dan efisien	7 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	8 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
			8 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			9 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			

No	Isu Strategis 2026	Prioritas Pembangunan 2026	Dukungan Program Nomenklatur Tahun 2026		Keterangan	Program Unggulan Kepala Daerah
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
7	Pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	4 Peningkatan identifikasi dan inventarisasi sumber daya serta masalah lingkungan hidup	1 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Perubahan dukungan Program Nomenklatur menyesuaikan arah kebijakan berdasarkan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029	PROGRAM SARI : Salatiga Lestari Penegakan regulasi daerah untuk pencegahan/penindakan pencemaran lingkungan dan pelanggaran RTRW untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan PROGRAM BIRULAH : Bangun Rumah Layak Huni Bantuan sosial untuk pemenuhan rumah yang layak dan sehat bagi rumah tangga miskin
			2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
			3 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			4 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
			5 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
			6 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			7 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			

No	Isu Strategis 2026	Prioritas Pembangunan 2026	Dukungan Program Nomenklatur Tahun 2026		Keterangan	Program Unggulan Kepala Daerah
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		b. Mengembangkan sistem manajemen transportasi cerdas guna meningkatkan efisiensi, keselamatan dan kenyamanan sistem transportasi	5 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	6 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		memper mudah akses pasar dan distribusi
		c. Meningkatkan sistem peringatan dini dan koordinasi antar instansi terkait dalam pencegahan dan penanggulangan bencana maupun peristiwa kebakaran	6 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	7 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		
		d. Mengembangkan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat	7 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	8 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		

Tabel 4. 15. Pemetaan Kegiatan Implementasi Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar
3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
5	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Dasar
6	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama
7	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sekolah Menengah Pertama
8	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
9	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
10	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
11	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
12	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
13	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
14	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
15	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
16	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota
17	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
18	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya

No	Kegiatan	Sub Kegiatan
19	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
20	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
21	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
22	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
23	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan

4.2.3.2. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 untuk mendukung Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan Kota Salatiga tahun 2026 juga berkorelasi dengan Strategi Nasional antara lain Penurunan Stunting. Standar Pelayanan Minimal, Sustainable Development Goal's (SDG's), penanggulangan kemiskinan serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang.

4.2.3.2.1. Kebijakan Penurunan Stunting

Antisipasi Generasi Stunting Guna Mencapai Indonesia Emas 2045, merupakan salah satu kebijakan yang diadopsi pada perencanaan pembangunan pada tahun 2026. Sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penurunan stunting dilaksanakan dalam proses perencanaan Pembangunan. Hal ini merupakan perwujudan peran pemerintah daerah dalam ikut serta dalam penurunan stunting. yang terdiri dari :

- 1) Menyiapkan kebijakan berkaitan dengan penurunan stunting;
- 2) Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal secara Maksimal;
- 3) Menetapkan target percepatan penurunan stunting untuk mendukung pencapaian target nasional;
- 4) Menetapkan program dan kegiatan terkait penurunan stunting. dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
- 5) Meningkatkan alokasi dan efektifitas penggunaan dana desa untuk penurunan stunting;
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penurunan stunting;
- 7) Untuk Penurunan Stunting Pemda melaksanakan 8 aksi konvergensi;
- 8) Melibatkan peran multisektor termasuk non pemerintahan dalam upaya penurunan stunting

Sebagai salah satu bentuk penguatan integrasi perencanaan daerah terhadap implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan merujuk Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8476/SJ tentang Hasil Pemetaan Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Percepatan Penurunan Stunting di Daerah. maka dalam RKPD tahun 2026, Pemerintah Kota Salatiga tetap mengalokasikan perencanaan terkait hal tersebut. Perpres ini masih menjadi payung hukum bagi Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018. Perpres ini juga untuk memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting 5,6% di tahun 2026 dan 5 % di tahun 2045. Upaya pencapaian target tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan lima (5) pilar. Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang meliputi:

- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga. Pemerintah Daerah provinsi. Pemerintah Daerah kabupaten/kota. dan Pemerintah Desa;
- b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga. Pemerintah Daerah provinsi. Pemerintah Daerah kabupaten/kota. dan Pemerintah Desa;
- d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu. keluarga. dan masyarakat; dan
- e. penguatan dan pengembangan sistem. data. informasi. riset. dan inovasi.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan rencana aksi nasional menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting. Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan :

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan. Evaluasi. dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia

Pada tahun 2026, untuk mendukung target penurunan stunting tersebut, perencanaan pembangunan Kota Salatiga menerapkan strategi pada upaya

menurunkan gizi buruk melalui gerakan masyarakat hidup sehat, peningkatan sarana pelayanan gizi masyarakat, pemberian dan perawatan pada kasus gizi buruk, peningkatan cakupan bayi dengan ASI eksklusif serta kerjasama lintas sektoral untuk penanganan stunting.

Prevalensi Stunting pada Balita menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan pada bidang Kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi untuk penanganan Stunting dilakukan dengan berbagai inovasi penanganan stunting.

Perencanaan yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan kegiatan lintas sektoral menjadi salah satu wujud keterlibatan Pemerintah Kota Salatiga dalam penanganan stunting guna mendukung Percepatan Penurunan Stunting secara nasional. Adapun program-program pendukung pencapaian target tersebut adalah :

Tabel 4. 16. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Penurunan Stunting di Kota Salatiga Tahun 2026

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pendidikan
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kesehatan
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	Pembangunan Puskesmas	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
	Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kesehatan
	Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
	Kegiatan : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	
	Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
6	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kesehatan
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
7	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Kesehatan
	Kegiatan : Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
	Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
	Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
9	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	

4.2.3.2.2. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta dengan telah ditetapkannya Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Salatiga Tahun 2023-2026, maka pada tahun 2026 Kota Salatiga tetap memprioritaskan pemenuhan layanan dasar sesuai target SPM tidak hanya dalam hal jenis melainkan juga mutu (kuantitas dan kualitas layanan). Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Sedangkan Mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.

Pada SPM bidang pendidikan prioritas pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan secara merata dengan arah kebijakan pada tahun 2026 adalah peningkatan dukungan kelembagaan dan operasional pada pendidikan kesetaraan dan lembaga keterampilan dalam pembelajaran kewirausahaan

berorientasi global serta Penguatan kolaborasi antar stakeholder dalam menciptakan masyarakat Salatiga sebagai kota cerdas. Hal tersebut sesuai dengan tahap arah kebijakan tahunan pada rancangan RPJMD Kota Salatiga tahun 2025-2029.

Penerapan SPM bidang Kesehatan, untuk tahun 2026 fokus pada penguatan infrastruktur layanan primer (laboratorium kesehatan masyarakat, puskesmas, posyandu) dan layanan Rujukan serta pendidikan kesehatan masyarakat untuk mendukung promotif dan preventif terutama dalam edukasi gaya hidup sehat, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, kesehatan mental serta melakukan pemeriksaan kesehatan masyarakat secara berkala. Prioritas tersebut dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sebagaimana strategi yang ditetapkan pada RPJMD Kota Salatiga 2025-2029.

Peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang menjadi prioritas pembangunan tahun 2026 yang akan mendukung penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Arah kebijakan untuk penerapan SPM tersebut diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup. Sasaran pembangunan yang akan dicapai dengan penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah meningkatnya persentase wilayah dengan infrastruktur baik, sedangkan sasaran pembangunan pada penerapan SPM bidang Perumahan Rakyat adalah meningkatnya kualitas lingkungan sehat (penuntasan kawasan kumuh), dengan menggunakan strategi penerapan pada pemenuhan jenis dan mutu SPM.

Pemenuhan SPM Bidang Sosial pada tahun 2026 dilaksanakan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak, dalam rangka mewujudkan Kota Salatiga sebagai Kota Layak Anak. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan peningkatan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial dengan arah kebijakan pada pemantapan program-program penanggulangan kemiskinan.

Pemenuhan SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diwujudkan dalam upaya menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektivitas pembangunan. Strategi penerapan SPM bidang trantibunlinmas dengan pemenuhan pelayanan Ketentraman dan Ketertiban, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, informasi rawan bencana pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung terlaksananya pemenuhan SPM sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 4. 17. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pemenuhan SPM di Kota Salatiga Tahun 2026

No	SPM Bidang	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	PENDIDIKAN	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
		Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
			Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
			Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

No	SPM Bidang	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
2	KESEHATAN		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
			Kegiatan : Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

No	SPM Bidang	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		Jumah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
		Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (<i>humam immudeficiency virus</i>) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

No	SPM Bidang	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
			Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
4	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
		Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kegiatan : Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
			Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan
		Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
			Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
			Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
		Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

No	SPM Bidang	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
			Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
6	SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Penyediaan Permakanan Penyediaan Alat Bantu Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Pemberian Layanan Kedaruratan

4.2.3.2.3. Dukungan terhadap Penurunan Kemiskinan

Kemiskinan yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat, menjadi salah satu kebijakan pusat yang didukung dengan arah kebijakan pembangunan Daerah. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kota Salatiga mendukung strategis nasional dalam melaksanakan optimalisasi pelaksanaan pengentasa kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi :

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat;
2. Peningkatan pendapatan masyarakat, diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat;
3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan, diantaranya melalui :

- a. Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak; dan
- b. Peningkatan konektivitas antar wilayah seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung terlaksananya strategi penghapusan kemiskinan ekstrim sebagaimana tersebut dalam tabel berikut.

Tabel 4. 18. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim di Kota Salatiga Tahun 2026

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Mengurangi Beban Pengeluaran	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
		Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
		Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		Pengelolaan Dana BOP PAUD
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
		Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
		Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
		Kegiatan : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
		Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		Pengelolaan Layanan Imunisasi
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
		Kegiatan : Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
		Kegiatan : Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
		Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
		Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
		Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
		Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
		Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
		Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
		Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
		Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
		Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan
		Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA
		Kegiatan : Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
		Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
		Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		Penyediaan Permakanan
		Penyediaan Alat Bantu
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
		Pemberian Layanan Kedaruratan
		Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
		Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
		Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
		Kegiatan : Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota
		Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota
		Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
		Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
		Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		Kegiatan : Penataan Pendaftaran Penduduk
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
		Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
		Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
		Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
		Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
		Job Fair/Bursa Kerja
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
		Kegiatan : Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
		Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
		Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
		Kegiatan : Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
		Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
		Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
		Keegiatan : Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
		Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
		Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
		Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
		Pembangunan Tanggul Sungai
		Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
		Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
		Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		Penyediaan Unit pengolahan setempat
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
		Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
		Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
		Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
		Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
		Kegiatan : Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
		Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
		Kegiatan : Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
		Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
		Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
		Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
		Kegiatan : Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
		Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		Kegiatan : Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
		Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
		Kegiatan : Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
		Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
		Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
		Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
		Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
		Kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
		Kegiatan : Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
		Kegiatan : Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan Akses Internet
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
		Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Penyusunan Konten
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
		Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
		Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
		Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
		Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
		Kegiatan : Pengelolaan Sampah
		Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
		Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
		Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
		Keegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
		Pembangunan Jalan
		Pemeliharaan Berkala Jalan
		Pemeliharaan Rutin Jalan
		Pemeliharaan Rutin Jembatan
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
		Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
		Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
		Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
		Peningkatan Kesertaan KB Pria

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
		Kegiatan : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
		Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
		Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
		Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
		Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
		Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
		Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
		Kegiatan : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
		Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan
		Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
		Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
		Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
		Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Kecamatan Sidomukti
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
		Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
		Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Kecamatan Sidorejo
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
		Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
		Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Kecamatan Tingkir
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
		Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
		Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Kecamatan Argomulyo
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
		Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
		Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4.2.3.2.4. Dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam rangka konteks perencanaan pembangunan daerah, upaya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP) merupakan hal yang sangat strategis, tidak hanya dikaitkan dengan pengintegrasian dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, akan tetapi juga dintegrasikan dengan potensi

daerah yang dikaitkan dengan data di tingkat basis. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pengintegrasian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam dokumen perencanaan pembangunan, maupun pemetaan terhadap potensi dan permasalahan merupakan suatu keharusan.

Pada tahun 2026, prioritas pembangunan diarahkan pada hasil evaluasi capaian SDG's tahun 2025. Selanjutnya dilaksanakan sinkronisasi indikator-indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan dokumen perencanaan daerah. Indikator-indikator sasaran maupun program telah disinkronkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan (goal) berdasarkan Indikator yang telah ditetapkan pada Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan TBP.

Pemerintah Kota Salatiga sepenuhnya berkomitmen dalam mendukung terwujudnya 17 (tujuh belas) tujuan SDGs melalui program-program yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Bappeda Kota Salatiga sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4. 19. Sasaran, Prioritas dan Program yang Mendukung Terwujudnya SDGs di Kota Salatiga Tahun 2026

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan	- Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	- peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia	- PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		- Meningkatnya pelayanan sosial dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif	- peningkatan pengelolaan potensi perekonomian daerah	- PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		- Meningkatnya kondusivitas wilayah dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi		- PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
		- Meningkatnya pengembangan potensi sektor unggulan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi		- PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
				- PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	- Meningkatnya pelayanan sosial dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif	- peningkatan pengelolaan potensi perekonomian daerah	- PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
		- Meningkatnya pengembangan potensi sektor unggulan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi		- PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
				- PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
				- PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
				- PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
				- PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
				- PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	- Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	- peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia	- PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
4	Menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan belajar sepanjang hayat	- Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	- peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia	- PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	- Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta kesejahteraan keluarga	- peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia	- PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	- Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan yang didukung dengan masyarakat yang adaptif dan inovatif	- inventarisasi sumber daya serta masalah lingkungan hidup Kota Salatiga	- PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern	Tidak ada indikatornya di Pemerintah Kota Salatiga, karena ESDM bukan kewenangan kabupaten/kota		
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua	- Meningkatnya pengembangan potensi sektor unggulan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi - Meningkatnya kondusivitas wilayah dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi - Meningkatnya pelayanan sosial dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif	- peningkatan pengelolaan potensi perekonomian daerah	- PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
9	Membangun infrastruktur yang tangguh meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	- Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah yang merata	- peningkatan infrastruktur kewilayahan guna menunjang efektivitas layanan perkotaan	- PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
				- PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
10	Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara	- Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan yang didukung dengan masyarakat yang adaptif dan inovatif	- peningkatan pengelolaan potensi perekonomian daerah	- PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
		- Meningkatnya kondusivitas wilayah dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi	- peningkatan kualitas ASN dan implementasi budaya kerja yang berintegritas dan handal	- PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
		- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital dan berintegritas tinggi menuju pelayanan publik prima		- PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
				- PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
				- PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
11	Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	- Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan yang didukung dengan masyarakat yang adaptif dan inovatif	- peningkatan identifikasi dan inventarisasi sumber daya serta masalah lingkungan hidup Kota Salatiga	- PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
		- Meningkatnya kondusivitas wilayah dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi	- peningkatan infrastruktur kewilayahan guna menunjang efektivitas layanan perkotaan	- PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
		- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital dan berintegritas tinggi menuju pelayanan publik prima		- PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
				- PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
				- PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
				- PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	- Meningkatnya pelayanan sosial dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif	- peningkatan pengelolaan potensi perekonomian daerah	- PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
				- PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
				- PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
13	Mengatasi langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	- Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan yang didukung dengan masyarakat yang adaptif dan inovatif	- peningkatan identifikasi dan inventarisasi sumber daya serta masalah lingkungan hidup Kota Salatiga	- PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
14	Melakukan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan	Tidak ada indikatornya di Pemerintah Kota Salatiga, karena kawasan laut merupakan kewenangan Provinsi		
15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan	Tidak ada indikatornya di Pemerintah Kota Salatiga, karena bukan kewenangan kabupaten/kota		
16	Mewujudkan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	- Meningkatnya kondusivitas wilayah dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi -	- peningkatan kualitas ASN dan implementasi budaya kerja yang berintegritas dan handal	- PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital dan berintegritas tinggi menuju pelayanan publik prima		- PROGRAM PENCATATAN SIPIL
				- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				- PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
17	Menguatkan sarana dan kemitraan pelaksanaan dan merevitalisasi global	Tidak ada indikatornya di Pemerintah Kota Salatiga, karena bukan kewenangan kabupaten/kota		

4.2.4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut terangkum ke dalam seluruh urusan kewenangan pemerintah tingkat Kota. Dengan demikian, maka dokumen pokok-pokok pikiran DPRD Kota Salatiga, merupakan dokumen yang sangat penting dan strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar tidak lepas terhadap perwujudan tujuan dan sasaran Kota Salatiga.

Pokok-pokok pikiran DPRD Salatiga tahun 2026 merupakan wujud akumulasi dan representasi masyarakat Salatiga, melalui kegiatan reses dan kunjungan kerja yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRD di 4 daerah pemilihan yang meliputi 4 kecamatan. Kegiatan reses ini telah berhasil merangkum banyak aspirasi dari masyarakat, setiap anggota DPRD membawa aspirasi warga dari dapilnya masing-masing, untuk ditindaklanjuti Pemerintah Salatiga lewat mekanisme perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan daerah, dalam hal ini penyusunan RKPD tahun 2025, KUA-PPAS dan APBD tahun 2026.

Hasil indentifikasi dan analisa usulan dari aspirasi masyarakat berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah, selanjutnya dirumuskan dalam tema pokok-pokok pikiran DPRD yang dituangkan dalam Dokumen RKPD tahun 2026. Pokok-pokok pikiran DPRD dirinci dalam beberapa bidang yang selanjutnya diterjemahkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026. Berikut ini adalah usulan pokok-pokok pikiran berdasarkan kamus usulan dan permasalahan.

Tabel 4. 20. Usulan Pokok-pokok Pikiran berdasarkan Kamus Usulan dan Permasalahan untuk RKPD Tahun 2026

KAMUS USULAN	JUMLAH USULAN
Bantuan Benih Hewan Ternak	2
Bantuan Jalan Usaha Tani (JUT)	1
Bazar UMKM, Sosialisasi Perkoperasian	5
Drainase (perbaikan/rehabilitasi, pembangunan)	20
Festival Olahraga Pernapasan tingkat Jateng	1
Kejuaraan cabang olahraga tingkat pelajar (voli, renang, billiard, tenis meja, basket)	1
Pelatihan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (menjahit , memasak)	2
Pelatihan bagi Usaha Mikro (kewirausahaan, packaging, dsb)	2
Pelatihan Keterampilan bagi Masyarakat (menjahit, tata rias, pembuatan roti, barista, komputer Office)	4
Pelatihan Kompetensi Kader Posyandu ILP	2
Pelatihan penanganan darurat bencana	1
Pelatihan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan	2
Pemasangan LPJU	15
Pemeliharaan Jalan	10

KAMUS USULAN	JUMLAH USULAN
Pemeliharaan Jembatan	1
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	4
Pengadaan matras pencak silat	1
Pengadaan/Pemasangan Cermin tikungan, pita penggaduh, guardrail	2
Penyelenggaraan event olahraga rekreasi dan masyarakat	1
Perbaikan RTLH	12
Perluasan SPAM Perpipaan	3
Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan	8
Tanggul Sungai, Irigasi	9
TOTAL USULAN	109

4.2.5. Inovasi Daerah

Inovasi daerah merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan ide-ide baru guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi pemerintahan, serta daya saing ekonomi dan sosial. Inovasi ini mencakup berbagai bidang, seperti teknologi, kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, serta pembangunan ekonomi dan sosial. Dengan menerapkan inovasi, pemerintah daerah dapat menyederhanakan proses birokrasi, meningkatkan transparansi, dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Inovasi daerah juga dapat menciptakan peluang usaha baru, menarik investasi, serta meningkatkan daya saing sektor industri dan ekonomi kreatif. Inovasi dalam bidang pelayanan publik dan sosial dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang lebih baik. Penerapan teknologi dalam pemerintahan dan layanan publik dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan berinteraksi dengan pemerintah. Dengan inovasi, pemerintah daerah dapat lebih mudah menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil.

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri, nilai Indeks Inovasi Daerah Kota Salatiga dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4. 21. Hasil Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Kota Salatiga Tahun 2021-2025

Tahun	Nilai Indeks Inovasi Daerah	Kategori
2021	46,26	Inovatif
2022	47,11	Inovatif
2023	44,55	Inovatif
2024	51,10	Inovatif
2025	48,88	Inovatif

Pada tahun 2025 indeks inovasi target 51,50 dengan realisasi 48,88 dan capaian kinerja 94,91% serta target RPJMD tahun 2026 sebesar 52,00. Dengan ditetapkannya Perwali Nomor 10

Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah menjadi salah satu landasan hukum dalam upaya meningkatkan indeks inovasi melalui tahapan – tahapan yang telah ditentukan sesuai peraturan.

Indeks Inovasi Daerah merupakan indikator penting dalam menilai kapasitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong inovasi dalam berbagai sektor. Kota Salatiga menunjukkan tren yang fluktuatif dalam indeks ini. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan dan hambatan dalam penguatan ekosistem inovasi, baik dari aspek kebijakan, sumber daya manusia, maupun pemanfaatan teknologi. Pada tahun 2025, nilai indeks inovasi Kota Salatiga mengalami penurunan yang yaitu yang sebelumnya di tahun 2024 sebesar 51,10 menjadi 48,88 di tahun 2025, masuk dalam kategori kota inovatif. Hasil penginputan data inovasi daerah Kota Salatiga Tahun 2025 di aplikasi IID Kemendagri, dari 48 inovasi yang diusulkan oleh unit kerja, terpilih 22 inovasi yang dikirim untuk mengikuti Lomba Innovation Government Award tahun 2025, dengan perincian kematangan antara lain : kematangan lebih besar atau sama dengan 100 sejumlah 22 inovasi. Meskipun mengalami penurunan, Kota Salatiga masih memiliki peluang untuk bisa lebih mengoptimalkan inovasi di berbagai bidang guna mencapai peringkat yang lebih tinggi dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Beberapa tantangan yang masih dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya, kesiapan teknologi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Strategi yang akan dilakukan untuk lebih mengoptimalkan nilai indeks inovasi daerah Kota Salatiga antara lain:

- 1) Berkolaborasi secara Pentahelix terutama Perguruan Tinggi yaitu melibatkan mahasiswa magang untuk pendampingan inovasi daerah Kota Salatiga.
- 2) Mengeksplor jumlah inovator yang ada di pemerintah Kota Salatiga terutama di sekolah SD dan SMP melalui Dinas Pendidikan Kota Salatiga.
- 3) Menjadi bagian dari nilai capaian kinerja OPD dalam aspek inovasi.
- 4) Melakukan desk setiap periode sesuai dengan target inovasi.
- 5) Memberikan reward and punishment bagi para inovator yang berkontribusi bagi kemajuan Kota Salatiga terutama untuk perangkat daerah dan BUMD di Kota Salatiga.

Kota Salatiga telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong inovasi daerah sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan. Pada perubahan RKPD Kota Salatiga tahun 2026, akan dilaksanakan beberapa inisiatif program dan kegiatan yang mendukung penciptaan ekosistem inovasi dan budaya inovasi di kalangan masyarakat, Aparatur Sipil Negara, Organisasi Perangkat Daerah dan BUMD Kota Salatiga antara lain berupa :

- 1) Penyelenggaraan Lomba Kreativitas dan Inovasi (Krenova) Masyarakat Kota Salatiga. Pemenang lomba Krenova mendapatkan fasilitas berupa uang pembinaan, piagam, piala dan fasilitasi pengiriman lomba serupa di tingkat Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Mendampingi inovator Kota Salatiga untuk ikut serta dalam Lomba Kreativitas dan Inovasi (Krenova) Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

3) Penyelenggaraan Lomba Krenova Kategori Perangkat Daerah. Lomba ini diikuti oleh semua Organisasi Perangkat daerah dan BUMD di Kota Salatiga.

Dengan penguatan ekosistem inovasi yang lebih inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing tinggi melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam inovasi dan teknologi; optimalisasi digitalisasi layanan publik; serta penerapan kebijakan yang mendukung inovasi di tingkat lokal, Kota Salatiga berpotensi untuk menjadi salah satu kota inovatif terdepan di Indonesia.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menginisiasi kegiatan SIAP INOVASI, yang bertujuan untuk membangun ekosistem inovasi yang kolaboratif. Program ini menargetkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melahirkan setidaknya satu inovasi baru setiap tahunnya guna meningkatkan pelayanan publik, memperkuat ketersediaan data, dan meningkatkan Indeks Inovasi Daerah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung visi kota yang maju dan adaptif.

4.2.6. Pemanfaatan Kelitbangan dalam Pencapaian Priotitas Pembangunan dukungan Program Unggulan Wali Kota

Pemanfaatan kelitbangan menjadi salah satu pertimbangan awal dalam menentukan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, serta penyusunan dokumen kelitbangan juga mengacu pada kebijakan nasional sebagai salah satu landasan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Hasil-hasil kelitbangan yang telah disusun Bappeda maupun Perangkat Daerah menjadi dasar dalam pencapaian program unggulan Wali Kota Salatiga.

Tabel 4. 22. Rekomendasi Perencanaan dalam Pencapaian Program Unggulan Wali Kota

Program Unggulan Wali Kota	Kajian yang relevan	Rekomendasi dalam Perencanaan
KOMIK : Kolaborasi Milenial Kreatif Pengembangan ruang ekspresi gaya hidup positif, seni dan budaya bagi Gen-Z, pemuda dan pelaku seni	a) Kajian Dampak Sosial Ekonomi Program KOMIK (Kolaborasi Milenial Kreatif) dan Program Sekar (Salatiga Berkarya) b) Studi Kelayakan Creative Hub untuk Transformasi Gedung Non-Aktif menjadi Ruang Kerja Kolaboratif	a) Pemetaan peran stakeholder dalam kerjasama hexahelix sesuai dengan roadmap; dan kerjasama hexalix yang dikuatkan dalam bentuk formal b) Pemanfaatan aset GPD menjadi <i>creative hub</i> dan pengembangannya (seni budaya, <i>digital creative</i> , <i>co working space</i> , UMKM)
SEKAR : Salatiga Berkarya Optimalisasi aset Pemerintah Kota Salatiga dan revitalisasi BUMD menjadi lebih produktif berkolaborasi dengan investasi swasta Pengembangan ekonomi kreatif dengan	a) Kajian Dampak Sosial Ekonomi Program KOMIK (Kolaborasi Milenial Kreatif) dan Program Sekar (Salatiga Berkarya) b) Studi Kelayakan Revitalisasi Pasar Untuk Modernisasi Pusat Ekonomi Rakyat	a) Pemetaan peran stakeholder dalam kerjasama hexahelix sesuai dengan roadmap; dan kerjasama hexalix yang dikuatkan dalam bentuk formal b) Memberikan rekomendasi OPD dalam melaksanakan revitalisasi pasar tematik di Kota Salatiga

Program Unggulan Wali Kota	Kajian yang relevan	Rekomendasi dalam Perencanaan
mengutamakan komoditas unggulan lokal melalui pendampingan UMKM pemberdayaan kewirausahaan melalui akses pendanaan dan pengembangan UMKM	c) Potensi Ekonomi Sirkular	c) Regulasi, sosial, manajemen pemasaran, sarana prasarana
SARI : Salatiga Lestari Revitalisasi Taman Kota dan Ekowisata yang mengedepankan keunggulan kompetitif tiap wilayah (kelurahan/kecamatan Penataan sarana prasarana publik, khususnya Gedung pemerintah, pedestrian, jalan sehingga berstandar pelayanan inklusif. Penegakan regulasi daerah untuk pencegahan/penindakan pencemaran lingkungan dan pelanggaran RTRW Membangun sistem pengelolaan sampah terpadu ditingkat kelurahan/kecamatan Mendorong terciptanya kawasan industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	a) Review Rencana Induk Persampahan b) Kajian Pengolahan Lindi TPA	a) Menjadi roadmap pengelolaan persampahan di OPD terkait selama minimal 5 tahun sampai 20 tahun, dan bisa direview apabila diperlukan b) Untuk dilaksanakan di OPD terkait dalam melakukan perbaikan IPAL Lindi TPA, yang saat ini tidak efektif
BIRULAH : Bangun Rumah Layak Huni Program bantuan sosial untuk pemugaran rumah tangga miskin untuk mendapatkan rumah yang sehat	a) Pendampingan Perencanaan DAK Tematik PPKT 2026 b) Pendampingan Konsolidasi Tanah DAKT PPKT 2025	a) Sebagai dasar usulan program DAKT PPKT selanjutnya b) Mendukung OPD terkait dalam menangani permasalahan kawasan kumuh
STBM : Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pemberian bantuan keuangan kelurahan/RW untuk merubah perilaku higiene dan membangun sarana sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat	a) Baseline Strategi Sanitasi Kota (SSK) Salatiga b) Masterplan Pembangunan IPLT c) Kajian Kebutuhan Sanitasi Dasar untuk Pemetaan	a) Sebagai acuan dasar penyusunan kebijakan dalam pemutakhiran SSK tahun 2026-2030, sebagai dasar OPD melaksanakan roadmap pembangunan di bidang sanitasi b) Sebagai dasar OPD terkait untuk melakukan pembangunan atau pengembangan IPLT dalam rangka memenuhi target sanitasi aman 2045 sebesar 95% c) Sebagai dasar OPD terkait dalam menentukan prioritas lokasi penerima bantuan

Program Unggulan Wali Kota	Kajian yang relevan	Rekomendasi dalam Perencanaan
	Akses MCK Layak di Permukiman d) Review RISPAM	MCK/septic tank layak dan aman d) Sebagai roadmap OPD terkait melaksanakan pembangunan infrastruktur air minum selama minimal 5 tahun sampai 20 tahun dalam rangka memenuhi target air minum siap minum perpipaan tahun 2045 sebesar 100%, bisa dilakukan review apabila diperlukan. Air minum siap minum perpipaan mendukung suksesnya program STBM.
SOS : Salatiga Online System Program SOS bertujuan membangun infrastruktur jaringan online terpadu untuk pengawasan infrastruktur, lingkungan hidup, dan mobilitas masyarakat, yang berpusat pada Command Center tingkat kecamatan dan Kota	a) Kajian Infrastruktur Inklusif untuk Meningkatkan Aksesibilitas Fasilitas Publik	a) Sebagai rekomendasi teknis, kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur oleh OPD terkait yang inklusi dan ramah untuk semua kalangan

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Pendanaan daerah merupakan pemanfaatan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah serta dukungan pencapaian target pembangunan Provinsi dan target pembangunan Nasional.

Rencana kerja dan pendanaan daerah merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan secara lengkap dalam lampiran matrik rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah Kota Salatiga. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025-2029.

Selain itu Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026 juga merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Rencana kerja ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis, korelasi terhadap Standar Pelayanan Minimal, *Sustainable Development Goal's* (SDG's), dan pengentasan kemiskinan serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 memuat program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang berfungsi sebagai pelaksana urusan daerah yang meliputi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, serta urusan pendukung urusan pemerintahan.

Program prioritas pembangunan Kota Salatiga Tahun 2026 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 serta Kepmendagri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 adalah Perubahan Keempat atas Kepmendagri Nomor 050-5889 mengenai hasil verifikasi, validasi, inventarisasi, dan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, serta nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Pelaksanaannya didukung dengan pelaksanaan program

yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang merupakan unsur pendukung dan unsur penunjang urusan pemerintahan.

5.1. Rencana Kerja

Implementasi program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah dengan memperhatikan urgensi dan kapasitas kemampuan keuangan daerah sehingga penjabaran program dibedakan menjadi dua prioritas, yaitu :

- 1. Prioritas I, merupakan program prioritas pembangunan daerah tahun 2026 sesuai dengan pentahapan perencanaan tahun ketiga RPJMD Tahun 2025-2029, program Intervensi yang bersifat kebijakan, isu global, isu Nasional, isu Provinsi, Prioritas pembangunan, isu strategis, SDGs dan SPM.
- 2. Prioritas II, Merupakan prioritas program yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang berhubungan dengan permasalahan pelayanan tugas fungsi sesuai urusan, bidang urusannya, atau sebagai unsur pendukung atau unsur penunjang pelaksanaan pemerintahan.

Penentuan prioritas pertama tidak terlepas dari penyelesaian permasalahan Pembangunan dan isu strategis yang dirumuskan berdasarkan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Pada perubahan RKPD tahun 2026, permasalahan dan isu strategis berdasarkan hasil evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2026. Adapun rencana kerja perubahan tahun 2026 dengan memperhatikan penjabaran prioritas pembangunan dalam program kegiatan Perangkat Daerah dengan fokus kegiatan prioritas yang akan dilakukan dikaitkan dengan permasalahan/isu strategis yang disajikan sebagaimana dalam tabel 5.1 sedangkan penjabaran untuk pendanaan prioritas pembangunan tersebut tersaji pada tabel 5.2, berikut ini :

Tabel 5. 1 Penjabaran Isu Strategis, Prioritas Pembangunan dan Rencana Kerja Tahun 2026

No	Isu Strategis 2026	Prioritas Pembangunan 2026	Dukungan Program Nomenklatur Tahun 2026		Rencana Kerja	Keterangan
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	1 Peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia				Perubahan dukungan Program Nomenklatur, menyesuaikan arah kebijakan berdasarkan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029
2	Pengelolaan dan pelestarian budaya daerah	a. Meningkatkan kualitas dan pemerataan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan kurikulum berbasis digital pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah menuju Pendidikan Salatiga Standar Internasional	1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Program ini di tujukan untuk meningkatnya partisipasi anak usia sekolah, yang didukung dengan peningkatan kualitas sarana prasarana serta tenaga pengajar.	
3	Kesenjangan gender, belum optimalnya perlindungan anak dan perempuan serta pelayanan lansia	b. Pemetaan dan pendataan anak-anak dari keluarga miskin yang membutuhkan akses pendidikan, didukung dengan penyediaan lokasi dan SDM dalam mendukung implementasi sekolah rakyat di Kota Salatiga	2 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	2 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Program ini di arahkan pada menjamin kualitas tenaga pendidik yang sudah bersertifikat dan telah memenuhi kualifikasi minimal S1.	
			3 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas bangunan gedung yang ditandai dengan peningkatan persentase Bangunan Gedung Negara milik Pemerintah Kota dalam Kondisi Baik	

No	Isu Strategis 2026	Prioritas Pembangunan 2026	Dukungan Program Nomenklatur Tahun 2026		Rencana Kerja	Keterangan
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
			4 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	4 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Program ini di arahkan pada peningkatan tata kelola anggaran yang di dukung dengan persentase penambahan nilai aset tetap, khususnya pada tata kelola aset pendidikan	
			5 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			
			6 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			7 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
			8 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
		c. Meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat untuk mendukung promotif dan preventif terutama dalam edukasi gaya	9 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	1 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Program ini diarahkan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal urusan kesehatan serta meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	

No	Isu Strategis 2026	Prioritas Pembangunan 2026	Dukungan Program Nomenklatur Tahun 2026		Rencana Kerja	Keterangan
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		hidup sehat, kesehatan mental, pencegahan penyakit menular dan tidak menular	KESEHATAN MASYARAKAT	KESEHATAN MASYARAKAT		
		d. Meningkatkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan	10 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Program ini diarahkan untuk meningkatkan mutu dan distribusi tenaga kesehatan	
			11 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	3 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Program ini diarahkan pada standar fasilitas pelayanan kafarmasian serta persyaratan perijinannya	
			12 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Program ini diarahkan pada prosentase cakupan desa/kelurahan siaga strata mandiri	
		e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga dan pengembangan potensi atlet lokal	13 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Program ini diarahkan pada upaya peningkatan pembudayaan dan prestasi olah raga dengan pengukuran kinerja pada persentase Atlet yang mengikuti	

No	Isu Strategis 2026	Prioritas Pembangunan 2026	Dukungan Program Nomenklatur Tahun 2026		Rencana Kerja	Keterangan
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		f. Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, pemberdayaan pelaku seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi dan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat identitas dan keberlangsungan budaya daerah			pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga	
			14 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Program ini diarahkan pada upaya peningkatan daya tarik destinasi pariwisata terutama pada penguatan nilai-nilai budaya lokal, pemberdayaan pelaku seni dan budaya yang ditandai dengan Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara, Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten / Kota dan peningkatan hunian hotel	
			15 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Program ini diarahkan pada meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan objek pemajuan kebudayaan	
			16 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
		g. Penguatan regulasi dan kebijakan perlindungan perempuan dan anak	17 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN	1 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Program ini dilaksanakan untuk menurunkan kejadian kekerasan terhadap	

No	Isu Strategis 2026	Prioritas Pembangunan 2026	Dukungan Program Nomenklatur Tahun 2026		Rencana Kerja	Keterangan
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		serta kesejahteraan keluarga	PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		perempuan yang diukur dengan persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani dan persentase UPTD PPA sesuai standar layanan	
			18 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Program Perlindungan Khusus Anak diarahkan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak dengan pengukuran kinerja pada indikator persentase Korban kekerasan anak yang mendapat layanan komprehensif	
			19 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	3 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) didukung dengan Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh	

No	Isu Strategis 2026	Prioritas Pembangunan 2026	Dukungan Program Nomenklatur Tahun 2026		Rencana Kerja	Keterangan
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
					Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA), Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 tahun, Cakupan Kader BKB yang Terlatih, dan Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB	
4	Pertumbuhan ekonomi yang merata didukung investasi dan produk unggulan yang berdaya saing	2	Peningkatan pengelolaan potensi perekonomian daerah			Perubahan dukungan Program Nomenklatur menyesuaikan arah kebijakan berdasarkan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 dan Dukungan Tematik Provinsi Jawa Tengah untuk Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional
			a. Pemberdayaan dan penguatan kapasitas UMKM untuk mendukung kualitas produk dan jejaring usaha	1 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
				2 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
				3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
					Program ini diarahkan pada Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri didukung dengan prosentase usaha mikro yang mendapatkan legalitas usaha	
					Program ini diarahkan pada peningkatan daya saing UMKM dengan didukung pada prosentase UMKM yang mengakses pembiayaan	
					Program ini diarahkan pada Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi didukung	

No	Isu Strategis 2026	Prioritas Pembangunan 2026		Dukungan Program Nomenklatur Tahun 2026		Rencana Kerja	Keterangan
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		b. Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat				dengan pertumbuhan pasar rakyat yang terdigitalisasi	
				4 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Program ini diarahkan pada peningkatan daya saing kepemudaan didukung dengan prosentase pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan.	
				5 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Program ini diarahkan untuk meningkatkan distribusi dan kualitas sarana pertanian dengan indikator kinerja prosentase pemenuhan kebutuhan sarana pertanian dan produktivitas tanaman pangan	
				6 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Program ini diarahkan pada peningkatan distribusi dan kualitas prasarana pertanian didukung dengan pemenuhan kebutuhan prasarana pertanian, stimulan bantuan benih padi, pengendalian OPT dan DPI, mempertahankan luas lahan pertanian yang ada.	

No	Isu Strategis 2026	Prioritas Pembangunan 2026	Dukungan Program Nomenklatur Tahun 2026		Rencana Kerja	Keterangan
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
			7 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	4 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Program ini di arahkan pada presentase cakupan bina kelompok tani kategori pemula, lanjut, madya serta utama serta upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pada pada lahan yang tersedia.	
			8 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	5 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Program ini di arahkan pada peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat yang ditandai dengan Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD	
				6 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya serta cakupan kelompok pembudidaya ikan serta kapasitas kelompok pembudidaya ikan sesuai standar	
		c. Penguatan kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat melalui peningkatan pendidikan		1 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGA N KETAHANAN	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya diarahkan untuk mencapai outcome meningkatnya	

No	Isu Strategis 2026	Prioritas Pembangunan 2026	Dukungan Program Nomenklatur Tahun 2026		Rencana Kerja	Keterangan
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
			politik dan wawasan kebangsaan dalam berbagai kegiatan guna meningkatkan cinta tanah air, nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari	EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	
5	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Kolaboratif	3	Peningkatan kualitas ASN dan Implementasi budaya kerja yang berintegritas dan handal			Perubahan dukungan Program Nomenklatur, menyesuaikan arah kebijakan berdasarkan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029
		a.	Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dan selaras dengan perencanaan nasional	1 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
		b.	Meningkatkan sistem pengelolaan kemananan informasi daerah	2 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK	
					Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah di dukung dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan daerah dan Indeks Manajemen Risiko	
					Program ini diarahkan untuk peningkatan keamanan siber dan sandi di lingkungan pemerintah daerah, yang ditandai dengan indikator Persentase tingkat	

No	Isu Strategis 2026	Prioritas Pembangunan 2026	Dukungan Program Nomenklatur Tahun 2026		Rencana Kerja	Keterangan
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
				PENGAMANAN INFORMASI	kematangan daerah dalam penyelenggaraan keamanan informasi	
		c. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat	3 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	3 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Program ini akan diarahkan pada peningkatan kualitas kebijakan kesejahteraan masyarakat yang didukung pengembangan kebijakan berbasis data dan bukti (<i>evidence base policy</i>) yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat	
		d. Perluasan jaringan internet broadband dan penyediaan akses WiFi publik di fasilitas layanan umum	4 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Program ini diarahkan pada penguatan Satu Data Salatiga sebagai rujukan terpadu dalam satu portal dan dapat diakses oleh semua, untuk menciptakan transparansi tata kelola pemerintahan Kota Salatiga, serta penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	
				5 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Program ini diarahkan untuk peningkatan kualitas pengelolaan aplikasi informatika ditandai dengan	

No	Isu Strategis 2026	Prioritas Pembangunan 2026	Dukungan Program Nomenklatur Tahun 2026		Rencana Kerja	Keterangan
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
					peningkatan Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet dan persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	
		e. Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dan kelurahan, dan memperkuat koordinasi dan kerjasama dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan perangkat daerah ditingkat kecamatan dan kelurahan	5 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta peningkatan kualitas pelayanan kecamatan dan kelurahan, penguatan koordinasi dan kerjasama dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan perangkat daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan	
		f. Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip daerah yang didukung pemanfaatan teknologi informasi	6 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	7 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Program ini diarahkan pada peningkatan tata kelola arsip dinamis dan statis dengan pengukuran kinerja pada tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	
		g. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sekretariat Dewan	7 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	8 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN	Program ini diarahkan pada upaya peningkatan layanan sekretariat DPRD dalam	

No	Isu Strategis 2026	Prioritas Pembangunan 2026	Dukungan Program Nomenklatur Tahun 2026		Rencana Kerja	Keterangan	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
			Perwakilan Rakyat Daerah yang efektif dan efisien		TUGAS DAN FUNGSI DPRD	meningkatkan kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan dan kualitas penganggaran dan pengawasan anggota DPRD	
			8 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
			9 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN				
7	Pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	4	Peningkatan identifikasi dan inventarisasi sumber daya serta masalah lingkungan hidup	1 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Program ini diarahkan pada penurunan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan didukung oleh pemantauan status mutu air dan peningkatan sarana prasarana laboratorium	Perubahan dukungan Program Nomenklatur, menyesuaikan arah kebijakan berdasarkan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029
		2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Program ini diarahkan pada peningkatan tata kelola persampahan dengan dukungan penanganan sampah, pengurangan sampah			

No	Isu Strategis 2026	Prioritas Pembangunan 2026	Dukungan Program Nomenklatur Tahun 2026		Rencana Kerja	Keterangan
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
					serta fasilitasi pengolahan sampah	
			3 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			4 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
			5 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
			6 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			7 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
8	Pemenuhan kualitas dan cakupan	5	Peningkatan infrastruktur kewilayahan guna menunjang efektifitas layanan perkotaan			Perubahan dukungan Program Nomenklatur,

No	Isu Strategis 2026	Prioritas Pembangunan 2026	Dukungan Program Nomenklatur Tahun 2026		Rencana Kerja	Keterangan
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	pelayanan infrastruktur	a. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar (air minum, sanitasi dan rumah layak) bagi masyarakat	1 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum sebagai kebutuhan dasar	menyesuaikan arah kebijakan berdasarkan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029
			2 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang ditandai dengan persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	
			3 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	3 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Program ini diarahkan pada penanganan perumahan dan permukiman kumuh dengan indikator program pada persentase rumah tidak layak huni yang diperbaiki	
			4 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Program ini diarahkan pada peningkatan penyediaan PSU Permukiman	

No	Isu Strategis 2026	Prioritas Pembangunan 2026	Dukungan Program Nomenklatur Tahun 2026		Rencana Kerja	Keterangan
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
				5 PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	Program ini diarahkan pada peningkatan aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman serta dapat diukur dengan rasio kemantapan jalan	
		b. Mengembangkan sistem manajemen transportasi cerdas guna meningkatkan efisiensi, keselamatan dan kenyamanan sistem transportasi	5 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	6 PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan transportasi darat dengan indikator kinerja kualitas layanan transportasi darat, Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota dan Rasio Kinerja Lalu Lintas (VCR)	
		c. Meningkatkan sistem peringatan dini dan koordinasi antar instansi terkait dalam pencegahan dan penanggulangan bencana maupun peristiwa kebakaran	6 PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	7 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Program ini diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	
		d. Mengembangkan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan	7 PROGRAM PENINGKATAN SARANA	8 PROGRAM PENELITIAN DAN	Program ini diarahkan untuk meningkatkan dukungan hasil kelitbangan di bidang inovasi	

No	Isu Strategis 2026	Prioritas Pembangunan 2026		Dukungan Program Nomenklatur Tahun 2026		Rencana Kerja	Keterangan
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
			pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat	DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PENGEMBANGAN DAERAH	dalam perencanaan pembangunan	

5.1.1. Rencana Kerja Prioritas Pertama

5.1.1.1 Rencana Kerja Dukungan untuk Prioritas Nasional

Tabel 5. 2 Dukungan Pendanaan Program Pembangunan Daerah Kota Salatiga terhadap Prioritas Nasional
(Asta Cita) Tahun 2026

No	PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM DAERAH	Pagu Program Dukungan Asta Cita Tahun 2026	
			APBD	PRKPD
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	1 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.104.010.000,00	1.211.928.000
		2 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.034.235.440,00	1.175.385.440
		3 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	127.546.900,00	127.546.900
		4 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	739.013.216,00	759.013.216
		5 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.301.336.000,00	1.328.446.000
		JUMLAH	4.306.141.556,00	4.602.319.556,00
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	4.629.342.000,00	4.629.342.000
		2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	525.026.350,00	525.026.350
		3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	300.000.000,00	300.000.000
		4 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	158.280.400,00	160.374.800
		5 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.719.600,00	1.719.600
		6 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	318.916.000,00	318.916.000
		7 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.557.076.307,00	17.278.610.307
		8 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	14.054.400,00	14.054.400
		9 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	328.247.500,00	355.761.500

No	PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM DAERAH	Pagu Program Dukungan Asta Cita Tahun 2026	
			APBD	PRKPD
		10 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	32.698.100,00	32.698.100
		11 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	213.325.400,00	337.641.400
		12 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	719.124.600,00	646.432.400
		JUMLAH	8.797.810.657,00	24.600.576.857,00
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	-	-
		2 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	11.712.028.954,00	14.143.499.676
		3 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	26.938.491.305,00	26.938.491.305
		4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	450.521.400,00	606.521.400
		5 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	575.000.000,00	725.000.000
		6 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	360.800.000,00	460.800.000
		7 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-
		8 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	267.800.000,00	267.800.000
		9 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	105.000.000,00	105.000.000
		10 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-	-
		JUMLAH	40.409.641.659,00	43.247.112.381,00
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta	1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	33.415.400.000,00	33.457.784.492
		2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	37.073.408.941,00	39.204.859.941
		3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER	582.085.000,00	582.085.000

No	PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM DAERAH	Pagu Program Dukungan Asta Cita Tahun 2026	
			APBD	PRKPD
	Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	DAYA MANUSIA KESEHATAN		
		4 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	970.997.300,00	1.062.743.695
		5 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAHAAN	11.998.498.849,00	12.148.180.731
		6 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	185.000.000,00	205.700.000
		7 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	379.700.000,00	379.700.000
		8 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	544.808.877,00	544.808.877
		9 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	180.000.000,00	180.000.000
		10 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	535.677.677,00	535.677.677
		11 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	170.760.000,00	170.760.000
		12 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	79.807.744,00	79.807.744
		13 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	586.369.000,00	586.369.000
		14 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.006.477.517,00	1.006.477.517
		JUMLAH	87.708.990.905,00	90.144.954.674,00
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	4.629.342.000,00	4.629.342.000
		2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	525.026.350,00	525.026.350
		3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	300.000.000,00	300.000.000
		4 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	11.712.028.954,00	11.712.028.954
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	26.938.491.305,00	26.938.491.305
		5 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	-
		6 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	60.500.000,00	60.500.000
		7 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	42.500.000,00	42.500.000

No	PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM DAERAH	Pagu Program Dukungan Asta Cita Tahun 2026	
			APBD	PRKPD
		8 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	37.000.000,00	37.000.000
		9 PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.371.751.092,00	17.371.751.092
		10 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	16.500.000,00	16.500.000
		11 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	10.870.000,00	10.870.000
		12 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	423.337.000,00	423.337.000
		13 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	20.030.000,00	20.030.000
		14 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	600.000.000,00	600.000.000
		15 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	40.930.000,00	40.930.000
		JUMLAH	62.728.306.701,00	62.728.306.701,00
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.246.630.000,00	1.246.630.000
		2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	185.000.000,00	185.000.000
		3 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	379.700.000,00	379.700.000
		4 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	544.808.877,00	564.308.877
		5 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	535.677.677,00	563.397.677
		6 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	35.000.000,00	-
		7 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-
		8 PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.371.751.092,00	17.371.751.092
		JUMLAH	20.298.567.646,00	20.310.787.646,00
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat	1 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN	739.013.216,00	759.013.216

No	PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM DAERAH	Pagu Program Dukungan Asta Cita Tahun 2026	
			APBD	PRKPD
	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		
		2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	374.071.200,00	104.920.000
		3 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.301.336.000,00	1.328.446.000
		JUMLAH	2.414.420.416,00	2.192.379.216,00
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	1 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.104.010.000,00	1.211.928.000
		2 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.034.235.440,00	1.175.385.440
		3 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	127.546.900	127.546.900
		4 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	318.916.000,00	318.916.000
		5 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.557.076.307,00	17.278.610.307
		6 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	360.800.000,00	460.800.000
		7 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-
		8 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	82.000.000,00	86.952.400
		9 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	7.390.132.016,00	759.013.216
		10 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.301.336.000,00	1.328.446.000
		JUMLAH	13.276.052.663,00	22.747.598.263,00
		TOTAL		239.939.932.203,00

Tabel 5. 3 Dukungan Pendanaan Pemerintah Kota Salatiga terhadap Program Strategis Nasional (ProSN) Tahun 2026

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	Dukungan Program Daerah		Rencana Kerja	Pagu Anggaran Tahun 2026	
						APBD	PRKPD
1	Pengentasan Kemiskinan	1 Penanggulangan Kemiskinan	1	Program Pemberdayaan Sosial	Program ini di arahkan pada peningkatan pemberdaya an sosial	185.000.000,00	205.700.000
			2	Program Rehabilitasi Sosial	Program ini di arahkan pada peningkatan rehabilitasi sosial	334.000.000,00	336.494.800
			3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Program ini di arahkan pada peningkatan perlindunga n dan jaminan sosial	379.700.000,00	379.700.000
			4	Program Penanggulangan Bencana	Program ini di arahkan pada peningkatan pengendalia n dan penanggulangan bencana pertanian	1.034.235.440,00	1.175.385.440
			5	Program Hubungan Industrial	Program ini di arahkan pada peningkatan pekerja Indonesia yang terlindungi	535.677.677,00	563.397.677
			6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	37.073.408.941,00	39.204.859.941
			7	Program Pendaftaran Penduduk	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas layanan pendaftaran penduduk	170.760.000,00	521.425.641

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	Dukungan Program Daerah		Rencana Kerja	Pagu Anggaran Tahun 2026	
						APBD	PRKPD
			8	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program ini di arahkan pada peningkatan pemanfaatan informasi kependudukan	8.310.000,00	8.310.000
			9	Program Pengelolaan Pendidikan	Program ini di arahkan pada peningkatan partisipasi anak usia sekolah	33.415.400.000,00	33.457.784.492
			10	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Program ini di arahkan pada peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera	1.006.477.517,00	997.964.517
			11	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program ini di arahkan pada peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	158.280.400,00	160.374.800
			12	Program Pengembangan UMKM	Program ini di arahkan pada peningkatan daya saing UMKM	434.063.880,00	434.063.880
			13	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program ini di arahkan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja	544.808.877,00	564.308.877
			14	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Program ini di arahkan pada peningkatan peran serta masyarakat dalam	-	0

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	Dukungan Program Daerah		Rencana Kerja	Pagu Anggaran Tahun 2026	
						APBD	PRKPD
					pengembangan kesenian tradisional		
			15	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program ini di arahkan pada peningkatan produksi perikanan budidaya	328.247.500,00	355.761.500
			16	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program ini di arahkan pada peningkatan produksi perikanan budidaya	32.698.100,00	32.698.100
			17	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program ini di arahkan pada peningkatan distribusi dan kualitas sarana pertanian	719.124.600,00	337.641.400
			18	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program ini di arahkan pada peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	34.248.300,00	39.948.300
			19	Program Penyuluhan Pertanian	Program ini di arahkan pada peningkatan kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	14.054.400,00	14.054.400
			20	Program Kawasan Permukiman	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas kawasan permukiman	3.380.000.000,00	3.380.000.000
			21	Program Peningkatan Prasarana, Sarana	Program ini di arahkan pada	4.529.771.222,00	4.529.771.222

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	Dukungan Program Daerah		Rencana Kerja	Pagu Anggaran Tahun 2026	
						APBD	PRKPD
				Dan Utilitas Umum (PSU)	peningkatan penyediaan PSU Permukiman		
			22	Program Pengelolaan Pendidikan	Program ini di arahkan pada peningkatan partisipasi anak usia sekolah	33.415.400.000,00	33.457.784.492
			23	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Program ini di arahkan pada peningkatan perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	4.629.342.000,00	4.629.342.000
			24	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program ini di arahkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	525.026.350,00	525.026.350
			25	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Program ini di arahkan pada peningkatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	-	1.000.000
			26	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program ini di arahkan pada peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	158.280.400,00	160.374.800
			27	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program ini di arahkan pada peningkatan penanganan kerawanan pangan	1.719.600,00	1.719.600

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	Dukungan Program Daerah		Rencana Kerja	Pagu Anggaran Tahun 2026	
						APBD	PRKPD
			28	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program ini di arahkan pada peningkatan distribusi dan kualitas prasarana pertanian	719.124.600,00	646.432.400
			29	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas layanan transportasi darat	11.712.028.954,00	14.143.499.676
			JUMLAH			135.479.188.758,00	140.264.824.305,00
		2 Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1	Program Pemberdayaan Sosial	Program ini di arahkan pada peningkatan pemberdaya an sosial	185.000.000,00	205.700.000
			2	Program Rehabilitasi Sosial	Program ini di arahkan pada peningkatan rehabilitasi sosial	334.000.000,00	336.494.800
			3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Program ini di arahkan pada peningkatan perlindunga n dan jaminan sosial	379.700.000,00	379.700.000
			4	Program Penanggulangan Bencana	Program ini di arahkan pada peningkatan pengendalia n dan penanggulangan bencana pertanian	1.034.235.440,00	1.175.385.440
			5	Program Hubungan Industrial	Program ini di arahkan pada peningkatan pekerja Indonesia yang terlindungi	535.677.677,00	563.397.677

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	Dukungan Program Daerah		Rencana Kerja	Pagu Anggaran Tahun 2026	
						APBD	PRKPD
			6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	37.073.408.941,00	39.204.859.941
			7	Program Pendaftaran Penduduk	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas layanan pendaftaran penduduk	170.760.000,00	521.425.641
			8	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program ini di arahkan pada peningkatan pemanfaata n informasi kependudukan	8.310.000,00	8.310.000
			9	Program Pengelolaan Pendidikan	Program ini di arahkan pada peningkatan partisipasi anak usia sekolah	33.415.400.000,00	33.457.784.492
			10	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Program ini di arahkan pada peningkatan pemberdaya an dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera	1.006.477.517,00	997.964.517
			11	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program ini di arahkan pada peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	158.280.400,00	160.374.800

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	Dukungan Program Daerah		Rencana Kerja	Pagu Anggaran Tahun 2026	
						APBD	PRKPD
			12	Program Pengembangan UMKM	Program ini di arahkan pada peningkatan daya saing UMKM	434.063.880,00	434.063.880
			13	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program ini di arahkan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja	544.808.877,00	564.308.877
			14	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Program ini di arahkan pada peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	-	0
			15	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program ini di arahkan pada peningkatan produksi perikanan budidaya	328.247.500,00	355.761.500
			16	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program ini di arahkan pada peningkatan produksi perikanan budidaya	32.698.100,00	32.698.100
			17	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program ini di arahkan pada peningkatan distribusi dan kualitas sarana pertanian	719.124.600,00	337.641.400
			18	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program ini di arahkan pada peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	34.248.300,00	39.948.300
			19	Program Penyuluhan Pertanian	Program ini di arahkan pada	14.054.400,00	14.054.400

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	Dukungan Program Daerah		Rencana Kerja	Pagu Anggaran Tahun 2026	
						APBD	PRKPD
					peningkatan kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian		
			20	Program Kawasan Permukiman	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas kawasan permukiman	3.380.000.000,00	3.380.000.000
			21	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Program ini di arahkan pada peningkatan penyediaan PSU Permukiman	4.529.771.222,00	4.529.771.222
			22	Program Pengelolaan Pendidikan	Program ini di arahkan pada peningkatan partisipasi anak usia sekolah	33.415.400.000,00	33.457.784.492
			23	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Program ini di arahkan pada peningkatan perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	4.629.342.000,00	4.629.342.000
			24	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program ini di arahkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	525.026.350,00	525.026.350
			25	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Program ini di arahkan pada peningkatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	-	1.000.000

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	Dukungan Program Daerah		Rencana Kerja	Pagu Anggaran Tahun 2026		
						APBD	PRKPD	
			26	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program ini di arahkan pada peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	158.280.400,00	160.374.800	
			27	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program ini di arahkan pada peningkatan penanganan kerawanan pangan	1.719.600,00	1.719.600	
			28	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program ini di arahkan pada peningkatan distribusi dan kualitas prasarana pertanian	719.124.600,00	646.432.400	
			29	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas layanan transportasi darat	11.712.028.954,00	14.143.499.676	
			JUMLAH			135.479.188.758,00	140.264.824.305,00	
		3	Sekolah Rakyat					
		4	Pembangunan 3 Juta Rumah	1	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.246.630.000,00	1.246.630.000
				2	Program Kawasan Permukiman	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas kawasan permukiman	3.380.000.000,00	3.380.000.000
		JUMLAH			273.116.394.399,00	282.495.600.693,00		
		TOTAL PAGU DUKUNGAN UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN					544.074.771.915,00	563.025.249.303,00

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	Dukungan Program Daerah		Rencana Kerja	Pagu Anggaran Tahun 2026	
						APBD	PRKPD
2	Ketahanan Pangan	1 Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	1	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program ini di arahkan pada peningkatan kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	81.700.000,00	132.380.000
			2	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas layanan transportasi darat	11.712.028.954,00	132.380.000
			3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Program ini di arahkan pada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada dan Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1.104.010.000,00	14.143.499.676
			4	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program ini di arahkan pada peningkatan distribusi dan kualitas prasarana pertanian	719.124.600,00	1.211.928.000
			5	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program ini di arahkan pada peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	158.280.400,00	646.432.400
			6	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program ini di arahkan pada peningkatan penanganan kerawanan pangan	1.719.600,00	160.374.800

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	Dukungan Program Daerah		Rencana Kerja	Pagu Anggaran Tahun 2026	
						APBD	PRKPD
			7	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program ini di arahkan pada peningkatan produksi perikanan budidaya	-	1.719.600
			8	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program ini di arahkan pada peningkatan produksi perikanan budidaya	32.698.100,00	355.761.500
			9	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program ini di arahkan pada peningkatan rehabilitasi sosial	334.000.000,00	32.698.100
			10	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program ini di arahkan pada peningkatan distribusi dan kualitas sarana pertanian		337.641.400
			11	Program Rehabilitasi Sosial	Program ini di arahkan pada peningkatan rehabilitasi sosial	37.073.408.941,00	336.494.800
			TOTAL PAGU DUKUNGAN UNTUK KETAHANAN PANGAN			51.216.970.595,00	17.491.310.276,00
3	Kesehatan untuk Semua	1 Jaminan Kesehatan Nasional	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	582.085.000,00	39.204.859.941
			2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program ini di arahkan pada peningkatan mutu dan distribusi tenaga kesehatan	276.575.000,00	582.085.000

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	Dukungan Program Daerah		Rencana Kerja	Pagu Anggaran Tahun 2026	
						APBD	PRKPD
			3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas dan distribusi sediaan farmasi alat kesehatan, dan makanan minuman	5.857.101.550,00	275.565.000
			4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	586.369.000,00	5.857.001.550
			5	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program ini di arahkan pada peningkatan pemberdaya an dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.412.112.000,00	592.968.400
		JUMLAH				8.714.242.550,00	46.512.479.891,00
		2 Makan Bergizi Gratis	1.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program ini diarahkan pada kegiatan administrasi tata pemerintahan, fasilitasi dan koordinasi hukum, fasilitasi kerjasama daerah dan Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	1.412.112.000,00	1.471.197.000
		JUMLAH				1.412.112.000,00	1.471.197.000,00
		TOTAL PAGU DUKUNGAN UNTUK KESEHATAN UNTUK SEMUA				10.126.354.550,00	47.983.676.891,00
4	Perluasan Akses Pendidikan	1 Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Program ini di arahkan pada peningkatan partisipasi anak usia sekolah	575.000.000,00	33.457.784.492

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	Dukungan Program Daerah	Rencana Kerja	Pagu Anggaran Tahun 2026	
					APBD	PRKPD
	TOTAL PAGU DUKUNGAN UNTUK PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN				1.987.112.000,00	34.928.981.492,00
5	Pertumbuhan Ekonomi	1 Pengendalian Inflasi	1 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Program ini di arahkan pada peningkatan kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	434.063.880,00	725.000.000
			2 Program Pengembangan UMKM	Program ini di arahkan pada peningkatan daya saing UMKM	300.000.000,00	434.063.880
			3 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	-	300.000.000
			4 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Program ini di arahkan pada peningkatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	158.280.400,00	1.000.000
			5 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program ini di arahkan pada peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	128.616.700,00	160.374.800
			6 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Program ini di arahkan pada peningkatan jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	60.500.000,00	216.305.800
			7 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program ini di arahkan pada peningkatan kemudahan berinvestasi	-	110.500.000

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	Dukungan Program Daerah		Rencana Kerja	Pagu Anggaran Tahun 2026	
						APBD	PRKPD
			8	Program Promosi Penanaman Modal	Program ini di arahkan pada peningkatan jangkauan promosi penanaman modal	37.000.000,00	1.000.000
			9	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program ini di arahkan pada peningkatan perizinan berusaha berbasis risiko	105.000.000,00	28.500.000
			10	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program ini di arahkan pada peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	267.800.000,00	105.000.000
			11	Program Pemasaran Pariwisata	Program ini di arahkan pada peningkatan jangkauan pemasaran pariwisata	600.000.000,00	267.800.000
			12	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	81.700.000,00	1.301.555.690
			13	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program ini di arahkan pada peningkatan kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	10.870.000,00	132.380.000
			14	Program Pengembangan Ekspor	Program ini di arahkan pada peningkatan pelaku usaha yang berorientasi ekspor	40.930.000,00	10.870.000

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	Dukungan Program Daerah		Rencana Kerja	Pagu Anggaran Tahun 2026	
						APBD	PRKPD
			15	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Program ini di arahkan pada peningkatan tertib niaga dan mutu produk	180.000.000,00	40.315.000,00
			16	Program Penempatan Tenaga Kerja	Program ini di arahkan pada peningkatan penempatan tenaga kerja	111.368.800,00	160.207.000
			JUMLAH			2.516.129.780,00	3.994.872.170,00
		2 Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program ini di arahkan pada peningkatan pembinaan dan pengawasan koperasi	83.200.000,00	111.368.800
			2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Program ini di arahkan pada peningkatan kinerja pengelolaan koperasi	71.242.200,00	83.200.000
			3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas SDM Perkoperasian	450.521.400,00	64.042.200
			4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Program ini di arahkan pada peningkatan produktivitas koperasi	1.295.142.472,00	606.521.400
			JUMLAH			1.900.106.072,00	865.132.400,00
		3 Kemudahan Perizinan	1	Program Penataan Bangunan Gedung	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas bangunan gedung	12.900.000,00	2.738.409.072
			2	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan	Program ini di arahkan pada peningkatan kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan	42.500.000,00	12.900.000

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	Dukungan Program Daerah		Rencana Kerja	Pagu Anggaran Tahun 2026	
						APBD	PRKPD
				Lingkungan Hidup (PPLH)	lingkungan yang diterbitkan		
			3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Program ini di arahkan pada peningkatan perizinan berusaha berbasis risiko	16.500.000,00	34.500.000
			4	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Program ini di arahkan pada peningkatan kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	575.000.000,00	16.500.000
			5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Program ini di arahkan pada peningkatan kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	20.030.000,00	725.000.000
			6	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian		20.030.000
		JUMLAH				666.930.000,00	3.547.339.072,00
		TOTAL PAGU DUKUNGAN UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI				5.083.165.852,00	8.407.343.642,00
		TOTAL PAGU DUKUNGAN PROSN				612.488.374.912,00	671.836.561.604,00

5.1.1.2 Rencana Kerja Dukungan untuk Prioritas Provinsi Jawa Tengah

Tabel 5. 4 Dukungan Rencana Kerja Kegiatan Kota Salatiga terhadap Program Prioritas Delegasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten/Kota	Rencana Kerja Dukungan
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	Menerbitkan SK Wali Kota yang mengatur Penggunaan Dana Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat	Pemanfaatan dana kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan
2	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional	Renovasi Lintasan Sintetik Atletik Stadion Kridanggo KOTA SALATIGA	Pemenuhan sarana olahraga unggulan Kota Salatiga (atletik) dalam upaya untuk peningkatan daya saing keolahragaan dalam upaya peningkatan pembudayaan dan prestasi olah raga
		Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota :	Penanganan kawasan kumuh yang difokuskan pada transformasi kawasan permukiman kumuh menjadi lingkungan yang tertata dan produktif
		- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru"	
3	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK & KPK	Peningkatan kapasitas APIP dengan penyediaan anggaran 1% dari APBD di luar Gaji	Pelaksanaan kegiatan untuk mendukung penurunan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan dan peningkatan kualitas pendampingan dan asistensi kegiatan yang dibiayai APBD
4	Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa	Posyandu ILP (Integrasi Layanan Primer) : 213 Posyandu, Rehab (Revitalisasi) Puskesmas Pembantu	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
5	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila	-	
6	Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta	-	
7	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan	Penyediaan anggaran sewa Rumah Aman untuk korban kekerasan	Pembentukan rumah perlindungan anak
8	Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru	Sosialisasi dan Penetapan Desa Wisata	Melaksanakan pemetaan calon Desa Wisata/Kampung Wisata menjadi longlist database
9	BUMDES Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jateng)	-	

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten/Kota	Rencana Kerja Dukungan
10	Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat	Sosialisasi Kegiatan Pencegahan dan mitigasi bencana di setiap kecamatan di Salatiga yang salah satunya ada praktik Dapur Umum (DU)	Pelatihan pencegahan dan mitigasi Bencana
11	Cek Kesehatan Gratis	Pemenuhan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai), Penyiapan sarana dan prasarana di puskesmas, Sosialisasi, Promosi Media sosial	Peningkatan layanan kesehatan ibu bebas anemia dan terpenuhinya nutrisi ibu hamil, layanan kesehatan bayi periode 100 HPK dan pembiayaan jaminan kesehatan daerah untuk MBR
12	Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu	Penerapan Puskesmas dengan Integrasi Layanan Primer (ILP)	Pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan ILP tingkat RW
13	Melahirkan Pemerintahan yang <i>Good Clear Government</i> dan <i>Collaborative Governance</i> melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa	Peningkatan Profesionalitas ASN dengan menerapkan Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit	Fasilitasi layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional
		Pembinaan Kelurahan dan LPMK (bagian Pemerintahan)	Pelaksanaan evaluasi penggunaan Dana Kelurahan
14	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	UPTD Pelindungan Perempuan Anak, pelaporan dan penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak. (tahap pembentukan UPTD PPA di tahun 2025)	Aktifasi dan fasilitasi kegiatan UPT PPA
15	Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru	-	
16	Pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Pelatihan PRSE (Perempuan Rawan Sosial Ekonomi), Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), BinteK Peningkatan Kapasitas 7 Pilar PSKS, Fasilitasi Adopsi, Visit dan Pendampingan Anak Terlantar, Anak Berhadapan dengan Hukum dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Fasilitasi Program Bantuan Yapi (Yatim Piatu), Fasilitasi Rujukan LKSA, Pelatihan Kemandirian Anak Terlantar, Porseni/Jambore Anak Terlantar, Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Orang Tua Anak Terlantar, Fasilitasi Akses SPMB Jalur Afirmasi Panti Dikdas dan Dikmen	Pelaksanaan program pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial
17	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	Pembinaan kepada Pelaku Usaha Pariwisata terkait Program Pengembangan Wisata Ramah Muslim	Pelaksanaan edukasi, pelatihan dan workshop terkait penyusunan SOP Pelayanan dan Manajemen Risiko kepada SDM pengelola DTW termasuk wisata Ramah Muslim
18	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi Produk UKM berbahan daging (Program Reguler) dan rekomendasi HAKI secara gratis.	Peningkatan literasi terkait produk tersertifikasi halal kepada UMKM melalui sosialisasi dan fasilitasi bekerjasama dengan BPJPH
		Penyelenggaraan Bimtek Keamanan pangan bagi pelaku usaha P-IRT.	Pendampingan langsung kepada pelaku IRTP mulai dari sosialisasi, pembinaan, hingga

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten/Kota	Rencana Kerja Dukungan
			fasilitasi perizinan yang salah satunya pengurusan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
19	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Pelatihan Juleha dan Sertifikasi Juru Sembelih Halal, Perbaikan Sarana Prasarana Rumah Potong Hewan	Pelaksanaan pelatihan Juleha dan sertifikasi Juru Sembelih oleh Dispngatan
20	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana		
21	Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan bio gas, hydro, maupun tenaga surya		
22	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan	Pelatihan pasaca panen bagi KWT / Poktan penerima program Pekarangan Pangan Lesatari	Pelaksanaan smart urban farming untuk optimalisasi pekarangan dan lahan sempit perkotaa
23	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	Pelatihan bagi Pengelola Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata)	Pelaksanaan edukasi, pelatihan dan workshop terkait peyusunan SOP Pelayanan dan Manajemen Risiko kepada SDM pengelola DTW
24	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM	Subsidi Kredit bagi UMKM melalui BPR Salatiga sebesar Rp 6 Milyar dan tanpa jaminan serta Pemdampingan bagi Kelompok UMKM agar mempunyai Legalililas usaha (berbadan hukum)	Pemberdayaan UMKM
25	Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau	-	
26	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa	Pemeliharaan taman (RTH) se Kota Salatiga, Belanja bibit tanaman	Pemeliharaan dan peningkatan prosesntase RTH Kota Salatiga dan pemenuhan bibit tanaman untuk pemeliharaan RTH
27	Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	- Sosialisasi Peningkatan Rasa Solidaritas - Antisipasi Kerawanan Sosial Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru - Sosialisasi Pencegahan Ekstrimisme dan Radikalisme	Upaya Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosia
28	Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan	- Audiensi dengan Walikota, Forkopimda dengan ormas - Fasilitasi Ormas - Hibah Ormas	Pengoptimalan koordinasi dan komunikasi ormas untuk meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat
29	Peningkatan operasional kader Posyandu	Honor petugas kesehatan Kader Posyandu ILP, Honor petugas kesehatan Kader Puskesmas Pembantu ILP	Pemenuhan fasilitasi Posyandu ILP
30	Peningkatan kualitas hidup lansia	Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi lansia melalui pemeriksaan / skrining kesehatan lansia sesuai standar, Puskesmas santun lansia dan lansia dengan ketergantungan sedang,	Optimalisasi Sekolah Lansia yang melibatkan penyuluh keluarga sejahtera

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten/Kota	Rencana Kerja Dukungan
		berat dan total mendapatkan perawatan jangka panjang (PJP)	
		Sekolah Lansia (Bina Keluarga Lansia /BKL)	
31	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	Penumbuhan wirausaha muda	Peningkatan pembelajaran kewirausahaan berorientasi global untuk pemuda
32	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	Peningkatan SDM bagi Pengurus dan pengawas Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) bagi 23 Kelurahan	Fasilitasi Pembangunan Gerai KKMP terutama pada penyediaan lahan
33	Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga	Pemberian penghargaan bagi atlet dan pelatih di Popda provinsi, uang saku bagi atlet dan pelatih PPLOP	Fasiitasi pelaksanaan kegiatan POPDA
34	Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan	Layanan konseling pendidikan inklusi, Pelatihan Guru Pembimbing Khusus dan Shadow Teacher, Psikotest Inklusi, Parenting Anak Berkebutuhan Khusus, Sosialisasi Hasil Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus	Penataan sarana prasarana pendidikan baik fisik maupun nonfisik yang berstandar pelayanan inklusif
35	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana	Pemasangan alat Early Warning Sistem (EWS) di wilayah rawan banjir/luapan air dan longsor	Pelatihan Penanggulangan Bencana, Penyediaan Peralatan Perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Tabel 5. 5 Dukungan Rencana Kerja Kegiatan Kota Salatiga terhadap Program Prioritas Pendukung Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

No	Program Delegasi Pendukung Pangan	Dukungan Kegiatan Kabupaten/Kota	Rencana Kerja Dukungan
1	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila	-	
2	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Pelatihan dan sertifikasi Juru Sembelih Halal	Peningkatan jumlah juru sembelih halal dan sarana prasana RPH
3	Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan <i>day care</i> untuk buruh di Kawasan Industri	Peningkatan pelayanan dan peran penyuluh pertanian	Pelaksanaan Program Penyuluh Pertanian dan Program hubungan Industrial
4	Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari	-	
5	Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida	-	
6	Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati)	-	
7	Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM	-	
8	Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian	Penyelerasan Perda Ketahanan Pangan dengan Rencana Induk Pangan Provinsi Membangun sistem pemantauan stok pangan antar-daerah berbasis platform	Pelaksanaan Program Peneyediaan Saran dan Prasanara Pertanian untuk mendukung Urban Farming dan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan

No	Program Delegasi Pendukung Pangan	Dukungan Kegiatan Kabupaten/Kota	Rencana Kerja Dukungan
		digital bersama Dinas Provinsi terkait	Barang Penting
9	Petani milenial gajian	Pemberian modal dan fasilitas kepada anak muda petani untuk pengembangan usahatani	Pelaksanaan program peningkatan daya saing kepemudaan dan pelatihan pemuda tani pda Program Penyuluhan Pertanian untuk dukungan Urban Farming
10	Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa	-	
11	Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi	Hilirisasi pertanian, menjadikan Salatiga sebagai pusat Distribusi dan Pengolahan hasil pertanian Rehabilitasi Gudang Penyimpanan Hasil Pertanian/ lumbung Pangan yang representatif sebagai “Modern Food Storage”	ketahanan pangan berbasis komunitas, pengembangan urban farming, memperluas kerjasama antara petani, pedagang, dan konsumen untuk menciptakan sistem pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan
12	Revitalisasi embung	Rehabilitasi / Normalisasi Bendung	Pelaksanaan Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian untuk distribusi dan kualitas sarana prasarana pertanian
13	Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan	Mengembangkan tanaman hidroponik di area binaan	Pengembangan urban farming ketahanan pangan berbasis komunitas untuk menciptakan sistem pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan
14	Subsidi Pangan Murah	Bazar Pangan Murah tiap Kecamatan	Kerjasama antara Kecamatan dengan Dinas Pangan dan Pertanian untuk pelaksanaan Bazar Pangan
15	Penyediaan benih yang berkualitas	Bantuan benih padi unggul	Pelaksanaan Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana Pertanian untuk distribusi dan kualitas sarana pertanian
16	Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian	Bantuan sarpras pertanian Pembuatan / Rehabilitasi Irigasi Pertanian di kawasan budidaya padi	Pelaksanaan Program Peningkatan dan Pengembangan Prasarana Pertanian untuk distribusi dan kualitas prasarana pertanian

5.1.1.3 Rencana Kerja Prioritas RPJMD untuk Tahun 2026

Pelaksanaan prioritas Pembangunan yang merupakan penerjemahan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 harus direncanakan secara utuh dalam RKPD Kota Salatiga sesuai dengan pentahapan Tahun 2026 diarahkan pada tahap “**Peningkatan Pembangunan SDM dan pengelolaan potensi perekonomian daerah didukung pemerintahan berintegritas dan infrastruktur berkualitas**”. Tahun 2026 ini difokuskan pada “**Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan yang didukung oleh infrastruktur berkualitas yang mempermudah akses pasar**”. Penentuan prioritas Pembangunan tidak terlepas dari penyelesaian permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang dirumuskan berdasarkan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan. Pada

Perubahan RKPD tahun 2026, permasalahan dan isu strategis berdasarkan hasil evaluasi kinerja triwulan I tahun 2026. Prioritas Pembangunan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada nomenklatur perencanaan Pembangunan dan ketentuan regulasi yang terkait. Tidak semua program yang dilaksanakan Perangkat Daerah dijadikan program prioritas. Pemilihan program prioritas juga memperhatikan kemampuan keuangan daerah pada tahun rencana.

Hasil penyelarasan prioritas Pembangunan Kota Salatiga tahun 2026 dengan nomenklatur program sesuai ketentuan tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 6 Penjabaran Pendanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2026

Prioritas Pembangunan 2026		Pagu Prioritas Pembangunan Tahun 2026		Program Pendukung		Pagu Program Pendukung Prioritas 2026	
		APBD	PRKPD			APBD	PRKPD
1	Peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia						
a.	Meningkatkan kualitas dan pemerataan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan kurikulum berbasis digital pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah menuju Pendidikan Salatiga Standar Internasional	33.415.400.000,00	33.457.784.492,00	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	33.415.400.000,00	33.457.784.492
b.	Pemetaan dan pendataan anak-anak dari keluarga miskin yang membutuhkan akses pendidikan, didukung dengan penyediaan lokasi dan SDM dalam mendukung implementasi sekolah rakyat di Kota Salatiga	2.563.392.472,00	10.932.309.072,00	2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	94.250.000,00	6.736.250.000
				3	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.295.142.472,00	2.738.409.072
				4	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.174.000.000,00	1.457.650.000
c.	Meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat untuk mendukung promotif dan preventif terutama dalam edukasi gaya hidup sehat, kesehatan mental,	37.073.408.941,00	39.204.859.941,00	1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	37.073.408.941,00	39.204.859.941

Prioritas Pembangunan 2026		Pagu Prioritas Pembangunan Tahun 2026		Program Pendukung		Pagu Program Pendukung Prioritas 2026	
		APBD	PRKPD			APBD	PRKPD
	pencegahan penyakit menular dan tidak menular						
d.	Meningkatkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan	6.715.761.550,00	6.714.751.550,00	2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	582.085.000,00	582.085.000
				3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	276.575.000,00	275.565.000
				4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.857.101.550,00	5.857.101.550
e.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga dan pengembangan potensi atlet lokal	11.998.498.849,00	12.148.180.731,00	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	11.998.498.849,00	12.148.180.731
f.	Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, pemberdayaan pelaku seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi dan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat identitas dan keberlangsungan budaya daerah	465.800.000,00	565.800.000,00	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	105.000.000,00	105.000.000
				3	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	360.800.000,00	460.800.000

Prioritas Pembangunan 2026		Pagu Prioritas Pembangunan Tahun 2026		Program Pendukung		Pagu Program Pendukung Prioritas 2026	
		APBD	PRKPD			APBD	PRKPD
g.	Penguatan regulasi dan kebijakan perlindungan perempuan dan anak serta kesejahteraan keluarga	1.207.447.517,00	1.196.748.317,00	1	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	94.000.000,00	91.783.800
				2	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	107.000.000,00	107.000.000
				3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.006.447.517,00	997.964.517
	JUMLAH	93.439.709.329,00	104.220.434.103,00	JUMLAH		93.439.709.329,00	104.220.434.103,00
2	Peningkatan pengelolaan potensi perekonomian daerah						
a.	Pemberdayaan dan penguatan kapasitas UMKM untuk mendukung kualitas produk dan jejaring usaha	1.609.063.880,00	2.460.619.570,00	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	575.000.000,00	725.000.000
				2	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	434.063.880,00	434.063.880
				3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	600.000.000,00	1.301.555.690
b.	Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan	2.404.029.600,00	2.577.008.195,00	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA	970.997.300,00	1.062.743.695

Prioritas Pembangunan 2026		Pagu Prioritas Pembangunan Tahun 2026		Program Pendukung		Pagu Program Pendukung Prioritas 2026	
		APBD	PRKPD			APBD	PRKPD
	beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat				SAING KEPEMUDAAN		
				2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	213.325.400,00	337.641.400
				3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	719.124.600,00	646.432.400
				4	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	14.054.400,00	14.054.400
				5	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	158.280.400,00	160.374.800
				6	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	328.247.500,00	355.761.500
c.	Penguatan kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat melalui peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dalam berbagai kegiatan guna meningkatkan	111.499.996,00	204.647.096,00	1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	111.499.996,00	204.647.096

Prioritas Pembangunan 2026		Pagu Prioritas Pembangunan Tahun 2026		Program Pendukung		Pagu Program Pendukung Prioritas 2026	
		APBD	PRKPD			APBD	PRKPD
	cinta tanah air, nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari						
JUMLAH		4.124.593.476,00	5.242.274.861,00	JUMLAH		4.124.593.476,00	5.242.274.861,00
3	Peningkatan kualitas ASN dan Implementasi budaya kerja yang berintegritas dan handal						
a.	Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dan selaras dengan perencanaan nasional	158.308.900,00	188.077.400,00	1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	158.308.900,00	188.077.400
b.	Meningkatkan sistem pengelolaan kemananan informasi daerah	119.999.900,00	119.999.900,00	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	119.999.900,00	119.999.900
c.	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat	1.186.909.645,00	1.471.197.000,00	3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.186.909.645,00	1.471.197.000
d.	Perluasan jaringan internet broadband dan penyediaan	3.198.616.700,00	2.913.623.300,00	4	PROGRAM PENGELOLAAN	128.616.700,00	216.305.800

Prioritas Pembangunan 2026		Pagu Prioritas Pembangunan Tahun 2026		Program Pendukung		Pagu Program Pendukung Prioritas 2026	
		APBD	PRKPD			APBD	PRKPD
	akses WiFi publik di fasilitas layanan umum				INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		
				5	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.070.000.000,00	2.697.317.500
e.	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dan kelurahan, dan memperkuat koordinasi dan kerjasama dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan perangkat daerah ditingkat kecamatan dan kelurahan	17.371.755.253,00	17.285.224.492,00	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.371.755.253,00	17.285.224.492
f.	Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip daerah yang didukung pemanfaatan teknologi informasi	82.000.000,00	86.952.400,00	7	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	82.000.000,00	86.952.400
g.	Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang efektif dan efisien	12.439.469.612,00	16.182.399.300,00	8	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	12.439.469.612,00	16.182.399.300
JUMLAH		34.557.060.010,00	38.247.473.792,00	JUMLAH		34.557.060.010,00	38.247.473.792,00
4	Peningkatan identifikasi dan inventarisasi sumber daya serta masalah lingkungan hidup	1.875.992.307,00	17.597.526.307,00	1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	318.916.000,00	318.916.000

Prioritas Pembangunan 2026		Pagu Prioritas Pembangunan Tahun 2026		Program Pendukung		Pagu Program Pendukung Prioritas 2026	
		APBD	PRKPD			APBD	PRKPD
				2	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.557.076.307,00	17.278.610.307
	JUMLAH	1.875.992.307,00	17.597.526.307,00	JUMLAH		1.875.992.307,00	17.597.526.307,00
5	Peningkatan infrastruktur kewilayahan guna menunjang efektifitas layanan perkotaan						
	a. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar (air minum, sanitasi dan rumah layak) bagi masyarakat	36.619.918.877,00	36.619.918.877,00	1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	525.026.350,00	525.026.350
				2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.380.000.000,00	3.380.000.000
				3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.246.630.000,00	1.246.630.000
				4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	4.529.771.222,00	4.529.771.222
				5	PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN	26.938.491.305,00	26.938.491.305

Prioritas Pembangunan 2026		Pagu Prioritas Pembangunan Tahun 2026		Program Pendukung		Pagu Program Pendukung Prioritas 2026	
		APBD	PRKPD			APBD	PRKPD
b.	Mengembangkan sistem manajemen transportasi cerdas guna meningkatkan efisiensi, keselamatan dan kenyamanan sistem transportasi	11.712.028.954,00	14.143.499.676,00	6	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	11.712.028.954,00	14.143.499.676
c.	Meningkatkan sistem peringatan dini dan koordinasi antar instansi terkait dalam pencegahan dan penanggulangan bencana maupun peristiwa kebakaran	127.546.900,00	127.546.900,00	7	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	127.546.900,00	127.546.900
d.	Mengembangkan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat	169.639.900,00	185.004.900,00	8	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	169.639.900,00	185.004.900
JUMLAH		48.629.134.631,00	51.075.970.353,00	JUMLAH		48.629.134.631,00	51.075.970.353,00
TOTAL		182.626.489.753,00	216.383.679.416,00	TOTAL		182.626.489.753,00	216.383.679.416,00

5.1.1.4 Program prioritas pendukung Penerapan SPM

Penentuan dan pemetaan program pelaksana penerapan SPM Tahun 2026 dalam RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 adalah sebagai berikut

Tabel 5. 7 Rencana Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pemenuhan SPM di Kota Salatiga Tahun 2026

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU PENDANAAN 2026	
			APBD	PRKPD
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pendidikan	95.000.000,00	88.500.000,00
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		95.000.000,00	88.500.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		95.000.000,00	88.500.000,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan	3.528.000.000,00	3.564.255.210,00
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		50.000.000,00	86.000.000,00
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		50.000.000,00	86.000.000,00
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		3.478.000.000,00	3.478.255.210,00
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		10.000.000,00	10.000.000,00
	Pengelolaan Dana BOP PAUD		3.468.000.000,00	3.468.255.210,00
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kesehatan	160.153.366.600,00	175.481.657.480,00
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		200.000.000,00	200.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		200.000.000,00	200.000.000,00
	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD		159.953.366.600,00	175.281.657.480,00
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		159.953.366.600,00	175.281.657.480,00
4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan	35.090.534.076,00	37.267.317.505,00
	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		6.381.698.500,00	6.366.598.093,00
	Pembangunan Puskesmas		-	0
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang		1.930.821.000,00	1.915.720.593,00

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU PENDANAAN 2026	
			APBD	PRKPD
	Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		4.450.877.500,00	4.450.877.500,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		-	
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		28.679.835.576,00	30.886.719.412,00
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		50.000.000,00	50.000.000,00
	Operasional Pelayanan Puskesmas		798.075.000,00	798.075.000,00
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		605.126.176,00	604.926.176,00
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		22.732.486.400,00	24.999.775.236,00
	Pengelolaan Layanan Imunisasi		36.265.000,00	36.265.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		32.912.000,00	32.912.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		380.277.000,00	380.277.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		193.245.000,00	143.205.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		793.105.000,00	843.145.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		51.800.000,00	51.800.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		15.540.000,00	15.540.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		1.245.975.000,00	1.245.975.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		399.095.000,00	364.650.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		106.237.000,00	102.077.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		981.030.000,00	981.030.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		13.824.000,00	13.824.000,00
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		106.643.000,00	106.643.000,00
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		138.200.000,00	116.600.000,00
	Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		29.000.000,00	14.000.000,00

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU PENDANAAN 2026	
			APBD	PRKPD
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		29.000.000,00	14.000.000,00
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kesehatan	5.857.101.550,00	5.857.001.550,00
	Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		4.948.433.000,00	4.948.333.000,00
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		4.948.433.000,00	4.948.333.000,00
	Kegiatan : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		415.160.550,00	415.160.550,00
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		415.160.550,00	415.160.550,00
	Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		493.508.000,00	493.508.000,00
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		493.508.000,00	493.508.000,00
6	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kesehatan	115.564.000,00	115.564.000,00
	Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		115.564.000,00	115.564.000,00
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		115.564.000,00	115.564.000,00
7	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Kesehatan	274.575.000,00	273.565.000,00
	Kegiatan : Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		152.310.000,00	152.310.000,00

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU PENDANAAN 2026	
			APBD	PRKPD
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		152.310.000,00	152.310.000,00
	Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		45.000.000,00	43.990.000,00
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		45.000.000,00	43.990.000,00
	Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		77.265.000,00	77.265.000,00
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		77.265.000,00	77.265.000,00
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	250.000.000,00	250.000.000,00
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		250.000.000,00	250.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		250.000.000,00	250.000.000,00
9	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	525.026.350,00	525.026.350,00
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		525.026.350,00	525.026.350,00

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU PENDANAAN 2026	
			APBD	PRKPD
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		75.026.350,00	75.026.350,00
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		450.000.000,00	450.000.000,00
10	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	698.452.341,00	698.452.341,00
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		698.452.341,00	698.452.341,00
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		66.051.000,00	66.051.000,00
	Penyediaan Unit pengolahan setempat		632.401.341,00	632.401.341,00
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perumahan dan Kawasan Permukiman	150.000.000,00	150.000.000,00
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		150.000.000,00	150.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		150.000.000,00	150.000.000,00
12	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.255.000.000,00	3.305.000.000,00
	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		3.255.000.000,00	3.305.000.000,00
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh		3.075.000.000,00	3.125.000.000,00
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		180.000.000,00	180.000.000,00
13	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.974.071.222,00	2.974.071.222,00
	Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		2.974.071.222,00	2.974.071.222,00
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		2.974.071.222,00	2.974.071.222,00
14	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Perumahan dan Kawasan Permukiman	250.000.000,00	250.000.000,00

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU PENDANAAN 2026	
			APBD	PRKPD
	Kegiatan: Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		250.000.000,00	250.000.000,00
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		250.000.000,00	250.000.000,00
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	63.490.193,00	83.979.193,00
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		63.490.193,00	83.979.193,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		63.490.193,00	83.979.193,00
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sosial	85.000.000,00	85.000.000,00
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		80.000.000,00	80.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		80.000.000,00	80.000.000,00
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.000.000,00	5.000.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.000.000,00	5.000.000,00
17	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Sosial	279.000.000,00	271.051.000,00
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		279.000.000,00	271.051.000,00
	Penyediaan Permakanan		279.000.000,00	271.051.000,00
18	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Sosial	338.700.000,00	338.700.000,00
	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		338.700.000,00	338.700.000,00
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		338.700.000,00	338.700.000,00

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU PENDANAAN 2026	
			APBD	PRKPD
19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	65.000.000,00	70.460.000,00
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		65.000.000,00	70.460.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		65.000.000,00	70.460.000,00
20	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	92.600.000,00	88.200.000,00
	Kegiatan : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		10.000.000,00	10.000.000,00
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal		10.000.000,00	10.000.000,00
	Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		82.600.000,00	78.200.000,00
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		13.800.000,00	13.800.000,00
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		68.800.000,00	64.400.000,00
21	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	495.319.000,00	501.918.400,00
	Kegiatan: Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		41.130.000,00	32.099.400,00
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		35.000.000,00	27.823.000,00
	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan		6.130.000,00	4.276.400,00

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU PENDANAAN 2026	
			APBD	PRKPD
	Elektronik serta Media Luar Ruang			
	Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		116.800.000,00	131.805.000,00
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		116.800.000,00	131.805.000,00
	Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		337.389.000,00	338.014.000,00
	Peningkatan Kesertaan KB Pria		30.000.000,00	30.000.000,00
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		307.389.000,00	308.014.000,00
22	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.006.477.517,00	1.006.484.800,00
	Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		29.677.517,00	29.684.800,00
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		6.322.117,00	14.842.400,00
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		23.355.400,00	14.842.400,00
	Kegiatan : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		976.800.000,00	976.800.000,00
	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		444.000.000,00	444.000.000,00
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu		532.800.000,00	532.800.000,00

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU PENDANAAN 2026	
			APBD	PRKPD
	Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			
23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pangan	52.590.000,00	81.140.878,00
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		52.590.000,00	81.140.878,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		52.590.000,00	81.140.878,00
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pangan	75.000.000,00	78.895.000,00
	Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		75.000.000,00	78.895.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		75.000.000,00	78.895.000,00
24	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kelautan dan Perikanan	32.698.100,00	32.698.100,00
	Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		32.698.100,00	32.698.100,00
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		24.610.000,00	24.610.000,00
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		8.088.100,00	8.088.100,00
25	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kelautan dan Perikanan	300.000.000,00	327.514.000,00
	Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		300.000.000,00	327.514.000,00
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		300.000.000,00	327.514.000,00
26	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertanian	133.450.000,00	121.020.000,00

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU PENDANAAN 2026	
			APBD	PRKPD
	Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		15.750.000,00	10.050.000,00
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		15.750.000,00	10.050.000,00
	Kegiatan: Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		117.700.000,00	110.970.000,00
	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		117.700.000,00	110.970.000,00
27	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Lingkungan Hidup	85.200.000,00	95.700.000,00
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		85.200.000,00	95.700.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		85.200.000,00	95.700.000,00
28	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Lingkungan Hidup	1.511.086.307,00	17.232.620.307,00
	Kegiatan : Pengelolaan Sampah		1.511.086.307,00	17.232.620.307,00
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		65.525.000,00	67.166.000,00
	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		700.856.500,00	1.058.319.500,00
	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		744.704.807,00	16.107.134.807,00
29	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	115.500.000,00	128.588.000,00
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		115.500.000,00	128.588.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		115.500.000,00	128.588.000,00
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		14.760.000,00	44.760.000,00

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU PENDANAAN 2026	
			APBD	PRKPD
	Kegiatan: Pelayanan Pendaftaran Penduduk		14.760.000,00	44.760.000,00
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		14.760.000,00	44.760.000,00
30	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		1.650.000,00	1.650.000,00
	Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		1.650.000,00	1.650.000,00
	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		1.650.000,00	1.650.000,00
31	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perhubungan	143.000.000,00	143.000.000,00
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		143.000.000,00	143.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		143.000.000,00	143.000.000,00
32	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Komunikasi dan Informatika	54.810.000,00	63.590.368,00
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		54.810.000,00	63.590.368,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		54.810.000,00	63.590.368,00
33	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Komunikasi dan Informatika	66.032.300,00	45.672.500,00
	Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		66.032.300,00	45.672.500,00
	Pelayanan Informasi Publik		9.600.000,00	33.000.000,00
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		56.432.300,00	12.672.500,00
34	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	184.376.350,00	184.376.350,00
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		184.376.350,00	184.376.350,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		184.376.350,00	184.376.350,00
35	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	450.521.400,00	606.521.400,00

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU PENDANAAN 2026	
			APBD	PRKPD
	PERLINDUNGAN KOPERASI			
	Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		450.521.400,00	606.521.400,00
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		450.521.400,00	606.521.400,00
36	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	575.000.000,00	725.000.000,00
	Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		575.000.000,00	725.000.000,00
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		100.000.000,00	100.000.000,00
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		475.000.000,00	625.000.000,00
37	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	434.063.880,00	434.063.880,00
	Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		434.063.880,00	434.063.880,00
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		434.063.880,00	434.063.880,00
38	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penanaman Modal	52.598.000,00	58.798.000,00
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		52.598.000,00	58.798.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		52.598.000,00	58.798.000,00
39	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal	42.500.000,00	34.500.000,00
	Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal		42.500.000,00	34.500.000,00

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU PENDANAAN 2026	
			APBD	PRKPD
	yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		42.500.000,00	34.500.000,00
40	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal	17.500.000,00	19.000.000,00
	Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		17.500.000,00	19.000.000,00
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		17.500.000,00	19.000.000,00
41	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepemudaan dan Olahraga	202.420.000,00	219.698.500,00
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		202.420.000,00	219.698.500,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		202.420.000,00	219.698.500,00
42	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kebudayaan	60.400.000,00	60.400.000,00
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		60.400.000,00	60.400.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		60.400.000,00	60.400.000,00
43	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perpustakaan	30.000.000,00	44.174.100,00
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		30.000.000,00	44.174.100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		30.000.000,00	44.174.100,00
44	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perdagangan	82.895.000,00	78.104.000,00
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		82.895.000,00	78.104.000,00

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU PENDANAAN 2026	
			APBD	PRKPD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		82.895.000,00	78.104.000,00
45	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTI		13.900.000,00	13.900.000,00
	Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		13.900.000,00	13.900.000,00
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		13.900.000,00	13.900.000,00
46	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perindustrian	165.000.000,00	178.500.000,00
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		165.000.000,00	178.500.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		165.000.000,00	178.500.000,00
47	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Perindustrian	395.000.000,00	455.000.000,00
	Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		395.000.000,00	455.000.000,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		395.000.000,00	455.000.000,00
48	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Perindustrian	544.808.877,00	544.808.877,00
	Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		544.808.877,00	544.808.877,00
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		544.808.877,00	544.808.877,00
				Perindustrian
49	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Perindustrian	17.000.000,00	17.000.000,00

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU PENDANAAN 2026	
			APBD	PRKPD
	Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		17.000.000,00	17.000.000,00
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		17.000.000,00	17.000.000,00
50	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Daerah	567.469.400,00	2.733.156.200,00
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		537.368.100,00	2.703.054.900,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		537.368.100,00	2.703.054.900,00
	Kegiatan : Penataan Organisasi		23.750.000,00	23.750.000,00
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		23.750.000,00	23.750.000,00
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6.351.300,00	6.351.300,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6.351.300,00	6.351.300,00
51	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah	62.766.000,00	62.766.000,00
	Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		41.056.000,00	41.056.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		41.056.000,00	41.056.000,00
	Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		21.710.000,00	21.710.000,00
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		21.710.000,00	21.710.000,00
52	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat DPRD	1.450.000.000,00	1.750.000.000,00
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.450.000.000,00	1.750.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.450.000.000,00	1.750.000.000,00
53	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan	341.637.000,00	343.637.000,00

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU PENDANAAN 2026	
			APBD	PRKPD
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		341.637.000,00	343.637.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		341.637.000,00	343.637.000,00
54	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan	132.784.900,00	166.178.400,00
	Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		17.386.400,00	17.386.400,00
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		17.386.400,00	17.386.400,00
	Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		30.432.000,00	26.766.000,00
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		30.432.000,00	26.766.000,00
	Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		84.966.500,00	122.026.000,00
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		18.147.000,00	9.427.000,00
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		45.164.000,00	95.164.000,00
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		21.655.500,00	17.435.000,00
55	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan	115.941.800,00	112.431.800,00
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		106.941.800,00	106.941.800,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		59.441.800,00	59.441.800,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		40.500.000,00	40.500.000,00

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU PENDANAAN 2026	
			APBD	PRKPD
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		7.000.000,00	7.000.000,00
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		9.000.000,00	5.490.000,00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		9.000.000,00	5.490.000,00
56	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Keuangan	300.000.000,00	300.000.000,00
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		300.000.000,00	300.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		300.000.000,00	300.000.000,00
57	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepegawaian	97.721.000,00	118.720.200,00
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		97.721.000,00	118.720.200,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		97.721.000,00	118.720.200,00
58	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengawasan	340.645.000,00	340.645.000,00
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		340.645.000,00	340.645.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		340.645.000,00	340.645.000,00
59	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Argomulyo	60.000.000,00	60.000.000,00
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		60.000.000,00	60.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		60.000.000,00	60.000.000,00
60	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Argomulyo	87.679.000,00	87.679.000,00

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU PENDANAAN 2026	
			APBD	PRKPD
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		87.679.000,00	87.679.000,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		87.679.000,00	87.679.000,00
61	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Argomulyo	4.695.365.590,00	4.474.688.990,00
	Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4.428.688.990,00	4.424.688.990,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2.138.515.690,00	2.138.515.690,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2.221.603.300,00	2.221.603.300,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		68.570.000,00	64.570.000,00
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		266.676.600,00	50.000.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		266.676.600,00	50.000.000,00
62	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Argomulyo	104.920.000,00	104.920.000,00
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		54.920.000,00	54.920.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		54.920.000,00	54.920.000,00
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		50.000.000,00	50.000.000,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		50.000.000,00	50.000.000,00
63	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Sidomukti	71.000.000,00	57.750.000,00
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		71.000.000,00	57.750.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		71.000.000,00	57.750.000,00

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU PENDANAAN 2026	
			APBD	PRKPD
64	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Sidomukti	97.340.400,00	92.400.400,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		97.340.400,00	92.400.400,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		97.340.400,00	92.400.400,00
65	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Sidomukti	3.414.448.500,00	3.413.392.900,00
	Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		3.164.448.500,00	3.166.740.400,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1.513.419.600,00	1.520.636.600,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.575.175.900,00	1.575.175.900,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		75.853.000,00	70.927.900,00
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		250.000.000,00	246.652.500,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		250.000.000,00	246.652.500,00
67	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sidomukti	94.490.200,00	90.417.200,00
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		59.490.200,00	55.417.200,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		59.490.200,00	55.417.200,00
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		35.000.000,00	35.000.000,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		35.000.000,00	35.000.000,00
68	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Sidorejo	90.000.000,00	95.553.000,00
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		90.000.000,00	95.553.000,00

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU PENDANAAN 2026	
			APBD	PRKPD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		90.000.000,00	95.553.000,00
69	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Sidorejo	52.751.600,00	46.091.600,00
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		52.751.600,00	46.091.600,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		52.751.600,00	46.091.600,00
70	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Sidorejo	4.458.836.540,00	4.395.085.540,00
	Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4.194.377.940,00	4.130.626.940,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2.239.658.640,00	2.181.907.640,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.867.757.300,00	1.867.757.300,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		86.962.000,00	80.962.000,00
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		264.458.600,00	264.458.600,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		264.458.600,00	264.458.600,00
71	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sidorejo	91.811.000,00	93.811.000,00
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		65.900.000,00	65.900.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		65.900.000,00	65.900.000,00
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		25.911.000,00	27.911.000,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		25.911.000,00	27.911.000,00
72	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Kecamatan Tingkir	54.000.000,00	54.000.000,00

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU PENDANAAN 2026	
			APBD	PRKPD
	DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		54.000.000,00	54.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		54.000.000,00	54.000.000,00
73	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Tingkir	64.034.323,00	64.034.323,00
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		64.034.323,00	64.034.323,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		64.034.323,00	64.034.323,00
74	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Tingkir	4.803.100.462,00	4.803.100.462,00
	Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4.673.464.344,00	4.673.464.344,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2.285.034.804,00	2.285.034.804,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2.262.529.540,00	2.262.529.540,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		125.900.000,00	125.900.000,00
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		129.636.118,00	129.636.118,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		129.636.118,00	129.636.118,00
75	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Tingkir	82.850.000,00	82.850.000,00
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		53.850.000,00	53.850.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		53.850.000,00	53.850.000,00
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		29.000.000,00	29.000.000,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		29.000.000,00	29.000.000,00

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU PENDANAAN 2026	
			APBD	PRKPD
76	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kesatuan Bangsa dan Politik	100.087.000,00	165.022.000,00
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		100.087.000,00	165.022.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100.087.000,00	165.022.000,00
77	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penanggulang an Bencana Daerah	30.326.000,00	30.326.000,00
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		30.326.000,00	30.326.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		30.326.000,00	30.326.000,00
TOTAL DUKUNGAN UNTUK PENURUNAN STUNTING			238.554.943.316,00	274.652.454.864,00

5.1.1.5 Program prioritas pendukung Kebijakan Nasional untuk Penurunan Stunting

Perwujudan peran pemerintah daerah dalam mendukung penurunan stunting adalah berupa sinkronisasi program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan. Kebijakan Pemerintah pusat berupa “*Antisipasi Generasi Stunting Guna Mencapai Indonesia Emas 2045*”, merupakan salah satu kebijakan yang diadopsi pada perencanaan pembangunan pada tahun 2026. Pada RKPD tahun 2026 dilakukan penentuan dan pemetaan program pelaksana penerapan Penurunan Stunting. Penentuan dan pemetaan program pelaksana penerapan Penurunan Stunting Tahun 2026 dalam RKPD Kota Salatiga tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 8 Rencana Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Penurunan Stunting di Kota Salatiga Tahun 2026

No	SPM Bidang	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Pendanaan Tahun 2026	
				APBD	PRKPD
1	PENDIDIKAN	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	205.500.000,00	179.850.000,00
		Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	195.500.000,00	169.850.000,00
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	1.550.000
		Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	-	-
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	121.500.000,00	78.300.000
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	50.000.000,00	46.000.000
			Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	12.000.000,00	22.000.000,00
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	12.000.000,00	12.000.000
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	-	-
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		-
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	-	10.000.000
			Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10.000.000,00	10.000.000,00
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	10.000.000,00	9.000.000
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	-
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	-	-
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	-	-
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	-
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	-	-
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	-	-
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	-	-

No	SPM Bidang	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Pendanaan Tahun 2026	
				APBD	PRKPD
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	-	1.000.000
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	-
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	-
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	-	-
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	171.500.000,00	149.650.000,00
			Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	171.500.000,00	149.650.000,00
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	4.600.000
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	-	7.450.000
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	-	1.950.000
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	4.800.000
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	-	6.550.000
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	121.500.000,00	78.300.000
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	50.000.000,00	46.000.000
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	94.250.000,00	6.736.250.000,00
			Kegiatan : Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	94.250.000,00	6.736.250.000,00
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	66.394.800,00	6.708.394.800
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	27.855.200,00	27.855.200
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	136.000.000,00	125.420.900,00

No	SPM Bidang	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Pendanaan Tahun 2026	
				APBD	PRKPD
			Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	136.000.000,00	125.420.900,00
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	-	-
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	-	-
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	8.170.900
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	96.000.000,00	77.250.000
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	40.000.000,00	40.000.000
Jumlah				607.250.000,00	7.191.170.900,00
2	KESEHATAN	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.809.332.352,00	2.778.332.352,00
		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.809.332.352,00	2.778.332.352,00
		Jumah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	32.912.000,00	32.912.000
		Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	793.105.000,00	843.145.000
		Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	193.245.000,00	143.205.000
		Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	380.227.000,00	380.227.000,00
		Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	21.935.000,00	21.935.000,00
		Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	252.119.352,00	221.119.352
		Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	981.030.000,00	981.030.000,00
		Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	34.734.000,00	34.734.000

No	SPM Bidang	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Pendanaan Tahun 2026	
				APBD	PRKPD
		Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	15.540.000,00	15.540.000
		Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (<i>humam immudeficiency virus</i>) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	52.685.000,00	52.685.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	51.800.000,00	51.800.000,00
Jumlah				2.809.332.352,00	2.778.332.352,00
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	66.051.000,00	66.051.000,00
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	66.051.000,00	66.051.000,00
			Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	-	-
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	66.051.000,00	66.051.000
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	525.026.350,00	525.026.350,00
			Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	525.026.350,00	525.026.350,00
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	-	-
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	75.026.350,00	75.026.350
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	450.000.000,00	450.000.000
		Jumlah			
4		Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	211.000.000,00	211.000.000,00

No	SPM Bidang	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Pendanaan Tahun 2026	
				APBD	PRKPD
	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	-	-
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	100.000.000,00	100.000.000,00
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kegiatan : Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	11.000.000,00	11.000.000,00
			Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	11.000.000,00	11.000.000
		Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota			
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	928.739.740,00	1.069.889.740,00
			Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	18.623.200,00	18.623.200,00
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	18.623.200,00	18.623.200
			Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	720.791.600,00	800.519.600,00
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	11.114.600,00	11.114.600
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	697.000.000,00	776.728.000
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	12.677.000,00	12.677.000
			Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	189.324.940,00	250.746.940,00
		Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	111.532.300,00	128.182.300
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	31.742.000,00	76.514.000

No	SPM Bidang	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Pendanaan Tahun 2026	
				APBD	PRKPD
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	21.050.640,00	21.050.640
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	25.000.000,00	25.000.000
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	90.730.800,00	90.730.800,00
			Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	90.730.800,00	90.730.800,00
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	76.030.800,00	76.030.800
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	14.700.000,00	14.700.000
Jumlah			1.230.470.540,00	1.371.620.540,00	
6	SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	319.000.000,00	326.119.800,00
			Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	319.000.000,00	326.119.800,00
			Penyediaan Permakanan	279.000.000,00	271.051.000
			Penyediaan Alat Bantu	10.000.000,00	24.799.000
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	15.000.000,00	8.150.000
			Pemberian Layanan Kedaruratan	15.000.000,00	22.119.800
Jumlah			319.000.000,00	326.119.800,00	
TOTAL PAGU PEMENUHAN PENERAPAN SPM			5.557.130.242,00	12.258.320.942,00	

5.1.1.6 Program prioritas pendukung Kebijakan Nasional untuk Penurunan Kemiskinan

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kota Salatiga mendukung strategis nasional dalam melaksanakan optimalisasi pelaksanaan pengentasa kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi :

- 1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat;
- 2. Peningkatan pendapatan masyarakat, diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat;
- 3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Untuk pelaksanaan tahun 2026 diarahkan sebagai berikut :

Tabel 5. 9 Rencana Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kota Salatiga Tahun 2026

No	Strategi	Perangkat Daerah / Sub Kegiatan	Rencana Pendanaan tahun 2026	
			APBD	PRKPD
1	Mengurangi Beban Pengeluaran		56.828.886.400	59.133.899.728
		Dinas Kesehatan	22.732.486.400	24.999.775.236
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	22.732.486.400	24.999.775.236
		Dinas Pangan dan Pertanian	85.000.000	84.199.400
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	2.092.700	1.292.700
		Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	-	-
		Pemantauan Stok Pangan	-	-
		Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	18.587.100	8.339.100
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-	-
		Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	14.722.000	18.378.000
		Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-	1.000.000
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1.719.600	1.719.600
		Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	47.878.600	53.470.000
		Dinas Pendidikan	33.405.400.000	33.409.355.092

No	Strategi	Perangkat Daerah / Sub Kegiatan	Rencana Pendanaan tahun 2026	
			APBD	PRKPD
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	-	1.950.000
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	10.120.900
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	-	-
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	-	-
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	8.999.700
		Pengadaan Perlengkapan PAUD	-	-
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	-	-
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	-	-
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.468.000.000	3.468.255.210
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.616.980.000	3.617.996.100
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	13.777.600.000	13.811.946.447
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	12.213.320.000	12.220.086.735
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	-	7.450.000
		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-
		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-
		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	10.000.000	9.000.000
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	12.000.000	12.000.000
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	121.500.000	78.300.000
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	96.000.000	77.250.000
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	-	-
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi	-	-

No	Strategi	Perangkat Daerah / Sub Kegiatan	Rencana Pendanaan tahun 2026	
			APBD	PRKPD
		Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	90.000.000	86.000.000
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	-	-
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	-	-
		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	265.000.000	292.720.000
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	265.000.000	292.720.000
		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.000.000	11.000.000
		Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	11.000.000	11.000.000
		Dinas Sosial	330.000.000	336.850.000
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	41.000.000	41.000.000
		Penyediaan Alat Bantu	10.000.000	24.799.000
		Penyediaan Permakanan	279.000.000	271.051.000
			83.105.991.871	100.872.151.649
2	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	997.948.640	1.139.098.640
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	25.000.000	25.000.000
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	11.114.600	11.114.600
		Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	27.234.700	27.234.700
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	31.742.000	76.514.000
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	20.132.000	20.132.000
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	697.000.000	776.728.000
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	24.165.800	24.165.800
		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	10.353.400	10.353.400

No	Strategi	Perangkat Daerah / Sub Kegiatan	Rencana Pendanaan tahun 2026	
			APBD	PRKPD
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	21.050.640	21.050.640
		Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	-	-
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	111.532.300	128.182.300
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	18.623.200	18.623.200
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	105.000.000	105.000.000
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	105.000.000	105.000.000
		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	190.998.849	189.332.600
		Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	190.998.849	189.332.600
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	179.070.000	529.735.641
		Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1.650.000	1.650.000
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	156.000.000	476.665.641
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	6.660.000	6.660.000
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	14.760.000	44.760.000
		Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	-	-
		Dinas Kesehatan	11.408.273.351	11.332.785.515
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.000.000	1.000.000
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	352.601.176	352.601.176
		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-

No	Strategi	Perangkat Daerah / Sub Kegiatan	Rencana Pendanaan tahun 2026	
			APBD	PRKPD
		Pembangunan Puskesmas	-	-
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	350.000.000	365.000.000
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	152.310.000	152.310.000
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.930.821.000	1.915.720.593
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	4.450.877.500	4.450.877.500
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	32.912.000	32.912.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	793.105.000	843.145.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	-	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	224.872.000	224.872.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	193.245.000	143.205.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	184.192.000	184.192.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	13.824.000	13.824.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	392.870.000	358.425.000
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	10.000.000	10.000.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	15.860.000	15.860.000
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	30.000.000	30.000.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	252.119.352	221.119.352
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	91.000.000	91.000.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	971.980.000	971.980.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	34.734.000	34.734.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	15.540.000	15.540.000

No	Strategi	Perangkat Daerah / Sub Kegiatan	Rencana Pendanaan tahun 2026	
			APBD	PRKPD
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	52.685.000	52.685.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	12.000.000	12.000.000
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	110.250.000	88.450.000
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	103.935.000	103.935.000
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	45.000.000	43.990.000
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2.000.000	2.000.000
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	77.265.000	77.265.000
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	30.000.000	42.700.000
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	481.275.323	481.442.894
		Dinas Komunikasi dan Informatika	2.900.000.000	2.400.000.000
		Penyediaan Akses Internet	2.900.000.000	2.400.000.000
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	194.568.800	194.568.800
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	83.200.000	83.200.000
		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	111.368.800	111.368.800
		Dinas Lingkungan Hidup	810.229.807	16.207.300.807
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi	-	33.000.000

No	Strategi	Perangkat Daerah / Sub Kegiatan	Rencana Pendanaan tahun 2026	
			APBD	PRKPD
		dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		
		Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	744.704.807	16.107.134.807
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	65.525.000	67.166.000
		Dinas Pangan dan Pertanian	1.051.231.000	1.006.052.800
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	675.000.000	605.477.000
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	44.124.600	40.955.400
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	-	-
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.496.400	7.496.400
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.610.000	24.610.000
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	327.514.000
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	39.616.664.496	40.052.128.496
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	123.195.000	123.195.000
		Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	8.890.000	8.890.000
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	425.000.000	425.000.000
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	675.000.000	675.000.000
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	66.051.000	66.051.000
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	75.026.350	75.026.350
		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	500.000.000	500.000.000
		Pembangunan Jalan	23.448.491.305	23.448.491.305

No	Strategi	Perangkat Daerah / Sub Kegiatan	Rencana Pendanaan tahun 2026	
			APBD	PRKPD
		Pembangunan Jembatan	-	-
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	4.883.267.500	4.883.267.500
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	-	-
		Pembangunan Tanggul Sungai	2.757.365.000	2.757.365.000
		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	-	-
		Pemeliharaan Berkala Jalan	1.300.000.000	1.300.000.000
		Pemeliharaan Rutin Jalan	1.200.000.000	1.200.000.000
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	500.000.000	500.000.000
		Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	-	335.784.000
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	-	-
		Penyediaan Unit pengolahan setempat	632.401.341	632.401.341
		Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	-	-
		Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	99.680.000
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	100.000.000	100.000.000
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	200.000.000	200.000.000
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-	-
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	-	-
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	450.000.000	450.000.000
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	946.977.000	946.977.000

No	Strategi	Perangkat Daerah / Sub Kegiatan	Rencana Pendanaan tahun 2026	
			APBD	PRKPD
		Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	935.000.000	935.000.000
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	390.000.000	390.000.000
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	75.000.000	75.000.000
		Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	75.000.000
		Dinas Pendidikan	-	5.600.000
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	1.550.000
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	-	-
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	-	-
		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-
		Pengadaan Mebel PAUD	-	-
		Pengadaan Mebel Sekolah	-	-
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	-	-
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	-	-
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	-
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	-	4.050.000
		Dinas Perhubungan	9.681.964.194	11.805.694.916
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	36.000.000
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	810.032.300	932.372.300
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	8.831.931.894	10.837.322.616
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-

No	Strategi	Perangkat Daerah / Sub Kegiatan	Rencana Pendanaan tahun 2026	
			APBD	PRKPD
		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-
		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.826.630.000	4.826.630.000
		Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	-	-
		Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000
		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	3.075.000.000	3.125.000.000
		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	975.000.000	975.000.000
		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-
		Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	75.000.000	75.000.000
		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	100.000.000	100.000.000
		Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	21.630.000	21.630.000
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	180.000.000	180.000.000
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	250.000.000	250.000.000
		Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	50.000.000	-
		Dinas Sosial	30.000.000	30.269.800
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	15.000.000	8.150.000
		Pemberian Layanan Kedaruratan	15.000.000	22.119.800
		Kecamatan Argomulyo	449.920.000	445.920.000

No	Strategi	Perangkat Daerah / Sub Kegiatan	Rencana Pendanaan tahun 2026	
			APBD	PRKPD
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	381.350.000	381.350.000
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	68.570.000	64.570.000
		Kecamatan Sidomukti	527.234.800	529.526.700
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	451.381.800	458.598.800
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	75.853.000	70.927.900
		Kecamatan Sidorejo	442.712.000	378.961.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	355.750.000	297.999.000
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	86.962.000	80.962.000
		Kecamatan Tingkir	485.650.000	485.650.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	359.750.000	359.750.000
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	125.900.000	125.900.000
		Kelurahan Blotongan	366.082.500	366.082.500
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	366.082.500	366.082.500
		Kelurahan Bugel	260.736.000	260.736.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	260.736.000	260.736.000
		Kelurahan Cebongan	300.578.820	300.578.820
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	300.578.820	300.578.820
		Kelurahan Dukuh	341.950.000	341.950.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	341.950.000	341.950.000
		Kelurahan Gendongan	200.000.000	200.000.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	200.000.000
		Kelurahan Kalibening	200.000.000	200.000.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	200.000.000
		Kelurahan Kalicacing	158.328.000	158.328.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	158.328.000	158.328.000
		Kelurahan Kauman Kidul	267.830.140	267.830.140
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	267.830.140	267.830.140

No	Strategi	Perangkat Daerah / Sub Kegiatan	Rencana Pendanaan tahun 2026	
			APBD	PRKPD
		Kelurahan Kecandran	290.443.000	290.443.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	290.443.000	290.443.000
		Kelurahan Kumpulrejo	326.166.680	326.166.680
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	326.166.680	326.166.680
		Kelurahan Kutowinangun Kidul	317.130.970	317.130.970
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	317.130.970	317.130.970
		Kelurahan Kutowinangun Lor	421.658.854	421.658.854
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	421.658.854	421.658.854
		Kelurahan Ledok	282.430.000	282.430.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	282.430.000	282.430.000
		Kelurahan Mangunsari	271.316.800	271.316.800
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	271.316.800	271.316.800
		Kelurahan Noborejo	264.229.560	264.229.560
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	264.229.560	264.229.560
		Kelurahan Pulutan	299.090.000	299.090.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	299.090.000	299.090.000
		Kelurahan Randuacir	230.076.630	230.076.630
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	230.076.630	230.076.630
		Kelurahan Salatiga	356.170.000	356.170.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	356.170.000	356.170.000
		Kelurahan Sidorejo Kidul	301.500.780	301.500.780
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	301.500.780	301.500.780
		Kelurahan Sidorejo Lor	334.000.000	334.000.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	334.000.000	334.000.000
		Kelurahan Tegalrejo	353.684.000	353.684.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	353.684.000	353.684.000
		Kelurahan Tingkir Lor	278.000.000	278.000.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	278.000.000	278.000.000
		Kelurahan Tingkir Tengah	206.994.200	206.994.200
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	206.994.200	206.994.200
		Puskesmas Cebongan pada Dinas Kesehatan	226.599.000	226.599.000

No	Strategi	Perangkat Daerah / Sub Kegiatan	Rencana Pendanaan tahun 2026	
			APBD	PRKPD
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	58.567.000	58.567.000
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	275.000	275.000
		Pengelolaan Layanan Imunisasi	150.000	150.000
		Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	-	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	118.142.000	118.142.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	25.932.000	25.932.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.050.000	1.050.000
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.575.000	1.575.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	12.900.000	12.900.000
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.450.000	2.450.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.250.000	2.250.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.150.000	3.150.000
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	158.000	158.000
		Puskesmas Kalicacing pada Dinas Kesehatan	256.190.000	256.190.000
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	76.830.000	76.830.000
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20.800.000	20.800.000
		Pengelolaan Layanan Imunisasi	3.065.000	3.065.000
		Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	-	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	106.760.000	106.760.000

No	Strategi	Perangkat Daerah / Sub Kegiatan	Rencana Pendanaan tahun 2026	
			APBD	PRKPD
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	11.245.000	11.245.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.800.000	2.800.000
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.500.000	1.500.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	16.690.000	16.690.000
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	750.000	750.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11.200.000	11.200.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.950.000	3.950.000
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	600.000	600.000
		Puskesmas Mangunsari pada Dinas Kesehatan	232.630.000	232.630.000
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8.460.000	8.460.000
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	42.425.000	42.425.000
		Pengelolaan Layanan Imunisasi	4.650.000	4.650.000
		Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	-	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	109.950.000	109.950.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	20.380.000	20.380.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	450.000	450.000
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.800.000	1.800.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	17.590.000	17.590.000

No	Strategi	Perangkat Daerah / Sub Kegiatan	Rencana Pendanaan tahun 2026	
			APBD	PRKPD
		Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.000.000	6.000.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	12.200.000	12.200.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.325.000	8.325.000
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	400.000	400.000
		Puskesmas Sidorejo Kidul pada Dinas Kesehatan	606.560.000	606.560.000
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	166.275.000	166.275.000
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	17.250.000	17.250.000
		Pengelolaan Layanan Imunisasi	24.050.000	24.050.000
		Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	-	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	309.400.000	309.400.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	57.720.000	57.720.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	950.000	950.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	900.000	900.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	6.265.000	6.265.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	600.000	600.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.400.000	13.400.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.000.000	9.000.000
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	750.000	750.000
		Puskesmas Sidorejo Lor pada Dinas Kesehatan	579.028.000	579.028.000
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	141.931.000	141.931.000

No	Strategi	Perangkat Daerah / Sub Kegiatan	Rencana Pendanaan tahun 2026	
			APBD	PRKPD
		Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	106.175.000	105.975.000
		Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	-	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	249.394.000	249.394.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	49.728.000	49.728.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	500.000	500.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	11.100.000	11.100.000
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4.500.000	4.500.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	12.750.000	12.750.000
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.150.000	2.350.000
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	800.000	800.000
		Puskesmas Tegalrejo pada Dinas Kesehatan	288.792.000	288.792.000
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	40.445.000	40.445.000
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	65.600.000	65.600.000
		Pengelolaan Layanan Imunisasi	4.350.000	4.350.000
		Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	-	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	127.457.000	127.457.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	31.080.000	31.080.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	475.000	475.000
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	300.000	300.000

No	Strategi	Perangkat Daerah / Sub Kegiatan	Rencana Pendanaan tahun 2026	
			APBD	PRKPD
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	300.000	300.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	12.910.000	12.910.000
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4.500.000	4.500.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.375.000	1.375.000
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-
		Satuan Polisi Pamong Praja	314.700.000	314.700.000
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	300.000.000	300.000.000
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	14.700.000	14.700.000
			20.347.447.932	20.794.241.832
3	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.994.000	25.994.000
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	13.317.000	13.317.000
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	12.677.000	12.677.000
		Bagian Perekonomian dan SDA	60.000.000	135.766.000
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	25.000.000	100.766.000
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	23.000.000	23.000.000
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12.000.000	12.000.000
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-
		Pengembangan Pendidikan	-	-
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	-	-
		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	753.517.000	753.517.000

No	Strategi	Perangkat Daerah / Sub Kegiatan	Rencana Pendanaan tahun 2026	
			APBD	PRKPD
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	403.517.000	403.517.000
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	350.000.000	350.000.000
		Dinas Kesehatan	5.705.159.740	5.641.059.740
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4.909.605.000	4.909.505.000
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	380.394.190	316.394.190
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	415.160.550	415.160.550
		Dinas Komunikasi dan Informatika	12.584.400	12.584.400
		Penyusunan Konten	12.584.400	12.584.400
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	1.530.827.480	1.829.627.480
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	100.000.000	100.000.000
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	475.000.000	625.000.000
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	71.242.200	64.042.200
		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	450.521.400	606.521.400
		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	434.063.880	434.063.880
		Dinas Pangan dan Pertanian	310.593.600	444.504.600
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	75.000.000	78.895.000
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.088.100	8.088.100
		Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada	-	-

No	Strategi	Perangkat Daerah / Sub Kegiatan	Rencana Pendanaan tahun 2026	
			APBD	PRKPD
		Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko		
		Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	117.700.000	110.970.000
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	-	-
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	20.751.100	20.751.100
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	14.054.400	14.054.400
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	75.000.000	211.746.000
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	49.950.000	50.270.000
		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	33.750.000	33.750.000
		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	16.200.000	16.520.000
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	774.539.000	771.762.000
		Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	27.247.000	18.824.800
		Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000	3.818.800
		Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000	5.000.000
		Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	5.000.000	5.000.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	31.976.000	31.541.600
		Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000	75.000.000
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di	31.050.000	31.050.000

No	Strategi	Perangkat Daerah / Sub Kegiatan	Rencana Pendanaan tahun 2026	
			APBD	PRKPD
		Kampung Keluarga Berkualitas		
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	13.800.000	13.800.000
		pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	68.024.000	70.674.600
		pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	49.253.000	57.638.200
		Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	32.000.000	32.000.000
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	68.800.000	64.400.000
		Peningkatan Kesertaan KB Pria	30.000.000	30.000.000
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	307.389.000	308.014.000
		Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20.500.000	20.500.000
		Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	20.500.000	20.500.000
		Dinas Pendidikan	-	10.979.400
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	10.979.400
		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	945.486.554	945.193.554
		Job Fair/Bursa Kerja	180.000.000	160.207.000
		Pelayanan antar Kerja	-	-
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	19.500.000
		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	-	-
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	220.677.677	220.677.677

No	Strategi	Perangkat Daerah / Sub Kegiatan	Rencana Pendanaan tahun 2026	
			APBD	PRKPD
		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	-	-
		Penyuluhan Transmigrasi	-	-
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	544.808.877	544.808.877
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	26.600.000	31.780.000
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	15.000.000	15.000.000
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	11.600.000	16.780.000
		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	620.000.000	614.000.000
		Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	620.000.000	614.000.000
		Dinas Sosial	559.000.000	575.075.000
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	338.700.000	338.700.000
		Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	37.225.000	37.225.000
		Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	-	-
		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	15.000.000	10.375.000
		Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	105.000.000	126.000.000
		Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	20.300.000	20.300.000
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	17.775.000	17.775.000
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	25.000.000	24.700.000

No	Strategi	Perangkat Daerah / Sub Kegiatan	Rencana Pendanaan tahun 2026	
			APBD	PRKPD
		Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	-	-
		Kecamatan Argomulyo	266.676.600	248.956.600
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	266.676.600	248.956.600
		Kecamatan Sidomukti	250.000.000	246.652.500
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	250.000.000	246.652.500
		Kecamatan Sidorejo	264.458.600	264.458.600
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	264.458.600	264.458.600
		Kecamatan Tingkir	129.636.118	129.636.118
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	129.636.118	129.636.118
		Kelurahan Blotongan	429.803.200	429.803.200
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	429.803.200	429.803.200
		Kelurahan Bugel	147.718.600	147.718.600
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	147.718.600	147.718.600
		Kelurahan Cebongan	169.374.800	169.374.800
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	169.374.800	169.374.800
		Kelurahan Dukuh	441.011.000	441.011.000
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	441.011.000	441.011.000
		Kelurahan Gendongan	290.200.450	290.200.450
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	290.200.450	290.200.450
		Kelurahan Kalibening	168.601.640	168.601.640
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	168.601.640	168.601.640
		Kelurahan Kalicacing	282.075.400	282.075.400
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	282.075.400	282.075.400

No	Strategi	Perangkat Daerah / Sub Kegiatan	Rencana Pendanaan tahun 2026	
			APBD	PRKPD
		Kelurahan Kauman Kidul	156.529.900	156.529.900
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	156.529.900	156.529.900
		Kelurahan Kecandran	250.603.600	250.603.600
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	250.603.600	250.603.600
		Kelurahan Kumpulrejo	406.434.400	406.434.400
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	406.434.400	406.434.400
		Kelurahan Kutowinangun Kidul	397.279.200	397.279.200
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	397.279.200	397.279.200
		Kelurahan Kutowinangun Lor	520.042.190	520.042.190
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	520.042.190	520.042.190
		Kelurahan Ledok	487.701.600	487.701.600
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	487.701.600	487.701.600
		Kelurahan Mangunsari	601.485.900	601.485.900
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	601.485.900	601.485.900
		Kelurahan Noborejo	383.723.200	383.723.200
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	383.723.200	383.723.200
		Kelurahan Pulutan	140.521.700	140.521.700
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	140.521.700	140.521.700
		Kelurahan Randuacir	406.434.400	406.434.400
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	406.434.400	406.434.400
		Kelurahan Salatiga	435.507.700	435.507.700
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	435.507.700	435.507.700
		Kelurahan Sidorejo Kidul	385.964.000	385.964.000
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	385.964.000	385.964.000
		Kelurahan Sidorejo Lor	557.676.200	557.676.200
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	557.676.200	557.676.200
		Kelurahan Tegalrejo	367.934.900	367.934.900
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	367.934.900	367.934.900
		Kelurahan Tingkir Lor	231.856.460	231.856.460
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	231.856.460	231.856.460
		Kelurahan Tingkir Tengah	268.585.600	268.585.600

No	Strategi	Perangkat Daerah / Sub Kegiatan	Rencana Pendanaan tahun 2026	
			APBD	PRKPD
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	268.585.600	268.585.600
		Puskesmas Mangunsari pada Dinas Kesehatan	14.846.000	14.846.000
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	14.846.000	14.846.000
		Puskesmas Sidorejo Kidul pada Dinas Kesehatan	11.520.000	11.520.000
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	11.520.000	11.520.000
		Puskesmas Tegalrejo pada Dinas Kesehatan	12.462.000	12.462.000
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12.462.000	12.462.000
		Satuan Polisi Pamong Praja	76.030.800	76.030.800
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	76.030.800	76.030.800
TOTAL PAGU DUKUNGAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTRIM			160.282.326.203	180.800.293.209

5.1.1.7 Program Prioritas untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Isu Pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goal's* (SDGs) adalah isu global yang harus dipastikan prinsip-prinsip Pembangunan berkelanjutan sudah diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dalam bentuk Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai target tahunan menuju target di tahun 2030. Pada Dokumen RKPD Kota Salatiga Tahun 2026, program prioritas untuk mendukung pencapaian SDGs menjadi salah satu prioritas program untuk rencana kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2027, dengan rencana program tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5. 10 Rencana Pendanaan untuk Sasaran, Prioritas dan Program yang Mendukung Terwujudnya SDGs di Kota Salatiga Tahun 20206

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program	Rencana Pendanaan Tahun 2026	
					APBD	PRKPD
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan	- Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	- peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia	- PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	33.415.400.000	33.457.784.492,00
		- Meningkatnya pelayanan sosial dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif	- peningkatan pengelolaan potensi perekonomian daerah	- PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	37.073.408.941	39.204.859.941,00
		- Meningkatnya kondusivitas wilayah dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi		- PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	158.280.400	160.374.800,00
		- Meningkatnya pengembangan potensi sektor unggulan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi		- PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	600.000.000	1.301.555.690,00
				- PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	379.700.000	379.700.000,00
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	- Meningkatnya pelayanan sosial dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif	- peningkatan pengelolaan potensi perekonomian daerah	- PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	575.000.000	725.000.000,00
		- Meningkatnya pengembangan potensi sektor unggulan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi		- PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	600.000.000	1.301.555.690,00
				- PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN	158.280.400	160.374.800,00

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program	Rencana Pendanaan Tahun 2026	
					APBD	PRKPD
				KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
				- PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.719.600	1.719.600,00
				- PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-
				- PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	213.325.400	337.641.400,00
				- PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	719.124.600	646.432.400,00
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	- Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	- peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia	- PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	37.073.408.941	39.204.859.941,00
4	Menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan belajar sepanjang hayat	- Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	- peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia	- PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		33.457.784.492,00
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	- Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta kesejahteraan keluarga	- peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia	- PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	105.000.000	107.216.200,00

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program	Rencana Pendanaan Tahun 2026	
					APBD	PRKPD
				- PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	94.000.000	91.783.800,00
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	- Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan yang didukung dengan masyarakat yang adaptif dan inovatif	- inventarisasi sumber daya serta masalah lingkungan hidup Kota Salatiga	- PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	4.629.342.000	4.629.342.000,00
				- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	698.452.341	698.452.341,00
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern	Tidak ada indikatornya di Pemerintah Kota Salatiga, karena ESDM bukan kewenangan kabupaten/kota				
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua	- Meningkatnya pengembangan potensi sektor unggulan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi	- peningkatan pengelolaan potensi perekonomian daerah	- PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	544.808.877	564.308.877,00
		- Meningkatnya kondusivitas wilayah dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi		- PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	180.000.000	160.207.000,00
		- Meningkatnya pelayanan sosial dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif		- PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	575.000.000	725.000.000,00
				- PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	600.000.000	1.301.555.690,00
				- PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	105.000.000	105.000.000,00

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program	Rencana Pendanaan Tahun 2026	
					APBD	PRKPD
				- PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-
9	Membangun infrastruktur yang tangguh meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	- Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah yang merata	- peningkatan infrastruktur kewilayahan guna menunjang efektivitas layanan perkotaan	- PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	26.938.491.305	26.938.491.305,00
				- PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	318.916.000	318.916.000,00
				- PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	611.223.798	941.739.418,00
				- PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-	33.000.000,00
				- PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.557.076.307	17.278.610.307,00
10	Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara	- Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan yang didukung dengan masyarakat yang adaptif dan inovatif	- peningkatan pengelolaan potensi perekonomian daerah	- PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	600.000.000	1.301.555.690,00
		- Meningkatnya kondusivitas wilayah dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi	- peningkatan kualitas ASN dan implementasi budaya kerja yang	- PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,	575.000.000	725.000.000,00

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program	Rencana Pendanaan Tahun 2026	
					APBD	PRKPD
			berintegritas dan handal	USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		
		- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital dan berintegritas tinggi menuju pelayanan publik prima		- PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	105.000.000	105.000.000,00
				- PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-
				- PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	379.700.000	379.700.000,00
11	Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	- Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan yang didukung dengan masyarakat yang adaptif dan inovatif	- peningkatan identifikasi dan inventarisasi sumber daya serta masalah lingkungan hidup Kota Salatiga	- PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	318.916.000	318.916.000,00
		- Meningkatnya kondusivitas wilayah dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi	- peningkatan infrastruktur infrastruktur kewilayahan guna menunjang efektivitas layanan perkotaan	- PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	611.223.798	941.739.418,00
		- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital dan berintegritas tinggi menuju pelayanan publik prima		- PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.557.076.307	17.278.610.307,00
				- PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.380.000.000	3.380.000.000,00
				- PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.246.630.000	1.246.630.000,00
				- PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.034.235.440	1.175.385.440,00

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program	Rencana Pendanaan Tahun 2026	
					APBD	PRKPD
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	- Meningkatnya pelayanan sosial dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif	- peningkatan pengelolaan potensi perekonomian daerah	- PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	318.916.000	318.916.000,00
				- PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	611.223.798	941.739.418,00
				- PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-	33.000.000,00
				- PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.557.076.307	17.278.610.307,00
13	Mengatasi langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	- Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan yang didukung dengan masyarakat yang adaptif dan inovatif	- peningkatan identifikasi dan inventarisasi sumber daya serta masalah lingkungan hidup Kota Salatiga	- PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-
				- PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	318.916.000	318.916.000,00
				- PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	611.223.798	941.739.418,00
				- PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA	-	33.000.000,00

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program	Rencana Pendanaan Tahun 2026	
					APBD	PRKPD
				DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		
				- PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	12.900.000	12.900.000,00
				- PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	34.820.000	34.300.000,00
				- PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.557.076.307	17.278.610.307,00
14	Melakukan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan	Tidak ada indikatornya di Pemerintah Kota Salatiga, karena kawasan laut merupakan kewenangan Provinsi				
15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan	Tidak ada indikatornya di Pemerintah Kota Salatiga, karena bukan kewenangan kabupaten/kota				
16	Mewujudkan perdamaian, keadilan	- Meningkatnya kondusivitas wilayah dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi	- peningkatan kualitas ASN dan implementasi budaya kerja yang	- PROGRAM PENINGKATAN	1.104.010.000	1.211.928.000,00

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program	Rencana Pendanaan Tahun 2026	
					APBD	PRKPD
	dan kelembagaan yang kokoh		berintegritas dan handal	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
		- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital dan berintegritas tinggi menuju pelayanan publik prima		- PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	170.760.000	521.425.641,00
				- PROGRAM PENCATATAN SIPIL	79.807.744	79.807.744,00
				- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.014.324.760	5.496.344.375,00
				- PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	128.616.700	216.305.800,00
17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global	Tidak ada indikatornya di Pemerintah Kota Salatiga, karena bukan kewenangan kabupaten/kota				
Pagu Dukungan Terwujudnya SDGs					169.252.411.869	275.803.346.049

5.1.1.8 Rencana Kerja Dukungan Program RKPD 2026 yang menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)

Dalam upaya memaksimalkan efektivitas kolaboratif pencapaian target prioritas pembangunan daerah, Pemerintah Kota Salatiga menerapkan konsep tematik, holistik, integratif dan spasial dalam setiap kebijakan pembangunan daerah

1. Konsep Tematik

Dalam perencanaan pembangunan, konsep tematik diskenariokan secara lima tahunan dan di breakdown tiap tahunnya. Lebih lanjut dijabarkan dalam kerangka prioritas pembangunan daerah setiap tahunnya dan sesuai dengan arah kebijakan daerah. Konsep tematik dalam arah kebijakan pembangunan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Konsep tematik diwujudkan dalam penetapan prioritas pembangunan daerah di Kota Salatiga pada tahun 2026 adalah :

- (1) Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah
- (2) Peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia
- (3) Peningkatan pengelolaan potensi perekonomian daerah
- (4) Peningkatan infrastruktur kewilayahan guna menunjang efektivitas layanan perkotaan
- (5) Peningkatan identifikasi dan inventarisasi sumber daya serta masalah lingkungan hidup, dan
- (6) Peningkatan kualitas ASN dan Implementasi budaya kerja yang berintegritas dan handal

2. Konsep Holistik

Dalam perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kota Salatiga menerapkan konsep holistik yaitu perencanaan yang komprehensif dari hulu ke hilir, antara lain pelaksanaan program penanganan kemiskinan dan penurunan stunting

3. Konsep Integratif

Penerapan konsep integratif juga dilakukan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan secara kolaboratif yang melibatkan semua perangkat daerah, antara lain penanganan kemiskinan stunting dan dalam upaya mengatasi kekumuhan.

Selain itu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah juga dilaksanakan Pemerintah Kota Salatiga berkolaborasi dengan aktor non pemerintah baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia dan pelaksanaan kegiatan, yaitu kegiatan penanganan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan (SDGs), penanganan stunting, penanganan anak usia sekolah tidak sekolah dan sebagainya. Dari sisi pentahelix non pemerintah yang dilibatkan adalah akademisi, tim penggerak PKK, BAZNAS, Mitra Perangkat Daerah, kelompok masyarakat, media massa, Forum CSR dan lainnya

4. Konsep Spasial

Konsep Spasial juga diterapkan dalam kebijakan pembangunan daerah di Kota Salatiga. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan penanganan stunting, kemiskinan dan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Tabel 5. 11 Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2026 yang menerapkan Konsesp Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)

No	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME RKPD 2026	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	APBD	RKPD	Perangkat Daerah
1	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			33.415.400.000	33.415.400.000	
	Outcome : Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD (Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD)	100 %			
		Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (Tingkat partisipasi warga negara usia 7–12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar)	100 %			
		Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs (Tingkat partisipasi warga negara usia 13–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama)	100 %			
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Kesetaraan (Tingkat partisipasi warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan)	100 %			
		Angka Putus Sekolah SD/MI	0,004 %			
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,057 %			
		Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI	88,45 %			
		Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs	87,87 %			
		Persentase sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang	78,08 %			
		Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik	87,44 %			
		Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik	95,46 %			

No	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME RKPD 2026	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	APBD	RKPD	Perangkat Daerah
		Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	93,79 %			
		Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	85,07 %			
		Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	94,76 %			
		Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	90,93 %			
		Iklim Kebhinekaan SD	69,05 Nilai			
		Iklim Kebhinekaan SMP	74,58 Nilai			
		Iklim Keamanan SD	73,7 Nilai			
		Iklim Keamanan SMP	74,4 Nilai			
		Iklim Inklusivitas SD	61,44 Nilai			
		Iklim Inklusivitas SMP	64,1 Nilai			
2	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			37.073.408.941	37.073.408.941	
	Outcome :Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	<i>Angka Kematian balita (AKABA)</i>	11,40 per 1.000 KH			
		Capaian penemuan kasus TB (Notifikasi kasus TB)	134,50 kasus			
		Persentase pasien TBC yang memulai pengobatan (Enrollment TBC)	91 Angka			
		Cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah	30 Angka			
		<i>Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk</i>	0,74 1.000 penduduk			
		Jumlah Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	5 desa/kelurahan			
		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan KKS (SK Forkom	100 %			

No	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME RKPD 2026	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	APBD	RKPD	Perangkat Daerah
		kec, SK Pokja Kel, Sekretariat, Rencana Kegiatan, Anggaran)				
		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pengawasan kualitas udara dalam ruang memenuhi syarat	33,33 %			
		Persentase Puskesmas Yang memfasilitasi Kelurahan Sehat Iklim	50 %			
		Persentase rumah tangga dengan kualitas air minum memenuhi syarat	30 %			
		Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat	70 %			
		<i>Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan</i>	100 %			
		Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	85 %			
		Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	83 %			
		Cakupan imunisasi di usia sekolah dasar	98 %			
		Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan	100 %			
		Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan	100 %			
		Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A	99,62 %			
		Cakupan kepesertaan JKN	100 %			
		Cakupan kepesertaan JKN Aktif	81 %			
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %			
		Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %			

No	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME RKPD 2026	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	APBD	RKPD	Perangkat Daerah
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	100 %			
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %			
		Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3)	99,55 %			
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	100 %			
		Persentase lanjut usia yang mandiri	89 %			
		Persentase Depresi yang mendapatkan layanan	1,5 %			
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	100 %			
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	100 %			
		Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100 %			
		Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100 %			
		Prevalensi Obesitas > 18 tahun	23,4 %			
		Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	40 %			
		Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	11,40 %			
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100 %			
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100 %			
		Cakupan pembinaan remaja di sekolah	100 %			
		Cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	100 %			
		Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	100 %			

No	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME RKPD 2026	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	APBD	RKPD	Perangkat Daerah
		Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	99,72 %			
		CakupanTempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat higiene sanitasi	65 %			
		Deteksi Dini Triple Eliminasi Ibu Hamil	76 %			
		Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	97 %			
		Incident Rate DBD per 100.000 penduduk	9,15 / 100rb penduduk			
		Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	61 kasus			
		Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan	85 %			
		Persentase penduduk dengan aktivitas fisik cukup	20 %			
		Persentase tempat kerja formal yang melaksanakan kesehatan kerja	55 %			
		Persentase tempat kerja informal yang melaksanakan kesehatan kerja	100 %			
		Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)	6 kasus			
		Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)	7,1 %			
		Persentase Ibu hamil KEK	13,5 %			
		Persentase Ibu Hamil yang Anemia	7,4 %			
		Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	50 %			
		Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar	100 %			
		Persentase Pustu, Puskesmas, dan RSUD yang memenuhi standar	100 %			

No	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME RKPD 2026	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	APBD	RKPD	Perangkat Daerah
		Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) dan Sumber Daya Manusia Kesehatan				
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	85 %			
		Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	4 /1000 penduduk			
		Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam	100 %			
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	73 %			
3	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			5.857.101.550	5.857.101.550	
	Outcome : Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Cakupan desa siaga strata mandiri	100 %			
		Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna	97,65 %			
		Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna	95,75 %			
		Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat	100 %			
		Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat	90,45 %			
		Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat	94,45 %			
		Cakupan sosialisasi dan edukasi Kawasan Tanpa Rokok	50 %			
4	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			26.938.491.305	26.938.491.305	
	Outcome :Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Rasio kemantapan jalan	95,53 %			

No	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME RKPD 2026	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	APBD	RKPD	Perangkat Daerah
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			698.452.341	698.452.341	
	<i>Outcome</i> : Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	19,40 %			
6	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			525.026.350	525.026.350	
	<i>Outcome</i> : Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	66,09 %			
7	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			977.000.000	977.000.000	
	<i>Outcome</i> : Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat pemerintah	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana atau relokasi kabupaten/kota	100 %			
		Persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100 %			
8	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			3.380.000.000	3.380.000.000	
	<i>Outcome</i> : Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/ kota yang ditangani	10,6 %			
9	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			1.246.630.000		
	<i>Outcome</i> : Meningkatnya kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni yang diperbaiki	5,2 %			

No	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME RKPD 2026	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	APBD	RKPD	Perangkat Daerah
10	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			4.529.771.222	4.529.771.222	
	<i>Outcome</i> : Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	65 %			
11	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			185.000.000	185.000.000	
	<i>Outcome</i> : Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam pelayanan sosial	46 %			
12	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			334.000.000	334.000.000	
	<i>Outcome</i> : Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %			
		Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %			
		Persentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 %			
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %			
13	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			379.700.000	379.700.000	
	<i>Outcome</i> : Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	96 %			
14	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA			20.300.000	20.300.000	

No	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME RKPDP 2026	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	APBD	RKPD	Perangkat Daerah
	Outcome : Meningkatkan perlindungan sosial korban dan bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	100 %			
15	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			544.808.877	544.808.877	
	Outcome : Meningkatkan produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang terlatih	0,31 %			
16	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			180.000.000	180.000.000	
	Outcome : Meningkatkan penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	71,69 %			
17	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			105.000.000	105.000.000	
	Outcome : Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Kelembagaan PUG Aktif	100 %			
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	100 %			
18	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			650.286.500	650.286.500	
	Outcome : Meningkatkan kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase PKK aktif	100 %			

No	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME RKPD 2026	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	APBD	RKPD	Perangkat Daerah
19	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			586.369.000	586.369.000	
	Outcome : Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rasio akseptor KB baru	14,40 %			
		Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15- 49	67,75 %			
		Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	8,47 %			
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26,65 %			
		Persentase Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	69,75 %			
		Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)	11,7 %			
		Demand Satisfied (Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi)	82,7 %			
20	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			1.006.477.517	1.006.477.517	
	Outcome : Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	46;23 rasio			
		Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA)	100 %			
		Cakupan Kader BKB yang Terlatih	74,85 %			
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB	95,5 %			
		Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	56,6 %			
		Indeks Lansia Berdaya	56,6 Indeks			

No	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME RKPDP 2026	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	APBD	RKPD	Perangkat Daerah
		Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	93,1 Indeks			
21	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			158.280.400	158.280.400	
	<i>Outcome</i> : Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023	1,63 Rasio			
22	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			1.719.600	1.719.600	
	<i>Outcome</i> : Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	87,74 %			
23	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			0	0	
	<i>Outcome</i> : Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	90 %			
24	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			213.325.400	213.325.400	
	<i>Outcome</i> : Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian	6,966 %			
		Produktivitas tanaman pangan (Padi dan Jagung)	75 ton/ha			
25	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			328.247.500	328.247.500	

No	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME RKPd 2026	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	APBD	RKPd	Perangkat Daerah
	Outcome : Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	100 %			
		Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	35 %			
		Produksi perikanan budidaya	705,085 ton			
26	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			318.916.000	318.916.000	
	Outcome : Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase pemantauan status mutu air	100 %			
		Persentase pemeliharaan sarana prasarana laboratorium	100 %			
27	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			3.000.000	3.000.000	
	Outcome : Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 %			
28	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			1.557.076.307	1.557.076.307	
	Outcome : Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase penanganan sampah	74 %			
		Persentase pengurangan sampah perkotaan	25 %			
29	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			11.712.028.954	11.712.028.954	

No	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME RKPD 2026	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	APBD	RKPD	Perangkat Daerah
	Outcome : Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,45 Rasio			
		Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota	8,05 %			
		Rasio Kinerja Lalu Lintas (VCR)	0,45 V/C			
30	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			3.070.000.000	3.070.000.000	
	Outcome : Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %			
		Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	65 %			
31	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			450.521.400	450.521.400	
	Outcome : Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Koperasi Aktif	62,18 %			
32	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			575.000.000	575.000.000	
	Outcome : Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase usaha mikro yang mendapatkan legalitas usaha	47,89 %			
33	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			434.063.880	434.063.880	
	Outcome : Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase UMKM yang mengakses pembiayaan	25,55 %			
34	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			970.997.300	970.997.300	

No	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME RKPD 2026	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	APBD	RKPD	Perangkat Daerah
	Outcome : Meningkatnya daya saing kepemudaan	persentase Pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan	5 %			
35	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			11.998.498.849	11.998.498.849	
	Outcome : Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	persentase Atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga	17 %			
36	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			105.000.000	105.000.000	
	Outcome : Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara	5 %			
		Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten / Kota	5 %			
		Tingkat Hunian Akomodasi	56,42 %			
37	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			267.800.000	267.800.000	
	Outcome : Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Fasilitas Pemasaran Pariwisata	100 %			
38	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			600.000.000	600.000.000	
	Outcome : Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase fasilitas pedagang pasar rakyat yang menggunakan platform digital	25 %			
JUMLAH PAGU ANGGARAN THIS				151.397.699.193	150.151.069.193	

5.1.2. Rencana Kerja Prioritas Kedua

Rencana program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2026 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

5.2.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

5.2.1.1.1. Pendidikan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pendidikan SD, pengelolaan pendidikan SMP dan pengelolaan pendidikan PAUD, serta pengelolaan pendidikan non formal/kesetaraan, pemberian Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP) PAUD, SD, SMP dan Non Formal/Kesetaraan, pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, pemenuhan prasarana sarana penunjang seperti pembangunan/ rehabilitasi laboratorium, perpustakaan dan sanitasi sekolah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu APK PAUD, APK SD/MI/Paket A, APK SMP/MTs/Paket B, Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A, Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B, Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI, Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs, Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional, Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen, Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional, Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional, Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimum AKM Jenjang SD/MI, Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimum AKM Jenjang SMP/MTs, Persentase Sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang, Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik, Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik. Selain itu pada program ini juga diarahkan pada pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan PAUD maupun kesetaraan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi.

2) Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SD/MI dan SMP/MTs, Persentase sekolah yang menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang TK dan jenjang PKBM.

3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang TK/RA, SD, SMP dan Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang PAUD, SD, dan SMP.

4) Program Pengendalian dan Perizinan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pengendalian, pengawasan dan penilaian kelayakan perizinan Lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk dokumen penilaian kelayakan usulan perizinan pendidikan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase TK/RA yang terakreditasi, Persentase Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat (PKBM) yang Terakreditasi, Persentase lembaga Kursus dan Pelatihan yang berijin, Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SD/MI, Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SMP/MTs.

5) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Program ini diarahkan pada pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra yang penuturannya dalam daerah Kabupaten/Kota dengan memberikan fasilitasi, workshop serta apresiasi siswa terhadap bahasa dan sastra. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs dan Persentase PKBM yang sudah memasukkan pembelajaran Bahasa Jawa pada mata pelajaran yang diberikan ke siswa.

5.2.1.1.2. Kesehatan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Kota, penyediaan fasilitas pelayanan, sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Kota, penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi, penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Kota. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM, Persentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM, Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil, Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD), Cakupan pembinaan remaja di sekolah, Pembentukan Posyandu Remaja, Persentase Ibu hamil KEK, Persentase Ibu Hamil yang Anemia, Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan, Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan, Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin, Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A,

Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3) , Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD), Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram), Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif, Cakupan pelayanan kesehatan balita, Angka Kematian balita (AKABA), Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan, Prevalensi Stunting pada Balita, Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia, Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB, Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR), Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV, Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV, Incident Rate DBD per 100.000 penduduk, Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk, Angka Penemuan Pneumonia Balita, Deteksi Dini Hepatitis, Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), Cakupan UCI kelurahan, Cakupan BIAS DT/Td, Cakupan BIAS Campak Rubela, Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar, Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam, Penemuan kasus AFP, (Acute Flaccid Paralysis), Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi, Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan, Cakupan kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar, Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja, Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas, cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional, Cakupan kepesertaan JKN, Cakupan Puskesmas yang melaksanakan intervensi lanjut PIS PK, Persentase Puskesmas yang melaksanakan SIMPUS, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart, Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan, Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk, Persentase RS rujukan yang terakreditasi.

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase akreditasi puskesmas strata utama.

3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), penerbitan sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga serta penerbitan sertifikat laik hygiene, sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum. Program ini

dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan, Persentase pangan IRT yang memenuhi syarat, Persentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan, Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, toko obat) yg memenuhi standart dan persyaratan perijinan, Cakupan TPM yang memenuhi syarat higiene sanitasi.

4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan Desa Siaga Strata Mandiri, Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna, Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna, Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat, Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat, Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat.

5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik, Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit, Persentase Pemakaian Tempat Tidur (BOR), *Average Length of Stay* (Av LOS), *Bed Turn Over* (BTO), *Turn Over Internal* (TOI), *Net Death Rate* (NDR), *Gross Death Rate* (GDR).

5.2.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Kota, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Rasion luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.

2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Presentase rumah tangga dengan akses air minum.

3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik melalui peningkatan prasarana sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan dan berbasis masyarakat, dalam rangka pencapaian indikator kinerja program yaitu Presentase rumah tangga dengan akses layanan pengolahan air limbah domestik.

4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai melalui pembangunan sistem drainase perkotaan, pemeliharaan sistem drainase serta menyusun strategi dan teknis sistem drainase perkotaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase jaringan drainase dalam kondisi baik.

5) Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung melalui pemberian rekomendasi teknis IMB dan SLF. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Rasio Kepatuhan IMB.

6) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya untuk mencapai indikator kinerja Presentase Penataan Bangunan dan Lingkungan.

7) Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan Kota melalui perencanaan, pembangunan jalan dan jembatan, updating kondisi jalan dan jembatan, peningkatan struktur jalan serta melakukan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan untuk mencapai indikator kinerja Prosentase jalan yang menjadi kewenangan dalam SK Jalan kondisi mantap dan Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik.

8) Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi, dan Penerbitan izin usaha jasa konstruksi Nasional. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Rasion tenaga operator/teknisi/analisi yang memiliki sertifikat kompetensi.

9) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan RTRW dan rencana Rinci Tata Ruang, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah, koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah, serta koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah untuk mencapai indikator kinerja tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

5.2.1.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan melalui kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kota, Sosialisasi dan persiapan

penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kota, Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus serta Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni korban bencana/relokasi kab/kota, Fasilitas Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kab/kota, Persentase peningkatan dokumen pengembangan perumahan.

2) Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha, serta Peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani, terfasilitasinya terbentuknya masyarakat atau kelompok pemelihara dan pemanfaat (KPP), Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni).

3) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan prasarana sarana utilitas perumahan, penyediaan prasarana sarana utilitas perumahan untuk Menunjang fungsi hunian umum perumahan dalam rangka untuk mencapai indikator kinerja yaitu cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung PSU yang berkelanjutan, terfasilitasinya pengembangan atau perluasan TPU dan meningkatnya kapasitas TPU, cakupan lingkungan permukiman yang sehat didukung PSU.

4) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mencapai target indikator kinerja yaitu jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian dalam rangka pencegahan terhadap perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.

5.2.1.1.5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Program ini diarahkan pada kegiatan Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan, serta pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum, Selain itu juga diarahkan pada kegiatan penegakan Perda melalui penanganan pelanggaran Perda dan Perwali dan juga

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mencapai indikator kinerja persentase cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan.

- 2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran untuk mencapai indikator kinerja Presentase ketersediaan Sarana Prasarana Damkar yang memadai, Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Kebakaran, Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

- 3) Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban dan juga penataan sistem dasar penanggulangan bencana. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM), Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM), Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM), Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana, peralatan pendukung penanggulangan bencana dan logistik.

5.2.1.1.6. Sosial

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan potensi sumber kesejahteraan social untuk mencapai indikator kinerja persentase Terbentuknya Lembaga Puskesmas, persentase LKS/LKSA yang telah mengikuti Assesment, persentase PSKS yang dibina.

- 2) Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial, dan Rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Presentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti, Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti, Presentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti, Presentase

Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.

3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kota untuk mencapai indikator kinerja Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pegemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi.

4) Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota untuk mencapai indikator kinerja Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana bagi korban bencana kabupaten/kota, Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pada kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kota untuk mencapai indikator kinerja cakupan pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

5.2.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

5.2.1.2.1. Tenaga Kerja

1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan swasta. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi.

2) Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja, perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan), dan Penertiban Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Realisasi Kegiatan Bursa Tenaga Kerja.

3) Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada kegiatan pengesahan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan dan kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial, Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan

terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). Selain itu, pada program ini untuk kinerja cakupan kepesertaan jaminan Sosial Ketenagakerjaan, mulai mulai memperhatikan arah kebijakan perlindungan tenaga kerja yang informal, mengingat untuk kedepan target kepesertaan Jamsostek tidak hanya yang formal saja, namun yang informal juga dilihat capaiannya.

5.2.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota; Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota. Target kinerja dari program ini adalah Persentase ARG pada belanja langsung APBD; Persentase kelembagaan PUG aktif, presentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG dan Persentase Perempuan di Lembaga legislatif.

2) Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/kota dengan target kinerja persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani sesuai standart dan Rasio Kekerasan terhadap perempuan.

3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota dengan target kinerja Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan.

4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota untuk mencapai target kinerja Persentase Perangkat Daerah yang berkontribusi dalam sistem data gender dan anak.

5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada kegiatan pelembagaan pemenuhan hak anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha dan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan Kualitas Hidup Anak. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja Persentase anak yang terlibat dalam kegiatan anak.

6) Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak, penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan

perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja presentase anak korban kekerasan.

5.2.1.2.3. Pangan

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program ini di arahkan pada penyediaan infrastruktur cadangan pangan termasuk hiliisasi komoditas susu dan daging serta komoditas pertanian lokal lainnya.

- 2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota dan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. Program ini direncanakan untuk mencapai target Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) dan kinerja ketersediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya.

- 3) Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota untuk mencapai target indikator kinerja penanganan rumah tangga rawan pangan.

- 4) Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota untuk mencapai target pangan segar aman.

- 5) Program Penyuluhan Pertanian

Program ini di arahkan pada presentase cakupan bina kelompok tani kategori pemula, lanjut, madya serta utama serta upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pada lahan yang ada.

- 6) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada peningkatan distribusi dan kualitas prasarana pertanian didukung dengan pemenuhan kebutuhan prasarana pertanian, stimulan bantuan benih padi, pengendalian OPT dan DPI, mempertahankan luas lahan pertanian yang ada.

5.2.1.2.4. Pertanahan

- 1) Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi untuk mencapai target indikator kinerja persentase rencana pengadaan tanah berdasarkan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA).

- 2) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
Program ini diarahkan pada kegiatan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mencapai indikator kinerja persentase penyelesaian permasalahan ganti kerugian tanah untuk pembangunan.
- 3) Program Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah
Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi, inventarisasi dan pengurusan hak atas tanah aset pemerintah untuk mencapai indikator kinerja persentase aset tanah pemerintah. Selain itu Program ini juga diarahkan pada pelaksanaan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, bisa ditambahkan dukungan program pertanahan pemerintah Kab/Kota dalam pelaksanaan penataan aset dan akses.
- 4) Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota untuk mencapai indikator kinerja persentase penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
- 5) Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan
Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan untuk mencapai indikator kinerja persentase penyelesaian sengketa, konflik dan perkara dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

5.2.1.2.5. Lingkungan Hidup

- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) dengan indikator kinerja berupa dokumen IKPLHD dan dokumen KLHS.
- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota. Target kinerja pada program ini Pemantauan Status Mutu Air, Persentase peningkatan sarana prasarana laboratorium, Presentase Konservasi Lahan, dan Persentase Konservasi Sumber Mata Air.
- 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota dengan target kinerja peningkatan Persentase ruang terbuka hijau dan cakupan layanan penerangan jalan umum. Program kegiatan ini sebagai salah satu upaya dalam memenuhi luasan RTH di Kota Salatiga.
- 4) Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan target capaian persentase penyimpangan dan atau pengangkutan limbah B3 sesuai dengan ketentuan.

- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan. Indikator capaian program ini adalah Kegiatan penegakan hukum lingkungan, Prosentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan, Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dan presentase tersusunnya dokumen IGRK.

- 6) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk meraih prestasi berupa penghargaan tingkat kota yang difasilitasi untuk penghargaan tingkat propinsi. Indikator capaian program ini adalah Jumlah penghargaan lingkungan hidup tingkat Kabupaten/kota, Persentase penerima penghargaan tingkat Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk penghargaan tingkat Provinsi, Peningkatan Kapasitas Pemahaman Lingkungan Hidup.

- 7) Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan persampahan untuk mengurangi sampah perkotaan dan juga kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak Swasta. Indikator kinerja untuk program ini adalah Persentase Pengurangan Sampah, Persentase Penanganan Sampah, Persentase Pengangkutan Sampah.

5.2.1.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 1) Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Penataan Pendaftaran Penduduk. Indikator yang ditargetkan untuk dicapai melalui pelaksanaan program ini yaitu Persentase perekaman KTP-el dan Persentase penerbitan KIA usia 0-5 tahun.

- 2) Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan pencatatan sipil dan Penyelenggaraan pencatatan sipil. Target capaian program ini yaitu Persentase penerbitan akta kelahiran usia 0-5 tahun dan Presentase akta perkawinan non muslim.

- 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan; penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Indikator kinerja program ini yaitu untuk mencapai ketersediaan database kependudukan.

5.2.1.2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota. Capaian indikator program ini yaitu Cakupan Pembinaan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (penyusunan Grand Design, Profil/Parameter dan Proyeksi Penduduk), Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 perempuan usia 15-19 thn (ASVFR), Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan, Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun, dan Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP).

2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal; Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB); Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota; Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. Capaian indikator program yaitu untuk mencapai Rasio akseptor KB baru, Cakupan peserta KB aktif, Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49, Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed), Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), dan Persentase Fasilitas Kesehatan yang siap melayani KB MKJP.

3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; kegiatan pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Indikator kinerja dari program ini yaitu Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA), Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 tahun, Cakupan Kader BKB yang Terlatih, Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB, dan Persentase Baduta Stunting.

5.2.1.2.8. Perhubungan

1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota; Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota; Pengelolaan terminal penumpang Tipe C; Pengujian berkala kendaraan bermotor; Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota; Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota; Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah kabupateran/kota; dan Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 daerah kabupaten/kota. Indikator capaian program ini yaitu Presentase rambu-rambu terpasang dan Presentase Layanan angkutan darat.

5.2.1.2.9. Komunikasi dan Informatika

1) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota guna mencapai indikator kinerja Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah.

2) Program Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota; pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota guna mencapai indikator kinerja Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dan Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

5.2.1.2.10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian program Persentase koperasi yang berkualitas.

2) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian program Persentase KSP/USP koperasi sehat, dengan indikator kinerja Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan.

3) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian program Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan.

4) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota, capaian program ini yaitu persentase akses pasar anggota koperasi.

5) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang dilakukan untuk mencapai indikator program persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan.

6) Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil dengan capaian program persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha.

5.2.1.2.11. Penanaman Modal

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal dan pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota dengan capaian program Nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN.

2) Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan capaian program Nilai Prosentase kenaikan jumlah minat Investasi berskala nasional (PMA dan PMDN).

3) Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota capaian Persentase perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan.

4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan capaian program Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk.

5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dengan capaian program Prosentase kenaikan perizinan dan non perizinan yang dikelola.

5.2.1.2.12. Kepemudaan dan Olahraga

1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota, dengan capaian program Persentase pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan.

2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi dan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. Capaian program adalah Persentase Atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga.

3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan dengan capaian program Persentase fasilitasi pengembangan kapasitas kepramukaan.

5.2.1.2.13. Statistik

1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota untuk mencapai target Presentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Presentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah.

5.2.1.2.14. Persandian

1) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian program Persentase tingkat kematangan daerah dalam penyelenggaraan keamanan informasi.

5.2.1.2.15. Kebudayaan

1) Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota, pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota dengan capaian program persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan.

2) Program Pembinaan Sejarah

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian program Persentase kajian sejarah.

3) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja program Persentase penetapan cagar budaya.

4) Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja program adalah Persentase SDM, Lembaga dan pranata yang dibina.

5) Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan museum Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja program adalah Presentase penambahan jumlah koleksi museum.

5.2.1.2.16. Perpustakaan

1) Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota dan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota dengan capaian program nilai tingkat kegemaran membaca.

2) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan capaian program presentase koleksi nasional dan kuno yang dilestarikan.

5.2.1.2.17. Kearsipan

1) Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota serta Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota dengan capaian program Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku.

2) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten/kota yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan; autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media serta pencarian arsip statis kabupaten/kota yang dinyatakan hilang dengan capaian program Persentase jumlah arsip yang diselamatkan.

3) Program Perizinan Penggunaan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di kabupaten/kota dengan capaian program Persentase peningkatan pengguna atau pengunjung arsip.

5.2.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

5.2.1.3.1. Kelautan dan Perikanan

1) Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil, pengelolaan pembudidayaan ikan dengan capaian program cakupan bina kelompok pembudidaya ikan dan presentase kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

2) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan pembudi daya ikan kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan dengan capaian program cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan serta indikator presentase kelompok kelompok pengolah dan pemasar ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

5.2.1.3.2. Pariwisata

1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota dengan capaian program Prosentase obyek wisata yang ditingkatkan.

2) Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan capaian program jumlah kegiatan/fasilitasi pemasaran pariwisata.

- 3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Ekosistem ekonomi kreatif dengan capaian program Jumlah kegiatan pengelolaan ekonomi kreatif.

- 4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan capaian program Jumlah Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

5.2.1.3.3. Pertanian

- 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian; Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro organisme; Peningkatan Mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan; Penyediaan Benih/Bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang seumumnya dalam 1 daerah, dengan capaian program Pemenuhan Kebutuhan sarana pertanian.

- 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, Pembangunan Prasarana Pertanian dengan capaian program Pemenuhan Kebutuhan prasarana pertanian.

- 3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian program Mortalitas Hewan/ternak akibat penyakit zoonosis.

- 4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota dengan capaian program Prosentase kejadian bencana pertanian.

- 5) Program penyuluhan pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan capaian program Cakupan Bina Kelompok Tani untuk Pemula, Lanjut, Madya dan Utama.

5.2.1.3.4. Perdagangan

1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diarahkan pada kegiatan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan; penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat. Capaian program ini yaitu Persentase jumlah perizinan yang dilegalitas terhadap jumlah pelaku usaha perdagangan.

2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya. Capaian program ini adalah Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar, Persentase kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina, Persentase kelompok PKL yang dibina, Persentase PKL yang ditata terhadap jumlah total PKL, Persentase PKL yang menempati lokasi peruntukan terhadap jumlah PKL.

3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota dan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota dengan capaian program adalah Persentase penerima pupuk bersubsidi terhadap pengguna pupuk dan Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah.

4) Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota capaian program adalah Persentase produk unggulan terhadap jumlah produk di Kota Salatiga.

5) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan guna mencapai indikator program berupa Persentase Alat UTP dan perlengkapannya di wilayah Kota Salatiga yang ditera ulang dan bertanda tera sah.

5.2.1.3.5. Perindustrian

1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan untuk mendapatkan indikator berupa Persentase industri Kota Salatiga yang berkembang.

2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait; Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

5.2.1.3.6. Transmigrasi

1) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Program ini diarahkan pada kegiatan penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan capaian program Persentase pelaksanaan proses transmigrasi.

5.2.1.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

5.2.1.4.1. Sekretariat Daerah

1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada kegiatan administrasi tata pemerintahan, fasilitasi dan koordinasi hukum, fasilitasi kerjasama daerah dan Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat. Capaian program ini yaitu Cakupan koordinasi administrasi pemerintahan; Cakupan koordinasi bidang administrasi kewilayahan; Cakupan fasilitasi Kerjasama daerah; skor LPPD; Ketepatan waktu penyampaian LKPJ (30 maret); Prosentase pelaksanaan kebijakan bidang hukum dan Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat.

2) Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian; pemantauan kebijakan sumber daya alam; Pengelolaan Pengadaan barang dan jasa, Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian; Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam; Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; Pelaksanaan Administrasi Pembangunan. Capaian program ini yaitu Cakupan koordinasi program perekonomian dan pembangunan; cakupan koordinasi OPD pengampu DBHCHT; Cakupan koordinasi dan Pembinaan BUMD/BLUD; Cakupan Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup dan SDA; Cakupan Koordinasi POK dan Persentase Nilai Belanja yang dilakukan melalui pengadaan.

3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan kegiatan pada Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat

Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah; Penataan Organisasi; Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Capaian program ini yaitu Cakupan koordinasi dan fasilitasi bidang keprotokolan dan kehumasan yang berkualitas; presentase kegiatan administrasi umum yang berhasil dikoordinasikan dan difasilitasi dan Cakupan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.

5.2.1.4.2. Sekretariat DPRD

1) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini diarahkan kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD dan Fasilitasi Tugas DPRD. Capaian program ini adalah Cakupan fasilitasi Fungsi Legislasi, Cakupan fasilitasi fungsi Penganggaran, Cakupan fasilitasi fungsi Pengawasan.

5.2.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

5.2.1.5.1. Perencanaan

1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan; analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah; pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, capaian program ini adalah Rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan daerah.

2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam); koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan. Capaian program ini yaitu Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Kesra dan Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Ekbang.

5.2.1.5.2. Keuangan

1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah; koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah; koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah; pengelolaan data dan implementasi

sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah. Capaian program ini yaitu Persentase belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan, Persentase belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures), Budget execution, deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD, Cash management (Persentase anggaran), Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan, dan Akses publik terhadap informasi keuangan daerah.

2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk mencapai indikator kinerja program Asset Management.

3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah dengan capaian program Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD.

5.2.1.5.3. Kepegawaian

1) Program Kepegawaian Daerah

Program ini diarahkan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN; mutasi dan promosi ASN; pengembangan kompetensi ASN dan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Capaian dari program ini adalah presentase Persentase PNS yang melanjutkan Pendidikan, Rasion PNS yang mengikuti assessment, Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan), Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

5.2.1.5.4. Pendidikan dan Pelatihan

1) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini diarahkan kegiatan pengembangan kompetensi teknis dan Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Capaian program ini yaitu Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Teknis dan Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Manajerial dan Fungsional.

5.2.1.5.5. Penelitian dan Pengembangan

1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini diarahkan kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan capaian program Persentase terfasilitasinya inovasi masyarakat daerah.

5.2.1.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

5.2.1.6.1. Inspektorat Daerah

1) Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal, penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu. Capaian program ini yaitu Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal; Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Persentase Jumlah OPD Meningkatkan Nilai Evaluasi SAKIP.

2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan dan kegiatan pendampingan dan asistensi. Capaian program ini yaitu nilai MCP Korsupgah KPK.

5.2.1.7. Unsur Kewilayahan

5.2.1.7.1. Kecamatan

Program yang diselenggarakan oleh kecamatan di Kota Salatiga dilaksanakan oleh 4 kecamatan yaitu: Kecamatan Sidorejo, Tingkir, Argomulyo dan Sidomukti.

1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan, capaian program ini adalah Persentase Peningkatan Skor IKM.

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, kegiatan pemberdayaan kelurahan. Capaian program ini adalah Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel.

3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah dengan capaian indikator program yaitu Persentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah dan Persentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

4) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan capaian program Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PPB P2 dan Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP.

5.2.1.8. Unsur Pemerintahan Umum

5.2.1.8.1. Kesatuan Bangsa Dan Politik

- 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan dengan capaian program yaitu Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap Nilai nilai Pancasila.
- 2) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik untuk mencapai indikator program persentase pendidikan Politik yang dilaksanakan.
- 3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan.
- 4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
- Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan capaian program Persentase penurunan penyalahgunaan narkoba dan Indeks Kerukunan Umat Beragama.
- 5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
- Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan capaian program yaitu Persentase Penurunan Kejadian atau konflik sosial.

Penetapan indikator program tersaji sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5. 12 Penetapan Indikator Program berdasarkan urusan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2026

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
DINAS PENDIDIKAN								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah							Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	95,45	100	100	100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	85,29	100	100	91,4	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79,30*	79,31	79,31	68,85	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah							Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah
		Angka Partisipasi Sekolah PAUD (Tingkat parsipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD)	%	97,88	100	100	100	
		Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (Tingkat partisipasi warga negara usia 7–12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar)	%	99,34	100	100	100	

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs (Tingkat partisipasi warga negara usia 13–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama)	%	96,82	100	100	100	
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Kesetaraan (Tingkat partisipasi warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan)	%	71,05	100	100	100	
		Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,005	0,004	0,004	0	
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,058	0,057	0,057	0,053	
		Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI	%	88,44	88,45	88,45	88,49	
		Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs	%	87,78	87,78	87,78	87,82	
		Persentase sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang	%	78,07	78,08	78,08	78,12	
		Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik	%	87,43	87,44	87,44	87,48	
		Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik	%	95,45	95,46	95,46	95,5	
		Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	2,81	93,79	93,79	93,83	

[illegible]

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	distribusi institusi pendidikan							distribusi institusi pendidikan
		Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang TK/RA	%	36,84	36,85	36,85	36,89	
		Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang SD	%	49,31	49,32	49,32	49,36	
		Persentase Guru bersertifikat pendidik jenjang SMP	%	58,65	58,66	58,66	58,7	
		Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang PAUD	%	87,8	87,81	87,81	87,85	
		Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SD	%	97,15	97,16	97,16	97,2	
		Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SMP	%	99,1	99,11	99,11	99,15	
1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan							Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan
		Persentase TK/RA yang terakreditasi	%	90,35	90,36	90,36	90,4	
		Persentase Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat (PKBM) yang Terakreditasi	%	83,33	83,33	83,33	83,34	
		Persentase lembaga Kursus dan Pelatihan yang berijin	%	92,86	92,86	92,86	92,87	
		Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SD/MI	%	100	100	100	100	

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SMP/MTs	%	100	100	100	100	
1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah							Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah
		Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SD/MI	%	20,43	20,43	20,43	20,44	
		Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SMP/MTs	%	42,86	42,86	42,86	42,87	
		Persentase PKBM yang sudah memasukkan pembelajaran Bahasa Jawa pada mata pelajaran yang diberikan ke siswa	%	66,67	66,67	66,67	66,68	
DINAS KESEHATAN								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggara n urusan perangkat daerah							Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggara n urusan perangkat daerah
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	100	100	

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,31	73,31	73,31	74,7	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86,9	86,91	86,91	86,95	
<i>Rumah Sakit</i>								
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit	Nilai	88,57	86,5	88,6	88,5	
		Cost Recovery Rumah Sakit	Nilai	102,32	100	100	100	
<i>KPM (Klinik Paru Masyarakat)</i>								
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Klinik Paru Masyarakat	Nilai	84,92	85	85	86	
<i>Puskesmas Tegalrejo</i>								
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Tegalrejo	Nilai	86,5	86,5	86,5	90	
<i>Puskesmas Cebongan</i>								
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Cebongan	Nilai	88,52	88,75	88,75	90	
<i>Puskesmas Kalicacing</i>								
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Kalicacing	Nilai	88,4	88,75	88,75	90	
<i>Puskesmas Mangunsari</i>								
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Mangunsari	Nilai	85,17	86,5	86,5	90	
<i>Puskesmas Sidorejo Lor</i>								
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Sidorejo Lor	Nilai	82,05	86,5	86,5	90	
<i>Puskesmas Sidorejo Kidul</i>								
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Sidorejo Kidul	Nilai	87,35	88,75	88,75	90	
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas kesehatan							Meningkatnya kualitas kesehatan

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	perorangan dan masyarakat							perorangan dan masyarakat
		Angka Kematian balita (AKABA)	per 1.000 KH	11,49	11,4	11,4	11,2	
		Capaian penemuan kasus TB (Notifikasi kasus TB)	Kasus	134	134,5	134,5	136,5	
		Prosentase pasien TBC yang memulai pengobatan (Errollment TBC)	Angka	90,04	91	91	95	
		Cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah	Angka	20	30	30	50	
		Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk	1.000 penduduk	0,74	0,74	0,74	0,74	
		Jumlah Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Kelurahan	2	5	5	23	
		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan KKS (SK Forkom kec, SK Pokja Kel, Sekretariat, Rencana Kegiatan, Anggaran)	Puskesmas	NA	100	100	100	
		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pengawasan kualitas udara dalam ruang memenuhi syarat	%	NA	50	50	100	
		Persentase Puskesmas Yang memfasilitasi Kelurahan Sehat Iklim	%	NA	50	50	100	
		Persentase rumah tangga dengan kualitas air minum memenuhi syarat	%	NA	30	30	34	
		Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat	%	NA	70	70	74	

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Persentase tempat kerja formal yang melaksanakan kesehatan kerja	%	NA	55	55	100	
		Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	%	100	100	100	100	
		Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	%	84,87	85	85	89	
		Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	%	82,07	83	83	85	
		Cakupan imunisasi di usia sekolah dasar	%	98,92	98	98,93	99	
		Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan	%	100	100	100	100	
		Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan	%	100	100	100	100	
		Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A	%	99,6	99,62	99,62	99,66	
		Cakupan kepesertaan JKN	%	98,55	100	100	100	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	100	100	100	100	
		Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100	100	100	100	
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	
		Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3)	%	99,55	99,55	99,55	99,55	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	%	100	100	100	100	

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Persentase lanjut usia yang mandiri	%	90	89	91	97	
		Persentase Depresi yang mendapatkan layanan	%	NA	1,5	1,5	2,5	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	%	100	100	100	100	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	%	100	100	100	100	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	338	100	100	100	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	100	100	100	100	
		Prevalensi Obesitas > 18 tahun	%	NA	23,4	23,4	23,4	
		Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	NA	40	40	80	
		Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	%	NA	11,4	11,4	8,4	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	100	100	100	100	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	98,16	100	100	100	
		Cakupan pembinaan remaja di sekolah	%	100	100	100	100	
		Cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	%	100	100	100	100	
		Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	%	100	100	100	100	
		Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%	99,71	99,72	99,72	99,76	

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Cakupan Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	99,44	65	99,5	75	
		Deteksi Dini Triple Eliminasi Ibu Hamil	%	75,78	75,8	75,8	76	
		Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	100	97	100	99	
		Incident Rate DBD per 100.000 penduduk	/ 100 rb penduduk	9,18	9,15	9,15	8,95	
		Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	%	60	61	61	65	
		Presentase penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	NA	20	20	20	
		Persentase tempat kerja formal yang melaksanakan kesehatan kerja	%	NA	55	55	75	
		Persentase tempat kerja informal yang melaksanakan kesehatan kerja	%	NA	100	100	100	
		Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)	Kasus	9	6	6	6	
		Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)	%	7,21	7,1	7,1	6,7	
		Persentase Ibu hamil KEK	%	13,78	13,5	13,5	11,5	
		Persentase Ibu Hamil yang Anemia	%	7,43	7,40	7,40	7	
		Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	%	NA	50	50	64	
		Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Persentase Pustu, Puskesmas, dan RSUD yang memenuhi standar Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	100	100	100	100	
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	NA	85	85	96	
		Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	/1000 penduduk	3,99	4	4	4,2	
		Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam	%	100	100	100	100	
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	%	66,13	73	73	81	
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (RSUD)	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat							Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart	%	100	100	100	100	
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan							Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan
		Persentase tenaga kesehatan yang sudah mengikuti pelatihan sesuai kompetensinya	%	73,04	73,5	73,5	75	
		Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	%	8,82	8,91	8,91	9,20	
		Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	%	100	100	100	100	

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	100	100	100	100	
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (RSUD)								
		Persentase karyawan RSUD yang yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi minimal 20 jam per tahun	%	57,5	60	60	70	
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi alat kesehatan, dan makanan minuman							Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi alat kesehatan, dan makanan minuman
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	%	50	58	58	70	
		Persentase pangan Industri Rumah Tangga aman dan bermutu	%	74,58	76	76	80	
		Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	%	16,27	29,76	29,76	51	
		Persentase apotek dan toko obat yg mampu memelihara persyaratan perijinan	%	100	100	100	100	
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas	%	81	84	84	86	

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah						
		Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	89,28	90	90	92	
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan							Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
		Cakupan desa siaga strata mandiri	%	100	100	100	100	
		Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna	%	97,55	97,65	97,65	98	
		Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna	%	95,65	95,75	95,75	96,15	
		Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat	%	100	100	100	100	
		Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat	%	90,34	90,45	90,45	90,89	
		Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat	%	94,34	94,45	94,45	90,89	
		Cakupan sosialisasi dan edukasi Kawasan Tanpa Rokok	%	37,5	50	50	100	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah							Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	100	100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88,22	88,6	88,6	88,8	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,96	72	72	74,5	
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman							Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman
		Rasio kemantapan jalan	%	91,97	95,53	95,53	95,57	
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatkan akses masyarakat terhadap irigasi							Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatkan akses masyarakat terhadap irigasi
		Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Nilai	64,84	66	66	68	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya askes masyarakat terhadap sistem							Meningkatnya askes masyarakat terhadap sistem

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	pengelolaan air limbah							pengelolaan air limbah
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	10,29	19,4	19,4	36,9	
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan							Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan
		Prosentase jaringan drainase kondisi baik	%	96,49	96,7	96,7	97,8	
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum							Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum
		Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	63,83	66,09	66,09	75,13	
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya kualitas bangunan gedung							Meningkatnya kualitas bangunan gedung
		Presentase Bangunan Gedung Negara milik Pemerintah Kota dalam Kondisi Baik	%	71,93	76,93	76,93	73,25	
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata							Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata
		Persentase penataan bangunan dan lingkungan	%	25	32,24	32,24	39,36	
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya kompetensi							Meningkatnya kompetensi

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	tenaga konstruksi							tenaga konstruksi
		Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi	Orang	67	75	75	75	
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n penataan ruang							Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n penataan ruang
		Jumlah KKPR yang diterbitkan	Dokumen	396	400	400	400	
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah							Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	100	100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	95	95,1	95,1	95,5	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,6	74,7	74,7	75,1	
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban							Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	bencana dan yang terken relokasi akibat pemerintah							bencana dan yang terken relokasi akibat pemerintah
		Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana atau relokasi kabupaten/kota	%	100	100	100	100	
		Persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman							Meningkatnya kualitas kawasan permukiman
		Presentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/ kota yang ditangani	%	10,01	10,6	10,6	40,73	
1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH								
		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	%	5,11	5,2	5,2	5,4	
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman							Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	46	65	65	85	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan							Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	50	100	100	100	
2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan							Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
		Persentase peningkatan penggunaan dan pemanfaatan tanah	%	100	100	100	100	
2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)							Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
		Persentase bidang tanah yang diredistribusi	%	100	100	100	100	
2.10.09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Meningkatnya luas lahan bersertifikat							Meningkatnya luas lahan bersertifikat
		Persentase luas lahan bersertifikat	%	50	100	100	100	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)								
URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								

[illegible]

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran							penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
		Presentase ketersediaan Sarana Prasarana Damkar yang memadai	%	75	75	75	80	
		Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Kebakaran (Waktu tanggap (response time) penanganan kkebakaran)	Menit	7	15	15	< 15	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (prosentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran)	%	100	100	100	100	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BPBD								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah							Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	100	100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	86	88	88	92,71	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	63	65	65	71,5	
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat, dan Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana							Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat, dan Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana
		Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana)	%	100	100	100	100	
		Persentase Cakupan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana (Jumlah warga negara yang memperoleh layanan	%	100	100	100	100	

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana)						
		Persentase Cakupan Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana)	%	100	100	100	100	
DINAS SOSIAL								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah							Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	100	100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	89,91	90,47	90,47	92,71	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,75	70,9	70,9	71,5	
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya pemberdayaan sosial							Meningkatnya pemberdayaan sosial
		Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan sosial yang Meningkatkan Kulaitasnya dalam pelayanan sosial	%	NA	46	46	100	
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya rehabilitasi sosial							Meningkatnya rehabilitasi sosial

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Presentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	100	100	
		Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	100	100	
		Presentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	100	100	
		Presentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	%	100	100	100	100	
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial							Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial
		Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	%	92,72	96	96	98,5	
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya perlindungan sosial korban dan bencana							Meningkatnya perlindungan sosial korban dan bencana
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	
1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan							Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan

[illegible]

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	Indonesia yang terlindungi							Indonesia yang terlindungi
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	93,24	94,07	94,07	95,24	
URUSAN PERINDUSTRIAN								
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya realisasi pembangunan industri							Meningkatnya realisasi pembangunan industri
		Persentase industri Kota Salatiga yang berkembang	%	0,31	0,44	0,44	2,2	
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IJIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN /KOTA	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian							Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM	Meningkatnya pemanfaatan							Meningkatnya pemanfaatan

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	informasi industri							informasi industri
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	100	100	100	
URUSAN TRANSMIGRASI								
3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi							Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi
		Persentase pelaksanaan proses transmigrasi	%	20	60	60	60	
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah							Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	100	100	

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	85,44	85,5	85,5	90	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,9	77	77	74	
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraa n PUG dan peran perempuan dalam pembangunan							Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraa n PUG dan peran perempuan dalam pembangunan
		Persentase Kelembagaan PUG Aktif	%	100	100	100	100	
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	%	100	100	100	100	
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani sesuai standart	%	100	100	100	100	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan
		Persentase UPTD PPA sesuai standart layanan	%	0	100	100	100	
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								
		Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender,							Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender,

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak							pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak
		Persentase Perangkat Daerah yang berkontribusi dalam sistem data gender dan anak	%	100	100	100	100	
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak							Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak
		Persentase kelembagaan forum anak yang aktif	%	100	100	100	100	
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif							Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif
		Persentase korban kekerasan anak yang mendapat layanan komprehensif	%	100	100	100	100	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								
	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi,	Persentase OPD yang mengintegrasikan dokumen GDPK 5 pilar ke dalam dokumen Perencanaan daerah	%	100	100	100	100	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi,

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak							penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak
		Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	
		Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun	%	0,07	0,08	0,08	0,04	
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	23	23	23	23	
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)							Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)
		Rasio akseptor KB baru	%	14,31	14,4	14,4	15,13	
		Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15- 49	%	67,7	67,75	67,75	72,98	
		Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	%	8,51	8,47	8,47	8,38	
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	26,65	26,65	26,65	28,71	
		Persentase Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	%	65,71	69,75	69,75	70,6	

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)	%	13	11,7	11,7	10	
		Demand Satisfied (Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi)	%	81	82,7	82,7	85,71	
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera							Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera
		Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	rasio	45.23.00	46.23.00	46.23.00	46;23	
		Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA)	%	100	100	100	100	
		Cakupan Kader BKB yang Terlatih	%	74,74	74,85	74,85	80,62	
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB	%	95,3	95,5	95,5	100	
		Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	56,5	57,3	57,3	58,9	
		Indeks Lansia Berdaya	Indeks	55,6	56,6	56,6	58,5	
		Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	Indeks	92,1	93,1	93,1	94,8	
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah							Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	100	100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	89,1	90,03	90,03	91,05	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,65	71,35	72	72,75	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan							Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
		Presentase Peningkatan Indeks ketahanan Pangan	%	-3,03	0,06	0,06	0,18	
2.09.03PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat							Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
		Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023	Rasio	1,49	1,63	1,63	2,20	

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan							Meningkatnya penanganan kerawanan pangan
		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	87,14	87,74	87,74	88,94	
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan							Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan
		Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	89,7	90	90	93,80	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian							Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian
		Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian	%	70	75	75	78,82	
		Produtivitas tanaman pangan (Padi dan Jagung)	Ton/ha	6,938	6,966	6,966	7022	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian							Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian
		Pemenuhan kebutuhan prasarana pertanian	%	50	75	75	75,38	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN	Meningkatnya pengendalian							Meningkatnya pengendalian

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner							kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
		Mortalitas hewan/ternak akibat penyakit zoonosis	%	0	0	0	0	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian							Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
		Persentase penanganan bencana pertanian	%	100	100	100	100	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian							Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian
		Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani						
		- Pemula	%	40	58,56	58,56	63,05	
		- Lanjut	%	46,25	58,56	58,56	77,77	
		- Madya	%	13,75	15,31	15,31	23,12	
		- Utama	%	0	2,6	2,6	2,73	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi perikanan budidaya							Meningkatnya produksi perikanan budidaya
		Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	%	100	100	100	100	

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	%	35	35	35	36,78	
		Produksi perikanan budidaya	ton	677,706	705,085	705,085	763207	
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya produksi perikanan budidaya							Meningkatnya produksi perikanan budidaya
		Cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan	%	100	100	100	100	
		Persentase kelompok kelompok pengolah dan pemasar ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya ikan yang Baik (CBIB)	%	35	35	35	36,78	
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah							Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	100	100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	82,43	82,82	82,82	84,43	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,1	77,12	77,12	77,16	

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan							Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan
		Nilai tingkat kegemaran membaca	nilai	75,23	60,8	76	64,8	
2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno							Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno
		Persentase koleksi nasional dan kuno yg dimiliki	%	0	100	100	100	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis							Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis
		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) (Pasal 40 dan Pasal 59 UU Nomor 43 Tahun tentang Kearsipan)	%	88,67	88,77	88,77	89,67	
2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK							Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	16,67	50	50	75	
2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup							Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup
		Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	%	0	25	25	45	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah							Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	100	100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	83	84,5	84,5	86,50	

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,1	75,3	75,3	75,7	
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP							Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP
		Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan LH	%	100	30	100	100	
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup							Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
		Persentase pemantauan status mutu air	%	100	100	100	100	
		Persentase pemeliharaan sarana prasarana laboratorium	%	100	100	100	100	
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragama n hayati							Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragama n hayati
		Persentase Ruang Terbuka Hijau Tingkat Kota	%	17,4	18	18	20	
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya penangan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)							Meningkatnya penangan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Persentase kelompok masyarakat yang memahami rencana aksi pengurangan dan penghapusan peralatan bermerkuri	%	5	10	10	50	
		Persentase sampah spesifik yang mengandung bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya beracun (limbah B3) yang terkumpul	%	0	30	30	70	
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan							Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan
		Persentase kegiatan penegakan hukum lingkungan	%	89,28	39,23	39,23	37,78	
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup							Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup
		Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh penyuluhan, kampanye dan pelatihan lingkungan hidup	%	30	60	60	70	
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan							Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup							dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
		Persentase penghargaan lingkungan hidup yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup							Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup
		Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan							Meningkatnya tata kelola persampahan
		Persentase penanganan sampah	%	76,51	74	77	70	
		Persentase pengurangan sampah perkotaan	%	21,65	25	25	30	
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah							Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	82,91	100	100	83	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	90,85	91,05	91,05	91,4	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,51	68,6	68,6	68,85	
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk							Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk
		Perekaman KTP-Elektronik	%	98,19	98,2	98,2	99	
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	85,86	86,7	86,7	86,77	
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil							Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil
		Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun yang mempunyai Akte Kelahiran	%	99,44	99,54	99,54	99,58	
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKA N	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan							Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan
		Jumlah PD yang telah memanfaatkan data	%	100	100	100	100	

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama						
DINAS PERHUBUNGAN								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah							Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	100	100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	87,82	88	88	92	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,1	74,3	74,3	75	
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat							Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat
		Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio	0,35	0,45	0,45	0,65	
		Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota	%	7	8,05	8,05	14,08	
		Kinerja Lalu Lintas	V/C	0,31	0,45	0,45	0,43	
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah							Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	100	100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	82	88,31	88,31	90,09	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,15	75,25	75,25	75,45	
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah							Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika							Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses	%	100	100	100	100	

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo						
		Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	60,05	65	65	85	
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraa n Sistem Statistik Nasional (SSN)							Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraa n Sistem Statistik Nasional (SSN)
		Presentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	
		Presentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya keamanan siber dan sandi di lingkungan pemerintah daerah							Meningkatnya keamanan siber dan sandi di lingkungan pemerintah daerah
		Persentase tingkat kematangan daerah dalam	%	70,85	70,09	71	71,2	

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		penyelenggaraan keamanan informasi						
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah							Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	100	100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	85,42	85,73	85,73	87,2	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,9	69,05	69,05	69,65	
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi							Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi
		Prosentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	62,5	71,79	71,79	78,75	
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi							Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi
		Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	71,58	74,43	74,43	87,08	

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian							Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian
		Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	%	57,89	52,58	58,9	54,46	
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya produktivitas koperasi							Meningkatnya produktivitas koperasi
		Persentase Koperasi Aktif	%	53,98	62,18	62,18	63,13	
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri							Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri
		Prosentase usaha mikro yang mendapatkan legalitas usaha	%	40,88	47,89	47,89	49,96	
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM							Meningkatnya daya saing UMKM
		Prosentase UMKM yang mengakses pembiayaan	%	24,8	25,55	25,55	27,06	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah							Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	100	100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	91,84	90	91,9	93698	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,9	77	77	77,4	
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kemudahan berinvestasi							Meningkatnya kemudahan berinvestasi
		Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Miliar rupiah	634,854	636,44	636,44	642,83	
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal							Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal
		Jumlah investor berskala nasional	pelaku usaha	363	370	370	370	
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko							Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko
		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	97,64	97,75	97,75	96,5	
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal							Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal
		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%	67	67	67	75	

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal							Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal
		persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data	%	0	80	80	80	
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah							Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	100	100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	78,84	80	80	80	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,2	68,2	68,2	69	
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya daya saing kepemudaan							Meningkatnya daya saing kepemudaan
		persentase Pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan	%	5,44	5	5,45	5	

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga							Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga
		persentase Atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga	%	17,04	17	17,05	17,5	
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya kualitas kepramukaan							Meningkatnya kualitas kepramukaan
		persentase fasilitasi pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%	65	65	65	68	
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA								
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah							Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	100	100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	86,64	87	87	91	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	69,6	70	70	72	
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan							Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	38,57	40	40	62	
2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Meningkatnya tata kelola museum							Meningkatnya tata kelola museum
		Persentase Penambahan Jumlah Koleksi Museum	%	38,18	38,68	38,68	62	
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan							Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan
		Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan	%	57,97	58	58	45	
2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional							Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional
		Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	%	0	58	58	51	
2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah							Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah
		Persentase Sejarah yang Dilestarikan dan Dikembangkan	%	0	25	25	40,68	

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata							Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata
		Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara	%	NA	5	5	5	
		Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten / Kota	%	NA	5	5	5	
		Tingkat Hunian Akomodasi	%	51,42	56,42	56,42	66,42	
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata							Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata
		Persentase Fasilitas Pemasaran Pariwisata	%	100	100	100	100	
3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif							Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif
		Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	0	3	3	11	
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif							Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%	0	50	50	100	
DINAS PERDAGANGAN								
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah							Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	96,46	100	100	100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	86,66	87,06	87,06	90	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	67,35	67,65	67,65	74	
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha							Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha
		Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	%	100	100	100	100	
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi							Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Prosentase fasilitasi pedagang pasar rakyat yang menggunakan platform digital	%	90	25	91	100	
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Menigkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting							Menigkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
		Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	%	100	100	100	100	
		Disparitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	-0,68	-0,64	-0,64	-0,56	
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor							Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor
		Fasilitasi Pelaku Usaha Ekspor Barang dan Jasa	%	3,3	3,5	3,5	4,3	
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk							Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk
		Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	70,23	45	71	68	
SEKRETARIAT DAERAH								

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah							Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	NA	100	100	100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	84,19	86	86	90	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,86	73	73	74	
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat							Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
		Cakupan Koordinasi Administrasi Pemerintahan	%	185	100	100	100	
		Cakupan Koordinasi Bidang Administrasi Kewilayahan	%	136	100	100	100	
		Cakupan Fasilitasi Kerjasama Daerah	%	430	100	100	100	
		Ketepatan waktu penyampaian LKPJ (30 maret)	%	100	100	100	100	
		Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Hukum	%	120	100	100	100	
		Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100	100	

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan							Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan
		Cakupan Koordinasi Program Perekonomian dan Pembangunan	%	312	100	100	100	
		Cakupan Koordinasi OPD Pengampu DBHCHT	%	162	100	100	100	
		Cakupan Koordinasi dan Pembinaan BUMD/BLUD	%	120	100	100	100	
		Cakupan Koordinasi bidang Lingkungan Hidup dan SDA	%	100	100	100	100	
		Cakupan Koordinasi POK	%	99,04	100	100	100	
		Persentase Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan	%	57,13	60	60	72,93	
SEKRETARIAT DPRD								
SEKRETARIAT DPRD								
4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggara n urusan perangkat daerah							Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggara n urusan perangkat daerah
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	100	100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	84,07	86	86	88,00	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72	73	73	75	

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan							Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan
	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang- undangan	Tingkat capaian kinerja dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100	100	100	100	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang- undangan
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								
5.01 PERENCANAAN								
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah							Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	100	100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	82,58	83	83	83,284	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,9	71,5	71,5	72,7	
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah							Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah	%	98	100	100	100	
		Indeks Manajemen Risiko	Angka	2,897	2,913	2,913	2,962	
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang perekonomian dan SDA							Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang perekonomian dan SDA
		Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Kesra	%	97,24	100	100	100	
		Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Ekbang	%	88,38	90	90	91,85	
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya dukungan hasil kelitbangan di bidang inovasi dalam perencanaan pembangunan							Meningkatnya dukungan hasil kelitbangan di bidang inovasi dalam perencanaan pembangunan

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Persentase terfasilitasinya inovasi masyarakat daerah	%	44,3	44,44	44,44	45,21	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH								
5.02 KEUANGAN								
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah							Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	100	100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	82,73	82,75	82,75	83,03	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,11	72,15	72,15	72,31	
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan , akuntansi dan pelaporan							Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan , akuntansi dan pelaporan
		Persentase belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	18,94	19,16	19,16	19,95	
		Cash managenent (Persentase anggaran)	%	15,07	8,28	8,28	4,59	
		Persentase laporan keuangan tepat waktu	%	100	100	100	100	
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya tata kelola aset daerah							Meningkatnya tata kelola aset daerah

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	2,7	3	3	4,1	
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital							Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	%	100	100	100	100	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								
5.03 KEPEGAWAIAN								
5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggara n urusan perangkat daerah							Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggara n urusan perangkat daerah
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	100	100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	87,519	87,55	87,55	87,90	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79,9	79,95	79,95	80,30	
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian							Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian
		Nilai Indeks NSPK Manajemen ASN	Nilai	75,11	76	76	80	

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional							Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional
		Persentase PNS yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	NA	15	15	19	
INSPEKTORAT								
6.01 INSPEKTORAT DAERAH								
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah							Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	100	100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	80	81,4	81,4	82,5	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78	78,2	78,2	79	
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan atau							Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan atau

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan							penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan
		Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Tahun Anggaran N-1	%	90	90,10	90,10	94,30	
		Tindaklanjuti Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	94	94,10	94,10	90,30	
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi							Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi
		Nilai Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP)	%	94	94,6	94,6	95	
		Prosentase Penyelesaian Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat (DUMAS)	%	100	100	100	100	
KECAMATAN ARGOMULYO								
7.01 KECAMATAN								
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah							Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	100	100	

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	85,26	86	86	90	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73	73	73	73,04	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik							Meningkatnya penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik
		Tingkat pencapaian pembangunan kelurahan dalam 1 tahun	%	0	80	80	95	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan							Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	100	100	100	100	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum							Meningkatnya penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum
		Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	100	100	100	100	
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa							Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
		Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP	%	73	75	75	79	
KECAMATAN SIDOMUKTI								

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
7.01 KECAMATAN								
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah							Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	100	100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	90,28	90,29	90,29	91	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,9	70,95	70,95	71,8	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik							Meningkatnya penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik
		Tingkat pencapaian pembangunan kelurahan dalam 1 tahun	%	0	80	80	95	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan							Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	100	100	100	100	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum							Meningkatnya penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	100	100	100	100	
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa							Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
		Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP	%	89,73	89,74	89,74	91,57	
KECAMATAN SIDOREJO								
7.01 KECAMATAN								
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah							Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	100	100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	88,67	89	89	89,8	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	69,15	70	70	70,8	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik							Meningkatnya penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik
		Tingkat pencapaian pembangunan kelurahan dalam 1 tahun	%	0	80	80	95	

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan							Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	100	100	100	100	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum							Meningkatnya penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum
		Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	100	100	100	100	
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa							Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
		Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP	%	82,9	83	83	85	
KECAMATAN TINGKIR								
7.01 KECAMATAN								
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah							Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	100	100	

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	91,45	91,47	91,47	91,51	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,35	72,36	72,36	72,4	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik							Meningkatnya penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik
		Tingkat pencapaian pembangunan kelurahan dalam 1 tahun	%	0	80	80	95	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan							Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	100	100	100	100	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum							Meningkatnya penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum
		Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	100	100	100	100	
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa							Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
		Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP	%	83,48	83,49	83,49	83,6	

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah							Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	100	100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	86,13	86,13	86,13	86,17	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,7	68,7	68,7	68,72	
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaaan							Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaaan
		Cakupan penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Kegiatan	5	5	5	5	
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MEMLALUI PENDIDIKAN POLITIK DANPENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya etika dan budaya politik							Meningkatnya etika dan budaya politik

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	Target Tahun 2026		TARGET KINERJA TAHUN 2030	OPD PENGAMPU
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Prosentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	NA	55	55	65	
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan							Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan
		Prosentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	60	60	60	64	
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat							Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat
		Prosentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonmi , sosial,budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	%	80	80	80	80,5	
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Menigkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan							Menigkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan
		Prosentase Konflik Sosial yang yang diselesaikan	%	100	100	100	100	

5.2. Pendanaan Daerah

Dengan adanya kebijakan pemerintah dan juga sehubungan dengan pagu definitif Bantuan Keuangan dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 diterima setelah ditetapkan Anggarannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, telah mengalami satu kali perubahan APBD. APBD tahun anggaran 2026 semula sebesar Rp890.794.061.878,00 (delapan ratus sembilan puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp1.049.061.000,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta enam puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp891.843.871.878,00 (delapan ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2026 sebesar Rp1.001.958.707.017,00 terdiri atas pendapatan daerah sebesar Rp878.645.500.728,00, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp123.313.206.289,00 dan belanja daerah sebesar Rp981.805.264.481,00. Perubahan RKPD tahun 2026 diprioritaskan pada pemenuhan gaji - TPP ASN dan non ASN, kekurangan pembayaran LPJU, prioritas Kepala daerah, pemenuhan mandatory spending dan juga kebutuhan rutin OPD serta pengeluaran pembiayaan untuk BUMD dan penyertaan investasi BLUD RSUD.

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Salatiga tahun 2024 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029. Kerangka Pendanaan Keuangan pada Perubahan RKPD 2026 sebagaimana terlihat dalam tabel 5.1 berikut:

Tabel 5. 4 Kerangka Pendanaan Keuangan pada Perubahan RKPD 2026

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH	865.843.871.878	878.645.500.728	12.801.628.850
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	324.861.630.878	337.196.018.728	12.334.387.850
04.01.01	Pajak Daerah	111.820.000.000	120.935.122.000	9.115.122.000
04.01.02	Retribusi Daerah	179.031.738.900	181.603.303.544	2.571.564.644
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.866.077.000	23.119.242.000	-1.746.835.000
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	9.143.814.978	11.538.351.184	2.394.536.206
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	540.982.241.000	541.449.482.000	467.241.000
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	494.778.301.000	494.944.568.000	166.267.000
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	46.203.940.000	46.504.914.000	300.974.000

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
5	BELANJA	891.843.871.878	981.805.264.481	89.961.392.603
05.01	BELANJA OPERASI	829.050.675.911	898.790.388.177	69.739.712.266
05.01.01	Belanja Pegawai	435.040.445.465	458.262.350.436	23.221.904.971
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	365.333.242.230	411.469.617.525	46.136.375.295
05.01.03	Bunga	0	0	0
05.01.04	Belanja Subsidi	150.000.000	175.000.000	25.000.000
05.01.05	Belanja Hibah	28.272.488.216	28.706.870.216	434.382.000
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	254.500.000	176.550.000	-77.950.000
05.02	BELANJA MODAL	59.993.195.967	80.214.876.304	20.221.680.337
05.02.01	Belanja Modal Tanah	25.606.000.305	25.606.000.305	0
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.235.352.140	34.441.594.433	19.206.242.293
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.719.905.422	4.704.585.042	984.679.620
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	13.183.057.500	13.064.598.500	-118.459.000
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.687.888.300	1.822.507.924	134.619.624
05.02.05	Belanja Aset Lainnya	560.992.300	575.590.100	14.597.800
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.800.000.000	2.800.000.000	0
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	2.800.000.000	2.800.000.000	0
	Total Surplus/(Defisit)	-26.000.000.000	-103.159.763.753	-77.159.763.753
6	PEMBIAYAAN			
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	26.000.000.000	123.313.206.289	97.313.206.289
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	26.000.000.000	123.313.206.289	97.313.206.289
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	26.000.000.000	123.313.206.289	97.313.206.289
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	23.000.000.000	23.000.000.000
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	0	23.000.000.000	23.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	23.000.000.000	23.000.000.000
	Pembiayaan Netto	26.000.000.000	100.313.206.289	74.313.206.289
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	-2.846.557.464	-2.846.557.464
	TOTAL APBD	891.843.871.878	1.001.958.707.017	110.114.835.139

Rencana kerja dan pendanaan dijabarkan menurut perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan peraturan wali kota tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah. Program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan Kota Salatiga tahun 2026, didukung dengan pembiayaan yang berasal dari berbagai sumber dana. Kebutuhan penganggaran untuk membiayai pelaksanaan program hingga sub kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, upaya pencapaian target capaian kinerja yang merupakan rangkaian upaya

penerjemahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah yang dilaksanakan secara bertahap.

Pada perubahan RKPD tahun 2026, secara terperinci dipersiapkan kebutuhan anggaran per sub kegiatan yang nantinya sebagai pedoman dalam penggunaan belanja untuk menerjemahkan indikator kinerja yang akan dicapai. Uraian rencana kerja dan pendanaan dalam perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 secara lengkap sebagaimana terlampir.

LAMPIRAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026

BAB VI PENUTUP

Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2026 serta kebijakan pusat dan provinsi Jawa Tengah serta sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan optimal untuk pencapaian sasaran Pembangunan. Dengan demikian seluruh kebijakan, strategi dan program atau kegiatan pembangunan Kota Salatiga tahun 2026 akan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Salatiga tahun 2026. Selain itu, RKPD Tahun 2026 juga diselaraskan dengan RPJMN 2025-2029, RKP tahun 2026 dan mendukung pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs), Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta mewujudkan perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam bentuk rumusan program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator yang terukur beserta sumber pembiayaannya.

6.1. Kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan RKPD dapat berjalan dengan baik, perlu diatur kaidah pelaksanaan RKPD sebagai berikut :

- Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga agar melaksanakan program-program RKPD dengan sebaik-baiknya mengarah pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD;
- RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan perangkat daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- RKPD akan menjadi instrumen dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dan masyarakat diharapkan dapat mengawal dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program-program pembangunan yang tertuang dalam RKPD.

Keberhasilan pencapaian kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 memerlukan kerja bersama seluruh perangkat daerah dan dukungan para pemangku kepentingan di Kota Salatiga. Oleh karena itu dukungan, kesungguhan, rasa tanggung jawab, dan semangat kerja keras harus dimiliki oleh seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan di Kota Salatiga. Semoga dengan pelaksanaan RKPD Kota Salatiga tahun 2026 yang masuk pada tahap **Peningkatan Pembangunan SDM dan Pengelolaan Potensi Perekonomian Daerah Didukung Pemerintahan Berintegritas dan Infrastruktur Berkualitas**” dapat mewujudkan cita-cita Kota Salatiga di tahun 2030 yaitu :

“Terwujudnya Kota Salatiga Sebagai Kota **BEDA : Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia”**

RKPD selain fokus dalam mencapai visi Kota Salatiga tahun 2025-2029, juga memiliki peran krusial dalam mengintegrasikan berbagai isu penting ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah. Secara nasional, terdapat 5 (lima) pengarusutamaan pembangunan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan RKPD di daerah, yaitu gender dan inklusi sosial, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), transformasi digital, pembangunan rendah karbon; dan pembangunan ketahanan iklim.

6.2. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian sangat penting dalam pelaksanaan RKPD Kota Salatiga Tahun 2027 untuk memastikan bahwa semua program berjalan sesuai dengan rencana dan selaras dengan tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Tanpa pengendalian yang efektif, RKPD berisiko tidak mencapai target, mengalami penyimpangan, atau bahkan mengalami kegagalan. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa pengendalian menjadi hal yang penting dilakukan dalam implementasi RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 :

1. Memastikan Seluruh Program Dilaksanakan

Seluruh program yang tertuang dalam RKPD yang disertai dengan target kinerja dan kebutuhan pendanaan pembangunan telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah, termasuk dalam RAPBD tahunan.

2. Memastikan Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Pengendalian berfungsi sebagai mekanisme untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi kinerja secara berkala. Ini membantu pemerintah daerah mengidentifikasi hambatan atau masalah yang muncul di tengah jalan, sehingga dapat mengambil tindakan korektif secepat mungkin.

3. Optimalisasi penggunaan sumberdaya

Memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan secara efisien dan efektif untuk kepentingan publik dalam pelaksanaan RKPD.

4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi

Proses pengendalian yang transparan dan terukur akan membuat pemerintah daerah lebih akuntabel terhadap masyarakat. Laporan hasil pengendalian dapat diakses publik, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi dan menilai kinerja pemerintah dalam melaksanakan janji-janji politik yang tertuang dalam RKPD.

5. Menyesuaikan dengan Perubahan Lingkungan

Lingkungan eksternal (sosial, ekonomi, politik) dapat berubah sewaktu-waktu. Pengendalian yang fleksibel memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan strategi dan program kerja agar tetap relevan dan efektif. Misalnya, jika terjadi krisis ekonomi, pengendalian dapat membantu mengidentifikasi program yang perlu diprioritaskan atau direstrukturisasi.

6. Mendorong Perbaikan Berkelanjutan

Hasil dari proses pengendalian (evaluasi, audit, dan laporan) memberikan umpan balik yang berharga. Umpan balik ini dapat digunakan untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program di masa mendatang. Ini menciptakan siklus pembelajaran dan perbaikan yang berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Pelaksanaan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah proses penting untuk mengukur keberhasilan, mengidentifikasi kendala, dan memberikan masukan untuk perbaikan di masa mendatang. Evaluasi ini diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Evaluasi dilakukan dengan tujuan:

1. Mengukur Pencapaian Sasaran, yaitu menilai sejauh mana target pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD telah tercapai.
2. Menilai Efektivitas dan Efisiensi, yaitu dapat meninjau efektivitas program dan penggunaan anggaran.
3. Mengidentifikasi Masalah, yaitu menemukan faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan program.
4. Meningkatkan Akuntabilitas, yaitu dalam rangka mewujudkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah daerah.
5. Menyediakan Masukan, yaitu dalam rangka memberikan rekomendasi untuk penyusunan perencanaan periode berikutnya.

Evaluasi membantu memastikan konsistensi antara RPJMD dengan rencana tahunan (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (APBD). Hal ini penting untuk mencegah adanya penyimpangan kebijakan dan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan selaras dengan tujuan jangka menengah. Pelaksanaan Evaluasi RKPD merupakan langkah krusial yang berfungsi sebagai cerminan keberhasilan dan kegagalan sebuah rencana pembangunan. Proses ini tidak hanya mengukur pencapaian, tetapi juga memberikan landasan untuk perbaikan di masa depan.

Dalam perjalanannya, RKPD selalu menghadapi ketidakpastian dan berbagai potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Untuk itu, manajemen risiko berperan sebagai "penjaga" yang memastikan rencana tersebut berjalan sesuai jalur. Untuk memastikan perencanaan yang tertuang dalam RKPD perlu dilakukan analisis manajemen risiko dengan mengidentifikasi potensi risiko baik pada lingkup internal maupun eksternal. Faktor risiko yang teridentifikasi sejak dini, pemerintah daerah dapat menyusun rencana yang lebih realistis dan memiliki strategi mitigasi yang kuat.

Penerapan manajemen risiko pada RKPD Kota Salatiga tahun 2026 diharapkan akan membantu dalam meningkatkan kemungkinan pencapaian target, mengoptimalkan alokasi sumber daya dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Melalui pengelolaan risiko secara proaktif,

pemerintah daerah dapat mencegah atau mengurangi kendala yang berpotensi menghambat program dan kegiatan, seperti keterlambatan proyek, pembengkakan biaya, atau kegagalan program yang menghambat pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Hal ini secara langsung meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RKPD Kota Salatiga tahun 2026.

WALI KOTA SALATIGA

ROBBY HERNAWAN

